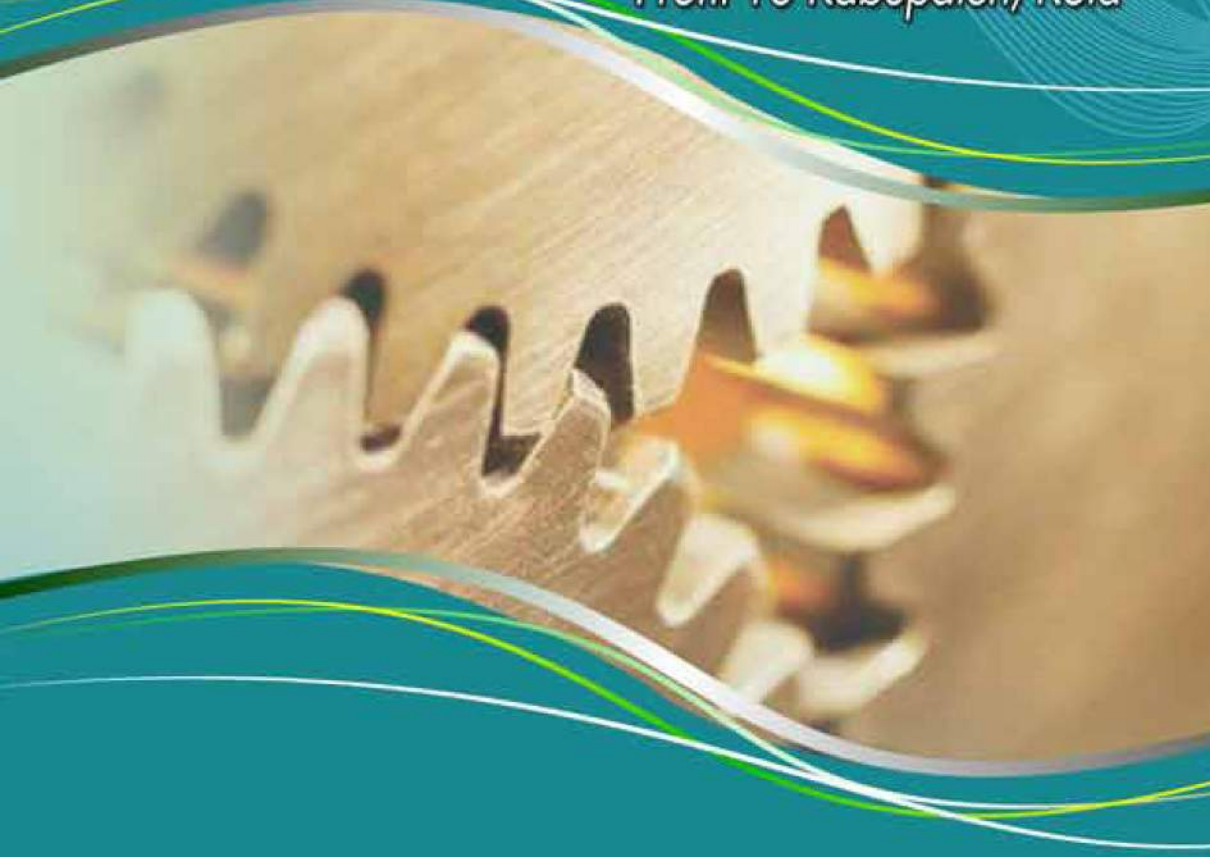
INDEKS MASYARAKAT SIPIL

Profil 16 Kabupaten/Kota



Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD)

Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II

Australian AID

YAPPIKA

Indeks Masyarakat Sipil
Profil 16 Kabupaten/Kota

Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD)

Indeks Masyarakat Sipil Profil 16 Kabupaten/Kota **Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD)**

Cetakan Pertama, Desember 2011
xxvi - 310, 16 x 26 cm

Tim Penulis : Fransisca Fitri
Lili Hasanuddin
Nor Hiqmah
Sri Indiyastutik

Editor : Firman Mujahid
Sugiarto A. Santoso

Tata Letak & Cover : Moelanka

Diterbitkan oleh:
YAPPIKA
Jl. Pedati Raya No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350,
Phone: +62-21-8191623, Fax: +62-21-85905262, +62-21-8500670,
E-mail: yappika@indosat.net.id Website: www.yappika.or.id

Indeks Masyarakat Sipil

Profil 16 Kabupaten/Kota

Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD)

Tim Penulis
Fransisca Fitri
Lili Hasanuddin
Nor Hiqmah
Sri Indiyastutik

YAPPIKA, Jakarta 2011

Kata Pengantar

Dr. Raden Siliwanti MPIA
Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS RI

Demokrasi konon adalah pemenang final dari pergulatan historis antar ideologi di dunia ini, terutama setelah runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989. Paling tidak, demikianlah tema ringkas yang dijelaskan Francis Fukuyama dalam bukunya yang terkenal "The End of History and the Last Man" (1992). Fukuyama mungkin agak melebihkan hasil pengamatannya, namun kenyataannya dapat dilihat bahwa demokrasi memang makin menguat di dunia ini.

Kekuatan demokrasi justru terletak pada kesederhanaan dan kejujuran konsepnya tentang manusia dan masyarakat, dan disanalah letak kecanggihannya, karena menyediakan mekanisme *check and balances* yang dapat melakukan koreksi, kritik dan perbaikan di dalam dirinya sendiri. Mekanisme inilah yang tidak pernah dipunyai oleh sistem politik manapun secara memadai sebelumnya.

Para penguasa yang mempercayai demokrasi, dan meyakini prinsip-prinsipnya harus bersedia tunduk pada aturan-aturannya. Apabila tidak, maka akan muncul ketidakpuasaan yang dapat berujung pada kejatuhan rejim yang berkuasa. Mereka yang tidak percaya pada demokrasi, pengalaman global membuktikan bahwa mereka akan mengalami nasib kejatuhan dengan menyakitkan bersama sistem otoriter yang dibangun sendiri.

Kebanyakan kita tidak pernah menyangka bahwa gelombang kekuatan masyarakat sipil dapat menjadi arus tidak terbendung, bahkan oleh kekuatan despotis sekalipun, seperti yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah selama setahun terakhir ini. Kebangkitan rakyat telah membawa dampak kejatuhan rejim pemerintahan yang berkuasa. Bantuan dari

kekuatan luar mungkin diperlukan, tapi kalau rakyat sendiri tidak menghendaki perubahan, tidak akan berarti banyak. Lihat saja Tunisia, Mesir, Libya yang rejim pemerintahannya telah terguling dengan keras, dan sekarang Suriah sedang dalam proses demokratisasi juga.

Timur Tengah adalah gelombang terakhir dari beberapa gelombang kekuatan masyarakat sipil yang menuntut demokrasi setelah perang dunia kedua berakhir, setelah gelombang bangkitnya demokrasi di Eropa Timur dan Amerika Latin pada era 80-an dan 90-an menggulingkan komunisme dan fasisme rezim diktator di kawasan itu. Hal ini merupakan tanda-tanda penting dari kecenderungan masyarakat sipil di dunia, termasuk Indonesia tentunya sejak akhir 1990-an.

Apa-apa yang kita lihat terjadi di negara-negara Timur Tengah sejak awal tahun ini tidak banyak berbeda dengan yang pernah terjadi di Indonesia pada 1998. Peristiwa dan rangkaian pergolakan seperti ini kita duga masih akan terus bergulir di Timur Tengah. Salah satu hal menarik dari bangkitnya masyarakat Indonesia dan Timur Tengah selama satu dasawarsa ini adalah dapat ditepisnya stigma bahwa masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam selama berabad-abad tidak mungkin menjadi demokratis karena dianggap kolot, tidak mau berubah, berorientasi pada masa lalu, anti modernitas, tidak efisien dan hanya "pasrah" pada nasib. Fakta membuktikan hal yang berbeda.

Selama beberapa dasawarsa terakhir, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ternyata mengalami peningkatan berarti pada kualitas dan kuantitas lapisan masyarakat sipil terpelajar, berkemampuan ekonomi serta bervisi politik egaliter, dengan kemampuan berorganisasi yang tinggi. Satu lapisan yang tidak mau didikte begitu saja oleh kehendak penguasa yang mereka anggap tidak mewakili siapa-siapa, kecuali diri mereka sendiri, dan serta kroni-kroni nya. Bagian inti lapisan ini adalah lapisan kelas menengah urban yang kosmopolit, bervisi global serta mempunyai jaringan sosial yang melewati batas-batas negara, dibantu oleh jaringan komunikasi dan informasi dunia maya yang makin luas. Ini semua adalah modalitas yang positif bagi bangkitnya masyarakat sipil yang berjuang bagi demokrasi. Mereka juga mampu melakukan *bargaining* dengan kekuatan-kekuatan asing yang mempunyai kepentingan strategis di negara mereka. Walaupun, tentu belum sekuat masyarakat sipil di negara-negara demokrasi liberal yang sudah lebih mapan dalam berorganisasi, membentuk jaringan dan mengelola sumber-sumber pendanaan secara mandiri.

Dengan demikian, salah satu tantangan utama bagi semua negara demokrasi adalah bagaimana memelihara keberlanjutan organisasi masyarakat sipilnya, yakni dengan mengoreksi keadaan warisan yang akut pada perimbangan antara kekuatan negara dan masyarakat. Pada satu sisi, masyarakat sipil harus mengisi peran-peran yang dulunya diisi oleh negara. Pada lain sisi, ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki dari organisasi masyarakat sipil, karena warisan politik masa lalu yang tidak bersahabat terhadap *pluralism* kekuatan di luar kekuatan negara.

Dilemanya adalah organisasi masyarakat sipil berada dalam keadaan paling tidak siap pada saat mereka paling dibutuhkan agar dapat menjadi pemeran utama menggalang partisipasi masyarakat secara substansial dalam proses konsolidasi demokrasi. Apabila keadaan ini tidak diatasi secara terencana dan terukur, maka akan terjadi dilema lainnya, yakni akan kembali lagi dominasi negara pada masyarakat sipil, padahal hal inilah yang sebelumnya ingin dikoreksi oleh gerakan reformasi politik di Indonesia sejak 1998. Masyarakat sipil yang mampu menggulingkan kekuatan otoriter seharusnya juga mampu apabila dibangun secara tepat untuk mengisi demokrasi yang mereka perjuangkan sejak awal.

Sejak awal kami sudah menyadari pentingnya meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil apabila konsolidasi demokrasi ingin berhasil dalam pembangunan jangka panjang. Oleh karena itulah RPJMN 2010-2014 memberikan porsi bagi penguatan organisasi masyarakat sipil sebagai wadah masyarakat sipil untuk berkiprah dalam mengurusi kepentingan mereka sendiri, terutama pada saat wakil mereka di dunia politik makin tidak dapat memenuhi harapan mereka.

Dalam konteks demikian itulah maka Indeks Masyarakat Sipil ini menjadi sangat penting, untuk menjadi salah satu basis kita mengukur dan menimbang kekuatan dan kesehatan masyarakat sipil kita. Produk indeks ini sangat strategis bagi pengembangan demokrasi kita. Saya sangat menghargai upaya ini, karena produk sejenis hampir tidak tersedia sebagai referensi pemerintah untuk menjadi *benchmark* yang kuat untuk mendorong keberlanjutan peran masyarakat sipil sebagai bagian sangat penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.

Kata Pengantar

Paul Boon
Direktur Program ACCESS Tahap II

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan dan kehidupan demokratis dirasakan semakin baik dari waktu ke waktu. Peletakan peran (*role enactment*) masyarakat sipil sangat menentukan kualitas demokrasi sebuah Negara. Membangun pemerintahan yang maju tidak dapat diabaikan dari peran masyarakat sipil sebagai bagian utama dari sistem tata kepemerintahan lokal yang baik (*local good governance*). Demokrasi sebagai sebuah sistem menuntut tumbuhnya masyarakat beradab yang bersemangat, gigih dan pluralis (Diamond, 1992). Dengan demikian *civil society* mempunyai peran yang strategis dalam mengawal konsolidasi demokrasi di tingkat daerah.

Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) selama lebih dari tujuh tahun ikut menyumbang pembangunan masyarakat sipil untuk lebih aktif dalam setiap proses pembangunan. Warga dan organisasinya berdaya serta berinteraksi aktif dengan pemerintahan untuk mendorong pembangunan yang berpihak kepada perempuan, warga miskin dan kelompok marginal, merupakan pernyataan inti (*core statement*) dalam kontribusi pembangunan demokrasi dan peran masyarakat sipil yang berarti di 16 kabupaten/kota tertinggal di kawasan timur Indonesia. Dari yang tidak berdaya menjadi aktor yang aktif, dari perempuan yang lemah menjadi perempuan yang berani dan tangguh, dari yang miskin dan seolah tanpa harapan menjadi aktif dan mengangkat ekonomi keluarga, dari yang pasif menjadi aktif terlibat dalam diskusi kebijakan, adalah contoh-contoh yang banyak dijumpai di 16 kabupaten/kota mitra program ACCESS di provinsi NTT, NTB, Sulsel, dan Sultra.

Keaktifan masyarakat sipil terlibat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam pembangunan demokrasi. Sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan, bahwa warga marginal dan lemah mampu terlibat dalam penetapan kebijakan baik di

tingkat desa hingga di kabupaten/kota. Substansi pengetahuan dan pengalaman memfasilitasi adalah salah satu kunci perubahan penting dalam membangun masyarakat sipil yang lebih berdaya. Perubahan tersebut mampu menginspirasi banyak aktor lainnya sehingga lahir hal-hal di luar kebiasaan , seperti Ibu Jumilah yang tidak lulus SD namun merintis pendidikan kaum perempuan, Ibu Saidah yang berjuang melawan para perusak lingkungan hidup dan kekerasan alam di Buton, mama Martha yang menyelamatkan hutan, ibu Gandu yang ikhlas mendorong *community center* dan membantu kaumnya yang lemah, atau pemuda Harisun yang gigih membangun semangat merintis kembali ekonomi dan kemandirian desanya. Dan masih banyak aktor lain yang gigih merintis pembaharuan sistem di lingkungannya.

Membangun masyarakat sipil membutuhkan waktu dan kesabaran. Perubahan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah komitmen pemerintah dan tokoh politik daerah. Pasang-surut peran masyarakat sipil dalam pembangunan tidak menyusutkan semangat perubahan yang ingin dicapai meskipun terkadang cukup melelahkan. Demikian pula dengan indeks masyarakat sipil (IMS) yang dialami oleh 16 kabupaten/kota mitra ACCESS, tidak jarang dijumpai ada yang turun atau naik. Ini adalah hal yang biasa karena indeks masyarakat sipil bukan sebuah perubahan yang linier, melainkan sangat dinamis.

Namun perubahan peran masyarakat sipil adalah sesuatu yang perlu terus diperjuangkan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Kesetaraan menghormati seluruh warga, termasuk perempuan, warga miskin dan marginal sangat penting diperjuangkan. Dan Indonesia yang telah berhasil memancarkan cahaya demokrasi di Asia akan menginsipirasi dan membuka mata dunia. Tentu proses ini belum berhenti dan semakin menarik di waktu yang akan datang. Indeks Masyarakat Sipil sebagai salah satu parameter pembangunan membutuhkan dukungan terus-menerus sehingga mampu meningkatkan peran warga di segala lini. Dengan demikian kemungkinan kesenjangan pembangunan dapat diperkecil.

Kami sangat berterimakasih kepada Yappika yang telah mengembangkan studi Indeks Masyarakat Sipil di wilayah mitra ACCESS. Kami berharap studi ini dapat menyumbang pada pembangunan manusia dan demokrasi di Indonesia yang semakin baik. Indeks Masyarakat Sipil adalah parameter bagaimana antar warga, pemeritah, dan swasta terjadi interaksi dan saling menghormati perbedaan.

Kata Pengantar

Fransisca Fitri
Direktur Eksekutif Yappika

Pada tahun 2004, empat tahun mulai berjalannya era desentralisasi, Yappika, dengan dukungan Program ACCESS/AusAID telah melakukan penilaian Indeks Masyarakat Sipil (IMS) tingkat kabupaten/kota. Indeks Masyarakat Sipil merupakan sebuah alat analisis partisipatif untuk mengukur "kesehatan" masyarakat sipil di sebuah wilayah. Pada saat itu, IMS dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng – Sulawesi Selatan, Kabupaten Buton dan Muna – Sulawesi Tenggara, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah – NTB, Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur – NTT, melalui kegiatan lokakarya di masing-masing daerah untuk mendialogkan berbagai persoalan yang menyangkut status masyarakat sipil. Lokakarya tersebut, selain menghasilkan pengetahuan tentang kondisi masyarakat sipil, juga menjadi ajang refleksi bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) dan stakeholdernya yang terlibat, serta menumbuhkan koalisi/jaringan masyarakat sipil kabupaten untuk advokasi. Pengukuran ulang Indeks Masyarakat Sipil dilaksanakan kembali di kedelapan wilayah tersebut pada 2007, untuk melihat apakah refleksi masyarakat sipil pada 2004 mewarnai gerakan masyarakat sipil pada masa setelahnya dan sejauhmana kontribusinya dalam mengisi ruang-ruang yang terbuka karena pelaksanaan desentralisasi maupun reformasi.

Pada tahun 2009, pemanfaatan alat IMS diperluas ke delapan daerah lain, yaitu Kabupaten Gowa dan Takalar – Sulawesi Selatan, Kota Baubau dan Kabupaten Buton Utara – Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bima dan Dompu – NTB, dan Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan – Sulawesi Selatan. Sementara pada delapan kabupaten sebelumnya dilakukan peninjauan ulang skor IMS. Serupa dengan inisiatif di tahun-tahun sebelumnya, lokakarya IMS 2009 juga menghasilkan sebuah tinjauan terhadap kekuatan dan kelemahan masyarakat sipil di 16 wilayah tersebut, serta peran-peran yang seharusnya disandangnya dalam mendorong proses desentralisasi menjadi lebih demokratis.

Sementara itu, hingga akan berakhirnya dekade pertama pelaksanaan desentralisasi menunjukkan bahwa otonomi daerah yang dikembangkan pemerintah Indonesia tidak diiringi dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan oleh aparatur negara. Pada satu sisi, ruang partisipasi masyarakat memang menjadi lebih terbuka tetapi pada sisi lain masih banyak aparat birokrasi yang bekerja dengan menegasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas sebagai warga negara yang seharusnya mendapatkan pelayanan. Sebagai akibatnya, asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat luas, dalam banyak kasus ternyata tidak terbukti kebenarannya.

Dalam situasi tersebut, adakah masyarakat sipil berkontribusi positif di dalam mengarahkan perubahan tatanan demokrasi di tingkat lokal? Peran-peran apa saja yang telah dimainkan dalam perubahan itu? Sejauh apa keberhasilan OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik dan mendorong tanggung-jawab negara untuk menanggulangi masalah-masalah sosial saat ini? Bagaimana dengan perkembangan situasi politik saat ini (lahirnya beberapa UU yang bernuansa positif bagi peran OMS, serta UU yang mereduksi/membatasi kehidupan dan peran OMS, termasuk terjadinya krisis ekonomi yang melanda beberapa belahan dunia) akan mempengaruhi peran masyarakat sipil melakukan pemberdayaan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar warga-negara yang terpinggirkan? Dan bagaimana meningkatkan peran-peran positif masyarakat sipil ke depan?

Dalam edisi buku ini, beberapa pertanyaan reflektif mengenai peran dan kontribusi masyarakat sipil di atas dapat ditemukan jawabannya. Pada bagian pertama, buku ini mengulas mengenai (1) Demokrasi Lokal dan Masyarakat Sipil, (2) Kontradiksi antara asumsi terjadi perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan otonomi daerah, dan (3) Peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam tata kepemerintahan lokal demokratis. Pada bagian kedua, buku ini mengulas mengenai perspektif atas kontribusi masyarakat sipil pada perubahan tata kepemerintahan lokal demokratis di 16 kabupaten/kota. Pada bagian ini tersaji peta masyarakat sipil berdasarkan tingkat pengaruh terhadap isu tata kepemerintahan lokal demokratis dan tingkat kesehatan masyarakat sipil. Pada bagian ini juga disajikan Grafik Intan Masyarakat Sipil sebagai parameter tingkat keluasan gerak masyarakat sipil per masing-masing kabupaten dan status masyarakat sipil setiap dimensi dalam Indeks Masyarakat Sipil. Pada bagian ketiga, buku ini akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi

bagi masyarakat sipil dalam memperkuat tata kepemerintahan lokal yang demokratis.

Dengan terbitnya buku ini, kami berharap dapat menambah khasanah perbincangan mengenai masyarakat sipil. Buku ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan masyarakat sipil sebagai salah satu pilar dalam pembangunan. Dan kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun hal ini akan menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras lagi di masa mendatang.

Terakhir ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak – fasilitator, panitia, peserta, narasumber, peneliti — yang terlibat dalam pelaksanaan Lokakarya Indeks Masyarakat Sipil di 16 kabupaten/kota.

Jakarta, 22 November 2011

Daftar Isi

KATA PENGANTAR
Direktur Komunikasi dan Politik BAPPENAS RI v
Direktur Program ACCESS Phase II ix
Direktur Eksekutif Yappika xi

DAFTAR ISI xv
DAFTAR SINGKATAN xix
RINGKASAN EKSEKUTIF xxiii

BAGIAN I
1. Demokrasi Lokal dan Masyarakat Sipil 1
2. Analisis: Hasil Pengukuran IMS dan Perubahan di Tingkat Kabupaten 13

BAGIAN II
1. Metodologi Indeks Masyarakat Sipil di 16 Kabupaten/Kota 31
2. Perspektif Kabupaten 47
   - Kabupaten Timor Tengah Selatan 49
   - Kabupaten Kupang 65
   - Kabupaten Sumba Timur 85
   - Kabupaten Sumba Barat 99
   - Kabupaten Dompu 113
   - Kabupaten Bima 129
   - Kabupaten Lombok Tengah 143
   - Kabupaten Lombok Barat 155
   - Kabupaten Buton Utara 167
   - Kota Baubau 183
   - Kabupaten Buton 199
   - Kabupaten Muna 213
   - Kabupaten Gowa 225
   - Kabupaten Takalar 241
   - Kabupaten Jeneponto 257
   - Kabupaten Bantaeng 273

BAGIAN III
Kesimpulan dan Rekomendasi 291

DAFTAR PUSTAKA 297

Daftar Singkatan

ABT	:	*Asset Based Thinking*
ACCESS	:	*Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme*
ADD	:	Alokasi Dana Desa
AMB	:	Angkatan Muda Buton
AMPRM	:	Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat Miskin
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APKAN	:	Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara
ASKESKIN	:	Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
ASPPUK	:	Asosiasi Perempuan Pengusaha Kecil
BAZIS	:	Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah
Bengkel Appek	:	Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung
BKMT	:	Badan Kontak Majelis Ta'lim
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
Butur	:	Buton Utara
CD Bethesda	:	*Community Development* Bethesda
CIS Timor	:	*Center for IDP's Service*
CRC	:	*Citizen Report Card*
DAU	:	Dana Alokasi Khusus
DCEP	:	*Distric Citizen Engangement Plan*
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FAMB	:	Forum Aspirasi Masyarakat Bima
FBK	:	Forum Bima Kreatif
FGD	:	*Forum Group Discussion*
FIK KSM	:	Forum Informasi Komunikasi Kelompok Swadaya Masyarakat
FKMT	:	Forum Komunikasi Masyarakat Tani

FKPPI	:	Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Indonesia
FLA	:	Forum Lintas Aktor
FMT	:	Forum Masyarakat Tani
Fopmasta	:	Forum Peduli Masyarakat Tani
FORPAD	:	Forum Peduli Anak Dompu
FP3M	:	Forum Peduli Perempuan Pedesaan Madapangga
GAMKI	:	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
GAPOKTAN	:	Gabungan Kelompok Tani
GMIT	:	Gereja Masehi Injil di Timor
GP Anshor	:	Gerakan Pemuda Anshor
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HISDI	:	Himpunan Studi Dan Pengembangan Terpadu
HMI	:	Himpunan Mahasiswa Indonesia
HNSI	:	Himpunan Nelayan seluruh Indonesia
HTI	:	Himpunan Tani Indonesia
IDRAP	:	*Institution for the Development of Rural and Indigenous People*
IKPBG	:	Ikatan Kerukunan Pendidikan Berong Loe Gowa
IMM	:	Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah
IMS	:	Indeks Masyarakat Sipil
IPDOM	:	Ikatan Pendidik Dompu
IPK	:	Ijin Pengelolaan Kayu
IPNU	:	Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama
IPPNU	:	Ikatan Pemuda Putri Nahdlatul Ulama
IRM	:	Ikatan Remaja Muhamadiyah
Jarpuk	:	Jaringan Perempuan Usaha Kecil
JKPIT	:	Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur
JMS	:	Jaringan Masyarakat Sipil

JPKP	:	Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir
KAK	:	Keuskupan Agung Kupang
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KKJ	:	Kerukunan Keluarga Jawa
KKM	:	Kerukunan Keluarga Muna
KKSS	:	Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan
KKT	:	Kerukunan Keluraga Tolaki
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPI	:	Koalisi Perempuan Indonesia
KPK	:	Kelompok Petani Kecil
KPMNT	:	Konsorsium Pembangunan Masyarakat Nusa Tenggara
KSM	:	Kelompok Swadaya masyarakat
KSU	:	Koperasi Serba Usaha
KTNA	:	Kontak Tani Nelayan Andalan
KTNA	:	Kontak Tani Nelayan Andalan
KUB	:	Kelompok Umat Basis
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
KWT	:	Kelompok Wanita Tani
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
LED	:	Lembaga Ekonomi Desa
LEMBARA	:	Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
Lensa	:	Lembaga Kemanusiaan
LESPEL	:	Lembaga Studi dan Pengkajian Lingkungan
LKD	:	Lembaga Keswadayaan Desa
LKM	:	Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LKM	:	Lembaga Ketahanan Masyarakat
LKM	:	Lembaga Keuangan Mikro
LP2DER	:	Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat
LP3M	:	Lembaga Penelitian Pengkajian Dan Pengembangan Masyarakat

LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MS	:	Masyarakat Sipil
Musrembang	:	Musyawarah Rencana Pembangunan
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
NU	:	Nahdlatul Ulama
NW	:	Nahdlatul Waton
OCPAT	:	Organizational Capacity and Performance Assessment Tools
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAHAM	:	Pusat Advokasi Hukum dan HAM
PAK	:	Pertemuan Apresiatif Kabupaten
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PEKKA	:	Perempuan Kepala Keluarga
Perda	:	Peraturan Daerah
Perdes	:	Peraturan Desa
PGRI	:	Persatuan Guru Republik Indonesia
PIAR	:	Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat
PIARA	:	Perlindungan Anak Nusantara
PII	:	Pemuda Islam Indonesia
PIKUL	:	Penguatan Institusi Kapasitas Lokal
PKL	:	Pedagang Kaki Lima
PMII	:	Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia
PNPM	:	Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
POKWASMAS	:	Pengawas Masyarakat Pesisir
PPK	:	Program Pengembangan Kecamatan
PSK	:	Pekerja Seks Komersial
PT PLN	:	Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara

RASKIN	:	Beras Masyarakat Miskin
RPJMDes	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SALOKOA	:	Organisasi Keturunan Kerajaan Gowa
Sanlima	:	Lembaga Peduli Sesama
SBMI	:	Solidaritas Buruh Migran Indonesia
SDA	:	Sumber Daya Alam
SINTESA	:	Yayasan Bina Potensi Desa
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMI	:	Serikat Mahasiswa Indonesia
SOLUD	:	Solidaritas Untuk Demokrasi
SPP	:	Simpan Pinjam Perempuan
SRTPK	:	Strategi Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan
SSP	:	Sanggar Suara Perempuan
TAF	:	The Asia Foundation
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
TKLD	:	Tata Kepemerintahan Lokala yang Demokratis
TTS	:	Timor Tengah Selatan
UMB	:	Universitas Muhammadiya Buton
UPT	:	Unit Pemukiman Transmigrasi
WHDI	:	Wanita hindu Darma Indonesia
WKI	:	Wanita Katolik Indonesia
YAO	:	Yayasan Alfa Omega
YAPPIKA	:	Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi
YASINTA	:	Yayasan Bina Potensi Wanita
YBC	:	Yayasan Bina Cempe
YP2MD	:	Yayasan Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif ini menampilkan temuan-temuan kunci hasil Indeks Masyarakat Sipil (IMS) tahun 2009 di 16 daerah yang dilaksanakan oleh YAPPIKA dengan dukungan Program ACCESS Fase II. Ke-16 wilayah tersebut terdiri dari 8 wilayah kerja lama dan 8 wilayah kerja baru Program ACCESS Fase II. Wilayah kerja lama mencakup Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi NTB, dan Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat di Provinsi NTT. Wilayah kerja baru meliputi Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Buton Utara dan Kota Bau-Bau di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima di Provinsi NTB, dan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi NTT.

Hasil IMS di wilayah kerja lama merupakan kaji ulang hasil pengukuran IMS di tahun 2007. Sementara di wilayah kerja baru, IMS 2009 ini merupakan pengukuran yang pertama kalinya. Di setiap wilayah menghasilkan intan IMS yang merupakan visualisasi dari tingkat kesehatan (status) masyarakat sipil ditinjau dari struktur internalnya, lingkungan eksternal yang berpengaruh pada tumbuh kembangnya, nilai-nilai yang dianut; dipraktekkan dan dipromosikan, serta dampak kerja yang dihasilkan. Secara umum skor dimensi nilai dan dimensi dampak di 16 kabupaten menunjukkan tingkat keberhasilan masyarakat sipil dalam mempraktekkan dan mempromosikan nilai-nilai yang dianut; dan tingkat capaian dampak kerja-kerja dalam berbagai sektor. Sementara skor dimensi struktur mengindikasikan kelemahan di beberapa wilayah. Begitu pula dengan dimensi lingkungan, masih lemah di beberapa wilayah.

Secara umum temuan-temuan kunci di 16 kabupaten adalah sebagai berikut:

1. **Tingginya kedermawanan dan partisipasi sosial dan politik warga, baik secara individu maupun kelompok.**

   Kehidupan sosial kemasyarakatan masih diwarnai dengan kedermawanan dan kerja sukarela maupun gotong royong. Aksi-aksi kolektif warga dilakukan untuk menanggapi isu-isu sosial di lingkungannya, seperti soal BOS atau Jamkesmas. Perempuan meningkat partisipasinya dalam pertemuan di desa, kader-kader desa cukup aktif mendorong masyarakat memberikan usulan dalam implementasi pembangunan, dan organisasi masyarakat di desa dilibatkan dalam rapat-rapat perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

2. **Sumber daya masyarakat sipil terbatas untuk dapat mendukung pencapaian visi-misinya.**

   Masyarakat sipil menghadapi persoalan keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan teknologi. Selain itu, kemampuan untuk melihat potensi sumber daya lokal dan mengembangkannya untuk keberlanjutan organisasinya pun lemah. Lembaga donor dan pemerintah masih menjadi sumber daya utama bagi masyarakat sipil.

3. **Kualitas relasi masyarakat sipil dengan pemda meningkat, terbalik dengan relasi masyarakat sipil dengan sektor swasta.**

   Ruang berinteraksi dan dialog antara masyarakat sipil dengan pemerintah semakin terbuka. Masyarakat sipil dapat berekspresi mengemukakan pendapat dan mengembangkan organisasi maupun jaringan relatif tanpa tekanan. Pemerintah melibatkan OMS dalam program-program yang dilaksanakan di daerah. Relasi masyarakat sipil dengan sektor pasar bervariasi antar kabupaten, mulai dari sama sekali tidak ada relasi yang terjalin, relasi mulai terbangun tetapi masih terbatas, sektor pasar telah berkontribusi untuk masyarakat sipil tetapi diwarnai dengan kepentingan politik, hingga relasi telah terjalin baik dengan sebagian kecil sektor pasar di kabupaten dan mereka mulai berkontribusi kepada kegiatan masyarakat sipil.

4. **Terdapat kondisi eksternal yang kurang mendukung masyarakat sipil untuk dapat berfungsi baik.**

   Konteks sosio-ekonomi memberikan tekanan pada masyarakat sipil kabupaten untuk dapat berfungsi dengan baik. Kemiskinan yang meluas akibat rendahnya pendapatan, kesenjangan sosial yang semakin tinggi, transaksi ekonomi yang tidak adil, semakin sering terjadi bencana alam, kenaikan bahan-bahan pokok termasuk BBM, kasus gizi buruk, tingkat melek huruf, dan infrastruktur teknologi infomasi yang minim. Sementara kebebasan informasi belum berkembang sebaik hak dasar lainnya (berekspresi, berkumpul, dan berserikat). Walaupun di tingkat nasional telah ada jaminan hukum untuk kebebasan memperoleh informasi publik, kebijakan tersebut belum berjalan efektif.

5. **Masyarakat sipil sebagai kekuatan pendorong nilai-nilai, juga masih belum sepenuhnya mempraktekkan nilai-nilai yang diyakini dan dipromosikannya**.

   Nilai-nilai demokrasi, transparansi, toleransi, anti kekerasan, kesetaraan gender, penanggulangan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan adalah nilai yang diyakini, dipraktekkan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Praktek dan promosi nilai transparansi berada pada posisi terendah di 16 kabupaten, di beberapa kabupaten bahkan skornya kurang. Hanya sedikit OMS yang melaporkan keuangannya ke publik, termasuk yang melakukan audit eksternal kelembagaan yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.

6. **Masyarakat sipil menunjukkan keberhasilan dalam mendorong dan mempengaruhi kebijakan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.**

   OMS berhasil melakukan advokasi mendorong kebijakan publik, misalnya Perda Transparansi, Perda Perlindungan Anak, Perda ADD, dan kenaikan anggaran ikatan bidan. Masyarakat sipil juga cukup berhasil mendorong usulan melalui musrenbang dan penyusunan RPJMDes untuk lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat.

7. **Rendahnya kinerja masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas Negara dan sektor pasar.**

   Kinerja masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas Negara dan sektor swasta mendapatkan skor terendah pada dimensi dampak. Walaupun daya tawar OMS bagi pemerintah meningkat, yang tercermin dari diadopsi/diakomodasinya agenda OMS, namum OMS kurang solid ketika melakukan advokasi terhadap kedua sektor ini, masing-masing bergerak sendiri. Juga, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh OMS menyebabkan hambatan besar pada upaya mendorong terwujudnya tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta.

Bagian Pertama

1

Demokrasi Lokal dan Masyarakat Sipil

Bagian Pertama

1 Demokrasi Lokal dan Masyarakat Sipil

1.1. Latar Belakang Program

1.1.1. Desentralisasi yang demokratis

Ketika otonomi daerah digulirkan di Indonesia, banyak yang berharap bahwa hal ini akan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Harapan ini bukan tanpa alasan. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, otonomi daerah juga akan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat lebih cepat dipenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Beetham (1996: 30) berpendapat bahwa pemerintahan lokal berpotensi lebih demokratis karena memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab (*responsiveness*) dan representatif (*representativeness*)[1]. Blair (2000: 21) juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda, yakni pemerintah di tingkat lokal akan menjadi lebih responsif kepada tuntutan warganya, dan akan lebih efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya[2]. Sementara itu, Cornwall dan Gaventa (2001) menyebutkan bahwa satu hal penting dalam desentralisasi adalah pemerintahan lokal dapat menyediakan kesempatan bagi warga negara untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pemerintahan[3]. Partisipasi warga dapat didefinisikan sebagai perluasan agenda masyarakat, dimana masyarakat dapat memobilisasi dan merumuskan tuntutannya.

---

[1] Lihat dalam Laporan Penelitian Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, Yappika, 2006

[2] Ibid

[3] Ibid

Apa yang tertuang dalam literatur tidak sama dengan kenyataan yang terlihat dalam proses desentralisasi di Indonesia. Otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, apalagi kelompok masyarakat miskin dan kaum perempuan. Meskipun otonomi daerah sudah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, kondisi daerah tidak bergerak seperti yang diharapkan. Simak saja beberapa hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menggeluti isu otonomi daerah. Hasil Survei Regional Economic Development Institute di 23 Kota dari 12 Provinsi pada tahun 2003 menunjukkan bahwa era desentralisasi telah meningkatkan beban pajak, retribusi dan berbagai pungutan liar. Masyarakat pun mengeluhkan proses perijinan yang masih tidak transparan dan mahal. Sangat sedikit dari mereka yang melihat peningkatan layanan terhadap masyarakat sebagai prioritas utama pemerintah daerah[4].

Hasil riset YAPPIKA pada 2006 mengenai desentralisasi yang dilakukan di 15 kabupaten/kota dari 8 propinsi menemukan hasil yang senada. Kebijakan desentralisasi tampaknya baru menggeser kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kurang bahkan kecil sekali perhatian pada aspek yang terkait dengan desentralisasi kepada institusi lokal seperti desa, kelompok masyarakat, institusi adat. Bahkan ada kecenderungan bahwa ruang lingkup desentralisasi tidak termasuk aspek yang terakhir ini, misalnya tercermin dari kebijakan terkait dengan pengelolaan SDA di tiap sektor yang masih kurang memberikan ruang yang cukup untuk menjamin hak-hak masyarakat setempat.

Dari sisi anggaran, hasil riset YAPPIKA juga memperlihatkan bahwa alokasi anggaran belum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mayoritas masyarakat. Dua sektor pokok yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yakni pendidikan dan kesehatan, belum dijadikan rujukan utama dalam perumusan anggaran dan kebijakan alokasi APBD[5].

Dalam bidang pelayanan publik, masih menurut hasil riset YAPPIKA, pemerintah daerah belum responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal, pelayanannya pun belum efektif dan efisien, serta belum banyak perubahan dalam kuantitas dan kualitas pelayanan umum. Masyarakat merasa belum mendapatkan akses layanan yang adil dan berkualitas, baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan karena tidak ada atau minim kebijakan

[4] Lihat "Kritik terhadap Otonomi." Tajuk Koran Tempo, 9 April 2003

[5] Lihat Laporan Penelitian Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, Yappika 2006

daerah yang dibuat yang berorientasi pada perbaikan pelayanan. Perda yang berkaitan dengan bidang kesehatan, sebagai misal, hanya mengatur soal tarif atau biaya berobat. Akibatnya, masih ditemukan anak usia sekolah yang tidak dapat menjangkau layanan pendidikan, sementara di bidang kesehatan masih dikeluhkan soal mahalnya biaya pengobatan.

Repotnya lagi, amat sedikit akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja pemerintah daerah. Di semua daerah yang diteliti YAPPIKA tidak ada mekanisme dan prosedur yang terlembaga yang memungkinkan masyarakat mengontrol kinerja pemerintah. Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme keluhan (*complaint mechanism*) yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan terhadap kinerja pemerintah. Tidak aneh jika keluhan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan daerah juga tidak pernah diketahui hasilnya. Bahkan masyarakat pun tidak memperoleh gambaran apakah keluhan yang disampaikan telah direspon dan ditindaklanjuti.

Studi USAID DRSP[6] yang berupaya memotret desentralisasi secara lebih utuh melaporkan pengeluaran untuk biaya pelayanan publik pada umumnya meningkat. Namun sebaliknya, perbaikan kualitas dan jangkauan pelayanan hanya mengalami sedikit kemajuan. Beberapa daerah memang melakukan upaya-upaya inovatif tetapi berbagai kasus kelalaian terjadi dalam hal kualitas dan jangkauan, misalnya imunisasi dan gizi anak. Penyediaan infrastruktur untuk kesehatan, sekolah, jalan dan penyediaan air tidak mendapatkan alokasi investasi cukup di beberapa daerah. Inovasi-inovasi yang diciptakan, baik oleh pemerintah daerah secara mandiri maupun kesempatan karena kebijakan pemerintah pusat, tidak cukup diupayakan penyebarluasannya sebagai model dan pembelajaran.

Tiga tahun paska studi *stock taking* 2006 tersebut, upaya perbaikan layanan publik dan proses perencanaan penganggaran terus dilakukan oleh beberapa daerah seperti pengoperasian layanan satu atap di sekitar 150 kabupaten/kota, pertumbuhan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), disepakatinya kontrak layanan (*citizen charter*), pengembangan mekanisme keluhan dan umpan balik, serta sistem voucher. Namun demikian perbaikan ini belum menjadi gambaran umum se-Indonesia.[7]

---

6 Lihat Laporan USAID DRSP. Desentralisasi 2006: Membedah Reformasi Desentralisasi di Indonesia, DRSP 2006

7 Lihat Stock taking study terkini USAID-DRSP. Desentralisasi 2009: Membedah Reformasi Des entralisasi di Indonesia, DRSP 2009

Kajian yang dilakukan oleh Sugeng Pujileksono[8] menemukan beberapa penyebab dari belum maksimalnya pelayanan publik, yaitu; pertama, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik, tetapi masih berpihak pada kepentingan politik, kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan pemilik kapital; kedua, sebagian penyelenggara pelayanan publik masih kurang menyadari peran dirinya sebagai pelayan. Tidak jarang oknum pelayan publik memberikan pelayanannya jika telah memperoleh *service* dari penerima layanan; dan ketiga, tidak sedikit instansi pelayanan publik yang dalam memberikan pelayanannya tidak mengedepankan azas akuntabel dan transparansi, sehingga penerima layanan tidak mengetahui prosedur memperoleh layanan dan melakukan komplain.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Otonomi daerah yang dikembangkan pemerintah Indonesia tidak diiringi dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan oleh aparatur negara. Masih banyak aparat birokrasi yang bekerja dengan menegasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas sebagai warga negara yang seharusnya mendapatkan pelayanan. Sebagai akibatnya, asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat luas, dalam banyak kasus ternyata tidak terbukti kebenarannya. Yang terlihat justru maraknya perilaku elit lokal –baik dari kalangan pemerintah maupun DPRD— yang mempertontonkan semangat mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan pandangan dan kritik masyarakat luas.

Situasi seperti ini membuktikan pendapat Mouzelis, yang menggunakan argumen dasar teori perilaku organisasi (*organization behavior*) untuk diaplikasikan pada konteks birokrasi. Menurut Mouzelis, organisasi (termasuk di dalamnya organisasi pemerintah) terdiri dari sejumlah individu yang memiliki tata nilai pribadi, ekspektasi, dan pola perilaku tersendiri. Setiap individu yang tergabung di dalam organisasi tersebut berusaha memperjuangkan pencapaian kepentingannya, dalam keputusan atau kebijakan yang dibuat organisasi. Secara lebih detil, studi yang dilakukan Syarif Hidayat menemukan sedikitnya ada tiga kepentingan individu elit lokal yang ikut mewarnai kebijakan pemerintah daerah, yaitu kepentingan ekonomi (*seeking economic ends*), kepentingan untuk

[8] Artikel 'Menuju Pelayanan Berpihak pada Publik' dalam Pelayanan Publik bukan untuk Publik (2006; hal. 1)

pengembangan karir (*career advancement*), dan kepentingan untuk sponsor politik (*political sponsorship*)[9]. Tiga hal ini, dalam beragam derajatnya, sangat nyata terlihat pada perilaku elit lokal di beberapa daerah di Indonesia.

Melihat gambaran di atas, dibutuhkan upaya untuk mewarnai perjalanan desentralisasi di Indonesia ke arah yang demokratis, sehingga desentralisasi yang berlangsung dapat menjadi media bagi tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi di tingkat lokal. Desentralisasi yang demokratis tidak hanya memandang otonomi daerah sebatas pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi mencakup konteks yang lebih luas, yakni hubungan negara dan masyarakat (*state-society relation*). Masyarakat memiliki peluang untuk terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan (*policy formulation*) maupun pelaksanaannya (*policy implementation*) termasuk dalam hal melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada sisi lain, aparat pemerintah memiliki kesempatan untuk bisa berperan lebih efektif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendorong akuntabilitas mereka.

Setidaknya ada tiga aspek penting yang harus tercakup dalam desentralisasi yang demokratis, yakni *political equality*, *local accountability*, dan *local responsiveness*[10]. *Political equality* merupakan prinsip yang memberikan kesempatan besar kepada masyarakat untuk mengekspresikan hak-hak sipil dan politiknya, seperti memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara (*Smith, 1985:24*). Kesempatan berpartisipasi yang lebih besar bagi masyarakat dalam era desentralisasi merupakan konsekuensi logis dari perpindahan tempat pengambilan keputusan dari pemerintah nasional kepada pemerintah lokal.

Hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks *political equality* penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan refleksi daya tawar masyarakat terhadap berbagai keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga formal pemerintahan. Masyarakat adalah pemilik kedaulatan

---

[9] Syarif Hidayat (2000: 52), "Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan", Pustaka Quantum, Jakarta

[10] Ketiga aspek ini merupakan konsepsi sekaligus alat ukur untuk mendorong desentralisasi yang demokratis. Yappika menggunakan konsepsi ini dalam penelitian pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, lihat Laporan Penelitian Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, Yappika, 2006

sekaligus pemilik otonomi, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dan memberikan suaranya (*local voice and choice*). Desentralisasi tidak dimaksudkan memberikan otonomi hanya kepada pemerintah daerah, tetapi lebih dari itu harus memperkuat peran dan kedudukan warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dengan kata lain desentralisasi semakin meningkatkan demokrasi partisipatif (*participatory democracy*). Sedangkan dalam hubungan antara masyarakat dengan masyarakat (*society-society relation*), *political equality* dalam pemerintahan daerah mencirikan kesempatan yang sama secara horizontal antar warga maupun kelompok warga untuk partisipasi, memberikan suara dan pilihan dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Kesetaraan politik antar warga ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena setiap orang sejatinya memiliki hak yang sama dalam hukum dan politik. Artinya, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi setiap kebijakan berdasarkan kepada preferensinya dan juga kepentingannya, menurut rambu-rambu yang telah disepakati dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Local accountability adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat dipertanggung–jawabkan secara terbuka kepada semua pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Merupakan kewajiban pemerintah daerah (termasuk DPRD) mendorong terciptanya mekanisme dan sistem akuntabilitas sebagai refleksi atas keberadaannya sebagai pengemban mandat dari warga yang menjadi konstituennya maupun sebagai respon atas tuntutan pengelolaan birokrasi dengan ukuran-ukuran berbasis kinerja. Kewajiban ini antara lain mencakup mekanisme pemberian informasi dan/atau menjelaskan kinerja pemerintah daerah, baik dalam bentuk keputusan-keputusan yang dibuat dan tindakan-tindakan yang diambil kepada berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan informasi yang diberikan tersebut, para pemangku kepentingan mengetahui tentang apa yang telah dilakukan pemerintah sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, saran dan kontrol yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dengan perkataan lain *local accountability* menyangkut relasi antara desentralisasi dengan peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh

informasi, transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terciptanya mekanisme untuk menyampaikan keluhan (*complaint mechanism*), adanya konsultasi dan persetujuan yang diberikan masyarakat sebelum program-program pemerintah dijalankan (*free and prior informed consent*) serta adanya *feed-back* dan kontrol dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas ini, menurut Ljungman, merupakan perwujudan atas kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga. Dengan meminta akuntabilitas dari pembuat kebijakan dan aktor-aktor lain atas tindakan-tindakan mereka yang berdampak terhadap hak-hak rakyat, telah memberikan kontribusi bagi perubahan penyelenggaraan pembangunan dari keadaan yang bersifat kemurahan hati atau amal baik pemerintah terhadap rakyatnya menjadi kewajiban, sehingga menjadi lebih mudah untuk dipantau. Akuntabilitas mewajibkan pemerintah untuk: (1) menerima tanggung jawab atas dampak yang terjadi terhadap kehidupan rakyat; (2) bekerjasama dengan menyediakan informasi, melakukan proses yang transparan dan mendengarkan pandangan-pandangan masyarakat; dan (3) memberikan tanggapan yang cukup memadai terhadap pan–dangan-pandangan tersebut. Dengan demikian akuntabilitas mengandung arti bahwa penjabat negara dan figur-figur yang mempunyai kekuasaan lainnya bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga. Di pihak lain anggota-anggota masyarakat yang memiliki hak tersebut bertanggungjawab pula untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan prioritas mereka dan bekerjasama dengan yang lain dalam membangun proses untuk merealisasikan hak-hak tersebut.

Dalam mengimplementasikan akuntabilitas, satu hal yang penting adalah tersedianya kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya transparansi dan kesempatan untuk mendiskusikan dan mencari perbaikan atas kebijakan atau tindakan-tindakan yang mempunyai pengaruh negatif terhadap hak-hak warga.

Local responsiveness merupakan prinsip untuk memastikan kebijakan dan praktek desentralisasi telah membuat pemerintah daerah semakin responsif melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar warganegara untuk mendapatkan pelayanan (misalnya pendidikan dan kesehatan), terlibat dalam proses politik, serta mendapatkan kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat, guna menjamin keberlangsungan perekonomian dan kehidupan sosial dan budaya dari masyarakat setempat.

Pengertian ini kadang-kadang dirujuk sebagai nilai 'kesejahteraan' *(welfare)* dari keberadaan pemerintah daerah.

Prinsip ini disusun berdasarkan argumen bahwa pemerintah daerah tidak hanya harus responsif atau tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, akan tetapi kebutuhan tersebut haruslah diidentifikasi berdasarkan pengetahuan yang mendalam atas masalah-masalah lokal dan menjawab kepentingan-kepentingan masyarakat lokal. Pengetahuan masalah-masalah lokal dilihat sebagai prasyarat dari *responsiveness* dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan informasi dua arah antara pemerintah dengan rakyat yang merupakan salah satu ciri dari demokrasi *(Smith, 1985: 28).*

1.1.2. Peran OMS dalam Desentralisasi yang Demokratis

Membumikan gagasan desentralisasi yang demokratis merupakan sebuah proses yang harus terus menerus dijalankan, karena hal ini bukanlah sesuatu yang bisa berlangsung dalam waktu sekejap. Tradisi pemerintah lokal harus berubah dari prinsip menguasai menjadi melayani, serta pro-aktif untuk mendorong partisipasi yang tinggi dari masyarakat, mengedepankan dialog dan tidak alergi terhadap kritik. Sebaliknya pada tingkat masyarakat perlu ada perubahan sikap dalam mendefinisikan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak dan kapasitas untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam konteks seperti inilah maka keberadaan organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan kapasitas yang memadai menjadi sebuah prasyarat yang cukup penting. Berbagai kajian menunjukkan bahwa OMS merupakan salah satu aktor yang dapat menjadi kekuatan dalam mendorong perubahan struktur pemerintahan demokratis guna terciptanya perubahan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan peristilahan umum yang mengakomodasi berbagai bentuk organisasi yang tumbuh di tengah masyarakat untuk melakukan kegiatannya secara mandiri. Di Indonesia, istilah organisasi masyarakat sipil sering juga disebut dengan organisasi warga, organisasi masyarakat madani. Terlepas dari berbagai perbedaan konsepsi dibalik penggunaan istilah tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil merupakan organisasi masyarakat yang cenderung membatasi intervensi negara dan pengaruh pengusaha dalam pelaksanaan kegiatannya. OMS tidak hanya diperuntukkan bagi Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) semata, tetapi juga mencakup organisasi-organisasi keagamaan, organisasi rakyat, kelompok sosial, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, kelompok tani, organisasi buruh, organisasi profesi, dan lain-lain, termasuk LSM di dalamnya.

Keberadaan organisasi masyarakat sipil bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Seiring dengan gerakan kebangsaan sebagai akibat dari kebijakan liberalisasi politik dan modernisasi pemerintah Belanda, muncul puluhan bahkan ratusan organisasi rakyat yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, ekonomi dan bahkan politik yang mewarnai Indonesia dengan beragam tujuan, akan tetapi mencita-citakan sebuah tujuan bersama yakni memperoleh kemerdekaan dari Pemerintah Belanda. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah contoh organisasi yang lahir pada awal abad ke-20 dan masih bertahan hingga saat ini serta berhasil mempertahankan perannya sebagai kekuatan penting di luar negara.

Perkembangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia terus berlanjut hingga masa awal kemerdekaan (dasawarsa 1950-an) dengan berkembangnya organisasi-organisasi massa dan kaum profesional seperti organisasi buruh, pemuda, mahasiswa, wartawan, seniman dan lain-lain.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan OMS mengalami kemunduran dalam menjalankan peran-perannya. Atas nama stabilitas yang ditujukan guna menjamin pertumbuhan ekonomi, Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan guna mengendalikan kekuatan pendukungnya dan mengatasi kelompok oposisi dari aktivitas politik yang dianggap 'mengganggu'. Sedangkan untuk melegitimasi Demokrasi Pancasila yang dikembangkannya, Orde Baru menyediakan ruang partisipasi melalui organisasi-organisasi tunggal yang dibentuk/di bawah kontrol negara.

Meskipun Orde Baru menerapkan kebijakan yang tidak ramah terhadap kemandirian masyarakat sipil yang independen, pada masa ini organisasi masyarakat sipil sebenarnya tidak mati sama sekali. Dalam perkembangannya ada beberapa generasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang pernah lahir selama Orde Baru. Pada awal dasawarsa 1970-an muncul berbagai LSM pembangunan yang dimotori oleh para cendekiawan muda (mahasiswa dan sarjana yang baru lulus) yang memiliki idealisme tinggi untuk membantu masyarakat. Sebuah paradigma yang diyakini LSM adalah pemerintah tidak selayaknya memonopoli penentuan arah dan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, LSM memunculkan pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom-up development*), sebagai alternatif model pembangunan dari atas (*top-down*

development) yang dikembangkan pemerintah. Untuk memberikan bukti atas model pembangunan alternatif ini, banyak LSM yang bekerja pada tataran praktis di desa-desa pedalaman dalam skala mikro.

Pada dasawarsa 1980-an mulai bermunculan LSM yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pada dasawarsa ini mulai menonjol kegiatan-kegiatan LSM yang bergerak dalam bidang advokasi. LSM-LSM ini melakukan advokasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang mulai muncul sebagai akibat perkembangan pembangunan dan industrialisasi serta pertumbuhan penduduk yang pesat.

Pada dasawarsa 1990-an seiring dengan semakin berkembangnya wacana dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi secara global, di Indonesia muncul gerakan-gerakan LSM yang bergerak dalam advokasi HAM dan demokrasi dengan berbagai tuntutan seperti dipulihkannya hak-hak sipil dan politik rakyat, menentang pelanggaran HAM yang dilakukan negara serta menuntut demokratisasi politik. Advokasi juga dilakukan terhadap pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi seperti hak atas tanah dan sumberdaya alam, hak-hak masyarakat adat, hak-hak kaum perempuan serta kesetaraan gender, dan sebagainya.

Jatuhnya pemerintah otoriter Soeharto yang diikuti dengan proses transisi menuju demokrasi; telah membawa banyak perubahan di Indonesia, termasuk pertumbuhan yang sangat luar biasa dari masyarakat sipil. Organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam beberapa tahun terakhir sangat meningkat jumlahnya, baik di tingkat nasional maupun lokal. Akan tetapi, "kebangkitan masyarakat sipil" di era reformasi ini sebenarnya menghadirkan sebuah tantangan baru yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi masyarakat sipil dalam situasi represif Orde Baru. Kini masyarakat sipil dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang kontribusi positif mereka terhadap konsolidasi demokrasi saat ini, khususnya konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Bagian Pertama

2

Analisis: Hasil Pengukuran IMS dan Perubahan di Tingkat Kabupaten

Bagian Pertama

2 Analisis: Hasil Pengukuran IMS dan Perubahan di Tingkat Kabupaten

2.1. Gambaran Umum Status Masyarakat Sipil Kabupaten

Uraian pada bagian ini menjelaskan secara ringkas tentang status kesehatan masyarakat sipil di 16 kabupaten yang merupakan hasil pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) tahun 2009, yang dilakukan oleh YAPPIKA dengan dukungan Program ACCESS Fase II. Informasi hasil IMS yang disajikan, mulai dari tingkat dimensi dan subdimensi yang menyumbang skor pada masing-masing dimensi serta interpretasi ringkas atas perolehan skor tersebut terhadap status masyarakat sipil di wilayah yang dikaji.

Informasi hasil IMS yang disajikan juga dibedakan berdasarkan wilayah yang dikaji, yaitu kabupaten kerja lama Program ACCESS dan kabupaten wilayah kerja baru Program ACCESS Fase II. Kabupaten lama adalah kabupaten yang sebelumnya pernah dilakukan pengukuran IMS pada tahun 2004 dan 2007, sehingga pengukuran pada tahun 2009 sifatnya adalah pengkajian ulang. Sementara itu, kabupaten baru adalah kabupaten yang belum pernah dilakukan pengukuran IMS.

2.1.1. Status Masyarakat Sipil di Kabupaten Baru

Secara keseluruhan, lokakarya IMS di 8 kabupaten wilayah kerja baru, telah menghasilkan gambaran kondisi masyarakat sipil kabupaten dalam empat dimensi Indeks Masyarakat Sipil dan interpretasi atas hasil penilaian. Hasil pengukuran ini dapat memberikan gambaran kepada aktor-aktor masyarakat sipil tentang kondisi dirinya (internal) dan juga situasi-situasi yang melingkupi wilayah kerjanya (eksternal). Berdasarkan hasil pengukuran ini, pada setiap lokakarya IMS disusun rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi masyarakat sipil kabupaten. Perolehan skor setiap dimensi dari hasil pengukuran pada setiap kabupaten dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Skor Rata-Rata per Dimensi untuk 8 Kabupaten Wilayah Kerja Baru ACCESS Tahap II

No.	Kabupaten/kota	DIMENSI			
		Struktur	Lingkungan	Nilai	Dampak
1.	Bau-bau	1,56	1,51	1,76	1,65
2.	Buton Utara	1,55	1,76	1,82	1,77
3.	Gowa	1,69	1,86	2,02	1,96
4.	Takalar	1,42	1,45	1,60	1,53
5.	Bima	1,34	1,37	1,65	1,66
6.	Dompu	1,65	1,71	1,92	1,92
7.	Timor Tengah Selatan (TTS)	1,44	1,28	1,52	1,58
8.	Kupang	1,62	1,62	1,94	1,92

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada semua kabupaten perolehan skor untuk setiap dimensi berada pada kisaran kategori kurang sehat dan cukup sehat[1]. Namun, jika menengok pada perolehan skor tiap dimensi, terlihat bahwa untuk dimensi Nilai dan Dampak, semua kabupaten memperoleh skor pada kategori yang sama, yaitu cukup sehat. Dengan demikian bisa dikatakan, terlepas dari keragaman kondisi aktor-aktor masyarakat sipil dan kondisi lingkungan yang melingkupinya, masyarakat sipil cukup aktif mempraktekkan dan mempromosikan nilai-nilai yang diyakininya dan cukup memberikan dampak pada situasi yang ada. Penjelasan secara singkat perolehan skor pada masing-masing dimensi adalah sebagai berikut[2]:

[1] Pengukuran IMS menggunakan skor 0 hingga 3, yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu; (a) 0-0,75: sakit; (b) 0,76-1,50: kurang sehat; (c) 1,51-2,25: cukup sehat; dan (d) 2,25-3,00: sehat.

[2] Uraian lebih detil dapat dilihat pada hasil-hasil pengukuran setiap kabupaten, yang terdapat dalam bagian ke-2 buku ini.

Dimensi Struktur:

Dimensi struktur meninjau aktor-aktor di dalam arena masyarakat sipil, mencakup keluasan dan kedalaman partisipasi warga, keragaman dan tingkat keorganisasian OMS, serta sumberdaya yang dimiliki aktor-aktor tersebut dan relasi diantara mereka.

Skor tertinggi untuk *dimensi struktur* diperoleh Kabupaten Gowa (1,69) dan terendah terlihat pada Kabupaten Bima (1,34). Terdapat tiga kabupaten yang mendapatkan skor pada kategori kurang sehat, yaitu Kabupaten Bima (1,34); Takalar (1,42); dan Timur Tengah Selatan/TTS (1,44). Sementara lima kabupaten lain, yaitu Kabupaten Buton Utara (1,55); Kota Bau-bau (1,56); Kabupaten Kupang (1,62); Dompu (1,65); dan Gowa (1,69) mendapatkan skor dalam kategori cukup sehat. Perolehan skor ini menunjukkan kondisi masyarakat sipil sebagai berikut:

- Relasi antar aktor-aktor masyarakat sipil yang tercermin dalam komunikasi dan kerja sama kegiatan maupun berjaringan/aliansi/koalisi untuk merespon isu-isu sosial yang didasarkan pada rasa kepedulian dan solidaritas yang tinggi.
- Kuatnya relasi antar aktor MS, di antaranya LSM – organisasi keagamaan – organisasi kepemudaan – kelompok masyarakat, dalam melakukan kerja-kerja advokasi yang berpihak kepada kelompok rentan (miskin, perempuan).
- Kedermawanan dan kerja sukarela warga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- Aksi-aksi kolektif warga dalam menanggapi persoalan sosial di lingkungannya telah menyentuh kelompok minoritas lintas agama dan suku.
- Sebaran OMS mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten.
- Tingginya keterlibatan perempuan dalam OMS dan berbagai aktivitasnya.

Dimensi Lingkungan:

Dimensi lingkungan menganalisis faktor-faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kekuatan/kelemahan masyarakat sipil, yang mencakup konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan kebijakan, kebebasan hak-hak dasar, serta relasi masyarakat sipil dengan negara dan pasar.

Skor *dimensi lingkungan* tertinggi diperoleh Kabupaten Gowa (1,86), sedangkan skor terendah terdapat di Kabupaten TTS (1,28). Terdapat tiga kabupaten yang memiliki skor dalam kategori kurang sehat, yaitu Kabupaten TTS (1,28); Bima (1,37); dan Takalar (1,45). Sementara itu, lima daerah lainnya mendapatkan skor dalam kategori cukup sehat, yaitu Kota Bau-bau (1,51); Kabupaten Kupang (1,62); Dompu (1,71); Buton Utara (1,76); dan Gowa (1,86). Perolehan skor ini menunjukkan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung tumbuh kembangnya masyarakat sipil sebagai berikut:

- Kebebasan pers dan kebebasan sipil (berkumpul, berekspresi, berasosiasi) tidak ada hambatan.
- MS dapat berekspresi mengemukakan pendapatnya baik berupa masukan maupun kritik terhadap pemerintah, tanpa ada tekanan dari pemerintah maupun aparat keamanan, dalam rangka memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
- Toleransi terhadap perbedaan kepercayaan maupun suku telah menjadi budaya yang cukup terpelihara dalam kehidupan keseharian masyarakat.
- Rasa percaya masyarakat kepada OMS tinggi, terutama pada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari bantuan/ pendampingan dari OMS
- Pemerintah memberikan perhatian penuh kepada OMS yang ada untuk melakukan kerja-kerja bersama dalam berbagai program kemitraan.

Dimensi Nilai

Dimensi nilai memfokuskan perhatian pada prinsip dan nilai-nilai yang dianut, dipraktekkan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Nilai-nilai yang dipilih merefleksikan satu satuan norma sosial dan politik yang diterima secara universal, yaitu demokrasi, transparansi, toleransi, anti kekerasan, kesetaraan gender, perlindungan keberlanjutan lingkungan dan penanggulangan kemiskinan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada semua kabupaten *dimensi nilai* berada pada kategori cukup sehat, dimana Kabupaten Gowa memperoleh skor tertinggi (2,02) dan Kabupaten TTS menempati urutan terendah (1,52). Perolehan skor ini mencerminkan kondisi masyarakat sipil sebagai berikut:

- Promosi dan praktek nilai anti kekerasan dan perdamaian oleh OMS di arena masyarakat sipil cukup gencar dilakukan, terutama terkait dengan isu KDRT

- Kesadaran dan praktek nilai anti kekerasan cukup berkembang terutama dalam mengelola konflik kekerasan antar warga maupun mulai beraninya warga melaporkan kasus KDRT kepada pihak kepolisian.
- Meningkatnya pemahaman kelompok perempuan terhadap isu KDRT dan cukup tingginya peran perempuan dalam mencegah serta menyelesaikan konflik kekerasan antar warga
- Ada kesadaran OMS untuk mempraktekkan nilai anti kekerasan, demokrasi, toleransi dan transparansi dalam kerja-kerja OMS.
- Pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan secara partisipatif

Dimensi Dampak

Dimensi dampak merupakan tinjauan atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan OMS terhadap kehidupan orang-per-orang, dan terhadap masyarakat luas, yang mencakup mempengaruhi kebijakan publik, mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta, respon terhadap kepentingan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa mendapatkan skor tertinggi untuk *dimensi dampak* (1,96) dan skor terendah diperoleh Kabupaten Takalar (1,53). Melihat keseluruhan skor maka seluruh kabupaten memiliki skor yang masuk dalam katergori cukup sehat. Hal ini menunjukkan kemampuan MS dalam menghasilkan dampak kerja pada tata pemerintahan dan pembangunan cukup baik, seperti yang tercermin dari kondisi-kondisi sebagai berikut:

- OMS berperan dalam memberdayakan masyarakat yang diwujudkan melalui membangun modal sosial masyarakat dan advokasi kebijakan publik.
- OMS telah menaruh perhatian pada terwujudnya akuntabilitas pemerintah dan sektor swasta dengan cara melakukan monitoring, mendorong transparansi, dan melontarkan kritik-kritik.
- Kebijakan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis serta perlindungan buruh migran memberikan jaminan hukum bagi kelompok rentan (misalnya kelompok miskin dan perempuan) untuk memperoleh hak-hak dasarnya.

- Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan komoditi lokal (kacang mete) serta dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Beberapa OMS berhasil melakukan advokasi mendorong kebijakan publik yang bermanfaat untuk masyarakat (misal Perda ADD, Perda Transparansi, Perda Perlindungan Anak, kenaikan anggaran ikatan bidan)
- OMS mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas berpendapat dalam forum-forum formal, memperluas jaringan antar MS, membuat kontrak politik.

2.1.2. Status Masyarakat Sipil di Kabupaten Lama

Status masyarakat sipil kabupaten lama diperlihatkan dalam Tabel 2. Dari perolehan skor tahun 2009, terlihat bahwa hampir seluruh kabupaten mengalami peningkatan skor di semua dimensi dibandingkan dengan hasil pengukuran tahun 2007, kecuali untuk Kabupaten Sumba Barat pada *dimensi struktur* dan Sumba Timur pada *dimensi lingkungan*. Sementara untuk Kabupaten Muna dan Buton, skor IMS 2009 ini tetap sama dengan tahun 2007. Para peserta lokakarya IMS di dua kabupaten tersebut bersepakat bahwa perubahan kondisi di kabupaten mereka tidak terlalu signifikan sehingga tidak perlu dilakukan penilaian ulang, dan skor IMS 2007 dianggap masih relevan dengan kondisi yang ada.

Tabel 2 Hasil Pengukuran IMS di Kabupaten Lama

No	Kabupaten	Struktur		Lingkungan		Nilai		Dampak	
		2007	2009	2007	2009	2007	2009	2009	2007
1.	Bantaeng	1,48	1,53	1,72	1,78	2,18	1,87	2,15	1,85
2.	Jeneponto	1,60	1,64	1,78	1,83	1,90	1,94	2,00	1,76
3.	Buton	1,26	1,26	1,44	1,44	1,81	1,57	1,81	1,57
4.	Muna	1,36	1,36	1,53	1,53	2,00	1,74	2,00	1,74
5.	Lombok Barat	1,61	1,84	1,52	1,58	1,92	1,79	1.90	1,79
6.	Lombok Tengah	1,61	1,67	1,62	1,69	1,96	1,91	2,06	1,77
7.	Sumba Barat	1,77	1,75	1,75	1,83	2,23	2,00	2,23	2,00
8.	Sumba Timur	1,54	1,54	1,72	1,69	1,99	1,87	2,01	1,80

Peningkatan skor hasil IMS di atas, tidak sekedar menunjukkan perubahan angka-angka yang diperoleh dalam lokakarya IMS, tetapi juga mencerminkan realitas keseharian yang terjadi pada setiap kabupaten. Dalam *dimensi struktur*, misalnya, perubahan sangat terasa dalam hal keaktifan warga dan OMS melakukan aktivitas di tengah masyarakat dan membangun interaksi antar sesama kalangan OMS. Pada kabupaten-

kabupaten yang mengalami peningkatan nilai *dimensi struktur*, seperti yang terjadi pada Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Lombok Barat dan Lombok Tengah beberapa perubahan kondisi nyata yang terlihat adalah sebagai berikut:

- Makin meluasnya sebaran OMS di tingkat desa yang lahir atas inisiatif masyarakat setempat dan memiliki pengurus yang mencerminkan keterwakilan kelompok perempuan, kelompok miskin dan komponen lain yang ada di desa. Partisipasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan di desa semakin meningkat, sementara kalangan muda cukup aktif di organisasi kepemudaan maupun organisasi *underbow* partai politik
- Organisasi masyarakat di desa-desa semakin berkembang dan selalu dilibatkan dalam rapat-rapat perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi program-program yang dilaksanakan di desa.
- Kader-kader desa cukup aktif mendorong masyarakat untuk memberikan usulan-usulan terkait implementasi program pembangunan (misalnya PNPM).
- Semakin banyak aksi masyarakat sipil mempertanyakan pemenuhan hak-haknya, misalnya terkait dengan dana BOS dan Jamkesmas melalui aksi-aksi damai
- Jaringan kerja, intensitas pertemuan/komunikasi dan kerjasama antar OMS semakin meningkat, bukan sekedar antar aktor melainkan antar lembaga.
- Situasi-situasi di atas, didukung pula oleh keluasan partisipasi warga dalam bentuk kerja gotong royong dan kerja sukarela yang masih tinggi. Selain itu, kedermawanan/budaya menyumbang masyarakat untuk membantu sesama, seperti sumbangan untuk amal dan kepentingan sosial juga masih cukup tinggi.

Pada *dimensi nilai*, perubahan yang menyolok terlihat pada upaya OMS menginternalisasi nilai-nilai dalam lembaganya dan mempromosikan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat luas. Pada beberapa kabupaten yang mengalami peningkatan hasil IMS untuk dimensi nilai, seperti yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Lombok Tengah, dan Sumba Timur beberapa perubahan yang terlihat adalah sebagai berikut:

- Selain menerapkan kesetaraan gender pada tingkat kepengurusan, OMS juga aktif mempromosikan kesetaraan gender di ruang

publik. Ada perubahan yang semakin membaik dalam hal keseimbangan gender di dalam OMS, sehingga sudah banyak perempuan yang menempati posisi kunci dalam organisasi masyarakat di desa-desa (KSM), bahkan ada perempuan yang menjadi kepala desa. Kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai pertemuan pun semakin terbuka lebar, termasuk di ranah politik yang ditandai dengan munculnya caleg-caleg perempuan dalam Pemilu

- Nilai-nilai demokrasi sudah dipahami dan diinternalisasikan di kalangan OMS, yang tercermin dalam pengelolaan organisasi maupun proses-proses pemilihan kepemimpinan di dalam organisasi
- Aksi-aksi MS untuk penanggulangan kemiskinan semakin meningkat melalui berbagai program yang dilakukan oleh OMS, Pemda maupun lembaga donor. Begitu juga dengan upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat atas dorongan OMS, kelompok keagamaan serta pemerintah.
- Beberapa OMS lokal juga giat mempromosikan nilai-nilai transparansi kepada masyarakat dampingan dan pemerintah desa, terutama dalam menetapkan prioritas bantuan, pengelolaan program dan pendanaan, seperti yang terlihat di Sumba Timur.

Pada *dimensi lingkungan* terlihat bahwa telah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Di Kabupaten-kabupaten yang mengalami peningkatan angka untuk dimensi lingkungan, seperti di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Sumba Barat beberapa perubahan kondisi yang terlihat adalah sebagai berikut:

- OMS sudah menjadi mitra pemerintah secara positif. Ruang berinteraksi dan dialog dengan pengambil keputusan semakin terbuka dan ada tindak lanjut dari dialog-dialog yang telah dilaksanakan. Pemerintah pun melibatkan OMS dalam program yang dilaksanakan di daerah, misalnya dalam program PNPM. Bahkan di Kabupaten Jeneponto, kerja-kerja advokasi yang dilakukan OMS telah menghasilkan lahirnya perda tata kelola air dan Komisi Irigasi yang menyebabkan perebutan air antar petani semakin menurun.
- Program desa mandiri yang mengembangkan kredit usaha rakyat (KUR) semakin membuka akses kredit di Bank melalui rekomendasi Bumdes (tidak perlu ada agunan).

- Dalam konteks desentralisasi, desa mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan APBDes dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan di Kabupaten Lombok Tengah, implementasi ADD menyediakan anggaran untuk bantuan sosial.
- Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dimanfaatkan oleh OMS untuk mengakses informasi dari pemerintah.
- Pada tingkat masyarakat, adanya perubahan pola pikir terhadap pendidikan perempuan terutama di pedesaan. Perempuan pun jauh lebih berani dalam melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingannya pada pemerintah dan aparat hukum lain, terutama untuk kasus-kasus KDRT. Masyarakat pun cukup leluasa menggunakan hak-hak politiknya, serta kerjasama antar etnis dan agama yang semakin meningkat.

Terkait dengan *dimensi dampak,* peningkatan hasil IMS terjadi di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Lombok Tengah, Sumba Timur. Beberapa perubahan yang terlihat pada daerah-daerah ini adalah sebagai berikut:

- Kapasitas Jaringan OMS dalam mempengaruhi sektor Negara dan Pasar semakin meningkat, sehingga semakin meningkatkan daya tawar OMS dan masyarakat terhadap pengambil keputusan di tingkat kabupaten maupun desa. Hal ini tercermin dari beberapa agenda kegiatan OMS diadopsi/diakomodasi kedalam agenda kegiatan Pemerintah.
- OMS semakin tanggap terhadap isu-isu yang ada di warga, seperti isu air bersih, kesehatan, kebersihan lingkungan, dll. melalui tindakan-tindakan fasilitasi, mediasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat yang mengalami persoalan/kasus.
- Terjadi peningkatan kualitas kemitraan antara OMS dengan masyarakat, sehingga keterlibatan aktif warga (laki-laki, perempuan) dalam musrenbang untuk mendorong pemenuhan kebutuhan sosial makin meningkat.

Perubahan-perubahan pada setiap kabupaten yang tergambar dari pengukuran tahun 2009 ini, dalam derajat tertentu dikontribusikan dari hasil-hasil kerja OMS di kabupaten bersangkutan paska pengukuran IMS tahun 2007. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Indeks

Masyarakat Sipil ini dikembangkan bukan hanya sebagai sebuah riset/ kegiatan yang menghasilkan pengetahuan semata. IMS diarahkan untuk menjadi "alat" yang berorientasi aksi dan diharapkan memiliki dampak politis - menguatkan masyarakat sipil menjadi arena yang potensial untuk mendorong perubahan/transformasi sosial. Dengan demikian, dalam setiap lokakarya pengukuran IMS selalu diakhiri dengan penyusunan rekomendasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat sipil di daerah bersangkutan, baik yang terkait dengan perbaikan kondisi internal OMS maupun dalam mendorong perubahan kondisi lingkungan di daerah kerja mereka masing-masing. Pelaksanaan atas rekomendasi-rekomendasi inilah yang memberikan kontribusi terhadap perubahan kondisi masyarakat sipil di suatu daerah.

2.2. Kontribusi Perubahan-Perubahan Di Tingkat Kabupaten Terhadap Desentralisasi Yang Demokratis

Dikaitkan dengan tiga aspek penting dalam desentralisasi yang demokratis[3], kondisi saat ini maupun perubahan-perubahan yang terjadi pada kabupaten-kabupaten yang menunjukkan peningkatan skor IMS lebih mengarah kepada aspek *political equality*. Sebagian besar perubahan yang terjadi mencerminkan kondisi yang memberikan kesempatan besar kepada masyarakat untuk mengekspresikan hak-hak sipil dan politiknya, baik dalam hal pembentukan organisasi dan pengembangan jaringan di antara organisasi-organisasi tersebut, maupun aksi-aksi yang dilakukan oleh aktor masyarakat sipil. Pemerintah daerah tidak lagi membatasi kerja-kerja yang dilakukan oleh OMS. Berbagai OMS dapat melakukan kegiatan hingga ke tingkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pedesaan, termasuk peningkatan partisipasi kelompok-kelompok perempuan dan masyarakat miskin. Keberadaan OMS pun semakin diapresiasi dan dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kalangan pemerintah daerah, seperti terlibat dalam proses penyusunan RPJMDes maupun Musrenbang. Kualitas kemitraan antara OMS dengan kalangan pemerintah pun semakin meningkat, sehingga banyak masukan dari OMS yang diakomodasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, tidak sedikit penggiat OMS

[3] Lihat bagian I, setidaknya ada tiga aspek penting yang harus tercakup dalam desentralisasi yang demokratis, yakni political equality, local accountability, dan local responsiveness.

yang justru menjadi "tenaga ahli" di instansi-instansi pemerintah daerah, meskipun dilakukan secara informal. OMS dan kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan dapat secara leluasa memainkan peran sebagai *vocal point* untuk mengungkapkan kepentingan masyarakat. Di dalam internal OMS sendiri, nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan gender semakin menguat, sehingga memungkinkan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Gambaran lebih jauh menunjukkan bahwa partisipasi sosial warga menampilkan kecenderungan yang meningkat, terlihat dari kerja gotong royong dan kerja sukarela yang masih tinggi. Kedermawanan atau budaya menyumbang masyarakat bagi sesama yang membutuhkan juga masih cukup tinggi. Demikian pula dengan aksi-aksi kolektif warga dalam menanggapi persoalan sosial di lingkungannya. Juga cukup banyak contoh-contoh partisipasi politik warga yang muncul di berbagai kabupaten, misalnya partisipasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan di desa semakin meningkat, dan aksi-aksi masyarakat sipil mempertanyakan pemenuhan hak-haknya terkait jaminan pendidikan dan kesehatan.

Dalam aspek tingkat keorganisasian juga memperlihatkan situasi yang positif, misalnya sebaran OMS di tingkat desa semakin meluas serta mencerminkan keterwakilan kelompok perempuan, kelompok miskin dan komponen lain yang ada di desa. Demikian pula kondisi relasi antar aktor masyarakat sipil meningkat yang tercermin dalam komunikasi dan kerja sama kegiatan maupun berjaringan untuk merespon isu-isu sosial maupun melakukan kerja-kerja advokasi yang berpihak pada kelompok rentan.

Sementara untuk dua aspek lainnya, yaitu *local accountability* dan *local responsiveness* informasi atas perubahan-perubahan yang terjadi minim disampaikan dalam lokakarya IMS. Hal ini dapat mencerminkan relatif kecilnya perubahan yang terjadi dibandingkan dengan aspek *political equality*. Perubahan yang teridentifikasi masih sebatas upaya-upaya yang dilakukan OMS untuk terjadinya akuntabilitas dan pelayanan yang prima kepada masyarakat, namun belum diikuti oleh praktek-praktek nyata yang dilakukan oleh Pemda. Meskipun beberapa kebijakan nasional sudah mengarah pada reformasi birokrasi dan *good governance*, tetapi masih belum diimplementasikan di daerah. Dalam batas-batas tertentu, kapasitas birokrasi di tingkat lokal pun masih belum siap untuk melakukan reformasi birokrasi secara fundamental, sehingga lebih banyak menunggu (termasuk menunggu desakan dari masyarakat) daripada berinisiatif melakukan

perbaikan yang diperlukan masyarakat luas. Di beberapa daerah, inovasi-inovasi untuk mendorong terjadinya *lokal accountability* sudah dilakukan. Pattiro Jeka, misalnya, berusaha mendorong lahirnya Perda Transparansi di Kabupaten Jeneponto, sementara ICW melakukan kegiatan Citizen Report Card (CRC) sebagai cara monitoring atas akuntabilitas penyelenggara negara. Bebebapa OMS pun giat mempromosikan nilai-nilai transparansi kepada pemerintah desa, terutama dalam menetapkan prioritas bantuan, pengelolaan program dan pendanaan. Dari kegiatan yang dilakukan ini hasilnya memang sudah ada, misalnya, keluarnya Perda Transparansi di Jeneponto, tetapi sifatnya masih terbatas dan tidak semasif seperti yang terlihat pada aspek *political equality*.

Terkait dengan *local responsiveness*, perubahan yang teridentifikasi dalam lokakarya IMS tahun 2009 menunjukkan bahwa aksi-aksi OMS semakin tanggap terhadap isu-isu yang ada di warga, seperti isu air bersih, kesehatan dan keberlanjutan lingkungan, melalui kegiatan fasilitasi, mediasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat yang mengalami persoalan/kasus. Begitu juga dengan upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, OMS, kelompok keagamaan serta pemerintah. Program-program penanggulangan kemiskinan juga semakin meningkat melalui berbagai program yang dilakukan oleh OMS, Pemda maupun lembaga donor. Program desa mandiri yang mengembangkan kredit usaha rakyat (KUR), misalnya, semakin membuka akses kredit di Bank melalui rekomendasi Bumdes (tanpa perlu agunan). Program Jamkesda dan BOSDA untuk masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh program Jamkesmas dan BOS dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemda masih sering mendapat kritik tajam dari masyarakat maupun OMS karena kurang tepat sasaran, terjadi penyelewengan anggaran, atau dijadikan kendaraan politik kepala daerah.

Lebih besarnya perubahan pada aspek *political equality* tidak dapat dilepaskan dari perhatian aktor-aktor masyarakat sipil di kabupaten dalam meningkatkan posisi tawar mereka kepada kalangan pemerintah mengenai peran-peran strategis yang dapat dimainkan. Warisan rejim orde baru – yang menganggap bahwa organisasi masyarakat sipil, khususnya LSM sebagai musuh pemerintah— masih belum pupus sepenuhnya di daerah. Dalam situasi seperti inilah maka upaya-upaya meningkatkan posisi tawar organisasi masyarakat sipil menjadi perhatian utama bagi OMS di kabupaten. Pada sisi lain, kalangan OMS di kabupaten pun masih belum

terlihat solid. Seringkali terjadi benturan antar OMS, baik pada tataran ideologi/pendekatan maupun konflik-konflik personal antar aktivisnya.

Selain itu, hasil-hasil pengukuran IMS di 16 kabupaten memperlihatkan bahwa kelemahan utama masyarakat sipil berada pada dimensi struktur, yaitu dimensi yang mencerminkan struktur internal masyarakat sipil. Kelemahan dimensi struktur ini cukup kentara dikontribusikan oleh lemahnya kondisi sumber daya masyarakat sipil. Di seluruh kabupaten, kondisi sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, keuangan dan teknologi berpengaruh signifikan pada keseluruhan lemahnya kondisi dimensi struktur ini. Sumber pendanaan bagi OMS dapat berasal dari lembaga donor, pemerintah, anggotanya bagi yang berbasis keanggotaan, dan sumber daya lokal atau publik. Namun saat ini sumber pendanaan yang relatif mudah diperoleh OMS masih banyak bersumber dari lembaga donor dan pemerintah. Umumnya hanya organisasi berbasis keagamaan saja yang mendapatkan sumber dana dari anggotanya. Kapasitas individu belum merata, termasuk dalam melihat potensi sumber daya lokal dan mengembangkannya untuk keberlanjutan organisasinya. Ketidakcukupan sumber daya ini berkontribusi negatif pada kemampuan masyarakat sipil untuk mengorganisir diri pada level yang lebih tinggi. Sebagai contoh, keberadaan organisasi payung/federasi bagi OMS di kabupaten sangat terbatas jumlahnya. Jika ada pun kurang efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rendahnya sumber daya masyarakat sipil tampaknya juga mengakibatkan dampak kerja masyarakat sipil dalam berbagai sektor masih belum maksimal dan baru berada pada kategori nilai cukup saja (lihat kolom Dampak pada Tabel 1 dan 2).

Jika kondisi struktur masyarakat sipil ini dikaitkan kembali dengan konsep desentralisasi yang demokratis[4] yang membutuhkan kesadaran dari semua stakeholder di daerah bersangkutan untuk saling berinteraksi dan membangun komitmen bersama, lemahnya kondisi struktur masyarakat sipil terutama pada aspek sumber daya akan menjadi penghambat bagi masyarakat sipil untuk memenuhi perannya di kabupaten. Situasi-situasi seperti inilah yang dalam periode 2007-2009 berusaha diatasi oleh kalangan OMS, yang kesemuanya itu masuk dalam aspek *political equality*.

[4] Lihat uraian di Bagian 1.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa lembaga donor berperan dalam *agenda setting* yang dimainkan oleh OMS-OMS di tingkat kabupaten. Dalam konteks Program ACCESS Fase I, misalnya, fokus perhatiannya memang lebih banyak memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas OMS untuk dapat berinteraksi secara dinamis dengan kalangan pemerintah dan penguatan organisasi-organiasi di tingkat desa, utamanya organisasi-organisasi perempuan, untuk terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, yang lagi-lagi masih erat kaitannya dengan aspek *political equality*. Begitu juga dengan lembaga-lembaga donor lainnya. Dalam periode 2007-2009, masih banyak lembaga donor yang memberikan perhatian terhadap peningkatan *bargaining position* OMS melalui upaya-upaya mengembangkan iklim politik yang kondusif, seperti misalnya melalui program pemantauan Pemilu atau pendidikan pemilih. Kalaupun ada program-program yang memberikan perhatian terhadap pelayanan kepada masyarakat, sifatnya masih berupa penyediaan secara langsung oleh lembaga donor bersangkutan, bukan mendorong tanggung jawab negara untuk penyediaan layanan publik tersebut.

Terlepas dari berbagai kelemahan yang ada, perubahan-perubahan yang sudah terjadi, seperti uraian di atas, merupakan aset yang berharga bagi kabupaten, karena telah menyediakan pra-kondisi yang memadai bagi peningkatan peran OMS untuk merambah pada aspek *local accountability* dan *local responsiveness* pada masa-masa mendatang.

Untuk ke depan perhatian aktor-aktor masyarakat sipil kabupaten penting diarahkan kepada kedua aspek ini. Peluang itu semakin terbuka dengan lahirnya Undang-undang mengenai Pelayanan Publik dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Kerja-kerja OMS harus mengakselerasi kebijakan nasional ini terimplementasi di kabupaten. Dalam konteks program ACCESS pun, pada ACCESS Fase II ini ada perhatian khusus terhadap isu pelayanan publik dan penganggaran.

Program ACCESS Fase II ini bertujuan agar warga dan organisasinya berdaya untuk melakukan interaksi aktif dengan pemerintahan lokal dalam upaya meningkatkan dampak-dampak pembangunan di 16 kabupaten di Kawasan Timur Indonesia. Melihat pada kelemahan utama masyarakat sipil pada dimensi struktur, maka pilihan Program ACCESS Fase II untuk membangun struktur masyarakat sipil, terutama partisipasi politik, tingkat keorganisasian, relasi dan jaringan kerja sama, serta sumber daya sangat relevan. Wilayah utama perubahan yang diinginkan adalah partisipasi publik di dalam pembuatan keputusan, pelayanan publik yang berkualitas,

transparansi/akuntabilitas dan akses terhadap informasi, dan keadilan sosial/penegakan hukum. Beberapa program lain pun mulai menukik pada isu-isu *local accountability* dan *local responsiveness* ini. Tengoklah program PNPM yang banyak memberikan dukungan pendanaan terhadap penyediaan sarana publik. Belum lagi beberapa kementerian sektoral yang juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Kecenderungan-kecenderungan ini tentu saja penting menjadi perhatian OMS ke depan. Sudah saatnya bagi OMS untuk memberikan perhatian terhadap aspek *local accountability* dan *local responsiveness* ini, untuk membumikan desentralisasi yang demokratis secara lebih bermakna, tidak sekedar demokrasi prosedural seperti yang banyak dikritik berbagai pihak selama ini. Untuk meningkatkan peran-perannya berjalan efektif, maka kemampuan-kemampuan yang bersifat teknokratis menjadi kebutuhan yang diperlukan. Misalnya, bagaimana memfasilitasi masyarakat berdialog dengan SKPD tertentu mengenai maklumat pelayanan seperti yang dimandatkan dalam Undang-undang Pelayanan Publik. Selain itu, pandangan yang inklusif juga harus mulai ditumbuhkan di kalangan OMS dalam rangka membangun sinergi dengan berbagai inisiatif lain yang dikembangkan di kabupatennya masing-masing. Melalui upaya-upaya seperti inilah diharapkan OMS memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap *local accountability* dan *local responsiveness* dalam desentralisasi yang demokratis. Dan, hal-hal ini diharapkan mewarnai perubahan yang akan dihasilkan dalam pengukuran ulang IMS di kemudian hari.

2.3. Pembelajaran Berharga

Berdasarkan pengalaman YAPPIKA melakukan pengukuran IMS di 16 kabupaten, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan IMS untuk melihat kondisi yang terjadi di sebuah kabupaten memberikan gambaran yang komprehensif atas realitas yang ada. Penggunaan IMS ini memandu semua pihak untuk mengeksplorasi berbagai kenyataan yang terjadi melalui diskusi-diskusi antar pihak (masyarakat, OMS maupun stakeholder kunci) atas dasar informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Selain terjadi sharing, terjadi juga koreksi atas sebuah informasi yang disampaikan satu pihak oleh pihak lainnya. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi yang dirumuskan berbasiskan pada situasi/kondisi yang telah terkumpul melalui diskusi-diskusi intensif yang berlangsung, utamanya pada saat

interpretasi atas nilai-nilai yang diperoleh dalam pengukuran. Bisa dikatakan bahwa secara kualitatif rekomendasi yang dihasilkan relevan dengan persoalan yang dihadapi.

Beberapa pembelajaran berharga dari pelaksanaan Indeks Masyarakat Sipil adalah;

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi/ situasi masyarakat sipil di sebuah kabupaten tertentu melalui proses penilaian dan refleksi atas MS saat ini (analisis kelemahan dan kekuatan MS), membangun visi bersama tentang MS, serta mengembangkan strategi untuk mendorong perubahan yang positif.
- Memberdayakan masyarakat sipil dan stakeholder kuncinya dengan memberikan kesempatan berdialog dan mengembangkan jaringan di antara mereka.
- Memperkuat kapasitas MS (melalui diskusi dan dialog mendalam atas nilai-nilai yang seharusnya diyakini, dipraktekkan, dan dipromosikan oleh MS serta dialog atas dampak yang ditimbulkan dari berbagai rangkaian kegiatan MS) sehingga mampu memenuhi peran-peran positifnya dalam mendorong tata pemerintahan yang baik.

Sebagai catatan akhir, ada beberapa tantangan pokok dalam penggunaan Indeks Masyarakat Sipil, yakni; (a) pendefinisian (konsep) masyarakat sipil yang beragam dan masih terus diperdebatkan; (b) seringkali terjadi kerancuan ketika membahas "realitas" masyarakat sipil dengan "kondisi ideal" yang diharapkan. Kecenderungannya, pada saat awal implementasi Indeks sudah memberi batasan pada definisi masyarakat sipil yang akan dianalisis, sehingga mengabaikan realitas masyarakat sipil yang begitu beragam, bervariasi, dan terkadang memiliki nilai-nilai, tujuan dan kepentingan yang saling bertentangan; dan (c) khusus untuk *perception based*, masih muncul keraguan di beberapa peserta tentang indeks berbasis persepsi, khususnya menyangkut validitas hasil penilaian yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan dari orang-orang yang diundang dalam lokakarya.

Bagian Kedua

1

Metodologi Indeks Masyarakat Sipil di 16 Kabupaten/Kota

Bagian Kedua

Metodologi Indeks Masyarakat Sipil di 16 Kabupaten/Kota

2.1. Konsepsi Masyarakat Sipil

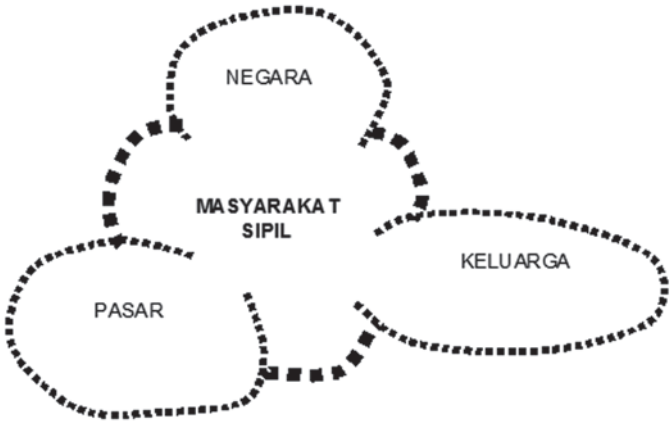
Masyarakat Sipil merupakan konsep yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan masa maupun fokus perhatian dari para ahli yang menggeluti isu masyarakat sipil.

Di Indonesia, setidaknya ada 3 konsepsi masyarakat sipil yang berkembang, yakni[1]

1. Konsepsi masyarakat sipil yang menekankan aspek horisontal —sangat terkait dengan konsep budaya. Konsep masyarakat sipil didekatkan dengan "*civility*" atau keberadaban dan "*fraternity*". Aspek ini dibahas pemikir-pemikir Indonesia yang kemudian menggunakan istilah Masyarakat Madani, dipopulerkan oleh Nurcholish Madjid.
2. Konsepsi masyarakat sipil yang menekankan aspek vertikal – sangat terkait dengan konsep politik dan menggunakan istilah masyarakat warga atau kewargaan digunakan oleh Ryaas Rasyid dan Daniel Dhakidae. Konsep ini mengutamakan otonomi masyarakat terhadap negara, dengan pertimbangan bahwa istilah civil dipandang dekat dengan "*citizen*" dan "*liberty*".

3. Konsepsi masyarakat sipil yang mencakup aspek horisontal maupun vertikal, yang dibahas oleh Afan Gaffar, Paulus Wirutomo dan Mochtar Mas'oed.

Diagram 1 Masyarakat Sipil Sebagai Sebuah Arena



Hal yang menarik dicermati dari keragaman konsepsi masyarakat sipil yang berkembang adalah adanya perbedaan cara pandang terhadap masyarakat sipil. Ada yang memandang masyarakat sipil sebagai sebuah entitas, namun ada pula yang melihatnya sebagai sebuah arena terjadinya interaksi, kontestasi dan negosiasi para pihak. Salah satu pihak yang memandang masyarakat sipil sebagai arena adalah CIVICUS, sebuah organisasi internasional yang menaruh perhatian terhadap perkembangan masyarakat sipil di berbagai negara. CIVICUS mendefinisikan masyarakat sipil sebagai *sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama* (CIVICUS, 2003). Secara skematis, definisi masyarakat sipil menurut CIVICUS seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Arena* dimaksudkan sebagai ruang di dalam masyarakat dimana individu-individu bertemu, berkumpul, berdiskusi dan berdebat untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat yang lebih luas. Arena menekankan pada pentingnya peran aktor-aktor masyarakat sipil dalam memperluas ruang publik di mana berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat bertemu. Di dalam *arena* juga terkandung pengertian yang lebih luas yang tidak membatasi aktor-aktor masyarakat sipil hanya kepada organisasi-organisasi

yang formal tetapi juga kelompok-kelompok atau jaringan-jaringan informal di dalam masyarakat.

- *Keluarga* adalah wilayah kehidupan privat atau ranah domestik dari kehidupan rumah tangga. Namun difahami bahwa tidaklah semua kehidupan dalam keluarga menjadi persoalan privat. Kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, akan selalu menjadi persoalan publik.
- *Negara* adalah organisasi kekuasaan yang menyandang monopoli penggunaan kekuasaan secara legal untuk mengatur setiap anggota masyarakat melalui hukum dan perundang-undangan, termasuk wewenang untuk menggunakan kekerasan.
- *Pasar* atau sektor swasta adalah ruang dimana anggota-anggota masyarakat bertemu untuk memperoleh penghasilan, mendapat keuntungan dan kekayaan melalui proses produksi atau pertukaran barang dan jasa, dan lain-lain. Karena motifnya adalah untuk mencari keuntungan maka pasar dikeluarkan dari definisi masyarakar sipil.
- *Berkelompok* adalah kekuatan utama dari masyarakat sipil yang terletak pada kemampuannya untuk membangun interaksi dan interelasi antara satu dengan yang lain maupun dengan pihak lainnya.
- *Kepentingan bersama* diartikan secara luas yang dapat berupa promosi nilai, kebutuhan, identitas, norma, dan aspirasi-aspirasi lainnya.

Dari definisi di atas terlihat bahwa CIVICUS memandang masyarakat sipil sebagai arena yang bebas dimasuki oleh berbagai aktor, tidak hanya aktor-aktor (pelaku/pihak) yang "beradab" (*civilized*) tetapi juga terbuka untuk dimasuki para aktor yang *uncivilzed*. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa CIVICUS memandang masyarakat sipil diisi oleh aktor yang tidak homogen, tetapi lebih merupakan arena yang kompleks dimana nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda berinteraksi sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi benturan kepentingan di dalamnya.

Konsepsi masyarakat sipil CIVICUS lebih mengarah sebagai arena politik (daripada arena ekonomi yang menggunakan sebutan "sektor nonprofit"), karena CIVICUS memfokuskan perhatian dalam aksi publik (relasi, interaksi, kontestasi) dalam konteks tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang lebih luas dan tidak diutamakan pada peran ekonomi organisasi nonprofit dalam masyarakat. Perspektif politis terhadap

masyarakat sipil ini mengarah pada tinjauan atas "relasi kekuasaan", baik di dalam arena masyarakat sipil sendiri, maupun di antara masyarakat sipil dengan negara dan pasar.

CIVICUS juga tidak memfokuskan definisi MS pada "organisasi" karena beberapa alasan. Pertama, selain orang-orang yang berasosiasi dalam satu organisasi, ada pula orang yang bergabung dalam demonstrasi/ aksi damai atau menjadi anggota kelompok informal. Definisi yang secara tegas menyebutkan "organisasi" akan gagal untuk menyertakan aksi kolektif informal dan bentuk-bentuk yang bersifat sementara. Kedua, definisi yang memfokuskan perhatian pada "organisasi" cenderung menyebabkan penilaian MS menurut jumlah dan bentuk organisasi yang ada, dibandingkan dengan menitikberatkan pada aksi publik secara bersama.

Sebagai implikasinya, walaupun mengakui batasan-batasan teoritis MS sebagai arena di luar negara, pasar dan keluarga, CIVICUS pun mengakui bahwa dalam kenyataannya batas antara satu arena dengan arena lainnya tidak betul-betul tegas (kabur) karena terdapat tumpang tindih antara arena-arena yang berbeda. Dengan demikian, CIVICUS mendefinisikan 'keanggotaan' MS menurut "fungsi" (aktivitas atau peran yang diambil oleh para aktor) daripada "bentuk" organisasi. Aktor-aktor dapat bergerak dari satu arena ke arena yang lain (bahkan menempati lebih dari satu arena secara simultan), tergantung pada sifat/fungsi aksinya. Sebuah perusahaan swasta, misalnya, ketika melakukan aktivitas profit akan masuk dalam arena pasar. Namun, ketika perusahaan yang sama melakukan aktivitas filantropi dapat dikatakan berperan dalam MS. Contoh lainnya adalah ketika seseorang berdiskusi di dalam keluarganya (antara anak, bapak, ibu), tidak dipandang sebagai masyarakat sipil. Namun bila sang anak, sang bapak, atau sang ibu membawa masalah keluarganya (misalnya kekurangan air) menjadi masalah warga sebuah komunitas, yang kemudian didukung oleh tetangga-tetangga mereka untuk disampaikan kepada pemerintah setempat atau perusahaan penyedia air minum, maka anggota keluarga tersebut dapat dikatakan menggunakan ranah publik dan ia menjadi bagian dari masyarakat sipil.

2.2. Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil Kabupaten

Untuk meningkatkan peran-peran OMS dalam tata kepemerintahan lokal yang demokratis, Yappika merasa perlu untuk mengetahui kondisi OMS di tingkat kabupaten melalui sebuah pengukuran yang sistematis dan terstruktur. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat yang dikembangkan CIVICUS yang disebut Indeks Masyarakat Sipil (IMS). Pilihan Yappika menggunakan IMS dilandasi dengan pertimbangan bahwa IMS merupakan alat yang memungkinkan untuk menangkap realitas MS secara utuh (termasuk sisi "gelap" MS) dan berusaha untuk mencari upaya-upaya bagi penguatan masyarakat sipil tersebut agar mencapai kondisi masyarakat sipil yang sehat.

Metodologi

Ada 2 (dua) macam pendekatan atau cara untuk melakukan penilaian status atau "tingkat kesehatan" masyarakat sipil dengan menggunakan Indeks Masyarakat Sipil, yang dikembangkan oleh CIVICUS. Pendekatan pertama, melakukan penelaahan dengan memanfaatkan indikator-indikator untuk melakukan penilaian berdasarkan persepsi para pihak yang dilibatkan dalam prosesnya. Maksud dari proses penilaian berdasarkan persepsi para-pihak, yaitu sekelompok tokoh masyarakat sipil, stakeholder kunci masyarakat sipil, dan orang-orang yang dipilih dan dipercayai oleh masyarakat miskin dan termarjinalisasi karena telah memberikan banyak dukungan pada kelompok tersebut. Orang-orang yang terpilih menjadi peserta lokakarya dianggap cukup memiliki pengalaman, kecakapan dan pengetahuan tentang sektor masyarakat sipil (baik sebagai pengamat maupun praktisi), sehingga laik menjadi sampel untuk merepresentasikan kondisi masyarakat sipil di sebuah wilayah. Dengan demikian, indikator yang digunakan pun dinamakan indikator Indeks berbasis persepsi.

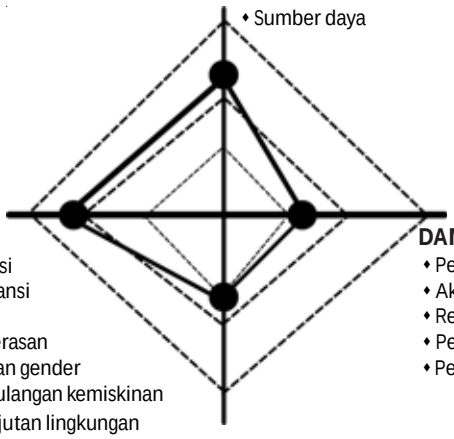
Pendekatan kedua, memanfaatkan indikator untuk mencari data-data kuantitatif dan kualitatif, sebagai basis analisis melakukan penilaian, bagi para pihak yang secara khusus dipilih. Apabila kedua pendekatan tersebut disinergikan, maka dibutuhkan data-data dasar (dalam bentuk numerik maupun deskripsi) tentang berbagai aspek masyarakat sipil yang akan ditelaah, yang dapat digali dari sumber-sumber hasil penelitian tentang masyarakat sipil yang pernah ada, atau melakukan sendiri sebuah penelitian yang komprehensif mengenai masyarakat sipil di sebuah wilayah.

Meskipun alat ini ditujukan untuk melakukan penelaahan terhadap kondisi kesehatan masyarakat sipil dengan pendekatan persepsi. Banyak sekali keuntungan yang bisa diraih, bila para-pihak yang dilibatkan untuk melakukan penilaian atas dasar persepsi mereka, dapat menguji kembali persepsi tersebut dengan sehimpunan data kuantitatif dan kualitatif, yang bisa dikumpulkan oleh seorang/sekelompok peneliti. Penggunaan alat ini diimplementasikan pada pengukuran kondisi kesehatan masyarakat sipil di 8 kabupaten wilayah kerja Program ACCESS tahap II yang baru, yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kota Bau-bau dan Kabupaten Buton Utara.

Kerangka Analisis

IMS menggunakan 74 indikator, dimana setiap indikator akan mengukur setiap aspek yang dipandang penting mengenai keadaan masyarakat sipil. Ke-74 indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 25 subdimensi dan 4 kelompok besar yang disebut dengan dimensi. Keempat dimensi tersebut masing-masing adalah: struktur *(structure)*, lingkungan eksternal *(external environment)*, nilai-nilai *(values)*, dan dampak *(impact)*. Keempat dimensi tersebut secara grafik akan membentuk apa yang disebut dengan intan masyarakat sipil *(civil society diamond)* sebagaimana digambarkan di samping ini.

Diagram 2 Intan Masyarakat Sipil



STRUKTUR
- Keluasan partisipasi warga negara
- Kedalaman partisipasi warga negara
- Keragaman MS
- Tingkat organisasi
- Relasi antar MS
- Sumber daya

NILAI
- Demokrasi
- Transparansi
- Toleransi
- Anti-kekerasan
- Kesetaraan gender
- Penanggulangan kemiskinan
- Keberlanjutan lingkungan

DAMPAK
- Pengaruh MS terhadap kebijakan publik
- Akutanbilitas sektor negara dan pasar
- Respon terhadap kepentingan sosial
- Pemberdayaan warga negara
- Pemenuhan kebutuhan sosial

LINGKUNGAN
- Konteks politik
- Kebebasan dan hak-hak dasar
- Konteks sosial-ekonomi
- Konteks sosial-kultural
- Hukum dan aspek legal
- Relasi MS dengan negara
- Relasi MS dengan pasar

Uraian dari masing-masing Dimensi dan Sub Dimensi IMS adalah sebagai berikut:

Dimensi Struktur

Dimensi struktur melihat aktor-aktor di dalam arena MS, karakteristik utamanya dan relasi diantara mereka. Dimensi ini terdiri dari 6 subdimensi dan 21 indikator, yakni:

1) *Keluasan partisipasi warga* menilai prosentase/jumlah warga yang terlibat dalam aktivitas MS. Indikator-indikatornya mencakup; persentase warga yang mengambil bagian dalam aksi politik, donasi amal, menjadi anggota OMS, melakukan kerja relawan dan berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat.

2) *Kedalaman partisipasi warga* menilai seberapa sering/banyak orang terlibat dalam aktivitas MS. Indikator-indikatornya mencakup; berapa sering/banyak orang menyumbang untuk amal, seberapa sering kerja relawan mereka lakukan dan seberapa banyak mereka menjadi anggota OMS yang berbeda.
3) *Keragaman MS* menilai keragaman OMS di dalam arena masyarakat sipil. Apakah semua kelompok sosial berpartisipasi secara setara dalam arena MS? Apakah ada kelompok yang dominan atau yang tersisihkan? Indikator-indikatornya mencakup partisipasi perempuan, kelompok minoritas dan kelompok sosial lain dalam kepemimpinan dan keanggotaan OMS. Juga melihat keberadaan OMS di daerah pedesaan atau region-region tertentu.
4) *Tingkat organisasi* menilai infrastruktur yang dimiliki MS berkaitan dengan stabilitas dan kematangannya, serta kapasitasnya untuk melakukan aksi bersama. Indikator-indikatornya mencakup; eksistensi dan keefektifan lembaga payung, usaha untuk memperbaiki diri sendiri, tingkat dukungan, dan jaringan internasional.
5) *Relasi antar OMS* menilai ikatan dan hubungan kerja sama di antara aktor-aktor MS. Indikator-indikatornya mencakup; sharing informasi dan pengembangan jaringan/aliansi.
6) *Sumber daya (resources)* menilai kapasitas sumberdaya yang dimiliki OMS untuk mencapai tujuannya. Indikator-indikatornya mencakup; sumber daya finansial, manusia dan teknologi.

Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan melihat berbagai faktor luar yang berpengaruh atau memberikan kontribusi bagi perkembangan ke arah masyarakat sipil yang kuat, atau sebaliknya. Dimensi ini dibagi ke dalam 7 subdimensi dengan jumlah indikator 23, yakni:

1) *Konteks politik* menilai berbagai situasi politik dalam negara dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya mencakup; hak politik warga negara, tingkat kompetisi politik, aturan hukum, korupsi, keefektifan negara dan desentralisasi.
2) *Kebebasan dan hak-hak dasar* menilai hak-hak konstitusional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sipil. Sejauhmana kebebasan dan hak ini dijamin oleh hukum dan dilaksanakan dalam prakteknya. Indikator-indikatornya

mencakup; kebebasan sipil dan politik (kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan berorganisasi), kebebasan pers dan hak-hak atas informasi.

3) *Konteks sosial ekonomi* menilai situasi sosial ekonomi dalam negara dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya mencakup; kemiskinan yang meluas, perang sipil atau konflik, krisis ekonomi, ketidaksetaraan sosial ekonomi, dan tingkat buta huruf.
4) *Konteks sosial budaya* menilai seberapa jauh norma-norma sosial budaya berpengaruh terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya mencakup; tingkat kepercayaan, toleransi, budaya patriarki, feodalisme dan kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umum.
5) *Hukum dan aspek legal* menilai sejauhmana hukum dan aspek legal berpengaruh terhadap masyarakat sipil (mendorong tumbuh-kembangnya atau justru malah mematikan). Indikator-indikatornya mencakup; prosedur registrasi OMS, hambatan legal pada aktivitas advokasi OMS, aturan pajak dan filantropi.
6) *Relasi masyarakat sipil dan negara* menilai sifat dan kualitas relasi antara masyarakat sipil dengan negara. Indikator-indikatornya mencakup; otonomi OMS, dialog dan kerja sama antara OMS dan negara.
7) *Relasi masyarakat sipil dan pasar* menilai sifat dan kualitas relasi antara masyarakat sipil dengan pasar. Indikator-indikatornya mencakup; sikap sektor swasta terhadap OMS, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*).

Dimensi Nilai

Dimensi nilai memfokuskan perhatian pada prinsip dan nilai-nilai yang dianut, dipraktekkan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Berbeda dari dimensi-dimensi lain, aspek ini tidak mendapatkan banyak perhatian dalam literatur yang ada, sebagian karena dalam banyak konseptualisasi, nilai-nilai MS sebelumnya didefinisikan sebagai positif, progresif atau demokratis karena definisi MS yang dipilih. Subdimensi yang dipilih merefleksikan satu satuan norma sosial dan politik yang diterima secara universal (contohnya Deklarasi HAM). Indikator melihat baik pada bagaimana nilai-nilai ini dipraktekkan dalam MS dan upaya-upaya MS

untuk meningkatkan nilai-nilai dalam masyarakat luas. Dimensi ini terdiri dari 7 subdimensi dengan 14 indikator, yaitu:

1) *Demokrasi* menilai sejauhmana aktor-aktor MS mempraktekkan demokrasi di internal organisasi mereka, dan seberapa aktif OMS mempromosikan demokrasi kepada publik. Indikator-indikatornya mencakup; praktek-praktek demokrasi dalam OMS (misalnya memilih pemimpin dan membuat keputusan), dan aksi-aksi aktor dalam mempromosikan demokrasi pada tingkat masyarakat.
2) *Transparansi* menilai sejauhmana aktor-aktor MS mempraktekkan sekaligus mempromosikan transparansi. Indikator-indikatornya mencakup; korupsi dalam MS, transparansi keuangan dalam MS, dan aksi-aksi aktor MS mempromosikan transparansi pada tingkat masyarakat.
3) *Toleransi* menilai keseimbangan antara kekuatan toleran dan intoleran dalam MS, juga tingkat keterlibatan MS dalam meningkatkan toleransi dalam masyarakat luas. Indikator-indikatornya mencakup; toleransi di dalam MS dan aksi-aksi aktor MS dalam mempromosikan toleransi kepada masyarakat luas.
4) *Anti kekerasan* menilai kehadiran kekuatan kekerasan di dalam MS, sekaligus menilai usaha-usaha aktor-aktor MS untuk mempromosikan cara-cara non-kekerasan pada tataran individu, keluarga, dan publik. Indikator-indikatornya mencakup; anti kekerasan di dalam MS dan aksi-aksi aktor MS dalam mempromosikan anti kekerasan dan perdamaian.
5) *Kesetaraan gender* menilai penerapan kesetaran gender di lingkup internal OMS, sekaligus usaha-usaha OMS untuk mempromosikan nilai ini pada publik. Indikator-indikatornya mencakup; kesetaraan gender di arena MS, praktek-praktek kesetaraan gender di dalam OMS dan aksi-aksi mempromosikan kesetaraan gender di dalam masyarakat luas.
6) *Penanggulangan kemiskinan* menilai sejauhmana aktor-aktor MS terlibat dalam menangani isu kemiskinan dan mempromosikan kebijakan yang berpihak pada orang miskin. Indikator-indikatornya mencakup; aksi-aksi aktor MS menanggulangi kemiskinan dan melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada orang miskin.

7) *Keberlanjutan lingkungan* menilai sejauhmana aktor-aktor MS menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan kepada publik. Indikator-indikatornya mencakup; aksi-aksi aktor MS menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan kepada masyarakat luas.

Dimensi Dampak

Dimensi dampak mengukur dampak keberadaan masyarakat sipil terhadap kehidupan warganegara dan masyarakat secara keseluruhan. Dimensi ini, mengadopsi gagasan luas dari dampak, yang merujuk tidak hanya pada hasil akhir (misalnya berapa banyak pengaruh MS terjadi pada area khusus), tetapi juga pada proses (misalnya bagaimana keterlibatan MS secara aktif dalam area itu). Dimensi dampak terdiri dari 5 subdimensi dan 16 indikator.

1) *Mempengaruhi kebijakan publik* menilai tingkat keaktifan dan keberhasilan MS dalam mempengaruhi kebijakan publik, misalnya dalam hal; kebijakan atas prioritas pembangunan wilayah, proses penyusunan anggaran, dan sebagainya. Indikator-indikatornya mencakup; tingkat pengaruh aktor-aktor MS dalam kebijakan publik.
2) *Akuntabilitas Negara dan Pasar* menilai kemampuan aktor-aktor MS memantau sektor negara dan pasar, dan mendorong sektor-sektor itu lebih bertanggung-gugat. Indikator-indikatornya mencakup; sejauhmana aktor-aktor MS mendesakkan terwujudnya tanggung jawab Negara dan Pasar.
3) *Respon terhadap kepentingan sosial* menilai efektifitas OMS sebagai "wakil" atau "artikulator" dari kepentingan publik. Indikator-indikatornya mencakup; sejauhmana aktor-aktor masyarakat sipil memberikan tanggapan terhadap isu-isu sosial yang berkembang, dan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap aktor-aktor MS.
4) *Pemberdayaan warga negara* yaitu dengan menilai peran MS dalam memperbesar/memperluas "pilihan-pilihan" yang bisa diambil warga negara, sekaligus dalam meningkatkan kapasitas warga negara dalam melakukan kontrol atas keputusan (atau kebijakan) publik yang berdampak terhadap kehidupan mereka.

Indikator-indikatornya mencakup; memberikan informasi/ mendidik warga negara, membangun kapasitas untuk aksi bersama, memberdayakan masyarakat terpinggirkan, memberdayakan perempuan, membangun modal sosial, mendorong penyediaan lapangan pekerjaan.

5) *Pemenuhan kebutuhan sosial* yaitu dengan menilai peran MS dalam berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak dari, terutama, kelompok miskin dan masyarakat yang terpinggirkan atau termarjinalisasikan. Aspek bahasan dalam sub dimensi ini mencakup kinerja MS untuk memenuhi kebutuhan dasar secara langsung (memberi pelayanan langsung pada rakyat yang miskin atau terpinggirkan), dan untuk melobby pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan sosial. Indikator-indikatornya mencakup; melakukan lobby untuk penyediaan pelayanan dasar, memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak secara langsung, dan memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok terpinggirkan.

2.3. Langkah-Langkah Pokok Pengukuran IMS

Langkah-langkah pokok pengukuran IMS di kabupaten terdiri dari:

1. Pendefinisian Masyarakat Sipil: membahas tentang apa itu masyarakat sipil, ditinjau dari realitas keberagaman aksi-aksi warga negara dan berbagai kelompok masyarakat yang ada saat ini di sebuah wilayah.
2. Menyepakati alat analisis: merupakan ulasan dan kesepakatan terhadap substansi intan masyarakat sipil (dimensi, subdimensi, dan indikator-indikator pengukuran di tiap dimensi) yang menjadi basis atas idealisasi fungsi dan peran-peran masyarakat sipil — atau visi ideal yang dikembangkan bersama tentang masyarakat sipil.
3. Melakukan penilaian: atas status masyarakat sipil saat ini dibandingkan dengan visi ideal yang diharapkan dari masyarakat sipil (menilai realitas masyarakat sipil melalui penilaian individual atas tiap-tiap indikator yang disepakati). Sebelum penilaian, ada presentasi hasil riset tentang kondisi masyarakat sipil kabupaten dalam berbagai indikator-indikator IMS. Hasil riset tersebut

diharapkan dapat menyediakan informasi tambahan bagi peserta dalam melakukan penilaian.

4. Mendiskusikan hasil penilaian: menginterpretasikan (memberi makna) atas skor hasil penilaian, memberi contoh dan menyimpulkan status atau tingkat kesehatan masyarakat sipil saat ini.
5. Merumuskan rekomendasi agenda utama: menyepakati agenda-agenda utama yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan status atau "menyehatkan" masyarakat sipil.

PENILAIAN DAN INTERPRETASI

Setelah terjadi kesepakatan atas alat analisis dan indikator-indikator yang cocok untuk wilayah kabupaten tertentu, tiap-tiap peserta akan diminta untuk menilai indikator-indikator tersebut, atas dasar pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya dan pengalaman-pengalaman pribadinya. Dengan kata lain, landasan penilaian tiap peserta memang berdasarkan persepsi dia atas pernyataan/kondisi yang tertera dalam indikator. Sebelum melakukan penilaian, peserta perlu mengetahui tentang bentuk hasil akhir Indeks Masyarakat Sipil. Ujung dari proses menilai status atau tingkat "kesehatan" masyarakat sipil dengan Indeks ini adalah kelahiran beberapa "angka", yang muncul dari agregat penilaian individual peserta atas "kesehatan" masyarakat sipil saat ini. Pengalaman implementasi Indeks dengan 4 skala (0, 1, 2 dan 3 - atau 1, 2, 3, dan 4) memunculkan adanya empat selang; masing-masing selang memiliki lebar 0,75 (yang diperoleh dari 3 dikurang 0 dan dibagi 4, atau 4 dikurang 1 dan dibagi 4); dengan pemaknaan sebagai berikut:

- 0 - 0,75 atau 1,00 - 1,75 = sakit
- 0,76 - 1,50 atau 1,76 - 2,50 = kurang sehat
- 1,51 - 2,25 atau 2,51 - 3,25 = cukup sehat
- 2,26 - 3 atau 3,26 - 4 = sehat

Untuk melakukan penilaian, panitia dan fasilitator akan membagikan sebuah lembar penilaian, yang merupakan hasil diskusi

dan kesepakatan peserta atas indikator-indikator IMS (indikator-indikator yang dipilih oleh peserta untuk menganalisis status masyarakat sipil di wilayahnya). Cara menilai adalah membubuhkan tanda di atas skor sebuah indikator yang dianggap sesuai atau mencerminkan kondisi saat ini. Metoda yang digunakan untuk perolehan akhir nilai di tiap subdimensi dan dimensi dilakukan dengan matematika sederhana, penjumlahan dan pembagian untuk mendapat nilai rata-rata. Proses *entry* data, tabulasi dan penghitungan bisa dilakukan dengan memanfaatkan program database khusus pada program Microsoft Excel. Setelah proses penilaian dan pengolahan data diselesaikan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis, mendiskusikan, dan melakukan refleksi atas hasil penilaian peserta di tiap dimensi dan subdimensi, dilanjutkan dengan menyusun rekomendasi untuk tiap-tiap subdimensi dan dimensi. Selang dan pemaknaan atas selang yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya, dan tabel-tabel hasil penilaian yang berisi nilai rataan untuk tiap-tiap indikator, serta tingkat konsensus akan sangat membantu peserta untuk memulai pembahasan dalam rangka menginterpretasikan hasil dan merumuskan rekomendasi tersebut. Proses menginterpretasikan hasil penilaian dan merumuskan rekomendasi dapat dilakukan dengan diskusi kelompok berdasarkan dimensi. Sejumlah peserta berkumpul dan secara khusus melakukan sharing, refleksi, analisis, sekaligus mendiskusikan dan memberikan rekomendasi untuk masing-masing dimensi yang dibahasnya, untuk kemudian disampaikan dalam pleno. Sama halnya dengan ketika mendiskusikan alat analisis dan indikator, pleno bermanfaat untuk mencari kesepakatan semua peserta terhadap hasil diskusi kelompok serta melengkapi interpretasi dan rekomendasi-rekomendasi yang disusun.

Bagian Kedua

2

Perspektif Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Kabupaten Kupang
3. Kabupaten Sumba Timur
4. Kabupaten Sumba Barat
5. Kabupaten Dompu
6. Kabupaten Bima
7. Kabupaten Lombok Tengah
8. Kabupaten Lombok Barat
9. Kabupaten Buton Utara
10. Kota Baubau
11. Kabupaten Buton
12. Kabupaten Muna
13. Kabupaten Gowa
14. Kabupaten Takalar
15. Kabupaten Jeneponto
16. Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, kabupaten ini berada di $124,49^0$ – $124,09^0$ Bujur Timur dan $9,26^0$ – $10,10^0$ Lintang Selatan. Luas wilayah sebesar 3.947,00 Km^2 dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Timor Tengah Utara
- Sebelah Selatan : Laut Timor
- Sebelah Barat : Kabupaten Kupang
- Sebelah Timur : Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan sementara berjumlah 440.470 jiwa, yang terdiri atas perempuan 222.455 jiwa dan laki-laki 218.015 jiwa. Bila dikaitkan dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk di Kabupaten ini sebanyak 112 jiwa per kilo meter persegi.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan

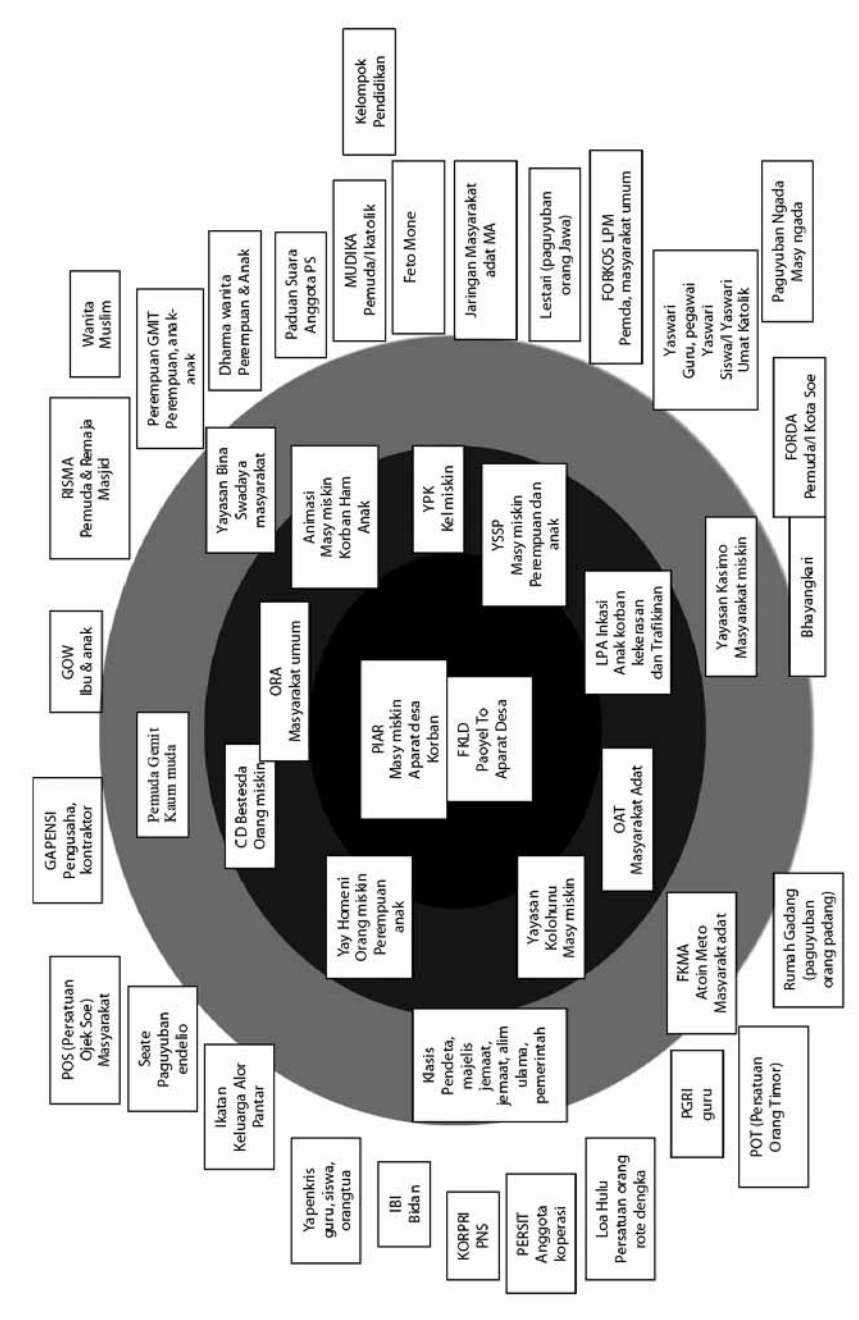
Peta organisasi masyarakat sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang disajikan dalam buku ini adalah hasil pemetaan yang dilakukan pada tahun 2009. Menurut para peserta diskusi terfokus, telah teridentifikasi 40 organisasi masyarakat sipil (OMS) di Timor Tengah Selatan. Jumlah tersebut terbagi dalam 5 (lima) kategori OMS yaitu: organisasi keagamaan sebanyak 7 OMS, kelompok gerakan sosial sebanyak 15 OMS, Forum/ jaringan/ koalisi/ perkumpulan sebanyak 3 OMS, kelompok tradisional berbasiskan suku dan etnis sebanyak 7 OMS,

dan organisasi berbasis anggota seperti organisasi profesi, kelompok representasional, kelompok sosial-budaya, dan kelompok swadaya masyarakat sebanyak 8 OMS. Apabila dilihat dari tingkat pengaruh, terdapat 2 organisasi yang masuk dalam kategori **sangat berpengaruh**, yaitu YSSP dan PIAR. Kedua OMS ini cukup banyak berkiprah pada isu-isu advokasi hak-hak dasar perempuan. Sementara itu, 8 OMS lain yang diidentifikasi berpengaruh di Kabupaten Timor Tengah Selatan ialah OAT, ORA, ANIMASI, Pemuda GMIT, KLASIS, Kolohunu, YPK dan CD Bethesda.

Ditinjau dari kelompok atau konstituen yang diwakili, OMS-OMS yang bekerja di Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini bekerja untuk atau mewakili kelompok perempuan, pemuda (Islam, Kristen, Katolik), remaja, masyarakat umum, kaum miskin, korban (KDRT, *traficking*, pelanggaran HAM), guru, pegawai yayasan, petani, aparat desa, masyarakat adat, masyarakat se-suku, pengusaha, tukang ojek, dan ibu-ibu polisi / PNS. Dari hasil pemetaan OMS, ditemukan sejumlah kelompok rentan yang belum terwakili oleh OMS di TTS. Kelompok rentan tersebut ialah kelompok cacat, waria, kelompok HIV/AIDS, kelompok PSK dan kelompok PKL (Pedagang Kaki Lima). Beberapa alasan yang dikemukakan terkait dengan belum didampinginya kelompok rentan tersebut adalah LSM-LSM di TTS sudah mempunyai fokus program lain. Selain itu, belum ada SDM yang memadai juga menjadi alasan mengapa kurang perhatian pada isu kelompok rentan.

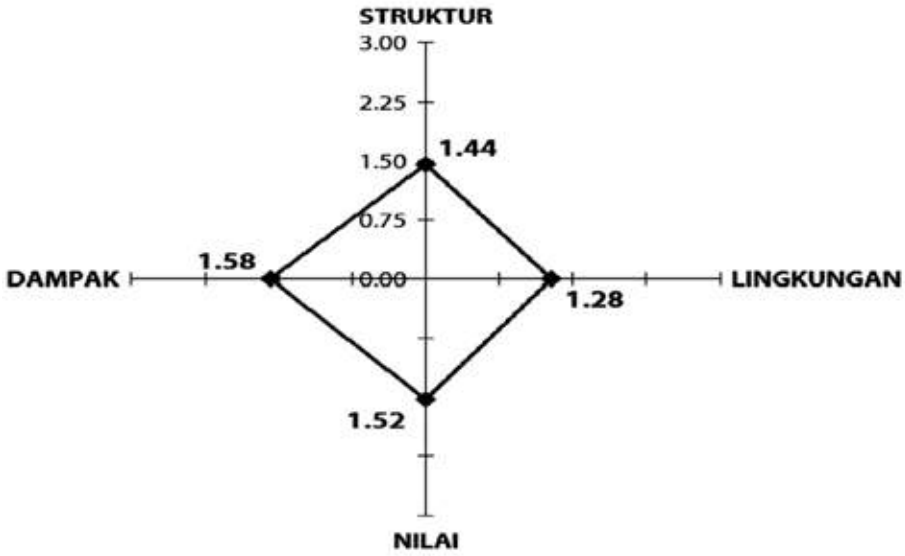
Kekuatan sosial masyarakat sipil terlihat dari kedekatan relasi yang terbangun di antara aktor-aktor masyarakat sipil. Peserta pemetaan OMS menetapkan relasi di antara mereka sebagai “sangat dekat” dan “dekat” serta mengidentifikasi penggerak/simpul komunikasi dalam setiap kelompok relasi. Ada empat kelompok OMS dari relasi “sangat dekat” ialah YSSP,PIAR, FKLD Palil To dan Dharma Wanita. Sementara dari kategori relasi “dekat” adalah YPK, Animasi, OAT, Haumeni, Klasis, Perempuan GMIT, Pemuda GMIT, CD Bethesda, ORA, Forum LPM dan POS. Menurut analisis peserta pemetaan OMS, terdapat beberapa alasan dasar dalam membangun relasi OMS karena persamaan isu dan lembaga funding serta merupakan organisasi bentukan hasil program OMS.

Diagram 2 Peta OMS di Kabupaten TTS terhadap TKLD Tahun 2009



Peserta juga melakukan pemetaan kekuatan OMS dalam isu tata kepemerintahan lokal demokratis (TKLD), hasilnya berbentuk Diagram Venn di atas. Lingkaran pusat atau lingkaran terdalam menunjukkan wilayah kerja/agenda perubahan utama kabupaten untuk mendorong TKLD. Beberapa OMS yang teridentifikasi telah bekerja pada wilayah ini adalah PIAR. Dari hasil pemetaan masyarakat sipil di Kabupaten TTS, beberapa OMS yang teridentifikasi dalam agenda perubahan utama kabupaten untuk program Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD) adalah PIAR, organisasi ini berada di jantung MS yang bergerak di isu TKLD. PIAR dengan organisasi yang telah dibentuknya yaitu FKLD (Forum Komunikasi Lintas Desa) dan forum warganya, gencar mengadvokasikan isu-isu yang terkait dengan TKLD seperti misalnya bersama SSP mengadvokasi anggaran fasilitas dan saranan kesehatan untuk perempuan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan (Perda KDRT dan Pergub PUI), advokasi perda partisipasi warga dalam musrembangdus dan musrembangdes. Advokasi SOP pelayanan anak dan perempuan di polisi, kejaksaan, dan rumah sakit, juga advokasi transparansi APBD.

Status Masyarakat Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan



Grafik 1 Intan IMS Kabupaten TTS

Pada Grafik 1 tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kondisi masyarakat sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2009 dinilai cukup. Hal ini ditunjukkan oleh hasil skor IMS di semua dimensi berada pada kategori cukup baik, yaitu Dimensi Struktur (1,44), skor Dimensi Lingkungan (1,28), skor Dimensi Nilai (1,52) dan skor Dimensi Dampak (1,58). Adapun gambaran masing-masing dimensi dapat dijelaskan berikut ini.

Aset-aset utama masyarakat sipil yang bekerja di Kabupaten Timor Tengah Selatan:

Dimensi Struktur

Relasi aktor-aktor masyarakat sipil di Kabupaten TTS sangat baik dalam kerja sama yang ditimbulkan dari rasa kepedulian dan solidaritas tinggi terhadap isu sosial.

Dimensi Lingkungan

Masyarakat sipil/OMS di Kabupaten TTS dalam berinteraksi satu sama lain tanpa memandang suku, agama maupun RAS yang merupakan konteks budaya mereka yang harus dijunjung tinggi.

Dimensi Nilai

Ruang-ruang OMS yang mempromosikan anti kekerasan menjadi aset arena Masyarakat Sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menangulangi masalah kekerasan.

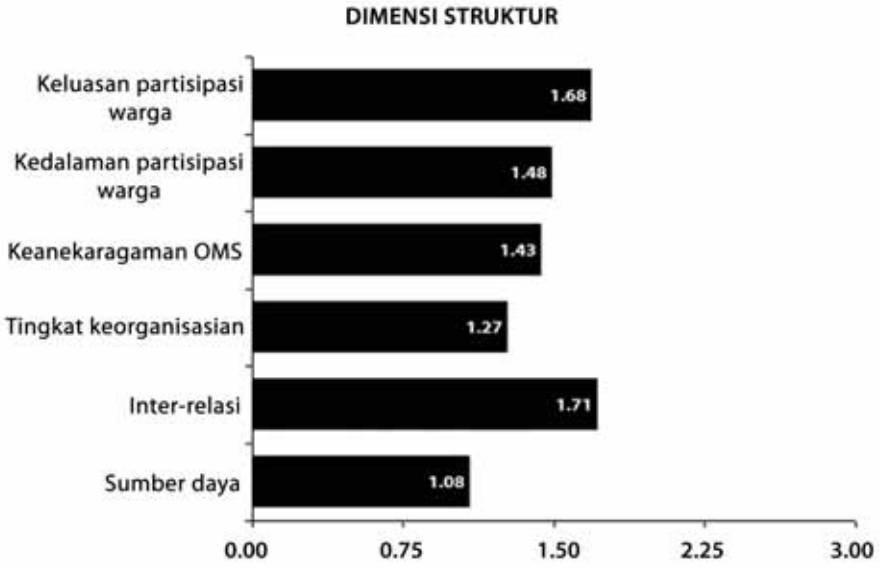
Dimensi Dampak

Organisasi masyarakat sipil / masyarakat sipil cukup tanggap terhadap kepentingan sosial warga seperti isu perempuan, HIV/AIDS.

DIMENSI STRUKTUR

Hasil pengukuran Indeks Masyarakat Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 menunjukkan kondisi masyarakat sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Dimensi Struktur memperoleh nilai buruk (1,44). Ada empat subdimensi yang berkontribusi pada cukup baiknya nilai Dimensi Struktur, dimana keempat subdimensi ini memperoleh skor cukup baik yaitu, subdimensi relasi antar aktor-aktor masyarakat sipil (1,71), subdimensi keluasan partisipasi warga (1,68); subdimensi kedalaman partisipasi warga (1,48). Sedangkan subdimensi yang

mempunyai kategori rendah dan memerlukan perhatian khusus yaitu, keanekaragaman MS (1,43), subdimensi tingkat organisasi (1,27) dan subdimensi sumber daya (1,08).



Skor tertinggi Dimensi Struktur ialah Subdimensi Relasi Antar Aktor-Aktor Masyarakat Sipil. Subdimensi ini memperoleh nilai cukup baik dengan skor yang paling tinggi dibandingkan empat subdimensi lainnya. Tingginya nilai subdimensi ini dikontribusi oleh kedua indikatornya, yaitu kerja sama (1,73) dan komunikasi (1,70) mendapatkan skor cukup baik. Kondisi cukup baik subdimensi ini dikontribusi oleh kerja sama yang ditimbulkan dari rasa kepedulian dan solidaritas tinggi terhadap isu bencana alam. Isu tersebut menjadi ancaman masyarakat sehingga mereka dituntut untuk bekerjasama, misalnya bekerjasama pada bencana. Selain itu, ada kesadaran yang timbul dalam diri masyarakat yang terpanggil untuk memberikan informasi kepada sesama, misalnya informasi terkait dengan penyakit diare di Bena yang disebabkan oleh keracunan es di Bena. Komunikasi umumnya dilakukan melalui surat dan telepon, pada saat pertemuan dan kegiatan pelatihan. Namun sayangnya komunikasi yang dilakukan masih terbatas jika ada kebutuhan bersama.

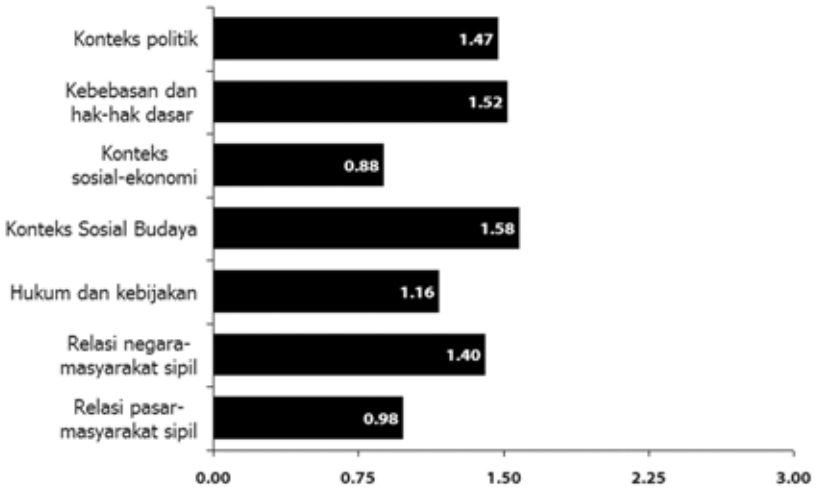
Skor terendah di Dimensi Struktur ialah Subdimensi Sumber Daya (1,08). Pada indikator sumber daya (1,15) berada pada kondisi kurang. Kondisi ini dikontribusi oleh masih kurangnya sumber daya manusia yang disebabkan karena kurangnya keterampilan khusus dan rendahnya tingkat

pendidikan. Selain itu, pada indikator kemampuan OMS menggali sumber daya (1,10) berada pada kurang baik, namun skornya berada pada selang yang rendah untuk kategori ini. Beberapa hal yang berkontribusi pada rendahnya skor indikator ini adalah dalam segi finansial karena belum mempunyai kemampuan untuk menggali sumber daya dari anggota sehingga kondisi sosial ekonomi anggota OMS yang tidak mendukung. Sebagian besar OMS yang sumber dayanya tergantung pada lembaga donor, kecuali organisasi adat dan keagamaan serta kelompok-kelompok pemberdayaan yang mendapatkan sumber daya dari iuran anggota.

Rekomendasi untuk merespon temuan dalam dimensi struktur sebagai berikut:

- Membutuhkan organisasi payung (ALIANSI, JARINGAN) sehingga dapat merespon isu-isu yang menjadi perhatian bersama atau keberadaan organisasi payung disosialisasikan secara luas.
- Strategi-strategi utama yang harus didorong untuk memperbaiki indikator-indikator yang kurang.
  - Penguatan kapasitas aktor-aktor organisasi masyarakat sipil lewat pelatihan-pelatihan.
  - Mensosialisasikan OMS lewat media cetak dan elektronik.
  - Membangun kerjasama dan komunikasi antar OMS.
  - Membangun kerjasama OMS dengan Pemerintah.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi lingkungan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukan kategori buruk dengan skor 1,28. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan lingkungan dalam aktifitas OMS kurang memberikan dukungan positif bagi organisasi masyarakat sipil (OMS)/masyarakat sipil (MS) sebagai ruang interaksi antara nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dengan berbagai kepentingan. Namun masih ada kekuatan yang cukup memberi kontribusi positif sebagai asset masyarakat sipil dan organisasi sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni konteks sosial budaya (1,58) dan kebebasan atas hak-hak dasar (1,52). Selain itu beberapa indikator yang masih perhatian khusus ialah konteks politik (1,47), relasi antara negara-masyarakat sipil (1,40), hukum dan kebijakan (1,16), relasi pasar-masyarakat sipil (0,98) dan indikator yang mempunyai nilai terrendah ialah konteks sosial ekonomi (0,88).

Konteks sosial budaya OMS/MS Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum menunjukan cukup berkontribusi positif dengan nilai antara 1,58 sampai 1,84. Toleransi (1,84) sudah merupakan budaya bagi masyarakat sipil/OMS dalam berinteraksi satu sama lain tanpa memandang suku, agama maupun RAS. Hal ini ditunjukkan pada aktifitas perayaan hari-hari raya agama Islam (Idul Fitri), tokoh-tokoh Islam, Protestan maupun Katolik saling berkoordinasi untuk menjamin keamanan hari-hari raya dengan terlibat sebagai panitia sekaligus bersilaturahmi. Setiap

proses-proses tersebut, perempuan lebih banyak terlibat aktif dan lebih cepat jika dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan menganggap proses-proses tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa pamrih.

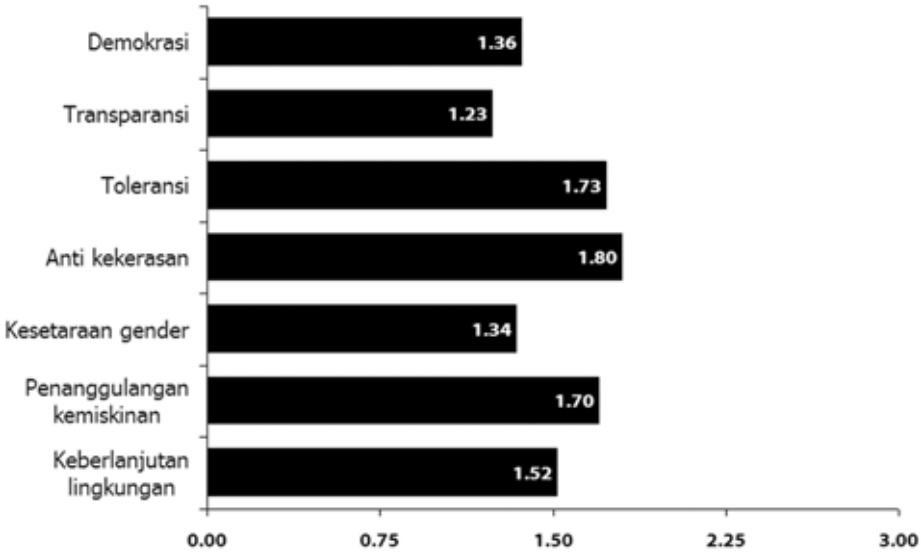
Selain itu, Subdimensi yang memiliki kategori rendah ialah Konteks sosial ekonomi (0,88). Hal ini masih beredarnya Sistem ijon di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih sangat tinggi sehingga merugikan masyarakat. Contohnya, hasil tanaman ekonomi produktif misalnya sayur-mayur, jeruk, bawang, sudah dibeli sebelum hasil panen. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pendidikan anak, kesehatan keluarga sehingga menjual hasil sebelum panen. Selain itu juga budaya pemborosan (urusan adat) yang mendesak sehingga masyarakat menjual hasilnya sebelum panen. Pendapatan keluarga sebagian besar di TTS berkisar 20.000- 30.000 ribu perminggu. Selain itu bantuan BLT yang dibantu oleh pemerintah sering disalahgunakan oleh kaum laki-laki misalnya dipakai untuk mabuk-mabukan. Disisi lain bantuan pemerintah bersifat sementara dan orientasinya proyek sehingga tidak ada keberlanjutannya.

Rekomendasi untuk merespon temuan dalam dimensi lingkungan sebagai berikut:

Berdasarkan potensi dan persoalan yang ada, maka ada beberapa solusi yang perlu dilakukan oleh OMS yakni:

- OMS perlu mendorong Program pemerintah agar program-program sesuai kebutuhan dan tepat saran (yang berhak menerima) dengan memanfaatkan proses Musrenbang sekaligus mengontrol dan mengkritisi mulai dari proses Musrenbang sampai pada proses penganggaran ditingkat kabupaten. OMS bekerjasama dengan pemerintah untuk BIMTEK kepada LPM di desa dan kelurahan dengan metode P3MD Plus Penganggaran.
- OMS perlu melakukan pendampingan bagi kelompok anak usia sekolah melalui program pendidikan usia sekolah dalam rangka mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi yang menimbulkan kemiskinan (buta aksara, menekan angka pekerja anak dibawah umur)
- OMS perlu mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan (peraturan Bupati) agar menghilangkan sistem ijon sekaligus melakukan pendampingan dan pelatihan bagi kelompok tani.

DIMENSI NILAI



Dimensi Nilai di Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapat skor 1,52 yang artinya cukup. Skor yang paling tinggi berkontribusi cukup yaitu pada subdimensi anti kekerasan (1,80). Selain itu subdimensi yang lain juga berkontribusi dalam dimensi nilai ialah subdimensi toleransi (1,73), subdimensi penanggulangan kemiskinan (1,70), subdimensi keberlanjutan lingkungan (1,52), subdimensi demokrasi (1,36), dan subdimensi kesetaraan gender (1,34). Ada satu indikator yang membutuhkan perhatian yang serius ialah subdimensi transparansi (1,23).

Ruang-ruang OMS yang mempromosikan anti kekerasan menjadi aset arena Masyarakat Sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menangulangi masalah kekerasan. Banyak OMS yang aktif mempromosikan anti kekerasan seperti SSP, Plan Nasional, Toga (Lewat khutbah digereja maupun masjid), lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) dan Pers. Dampak dari promosi anti kekerasan oleh OMS di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah persoalan kekerasan antar OMS maupun OMS dan Pemerintah sangat minim sekali. Terakhir persoalan kekerasan terjadi pada tahun 2007, ketika masyarakat menuntut pemerintah menyelesaikan kasus pertambangan (marmer). Kasus ini terjadi karena pemerintah merebut hak-hak masyarakat. Dampak dari konflik tersebut (antara MS dan Perusahaan) ada yang terluka, karena aksi tersebut

beberapa OMS di Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan protes. Jadi terkadang cara kekerasan dimanfaatkan karena hak-hak MS yang paling dasar direbut. Alasan lain sehingga konflik antar OMS hampir tidak pernah terjadi di Soe karena orang TTS tidak suka konflik, dan jika sampai terjadi konflik maka ada aturan adat yang akan menngatur konflik tersebut.

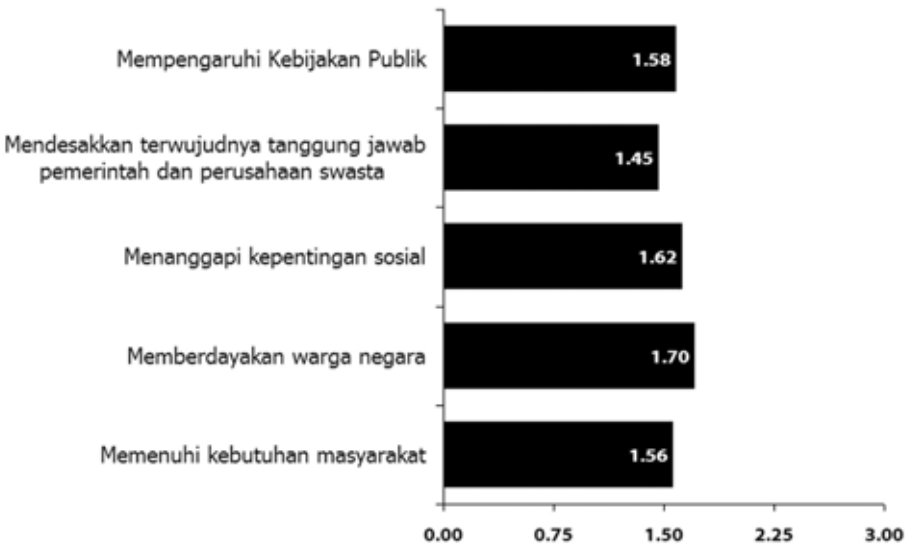
Pada subdimensi transparansi merupakan subdimensi dengan kategori buruk dengan skor 1,23. Di Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Selatan para aktor MS kurang mempromosikan transparansi karena ada satu budaya TTS yakni **"uwa ba kuba"** yakni ketika berbicara untuk menegur orang bukan dilakukan secara langsung tetapi melalui bahasa-bahasa sindiran sehingga butuh waktu untk perenungan dan diduga sulit untuk berbicara tentang transparansi. Pada kegiatan-kegiatan (seminar, lokakarya),masyarakat sipil dapat mempromosikan transparansi tapi pada tataran konsepnya saja, karena hal tersebut tidak diikuti pada tataran implementasi, masyarakat TTS juga tidak biasa berbicara *"to the point"* jadi ketika mau mengkritik seseorang bahasa yang digunakan tidak langsung tetapi masih berputar-putar jadi masih sulit untuk masyarakat TTS bisa transparan. Pada indikator transparansi keuangan, semua peserta lokakarya IMS tahun 2009 mengatakan pentingnya transparansi tetapi dalam penilaian dapat dilihat bahwa nilai tersebut sangat kurang yakni 0,76, namun walaupun transparansi yang kurang tetapi korupsi di arena OMS minim (atau karena tidak terungkap). Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya pengawasan dari organisasi itu sendiri sehingga bisa terjadi, misalnya bantuan-bantuan berupa material yang tidak terdistribusi dengan baik ke OMS.

Rekomendasi untuk merespon temuan dalam dimensi nilai sebagai berikut:

- Pendampingan yang aktif dari OMS terhadap anggota masyarakat yang mendapat bantuan sehingga bertanggungjawab untuk mengembalikan bantuan tersebut agar dapat di gulirkan.
- Perlu ada sanksi bagi MS yang melanggar aturan dalam mengelola bantuan (tertuang dalam MoU).
- Laporan pertanggungjawaban dari OMS harus di publikasi melalui media cetak dan elekronik.

- OMS, pemerintah bertanggung jawab dalam mempromosikan transparansi dalam berbagai bentuk, jenjang, struktur dan parktek melalui diskusi-diskusi, lokakarya dan dialog-dialog.
- Kesadaran dan tindakan untuk mempromosikan nilai anti kekerasan oleh Masyarakat Sipil yang harus dicerminkan dalam sikap dan perilaku, dimulai dari keluarga, OMS maupun negara, dan ketika terjadi pelanggaran-pelanggran maka perlu ada penegakan hukum yang tegas.
- Perlu regulasi di tingkat desa, untuk antisipasi berbagai bentuk kekerasan ditingkat desa/kelurahan.
- Mendorong Pemerintah mengalokasikan dana bagi OMS-OMS yang mengkampanyekan anti kekerasan.

DIMENSI DAMPAK



Secara keseluruhan, kondisi MS di Kabupaten TTS tahun 2009 dalam dimensi dampak mendapatkan skor cukup (1,58). Subdimensi yang berkontribusi dalam dimensi dampak ialah pemberdayaan masyarakat yang memiliki skor tertinggi 1,70. Selain itu, subdimensi lainnya juga berkontribusi adalah respon terhadap kepentingan sosial (1,62),

subdimensi mempengaruhi kebijakan publik (1,58), subdimensi pemenuhan kebutuhan masyarakat (1,56). Subdimensi yang masih dianggap buruk adalah mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan swasta (1,45)

Subdimensi pemberdayaan masyarakat (1,70) dalam kategori paling baik karena cukup banyak jumlah OMS yang kemudian memberikan dukungan terhadap masyarakat miskin, dalam bentuk peningkatan ekonomi dan pemberian pengetahuan. Pemberdayaan masyarakat paling banyak di Kab.TTS ialah terkait pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan didorong untuk terlibat dalam berbagai kegiatan baik dalam bantuan modal maupun penguatan kapasitas. Salah satu contoh konkret keberhasilan pemberdayaan, ketika demo tambang marmer, banyak perempuan yang berada di depan, dan mereka berani menyatakan bahwa keberadaan perusahaan marmer tersebut merebut hak-hak dasar mereka untuk air bersih, dan lain-lain. Selain itu, ada kisah tentang lima orang perempuan yang sekarang terpilih menjadi legislatif semua pernah terlibat dalam OMS. Perempuan di Kabupaten TTS didorong untuk berorganisasi agar mampu menduduki posisi-posisi strategis di organisasi.

Pengambil kebijakan juga sekarang mulai berubah pemikirannya, dan mulai menyatakan bahwa perempuan juga berkemampuan. Dalam isu kekerasan terhadap perempuan, makin banyak perempuan yang berani mengadukan terjadinya kekerasan terhadap mereka dalam rumah tangga. Dalam bidang pendidikan, tutor untuk Keaksaraan Fungsional saat ini lebih banyak perempuan, ketika berkumpul di tingkat Kabupaten, lebih dari 60% tutor untuk Keaksaraan Fungsional adalah perempuan.

Dalam hal membangun modal sosial (1,76), aksi-aksi yang dilakukan oleh OMS misalnya kelompok masyarakat untuk membangun rumah (seperti arisan), dan proses pembuatan rumahnya pun dikerjakan secara bersama. Pernah ada kelompok yang kemudian bergotong-royong untuk membangun rumah bagi para janda, terutama bagi rumah-rumah yang tidak memenuhi standar sehat. Indiktor dukungan terhadap lapangan pekerjaan (1,70) dilakukan oleh OMS ketika para petani berkelompok dan kemudian membuka lahan untuk ditanami sehingga berproduksi dan memberikan penghasilan. OMS juga mengajak petani untuk mengelola hasil buminya menjadi bahan-bahan yang lebih tahan lama untuk dijual. Ada OMS yang mengenalkan teknologi pengolahan ubi keladi, yang kemudian sekarang bisa menjadi usaha masyarakat. Dalam hal

memberikan informasi dan mendidik warga negara (1,73), rata-rata LSM akan memiliki pertemuan-pertemuan reguler dengan kelompok dampingannya untuk mendiskusikan isu-isu seputar apa yang ada dikelompok, maupun isu-isu baru yang dianggap penting untuk ditransfer. Ada juga dilakukan studi banding, sehingga masyarakat bisa melihat langsung perkembangan di kelompok lain di wilayah lain. Ada pula OMS yang punya berbagai jenis media (radio komunitas, buletin, dan sebagainya), dimana masyarakat turut terlibat dalam hal mengisi acara dengan menceritakan kejadian-kejadian di masyarakat. Saat ini baru mau memulai untuk membuat daftar LSM/OMS yang bergerak di berbagai isu, apa yang dikerjakan,dan perkembangan pekerjaan mereka. Ini dilakukan agar masyarakat tahu kepada siapa mereka bisa meminta dukungan dengan lebih jelas.

Dalam hal membangun kapasitas untuk aksi bersama (1,73), SSP misalnya menggerakkan peringatan hari AIDS nusantara, dengan melakukan gerakan 1,000 lilin, yang sebelumnya dimulai dengan lomba-lomba. Memang tidak semua aksi-aksi bersama yang digerakkan oleh MS yang memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Ada juga aksi-aksi bersama yang ditujukan untuk proses pemenangan calon-calon tertentu di Pemilu, yang sebenarnya juga diorganisir dengan cukup baik. Dalam hal memberdayakan masyarakat terpinggirkan (1,55), hampir semua OMS di Kabupaten TTS menyasar pada masyarakat marginal dalam hal ini kaum miskin. Program-progam yang dicanangkan pun sebenarnya ditujukan untuk pemberdayaan rakyat marginal (miskin) seperti terasering, peningkatan ekonomi rumah tangga, padat karya, pangan, dll. Selain hal tersebut pemberdayaan kaum terpinggirkan ini juga dilakukan melalui peningkatan pengetahuan mereka untuk meningkatkan posisi tawar.

Feodalisme memberikan pengaruh terhadap rendahnya keberanian OMS untuk melakukan desakan-desakan terhadap negara dan pengusaha. Misal, kasus marmer di Fatumnasi, ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga terjadi benturan antara keduanya. Hal ini terjadi karena yang berkuasa (ketua adat yang punya pengaruh meluas) kemudian didekati oleh pengusaha marmer dan aparatur pemerintah yang menginginkan adanya perusahaan marmer. Terjadilah manipulasi budaya untuk kebutuhan perusahaan marmer. Disisi lain, bergerak sendiri juga menyebabkan kendala dalam hal sumber daya (terbatas sumber pendanaan untuk melakukan aksi berkaitan dengan mendesak tanggung-jawab). Hal lain lagi adalah masih kurangnya pengetahuan sebagian besar OMS dalam hal dasar-dasar hukum yang bisa dimanfaatkan untuk menuntut/ mempertanyakan kebijakan dan praktek kebijakan negara dan pasar.

Rekomendasi untuk merespon temuan dalam dimensi dampak sebagai berikut:

- Membangun komunikasi dan sharing diantara OMS yang lebih sering dan lebih reguler, sehingga bisa mencari strategi bersama untuk proses-proses pemberdayaan warga yang lebih baik dan terintegrasi.
- Memberikan kesempatan kepada berbagai OMS untuk bisa melakukan studi banding/magang, bahkan didalam Kabupaten sendiri juga, sehingga bisa menggerakkan kreatifitas untuk mengembangkan hal-hal baru.
- Masih terus dibutuhkan proses-proses meningkatkan pengetahuan dan kebijakan-kebijakan masyarakat untuk mengenali lingkungannya dan mencari solusi atas persoalan-persoalannya.
- OMS masih membutuhkan penguatan kapasitas dalam hal "berkomunikasi" dan melobby pihak lain, termasuk dalam hal pembekalan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi isu tertentu.

Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tengggara Timur mencakup wilayah seluas 53.958,28 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 7.178,28 km² dan wilayah laut seluas 46 780 km² dengan garis pantai kurang lebih 492,4 km. Kabupaten ini memiliki 27 pulau, di mana 18 pulau di antaranya telah bernama dan 9 pulau belum diberi nama. Saat ini ada 5 pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Timor, Pulau Sabu, Pulau Semau, Pulau Raijua, dan Pulau Kera.

Ditinjau secara geografis, posisi Kabupaten Kupang berada pada 121°30’ - 124°11’ BT dan 9°19’ - 10°.57’ LS, dengan batas–batas wilayahnya:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sawu, Selat Ombai.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten TTS dan Ambeno/ Timor Leste.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Rote Ndao dan Laut Sawu.

Data Kabupaten Kupang dalam Angka 2009 menyebutkan wilayah administratif kabupaten ini terbagi ke dalam 29 kecamatan dan 240 desa/ kelurahan. Jumlah penduduk kabupaten pada tahun 2008 sebanyak 383.896 jiwa yang terdiri dari 193.180 laki-laki dan 190.716 perempuan. Wilayah Kabupaten Kupang sangat luas jika dibandingkan dengan jumlah

penduduknya. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 65 orang/km², dengan kepadatan tertinggi antara 250-280 orang/km² hanya di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, Raijua, dan Hawu Mehara. Sementara sebagian besar kecamatan memiliki kepadatan penduduk kurang dari 100/km²

Kabupaten ini cukup rawan terjadi bencana, seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran, angin topan, daerah aliran sungai. Wilayah rawan bencana terdapat di 11 kecamatan.

Jumlah Penduduk tahun 2008[1]	Total jumlah penduduk = 383.896 jiwa Total jumlah laki-laki = 193.180 jiwa Total jumlah perempuan = 190.716 jiwa
Komposisi anggota DPRD Kabupaten Kupang hasil Pemilu 2009[2]	35 orang dari 11 partai politik, terdiri dari: • Partai Hati Nurani Rakyat = 4 orang • Partai Karya Peduli Bangsa = 2 orang • Partai Gerakan Indonesia Raya= 2 orang • Partai Karya Perjuangan = 3 orang • Partai Demokrasi Kebangsaan = 1 orang

Peta Organisasi Masyarakat Sipil Kabupaten Kupang

Pemetaan OMS dihasilkan melalui sebuah diskusi kelompok terfokus yang diikuti oleh OMS yang bekerja di Kabupaten Kupang. Menurut peserta terdapat 6 kategori OMS yang bekerja di Kabupaten Kupang, yaitu organisasi keagamaan, kelompok gerakan sosial, forum/jaringan/koalisi/perkumpulan, kelompok tradisional berbasis suku dan etnis, organisasi berbasis anggota seperti organisasi profesi, kelompok representasional (kelompok sosial-budaya dan kelompok swadaya), dan kelompok pemuda. Pada proses pemetaan OMS, cukup banyak OMS dalam kelompok gerakan sosial yang teridentifikasi. Selain itu juga cukup banyak jaringan-jaringan berbasiskan isu yang dibentuk oleh OMS seperti

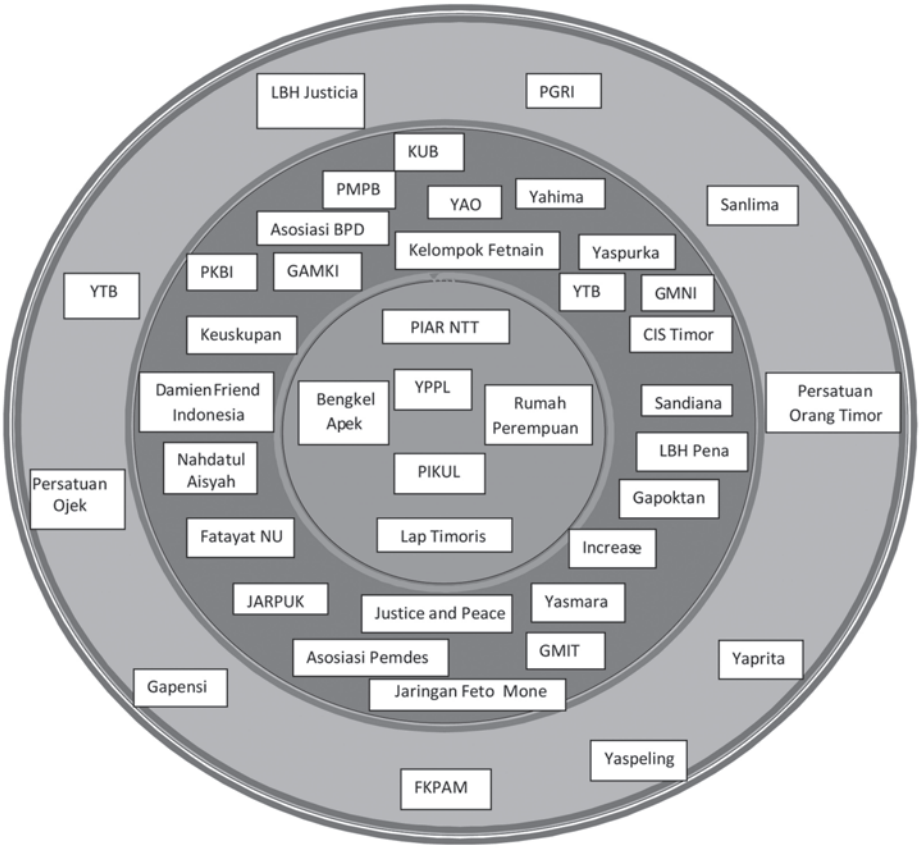
[1] Data dari Kabupaten Kupang dalam Angka 2009.
[2] http://www.kab-kupang.go.id/dprd/web/dprdkab/index.php?mod=partai

Blok Politik Masyarakat Sipil NTT, Forum Kemanusiaan Timor Barat, Aliansi Anti Korupsi NTT, Konsorsium Pembangunan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT), Forum DAS NTT, Forum Flobamora, Jaringan Masyarakat Adat NTT, Asosiasi Pemdes dan BPD, Forum Perlindungan Pekerja Terburuk NTT, Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT). Beberapa isu yang menjadi fokus kerja OMS adalah pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak-hak anak dan hak para pengungsi (eks Timor-Timur), pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan, advokasi kebijakan, perdagangan perempuan, bantuan hukum terhadap kasus hak atas tanah dan hak masyarakat adat, dan tata pemerintahan lokal yang demokratis. Pada isu terakhir mencakup perlindungan hak-hak dasar, kesetaraan gender, penguatan pemerintah desa, pemantauan korupsi, dan partisipasi politik perempuan.

Ditinjau dari kelompok atau konstituen yang diwakili, OMS-OMS yang bekerja di Kabupaten Kupang saat ini bekerja untuk atau mewakili kelompok perempuan, pemuda (Islam, Kristen, Katolik), remaja, kaum miskin, masyarakat umum, korban (KDRT, *trafficking*, pelanggaran HAM), PSK, ODHA, guru, petani, aparat desa, masyarakat adat, masyarakat se-suku, pengusaha, tukang ojek, dan anak jalanan. Saat ini masih ada kelompok rentan yang belum terwakili oleh OMS di Kupang yaitu kelompok buruh. Menurut peserta pemetaan OMS, sebenarnya ada beberapa OMS yang mencoba merespon isu tentang buruh (migran) jika persoalan ini muncul. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi alasan mengapa kurang perhatian pada isu buruh.

Bidang-bidang kerja yang dijalankan oleh OMS-OMS untuk Kabupaten Kupang antara lain melakukan penguatan/pemberdayaan masyarakat, pendidikan (pemberantasan buta aksara, anak putus sekolah, politik dan demokrasi), menyediakan informasi, menyediakan layanan kesehatan (KIA, kesehatan reproduksi, HIV/Aids, kesehatan lingkungan, PMT, PMS, dll.), menyediakan kebutuhan mendesak masyarakat (air bersih, pos gizi, dll.), kredit mikro, dan advokasi.

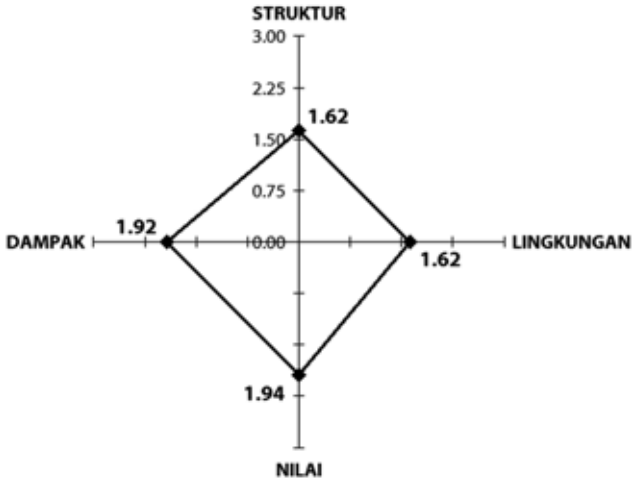
Diagram 3. Peta OMS di Kabupaten Kupang terhadap TKLD Tahun 2009



Kekuatan sosial masyarakat sipil Kabupaten Kupang terlihat dari kedekatan relasi yang terbangun di antara aktor-aktor masyarakat sipil. Peserta pemetaan OMS menetapkan relasi di antara mereka sebagai "sangat dekat" dan "dekat" serta mengidentifikasi penggerak/simpul komunikasi dalam setiap kelompok relasi tersebut. Ada tiga kelompok OMS dalam relasi "sangat dekat" yaitu (1) Keuskupan Agung Kupang, KUB, DFI dan Justice and Peace KAK; (2) Sinode GMIT, CIS Timor, GMKI, YAO, Rumah Perempuan, PIAR; (3) PIKUL, CIS Timor, Rumah Perempuan, PMPB, Sanlima, Bengkel Appek, PIAR. Sementara dalam relasi "dekat" lembaga yang menjadi penggerak/simpul komunikasi adalah PKBI, Yasmara, Sanlima, YPPL, Asosiasi BPD, dan YTB. Menurut analisis peserta pemetaan OMS, terdapat beberapa dasar dalam membangun relasi OMS seperti kesamaan program dan isu, komitmen, struktur hirarki, kesamaan sumber dana, dan kedekatan emosional karena pertemanan.

Peserta juga melakukan pemetaan kekuatan OMS dalam isu tata kepemerintahan lokal demokratis (TKLD), hasilnya sebagaimana tertuang dalam bentuk diagram 3 di atas. Lingkaran pusat atau lingkaran terdalam menunjukkan wilayah kerja/agenda perubahan utama kabupaten untuk mendorong TKLD. Beberapa OMS yang teridentifikasi telah bekerja pada wilayah ini adalah PIAR, Bengkel Appek, Rumah Perempuan, YPPL, PIKUL, dan Lap Timoris. Lingkaran lainnya menunjukkan wilayah kerja yang tidak langsung berkaitan dengan isu TKLD.

Status Masyarakat Sipil Kabupaten Kupang



Grafik 2 Intan IMS Kabupaten Kupang

Diagram di atas merupakan Intan yang merepresentasikan kondisi masyarakat sipil Kabupaten Kupang pada tahun 2009. Intan tersebut menunjukkan kondisi yang cukup sehat untuk seluruh dimensi masyarakat sipil, namun dua dimensinya yaitu Dimensi Struktur (1,62) dan Dimensi Lingkungan (1,62) masih jauh dari skor tertinggi. Sementara dua dimensi lain yaitu Dimensi Dampak (1,92) dan Dimensi Nilai (1,94) memiliki skor lebih tinggi yang memperlihatkan bahwa kerja-kerja masyarakat sipil dirasakan telah memberikan dampak bagi masyarakat; dan masyarakat sipil menjadi aktor yang cukup aktif dan berhasil mempromosikan dan mempraktekkan nilai-nilai universal di dalam dan di luar organisasinya

Kekuatan utama masyarakat sipil Kabupaten Kupang adalah promosi dan praktek nilai-nilai universal dalam arena masyarakat sipil. Masyarakat sipil merupakan aktor penting di kabupaten dalam promosi nilai anti kekerasan, toleransi, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender,

demokrasi, keberlanjutan lingkungan, dan transparansi. Meskipun demikian, masyarakat sipil masih memiliki tantangan untuk mendorong praktek anti kekerasan pada tingkat individu dalam skala rumah tangga karena masih banyak terjadi kasus kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Kredibilitas masyarakat sipil juga masih perlu ditingkatkan melalui praktek transparansi keuangan tidak hanya kepada lembaga donor atau di tingkat internal lembaga saja tetapi juga kepada kelompok dampingan dan publik melalui media yang terjangkau.

Tantangan utama masyarakat sipil Kabupaten Kupang adalah kecukupan sumber daya (SDM, keuangan, teknologi) untuk pencapaian visi misi lembaga dan konteks sosial ekonomi serta relasi pasar-masyarakat sipil yang kurang mendukung bagi tumbuh kembangnya masyarakat sipil. Meskipun pemkab telah memiliki website, ternyata hak konstitusional warga untuk mendapatkan informasi masih menjadi tantangan saat ini.

Aset-aset utama masyarakat sipil yang bekerja di Kabupaten Kupang

Dimensi Struktur

- Relasi antar aktor-aktor masyarakat sipil yang tercermin dalam komunikasi dan kerja sama kegiatan maupun berjaringan/ aliansi/koalisi untuk merespon isu.

Dimensi Lingkungan

- Pelaksanaan hak konstitusional bagi berfungsinya masyarakat sipil, yaitu kebebasan dan hak-hak dasar, cukup baik. Kebebasan pers dan kebebasan sipil (berkumpul, berekspresi, berasosiasi) tidak ada hambatan.

Dimensi Nilai

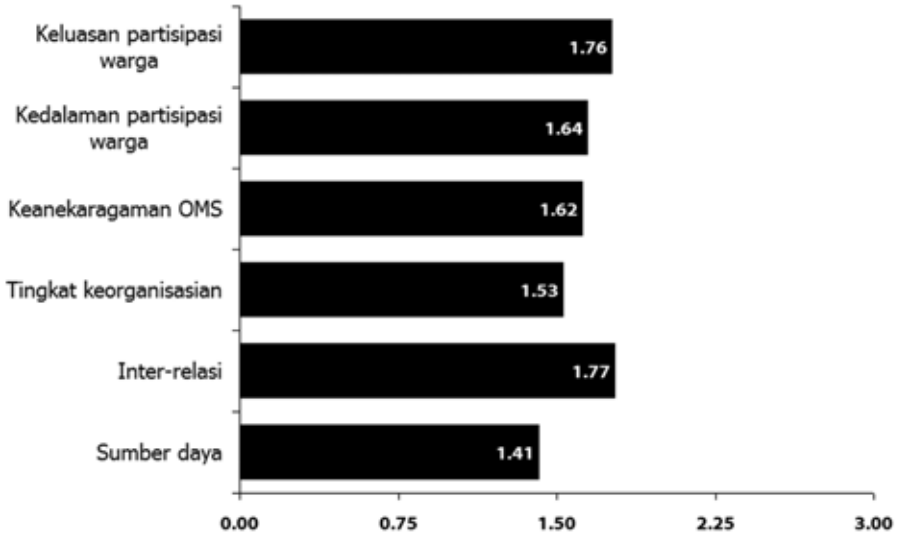
- Promosi dan praktek nilai anti kekerasan dan perdamaian oleh OMS di arena masyarakat sipil

Dimensi Dampak

- OMS berperan dalam memberdayakan masyarakat yang diwujudkan melalui membangun modal sosial masyarakat dan memberikan dukungan pekerjaan.
- OMS telah menaruh perhatian pada terwujudnya akuntabilitas pemerintah dan sektor swasta dengan cara melakukan monitoring, mendorong transparansi, dan melontarkan kritik-kritik.

Bagian berikut ini berisi uraian tentang empat dimensi masyarakat sipil Kabupaten Kupang terkait dengan skor dan maknanya serta faktor-faktor yang berpengaruh bagi pertumbuhan masyarakat sipil.

DIMENSI STRUKTUR



Dimensi Struktur masyarakat sipil Kabupaten Kupang berada pada kondisi cukup sehat, dengan skor 1,62. Kondisi masyarakat sipil yang cukup sehat ini dikontribusi oleh beberapa oleh subdimensi yang kondisinya cukup sehat, yaitu subdimensi relasi antar aktor-aktor masyarakat sipil (1,77); subdimensi keluasan partisipasi warga (1,76); subdimensi kedalaman partisipasi warga (1,64); dan subdimensi keragaman arena masyarakat sipil (1,62). Dari skor beberapa subdimensi tergambarkan bahwa struktur masyarakat sipil Kabupaten Kupang memiliki karakter utama berkemampuan menjalin relasi, warganya aktif dalam kegiatan kolektif di komunitasnya, serta arena masyarakat sipil yang cukup beragam. Namun, sebaliknya infrastruktur masyarakat sipil yaitu subdimensi tingkat organisasi mendapatkan skor rendah (1,53), walaupun masih berada pada kondisi cukup baik. Masyarakat sipil Kabupaten Kupang juga menghadapi masalah sumber daya yang serius, terlihat dari skor subdimensi sumber daya buruk (1,41).

Salah satu kekuatan utama masyarakat sipil Kabupaten Kupang pada Dimensi Struktur adalah jalinan komunikasi (1,79) dan kerja sama (1,76)

antar aktor. Kedua indikator ini memberi sumbangan positif pada skor subdimensi, yang memang hanya terdiri dari dua indikator ini. Pada kedua indikator ini terjadi perbedaan penilaian antara peserta perempuan dan laki-laki. Proses-proses komunikasi dan kerja sama antar aktor kabupaten dilakukan pada acara-acara adat dan keterlibatan kelompok-kelompok komunitas dalam kegiatan OMS yang lain, misalnya dengan LSM.

Komunikasi umumnya dilakukan secara langsung ketika bertemu dalam pertemuan dan kegiatan pelatihan atau menggunakan media surat dan telpon. Media komunikasi lainnya adalah milis Info Nusra. OMS anggota milis biasanya menggunakan milis ini untuk meminta dukungan bagi kasus-kasus yang didorong lembaganya. Namun karena wilayah kabupaten ini yang sangat luas, proses komunikasi antar aktor sesungguhnya masih menghadapi kendala keterbatasan jangkauan wilayah, disamping juga isu, dana dan waktu. Hal ini mengakibatkan koordinasi belum terjadi antar semua OMS kabupaten, walaupun koordinasi telah terjadi pada wilayah tertentu. Kerja sama antar aktor masyarakat sipil umumnya dilakukan dengan cara beraliansi/koalisi/konsorsium untuk merespon berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Bentuk aliansi/koalisi/konsorsium ini mulai dari yang bersifat tidak permanen seperti Forum Kemanusiaan Timor Barat, Aliansi Anti Korupsi NTT, dan Jaringan Anti Kemiskinan NTT; hingga bersifat permanen seperti Jarpuk, JPPR, dan FORPA.

> *Hal lain yang menarik bagi kami di CIS adalah partisipasi aktif bersama dengan OMS/ORMAS dalam melakukan aksi bersama, misalnya bulan lalu kami advokasi bersama persoalan listrik di Kupang yang pemadaman bergilirnya tak kunjung berhenti. Selain itu kami juga bersama-sama dengan masyarakat menuntut hak kepada pemerintah untuk pelayanan publik yang lebih baik, dan kampanye anti korupsi.*
>
> Winston Neil Rondo, S. Pt - Direktur CIS Timor

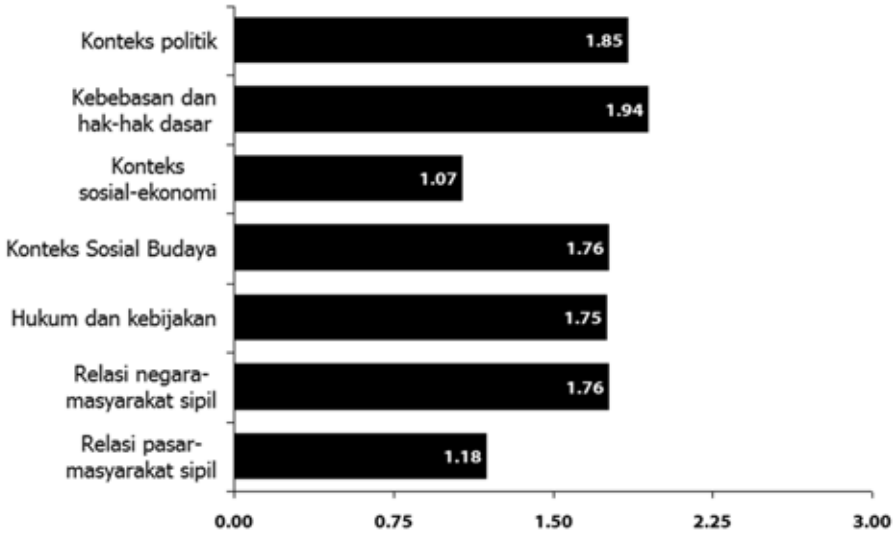
Selain memiliki kekuatan di atas, masyarakat sipil Kabupaten Kupang masih menghadapi masalah serius dalam kecukupan sumber daya untuk dapat mencapai tujuannya, terutama terkait keuangan. Menurut peserta IMS, saat ini sebagian besar OMS menggantungkan sumber dayanya

kepada lembaga donor. Hanya organisasi adat dan keagamaan serta kelompok-kelompok pemberdayaan yang mendapatkan sumber daya dari iuran anggota. Cara kerja banyak LSM internasional yang langsung tanpa melibatkan OMS lokal sebagai mitra kerja menyebabkan OMS kehilangan sumber daya, juga tidak menumbuhkembangkan OMS di tingkat lokal. Hal lain adalah terjadinya perubahan nilai dan perilaku OMS/aktivis dari bersifat sukarela menjadi berorientasi uang serta adanya cara pandang bahwa OMS (khususnya LSM) mempunyai banyak uang. Kebutuhan sumber daya manusia yang berkapasitas di Kabupaten Kupang masih terisi dari OMS Kota Kupang. Mereka memiliki keahlian sebagai fasilitator, *legal drafting*, penganggaran, hingga pengamat politik. Tetapi keahlian ini belum merata kepada seluruh OMS karena masih kurangnya *sharing* keahlian di antara mereka. Jenis keahlian yang dirasa masih kurang adalah *community organizer*. Selain jumlahnya kurang, tidak semuanya tinggal di desa atau lokasi dampingannya, ada pula yang hanya berkomitmen sebatas program.

Rekomendasi untuk meningkatkan dimensi struktur sebagai berikut:

- Pendataan OMS dan pengaktifan sekretariat bersama
- Meminta eksekutif dan legislatif membuat perda transparansi dan perencanaan sehingga ada jaminan bagi partisipasi masyarakat§ Peningkatan kapasitas untuk aparat desa dan OMS
- Mengidentifikasi kembali kearifan lokal di tiap wilayah§ Melakukan inventarisasi tokoh-tokoh MS yang mempunyai kapasitas pendidikan formal untuk difasilitasi mendapatkan pemenuhan pendidikan
- Mendorong komitmen dari organisasi payung dan institusi pendukung dalam jaringan.
- Perlu penguatan kapasitas SDM
- Mendorong OMS punya usaha mandiri (fundraising)

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi Lingkungan masyarakat sipil Kabupaten Kupang berada pada kondisi cukup sehat dengan skor 1,62. Dimensi ini merupakan faktor eksternal yang cukup berpengaruh positif atau cukup mendukung perkembangan masyarakat sipil di Kabupaten Kupang. Hasil IMS menunjukkan beberapa faktor eksternal yang berkontribusi menguatkan masyarakat sipil Kabupaten Kupang adalah Subdimensi Kebebasan dan Hak-hak Dasar (1,94), Konteks Politik (1,85), Konteks Sosial-budaya (1,76), Rrelasi Negara-MS (1,76); dan subdimensi hukum dan kebijakan (1,75) yang berada pada kondisi cukup sehat. Sebaliknya, masih terdapat faktor eksternal yang menghambat pertumbuhan masyarakat sipil Kabupaten Kupang, yaitu subdimensi konteks sosial ekonomi (1,07) dan subdimensi relasi pasar-masyarakat sipil (1,18) yang berada pada kondisi kurang sehat.

Hak konstitusional yang secara langsung terkait dengan berfungsinya masyarakat sipil, yaitu subdimensi kebebasan dan hak-hak dasar merupakan satu faktor eksternal yang cukup kuat mendukung tumbuhnya masyarakat sipil Kabupaten Kupang. Indikator yang mendukung adalah kebebasan pers dengan skor 2,28 yang menunjukkan kondisi cukup kondusif bagi pers untuk bekerja. Kalangan pers memahami aturan-aturan terkait pers yang berlaku dan bebas mendapatkan informasi serta

mempublikasikan informasi tersebut kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya media-media yang disebarkan di wilayah Kabupaten Kupang umumnya diproduksi dan disiarkan dari Kota Kupang, termasuk Radio Pemkab Kupang. Indikator lain yang mendukung adalah kebebasan sipil dengan skor 2,14 berada pada kondisi cukup baik. Hak konstitusional ini menunjukkan adanya kebebasan sipil, yaitu kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, dan berasosiasi bagi masyarakat sipil Kabupaten Kupang. Menurut peserta IMS, masyarakat desa sering berkumpul untuk mendiskusikan kepentingan bersama. Masyarakat juga dapat mengekspresikan pendapatnya secara terbuka kepada pemerintah, contohnya pada kasus perusahaan mangan di Desa Oeniko, kasus air minum Tilong, dan beberapa kasus kecil lain, meskipun respon pemerintah tidak selalu menyambut hangat hal tersebut. Selain itu masih terjadi intimidasi oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan isu SARA, misalnya isu agama agar pihak lain tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

Namun pada sisi lain, hak untuk memperoleh informasi bagi masyarakat sipil menjadi satu faktor eksternal yang kurang mendukung karena hanya mendapat skor 1,41 yang bermakna kurang sehat. Di satu pihak, masyarakat merasa tidak penting untuk mencari tahu data dan informasi yang berkaitan dengan dokumen daerah maupun dokumen desa, misalnya APBD, APBDes, atau dokumen kebijakan lainnya serta kurang mengetahui prosedur/mekanisme mencari informasi publik. Sementara di pihak lain, akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen kebijakan tertentu pemerintah masih terbatas walaupun pemkab telah memiliki *website*. Fakta ini sangat kontras dengan kenyataan bahwa pemerintah telah mengatur tata cara pemenuhan hak konstitusional ini lebih lanjut melalui UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Persoalan air bersih bagi kami masyarakat di Desa Noelbaki di wilayah tertentu masih cukup sulit, pemenuhan air bersih kepada masyarakat masih minim. Baru-baru ini kami warga di Noelbaki berkumpul dan bergotong royong untuk pembuatan dan pemasangan pipa air minum, sekaligus membuat bak penampung air. Dengan terpasangnya pipa air dan tersedianya bak penampung tersebut, maka kebutuhan air bersih di wilayah kami sedikit teratasi.

Martha Kewuan - Ketua Jaringan Pengusaha Kecil Ina Fo'a

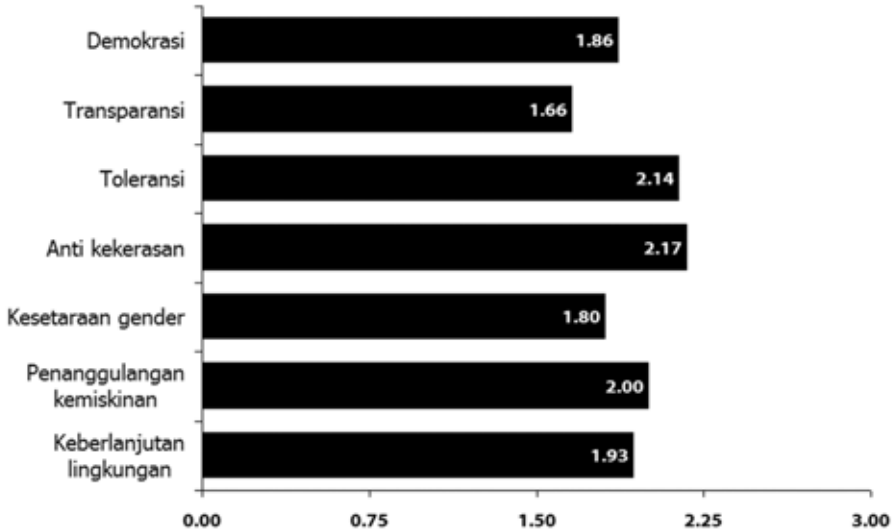
Konteks sosial ekonomi ternyata menjadi faktor eksternal yang menghambat tumbuh kembangnya masyarakat sipil Kabupaten Kupang. Subdimensi konteks sosial ekonomi ini hanya mendapatkan skor 1,07 yang bermakna kondisi sosial ekonomi kurang sehat. Angka kemiskinan cukup tinggi terlihat dari jumlah rumah tangga miskin sebesar 65.466 (81%) pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 65.539 pada tahun 2007. Kondisi rawan pangan terjadi di daerah-daerah kantong kemiskinan yang berlangsung pada awal musim tanam dan sebelum panen, yaitu sekitar bulan Oktober-Februari. Kondisi ini seringkali dibarengi dengan kekurangan air paling parah yang dialami pada puncak musim kemarau (antara bulan Agustus-November), sehingga berakumulasi pada kerentanan terhadap penyakit yang umumnya berkaitan dengan masalah air dan sanitasi berlangsung pada awal musim hujan (Februari-Maret). Pada musim-musim ini, kerawanan terjadi pada kebutuhan manusia yang sifatnya sangat mendasar dan mengancam kehidupan mereka, seperti pangan, air bersih.

Rekomendasi untuk memperbaiki dimensi lingkungan sebagai berikut:

- OMS harus proaktif mencari informasi tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat sipil, selain itu OMS perlu memberikan penyadaran-penyadaran kritis bagi masyarakat sipil tentang hak-haknya.
- OMS mendorong pemerintah di tingkat desa untuk memanfaatkan diskusi-diskusi desa dan papan informasi sebagai sarana untuk memberikan informasi berkaitan dengan dokumen-dokumen publik bagi masyarakat desa untuk pemenuhan hak-hak atas informasi.
- OMS perlu mendorong aturan kebebasan akses informasi bagi masyarakat sipil di Kabupaten Kupang dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah dan DPRD.
- OMS perlu membangun jaringan dengan berbagai kelompok OMS, media masa, perguruan tinggi dan DPRD untuk terus melakukan kontrol terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus korupsi serta memberikan penyadaran kritis bagi masyarakat tentang dampak dari korupsi.

- OMS perlu advokasi bersama dalam upaya penegakan hukum.
- OMS perlu mengadvokasi kebijakan daerah yang memberikan ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalam desa serta melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat desa dan BPD.
- OMS membangun kerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten Kupang (Dinas Pendidikan) untuk mendesain kurikulum pendidikan berbasis kesetaraan gender.
- OMS memperkuat kapasitas perempuan tentang hak-hak untuk terlibat dalam proses pembangunan termasuk menjadi kepala desa ataupun menduduki posisi kelembagaan di tingkat desa atau wilayah setempat.
- Pemerintah dalam membantu warga masyarakat sipil, perlu melakukan studi kelayakan dan melalui suatu perencanaan yang matang.
- OMS perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah (kerja kolaborasi) untuk melakukan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan rutin bagi kelompok OMS yang mendapat bantuan.
- OMS dan pemerintah perlu melakukan perencanaan bersama dalam berbagai program agar tidak tumpang tindih dan salah sasaran.
- OMS terus mengontrol dan mendesak janji pemerintah agar janji-janji pemerintah dapat direalisasikan.
- Sosialisasi undang-undang/aturan-aturan berkaitan dengan pajak.
- OMS perlu melakukan advokasi peraturan daerah yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan dalam aspek perbaikan ekologi lingkungan dan kontribusi pengusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi galian C.

DIMENSI NILAI



Dimensi Nilai masyarakat sipil Kabupaten berada pada kondisi cukup sehat dengan skor 1,94. Skor dimensi ini menggambarkan nilai dan prinsip yang dianut, dipraktekkan, dan dipromosikan oleh masyarakat sipil Kabupaten Kupang cukup baik. Seluruh subdimensi berada pada kondisi cukup sehat, di mana subdimensi anti kekerasan (2,17), subdimensi toleransi (2,14), dan subdimensi penanggulangan kemiskinan (2,00) merupakan tiga subdimensi dengan skor tertinggi. Empat subdimensi lain yang memiliki skor lebih rendah adalah subdimensi kesetaraan gender (1,80), subdimensi demokrasi (1,86), subdimensi keberlanjutan lingkungan (1,93), dan subdimensi transparansi (1,66) dengan nilai terendah.

Nilai anti kekerasan dan perdamaian menjadi salah satu kekuatan utama masyarakat sipil Kabupaten Kupang. OMS dan tokoh-tokoh masyarakat sipil tidak menggunakan cara-cara kekerasan di dalam arena masyarakat sipil. Hal ini ditunjukkan oleh skor indikator anti kekerasan di arena masyarakat sipil sebesar 2,31 yang bermakna sehat. Dalam kenyataannya, memang hampir tidak ada kejadian kekerasan yang dilakukan oleh OMS dan tokoh-tokoh masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh OMS memilih pendekatan dialog dengan pembuat kebijakan, meskipun adakalanya menggunakan aksi damai mendatangi kantor pemerintahan tetapi ditujukan untuk melakukan dialog. Walaupun dalam

ranah masyarakat sipil kejadian kekerasan hampir tidak terjadi, namun dalam skala rumah tangga masih terjadi banyak kasus kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Kasus kekerasan rumah tangga yang cukup sering terjadi dalam bentuk ingkar janji menikah. Kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah kekerasan terhadap anak dan kekerasan yang terjadi akibat konflik tanah warisan, yang kemudian melebar menjadi konflik kelompok. Sementara hasil IMS menunjukkan indikator arena masyarakat sipil untuk mempromosikan anti kekerasan dan perdamaian mendapat skor 2,03 yang bermakna cukup sehat. Hal ini mengindikasikan sosialisasi UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selama ini dilakukan oleh OMS belum cukup mendorong praktek anti kekerasan di tingkat rumah tangga.

Nilai transparansi masyarakat sipil Kabupaten Kupang berada pada kondisi cukup sehat dengan skor 1,66 yang merupakan skor terendah dalam Dimensi Nilai. Subdimensi ini menggambarkan kredibilitas masyarakat sipil yang ditunjukkan oleh transparansi keuangan dan korupsi, pertanggunggugatan OMS kepada pemberi mandat/konstituen, serta promosi transparansi kepada publik luas. Transparansi keuangan merupakan indikator dengan skor terendah, yaitu 1,45 dan satu-satunya yang berada pada kondisi kurang sehat. Meskipun OMS menyatakan transparansi keuangan penting dalam pengelolaan program, tetapi pada prakteknya proses transparansi yang dilakukan terbatas di internal lembaga. Pada kelompok-kelompok yang dibentuk untuk menerima bantuan dinas, keuangan kelompok umumnya diatur hanya oleh pengurus sedangkan anggota kelompok hanya menyetujui tindakan pengurusnya. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel, serta tidak adanya pengawasan ini yang mengakibatkan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan. Sejauh ini masih sedikit organisasi yang transparan kepada publik.

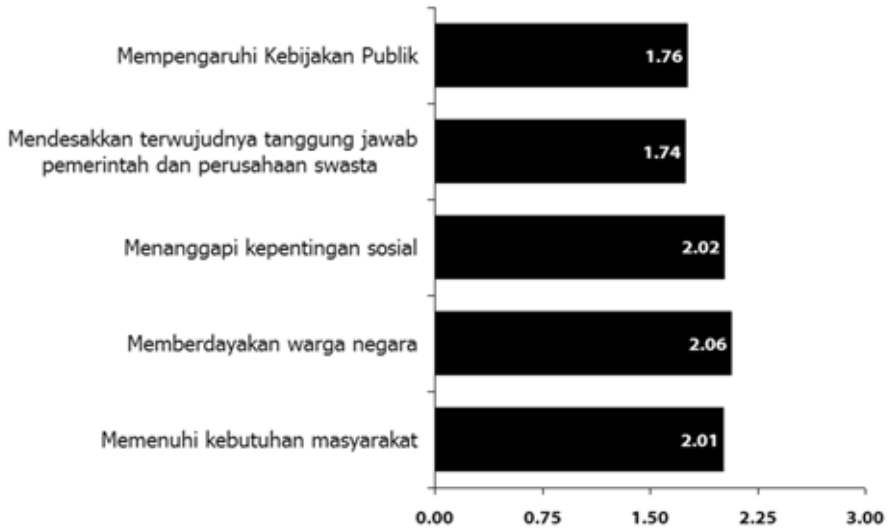
Rekomendasi untuk memperbaiki dimensi lingkungan sebagai berikut:

- Penting adanya keterbukaan dari pihak yang melakukan kekerasan. Pihak berwenang menyelesaikan kasus dengan baik sebagai proses pembelajaran.
- Penting dibuat pelatihan baik oleh LSM atau pemerintah untuk meningkatkan pemahaman tentang tindak kekerasan dan mendorong agar setiap orang berani mengungkapkan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

- Mendorong lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas.
- Perlu membentuk forum untuk meningkatkan toleransi.
- Perlu dilakukan penyadaran melalui bimbingan, pelatihan, seminar atau diskusi oleh aktor apa saja.
- Pemerintah harus punya *emergency* respon terhadap persoalan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan penanganan bencana, contohnya dalam kasus tanah turun di Fatuleu, Oebola hanya LSM yang membantu.
- Selain pemberian dana pemerintah juga diharapkan memberikan pendampingan terhadap bantuan yang diberikan supaya dana tersebut bisa efektif.
- Pemerintah diharapkan tidak melakukan diskriminasi wilayah (perlu optimalisasi Pemdes).
- OMS memiliki payung hukum.
- Melakukan penguatan kepada MS untuk terus-menerus membenahi sumber dayanya.
- Persyaratan mutlak untuk membentuk OMS adalah transparansi
- Pendidikan gender harus sampai pada lapisan daerah yang terpencil.
- Pelatihan kesetaraan gender tidak hanya diberikan kepada perempuan tetapi harus melibatkan laki-laki.
- Ada program dari pemerintah atau LSM di bidang keterampilan dalam kelompok-kelompok dan perlu didukung dengan pendanaan. Kelompok-kelompok tersebut harus dibentuk oleh masyarakat sendiri.
- Perlu mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk promosi gender.
- Melakukan pendidikan politik terus menerus secara merata di seluruh wilayah.
- Perlu ada perdes tentang pengelolaan hutan, kawasan galian C, retribusi galian C, lahan peternakan, dll.
- Mendorong pemerintah kabupaten untuk membuat program reboisasi.

- Masyarakat berpartisipasi dalam program reboisasi termasuk pengusaha.
- Perlu memperhatikan lingkungan pantai karena telah terjadi abrasi khususnya di wilayah Pantai Manikin dan pantai di Kabupaten Kupang.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi Dampak masyarakat sipil Kabupaten Kupang berada pada kondisi cukup sehat dengan skor 1,92. Kondisi ini memperlihatkan kerja-kerja masyarakat sipil telah menghasilkan dampak pada kehidupan warga maupun masyarakat luas. Kelima subdimensi dalam dimensi ini berada pada nilai cukup sehat, yaitu subdimensi memberdayakan masyarakat (2,06); subdimensi menanggapi kepentingan sosial (2,02); subdimensi memenuhi kebutuhan masyarakat (2,01); subdimensi mempengaruhi kebijakan publik (1,76); dan subdimensi mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan swasta (1,74). Kelima subdimensi ini menggambarkan peran-peran sekaligus dampak masyarakat sipil dalam proses tata kepemerintahan dan pembangunan.

Hal yang paling mengesankan bagi saya yakni ketika saya mulai terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman LSM, terutama Rumah Perempuan, seperti seminar-seminar, mengikuti TOT tentang child trafficking untuk orang dewasa dan anak-anak serta Pembentukan koperasi simpan pinjam.

Di Desa kami Matani Penfui – Timur, setelah melakukan pendidikan komunitas tentang child trafficking yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, bidan, guru, pemerintah desa, pemuda, dan anak-anak, kami membuat jaringan penanganan child trafficking.

Pdt. Diana OEmatan - Siahaya, S.Th - Ketua Majelis Jemaat Gereja Ebenhaezer Matani - Ketua kelompok Fetnain, JKLPK

Hal yang paling membanggakan buat saya adalah baru-baru (sekitar 1 tahun) saya dan teman-teman di Rumah Perempuan melakukan pengorganisasian kelompok perempuan yang kemudian terbentuk dengan nama Kelompok Fetonai. Kelompok ini mempunyai tujuan sebagai wadah penguatan perempuan kampong dan juga bertujuan mengadvokasi air bersih bagi perempuan dan kelompok masyarakat di Kampung Matani. Sejak pembangunan tilong (bendungan) masyarakat sekitar kekurangan air. Sementara pemanfaatan air bendungan ini terutama air bersihnya ditujukan untuk masyarakat pinggir kota (Tarus dan sekitarnya) dan masyarakat sekitar tidak mendapat fasilitas air bersih ini. Kegiatan-kegiatan kelompok yang dibangun bersama adalah mendiskusikan persoalan mereka dan menyususn rencana aksi. Meskipun sampai sekarang belum ada respon positif dari pemerintah setempat, tapi masyarakat terutama Kelompok Perempuan Fetonai tetap mempunyai semangat untuk memperjuangkan air bersih bagi mereka.

Rahmawati Bagang - Staf Rumah Perempuan

Subdimensi memberdayakan warga negara menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil Kabupaten Kupang pada Dimensi Dampak. Subdimensi ini mendapatkan penilaian cukup sehat (2,24). Peran memberdayakan masyarakat dalam Indeks Masyarakat Sipil diartikan sebagai berkontribusi pada proses agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan lebih mampu melakukan kontrol atas berbagai keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Tingginya skor subdimensi ini cukup dipengaruhi oleh indikator membangun modal sosial masyarakat yang menjadi satu kekuatan masyarakat sipil kabupaten. Indikator ini memiliki skor 2,24 yang bermakna cukup sehat. Pertumbuhan aset sosial seperti gotong royong, toleransi, dll. banyak dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan bersifat kerohanian, misalnya menyumbang untuk pembangunan gereja atau mesjid, serta melalui kegiatan-kegiatan kelompok dasawisma. Indikator lain adalah dukungan terhadap lapangan pekerjaan yang berada pada kondisi cukup sehat dengan skor 1,83, yang merupakan indikator dengan skor terendah dalam subdimensi memberdayakan masyarakat. Beberapa bentuk dukungan OMS terhadap lapangan pekerjaan masyarakat Kabupaten Kupang contohnya pelatihan dan pendampingan, penyediaan peralatan kerja, dan penyediaan modal yang berupa dana maupun bibit.

Kekuatan lain dalam Dimensi Dampak adalah subdimensi mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan swasta dengan skor 1,74. Subdimensi ini berada pada kondisi cukup sehat meskipun dengan skor terendah. Beberapa OMS telah melakukan peran-peran monitoring, mendorong transparansi, dan mengkritik pemerintah dan perusahaan swasta. Sebagai contoh PIAR mendorong pemda memangkas anggaran dan realokasi untuk anggaran pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun 2007, dan masih berlangsung hingga tahun 2009. Masyarakat mendesak jika PT. Aquamor dibangun maka harus merekrut pemuda setempat. Permintaan ini dipenuhi. Sekitar tahun 2006/07 masyarakat mendesak pemkab untuk mengembalikan tanah yang diambil oleh Dinas Kehutanan dengan cara melakukan hearing kepada pemkab dan disepakati untuk dikembalikan.

Rekomendasi untuk memperbaiki dimensi dampak sebagai berikut:

- LSM/donor yang fokus untuk pemberdayaan warga lebih meluaskan wilayah kerja ke daerah pelosok yang jauh dari kota.
- Pemerintah/LSM harus melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok yang telah dibentuk dengan memberi pelatihan pembuatan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, serta pengelolaan administrasi.
- Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang jelas dan berpihak kepada masyarakat untuk mengatur perusahaan pertambangan, khususnya mangan.§ Pemerintah perlu memberi ruang bagi OMS untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertambangan di daerah.
- Pemerintah dan perusahaan harus mengadakan persiapan/ pelatihan bagi calon tenaga kerja lokal dari masyarakat di lokasi-lokasi yang akan didirikan perusahaan.
- Memberikan kesempatan kepada OMS di tingkat desa untuk belajar/studi banding ke daerah lain atau hanya di dalam kabupaten dan bahkan antar desa.
- Pemerintah dan OMS bersinergi untuk menyusun database kebutuhan masyarakat supaya program yang turun sesuai dengan kebutuhan.
- OMS jangan hanya memberikan ketrampilan kerja untuk perempuan tetapi juga melakukan pendidikan kritis.
- Membangun hubungan/komunikasi antar OMS desa/ kecamatan/kabupaten untuk saling bagi informasi dan kapasitas.
- OMS dan pemerintah membangun hubungan/komunikasi supaya bisa saling bertukar informasi.

Kabupaten Sumba Timur

Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, kabupaten ini berada di $119{,}45^0$– $120{,}52^0$ Bujur Timur dan $9{,}16^0$ – $10{,}20^0$ Lintang Selatan. Luas wilayah sebesar 7.000,50 Km^2 dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Sumba
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumba Barat
- Sebelah Timur : Laut Sabu

Adapun secara kependudukan Kabupaten Sumba Timur tersaji informasi sebagai berikut;

Jumlah Penduduk tahun 2010[1]	Total jumlah penduduk = 227.835 jiwa Total jumlah laki-laki = 117. 656 jiwa Total jumlah perempuan = 110.179 jiwa
Tingkat Kesejahteraan penduduk tahun 2008	Jumlah penduduk miskin = 175.986 keluarga

Satus Masyarakat Sipil Sumba Timur

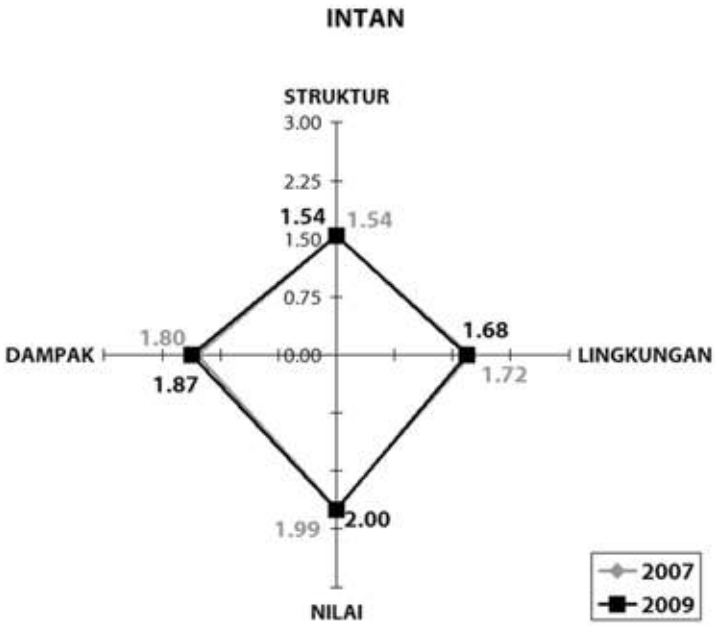
Melalui diskusi, Peserta Lokakarya Kaji Ulang IMS Kabupaten Sumba Timur 2009 menyepakati untuk menilai ulang sejumlah indikator yang diperkirakan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2007. Indikator-indikator tersebut tertera pada tabel berikut:

[1] BPS, Sumba Timur dalam Angka 2010

Table 3 Indikator IMS Kab. Sumba Timur yang Dinilai Ulang

No	Indikator	Subdimensi	Dimensi
1	Kemampuan menggali sumber daya	Sumber daya	STRUKTUR
2	Konteks sosial ekonomi	Konteks sosial ekonomi	LINGKUNGAN
3	Tanggung jawab sosial perusahaan	Relasi pasar dengan masyarakat sipil	
4	Aksi-aksi MS untuk mempromosikan transparansi	Transparansi	NILAI
5	Aksi-Aksi MS dalam Melestarikan Lingkungan	Keberlanjutan lingkungan	
6	Pengaruh MS dalam kebijakan publik	Mempengaruhi Kebijakan Publik	DAMPAK
7	Mendesakkan Tanggung Jawab Pemerintah	Mendesakkan Terwujudnya Tanggung Jawab Pemerintah dan Swasta	
8	Memberikan tanggapan	Menanggapi Kepentingan Sosial	
9	Kepercayaan Publik		

Grafik 1 Intan IMS Kabupaten Sumba Timur



Grafik di samping ini menunjukkan bahwa secara umum, kondisi masyarakat sipil di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2009 dinilai cukup sehat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil skor IMS di semua dimensi berada pada kategori cukup baik, yaitu Dimensi Struktur (1,54), skor Dimensi Lingkungan (1,68), skor Dimensi Nilai (2,00) dan skor Dimensi Dampak (1,87).

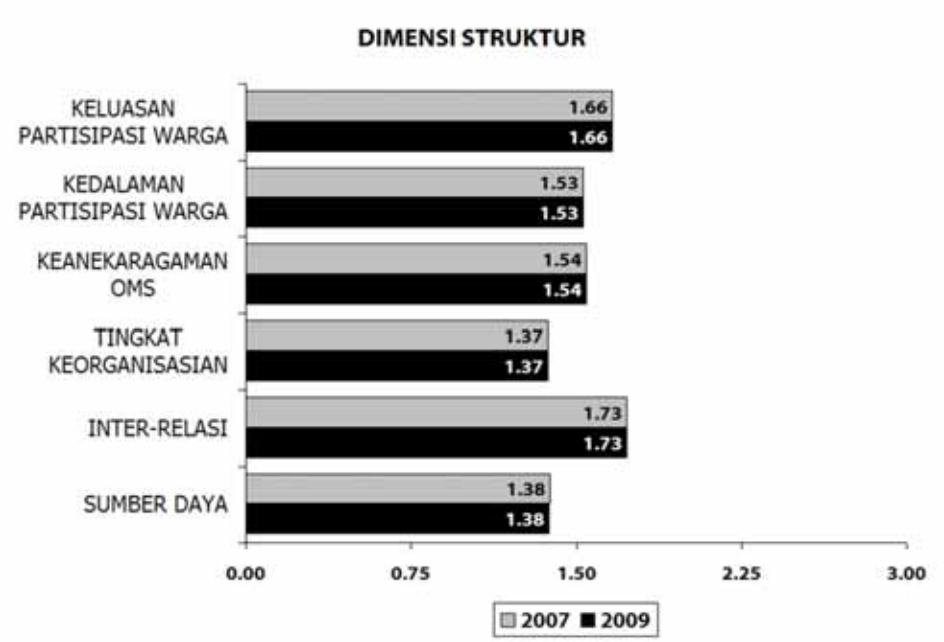
Apabila dibandingkan dengan hasil skor IMS tahun 2007, kondisi masyarakat sipil pada tahun 2009 menunjukkan perubahan pada ketiga dimensi yang beberapa indikatornya dilakukan kaji ulang. Sebagian besar indikator yang dikaji ulang mengalami peningkatan hasil skor IMS cukup signifikan, yang menunjukkan perbaikan kondisi masyarakat sipil pada indikator tersebut dibandingkan tahun 2007. Namun hasil skor IMS pada sebagian indikator lainnya mengalami penurunan. Artinya, pada tahun 2009, kondisi masyarakat sipil pada indikator tersebut memburuk dibandingkan tahun 2007. Beberapa indikator yang mengalami penurunan tersebut berada di dalam Subdimensi Konteks Sosial Ekonomi, Subdimensi Relasi Pasar – Masyarakat Sipil (dalam Dimensi Lingkungan). Penurunan hasil skor pada indikator dalam Subdimensi sosial ekonomi dan relasi pasar-MS cukup signifikan sehingga berpengaruh pada penurunan total skor di Dimensi Lingkungan.

Kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Sumba Timur ada pada Dimensi Nilai yang memperoleh skor tertinggi (2,00) atau masuk kategori cukup sehat, walaupun jika dibandingkan pada pengukuran IMS tahun 2007, hasil skor dimensi ini menurun. Menurut para peserta lokakarya IMS, cukup banyak aksi-aksi masyarakat sipil dalam promosi transparansi, toleransi, dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan masyarakat sipil Kabupaten Sumba Timur ada pada Dimensi Struktur yang memperoleh skor terendah (1,54).

DIMENSI STRUKTUR

Dimensi Struktur Kabupaten Sumba Timur berada pada kondisi cukup sehat (1,54) pada tahun 2009 dan tidak mengalami kenaikan dari tahun 2007 (1,54). Nilai dua subdimensi yang berkontribusi cukup pada dimensi, yaitu Subdimensi Inter-Relasi (1,73) dan Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga (1,66). Ada dua subdimensi lain yang masuk kategori kurang dan masih perlu memperoleh perhatian guna perbaikan di masa datang ialah Subdimensi Keanekaragaman OMS (1,54), Subdimensi Kedalaman Partisipasi Warga (1,53). Subdimensi yang memerlukan perhatian serius

adalah Subdimensi Sumber Daya(1,38) dan Subdimensi Tingkat Keorganisasian (1,37) karena masuk kategori kurang sehat.



Skor tertinggi Dimensi Struktur diperoleh Subdimensi **Inter-Relasi** yang masuk kategori cukup sehat (1,73) pada tahun 2009, tidak ada perubahan dari kondisi tahun 2007 (1,73). Inter-relasi antar OMS terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada partisipasi aktif antar OMS dalam musrenbang dus/des yang terjadi pada wilayah tertentu. Meskipun hubungan inter-relasi dibatasi pada kondisi topografi yang sulit dan dana yang terbatas tetapi semangat berinter-relasinya sangat tinggi. Sedangkan Subdimensi yang paling rendah ialah **Tingkat Keorganisasian** (1,37), meski subdimensi ini tidak dikaji ulang namun terdapat perkembangan yang cukup menarik. Pada tahun 2007 rendahnya nilai indikator prasarana pendukung disebabkan oleh prasarana pendukung bagi masyarakat sipil terbatas sehingga masyarakat cenderung melakukan aksi-aksi secara sendiri-sendiri dan dalam wilayah yang terbatas dan tidak terorganisir. Pada 2-3 tahun terakhir ini dukungan terhadap OMS masih terbatas pada OMS tertentu yang kebetulan menjadi sasaran wilayah pelayanan. Melihat kondisi pada tahun 2007, tentunya akan sangat berbeda dengan kondisi tahun 2009. Ada beberapa catatan kekinian terkait dengan subdimensi tingkat keorganisasian ialah terbentuknya GAPOKTAN dari beberapa organisasi desa di Lewa (Rakawatu, Kambatawundut, Londamara,

Lauhau) yang terbentuk pada akhir tahun 2008 sampai awal tahun 2009. Kelompok-kelompok ini mulai melakukan penjajakan dan perencanaan sesuai kebutuhan kelompok dan mulai mendapat peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan administrasi kelompok.

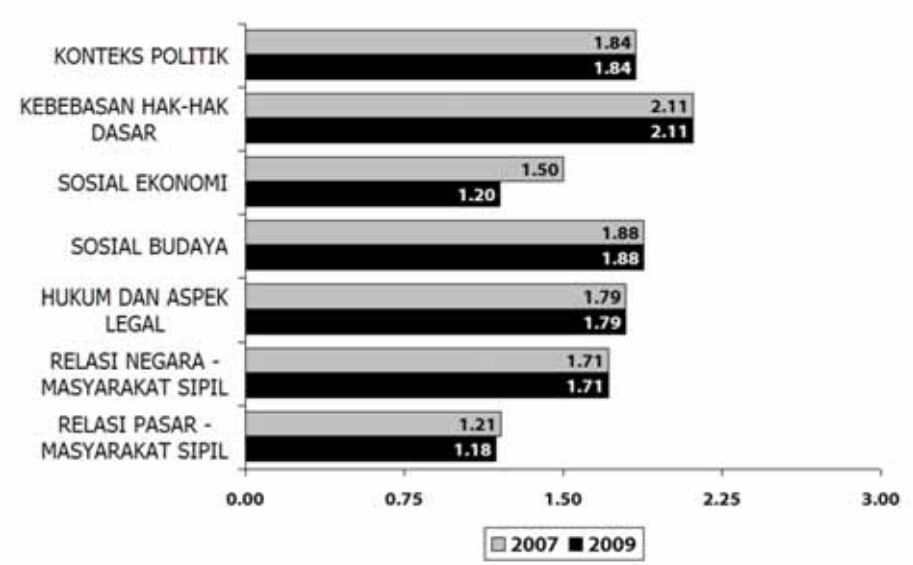
Pada penilaian tahun 2007 subdimensi sumber daya berada pada kondisi kurang sehat (1,38), yang menggambarkan bahwa sebagian besar OMS belum mempunyai sumber daya mandiri yang memadai seperti finansial, SDM, dan teknologi. Skor ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2004 (1,25). Pada subdimensi sumber daya, indikator kemampuan menggali sumber daya perlu dikaji ulang karena terjadi variasi gambaran kondisi pada indikator kemampuan menggali sumber daya (1,37). Sebagian besar OMS seperti koperasi simpan pinjam, organisasi wanita Kristen, KSM, kelompok tenun, dan LSM menyatakan mempunyai sumber dana dari iuran anggota serta keuntungan usaha yang dilakukan, bantuan pemerintah, bantuan donor, serta sumbangan individu. Sementara beberapa OMS memiliki keuangan lemah dan sangat tergantung dengan dana dari donor sehingga ketika tidak ada donor OMS tersebut hampir tanpa aktifitas bahkan terancam bubar. Gambaran kondisi di tahun 2009 dalam subdimensi sumber daya, antara lain beberaoa OMS/LSM masih sangat tergantung pada pihak luar, baik keuangannya maupun sumber daya lainnya. Kemampuan menggali dan mengelola sumber daya masih sangat terbatas. Tapi dibeberapa kelompok masyarakat lainnya sudah ada yang mandiri dalam segi pengembangan usaha, seperti KSM dan kelompok masyarakat lainnya di Desa Pambotanjara, Mbatakapidu, Wanggameti, Tawui, dan Ramuk melakukan swadaya bagi pengembangan usaha produktif (iuran simpan pinjam).

Aset-Aset Dimensi Struktur

- Masyarakat sipil sudah mulai berani untuk menuntut ketidakadilan dan ketidakberpihakan melalui penyampaian menyampaikan persoalan sosial kemasyarakatan melalui media komunikasi radio. Sementara institusi penyedia layanan sudah mulai merespon keluhan masyarakat.
- Tingkat kedermawanan masyarakat dalam memberikan sumbangan sosial di kalangan masyarakat sipil masih cukup tinggi serta masih terpelihara baik.

- Proporsi warga yang terlibat dalam kegiatan kolektif/gotong royong cukup meluas, hal ini didukung oleh nilai-nilai lokal (pawandang dan gotong-royong) yang cukup dipelihara secara baik oleh masyarakat.
- Cukup banyak OMS yang mendapatkan penguatan kapasitas dari pemerintah, donor, serta lembaga gereja.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi Lingkungan Kabupaten Sumba Timur berada pada kondisi cukup sehat (1,68) pada tahun 2009, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007 (1,72). Meskipun mengalami penurunan tetapi ada Subdimensi yang memberikan sumbangan positif pada hasil tersebut adalah Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar (2,11) dan Subdimensi Konteks Sosial Budaya (1,88). Sedangkan skor yang cukup sehat dalam menunjang dimensi ini namun masih perlu ditingkatkan ialah Subdimensi Konteks Politik (1,84), Subdimensi Hukum dan Aspek Legal (1,79), dan Subdimensi Relasi Negara–Masyarakat Sipil (1,71). Sementara itu, ada dua subdimensi yang berada pada kondisi kurang sehat, yaitu Subdimensi Konteks Sosio-Ekonomi (1,20) dan Subdimensi Relasi Pasar–Masyarakat Sipil (1,18). Buruknya nilai pada kedua subdimensi tersebut mencerminkan lingkungan eksternal maupun internal yang dapat menghambat atau menjadi tantangan bagi kesehatan masyarakat sipil.

Dari hasil IMS tahun 2009, skor tertinggi pada Dimensi Lingkungan diperoleh Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar yang berada pada kondisi cukup sehat (2,11). Kondisi ini tetap sama penilaiannya dengan kondisi tahun 2007 (2,11). Skor terendah pada Dimensi Lingkungan diperoleh pada Subdimensi Sosio Ekonomi (1,20) yang mengalami penurunan yang cukup sugnifikan dibandingkan pada tahun 2007 (1,50). Hal ini dapat dilihat dari masih sangat banyak persoalan sosial-ekonomi yang ada di Sumba Timur belum terselesaikan, seperti meluasnya kemiskinan dan rawan pangan di masyarakat. Meskipun sudah ada program peningkatan perekonomian dan program kecukupan pangan yang dilakukan pemerintah tetapi kenyataannya ada banyak masyarakat yang tidak merasakan manfaatnya, bahkan tidak merasakan program-program pemerintah. Program pemerintah sudah fokus pada masyarakat miskin tetapi implementasi masih lemah karena partisipasi masyarakat tidak dilibatkan pada perencanaan program. Realitanya memang terjadi peningkatan akses di Sumba Timur terhadap bantuan pemerintah dan LSM oleh masyarakat miskin dan perempuan. Namun bantuan ini tidak menyumbang pada pengurangan angka kemiskinan. Selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor kabupaten belum dapat menurunkan angka kemiskinan sehingga saat ini banyak kebijakan yang kurang ramah pada ekonomi yang substien. Hal itu disebabkan kebijakan bantuan ini tidak fokus pada upaya untuk mengurangi angka kemiskinan.

Aset-Aset Dimensi Lingkungan

- Tingkat kepercayaan di masyarakat beberapa tahun terakhir cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh semakin aktifnya masyarakat bergabung dalam kelompok atau organisasi kemasyarakatan.
- Toleransi antara umat beragama, suku minoritas serta kelompok lainnya tetap terjaga baik.
- Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan desa semakin meningkat.

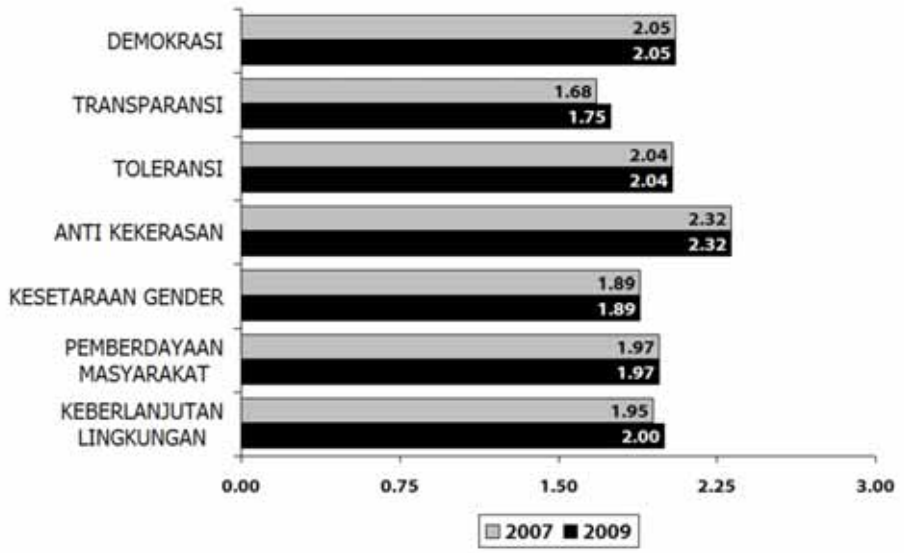
Skor terendah lainnya ialah Subdimensi Relasi Pasar - Masyarakat Sipil yang berada pada kondisi kurang sehat (1,18). Kondisi ini dinilai ulang pada indikator tanggung jawab sosial perusahaan karena mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2007 (1,21). Kondisi ini terlihat pada lemahnya posisi masyarakat ketika berhadapan dengan kalangan usaha.

Seperti yang terjadi pada Masyarakat Walakiri, mereka diajak untuk meluaskan lahan oleh suatu perusahaan. Pada awalnya memang terjadi dialog untuk membuat kesepakatan penggantian lahan tetapi realitanya pergantiannya tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga masyarakat menolak. Namun dari beberapa kasus yang ada,masyarakat tidak kompak dalam memperjuangkan kasus ini karena sebagian masyarakat menjadi pekerja/buruh yang justru menikmati hasil usaha itu. Hal ini menyebabkan perusahaan merasa aman-aman karena masih ada masyarakat yang membelanya.

Pada pengukuran tahun 2007 Subdimensi konteks sosio ekonomi berada pada kondisi relatif kurang sehat (1,50), sementara tahun 2004 berada pada kondisi yang sama (0,84). Kondisi ini dinilai ulang pada indikator konteks sosial ekonomi karena masih sangat banyak persoalan sosial-ekonomi yang ada di Sumba Timur belum terselesaikan. Misalnya dalam hal masih meluasnya kemiskinan dan rawan pangan di masyarakat. Meskipun sudah cukup banyak program-program peningkatan perekonomian dan program kecukupan pangan yang dilakukan pemerintah tetapi kenyataannya ada banyak masyarakat yang tidak merasakan manfaatnya, bahkan tidak merasakan program-program pemerintah tersebut. Beberapa kasus membuktikan bahwa ada persoalan dalam hal penyaluran bantuan ke masyarakat, mulai dari persoalan lambatnya waktu penyaluran, lambatnya respon dari pihak terkait, persoalan jumlah dan jenis bantuan yang sering sekali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sampai dengan persoalan biaya-biaya dan pajak yang harus dikeluarkan masyarakat yang membuat perekonomian masyarakat semakin berat. Permasalahan lain yang berpengaruh dalam konteks sosial-ekonomi adalah rendahnya harga komoditi pertanian. Masyarakat petani tidak pernah diuntungkan secara ekonomi dalam hal harga komoditi pertaniannya. Harga jual sangat tidak berimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan petani selama masa tanam. Termasuk mahalnya biaya pupuk dan obat-obatan. Perubahan kondisi yang terjadi di tahun 2009 berdasarkan kondisi tahun 2007 ialah terjadi peningkatan akses terhadap bantuan pemerintah dan LSM oleh masyarakat miskin dan perempuan. Namun bantuan ini tidak menyumbang pada pengurangan angka kemiskinan. Hal itu disebabkan kebijakan bantuan ini tidak fokus pada upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Program pemerintah sudah fokus pada masyarakat miskin (mengurangi angka kemiskinan) tetapi implementasi lemah, karena kendalanya masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan program. Fokus penanggulangan kemiskinan belum fokus di tingkat lokal.

Intervensi dalam bentuk BLT, beras sama di semua wilayah padahal ada daerah-daerah khusus yang perlu intervensi khusus. Selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor kabupaten belum bisa menurunkan angka kemiskinan dan didukung pula dengan adanya kebijakan yang kurang ramah pada ekonomi subsisten.

DIMENSI NILAI



Dimensi Nilai di Kabupaten Sumba Timur berada pada kondisi cukup sehat (2,00) pada tahun 2009, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2007 (1,99). Subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap Dimensi Nilai adalah Subdimensi Anti Kekerasan (2,32), Subdimensi Demokrasi (2,05) dan Subdimensi Toleransi (2,04). Selain itu ada empat subdimensi yang cukup baik, namun masih memerlukan perhatian untuk ditingkatkan ialah Subdimensi Keberlanjutan Lingkungan (2,00), Subdimensi Pemberdayaan Masyarakat (1,97), Subdimensi Kesetaraan Gender (1,89) dan Subdimensi Transparansi (1,75).

Subdimensi tertinggi dalam Dimensi Nilai ialah Subdimensi Anti kekerasan. Hal ini ditunjukkan bahwa tidak ada bentuk kekerasan yang terjadi antara sesama masyarakat sipil. Hal ini disebabkan oleh toleransi antar masyarakat yang sangat tinggi dan menghargai perbedaan yang ada dilingkungan sekitar. Sedangkan pada dimensi yang memiliki skor terendah di dimensi nilai ialah Transparansi. Di tahun 2007 telah ada upaya-upaya yang dilakukan OMS Sumba Timur untuk mendorong penegakan nilai-

nilai transparansi. Namun demikian, terdapat pandangan bahwa meski telah ada gerakan penting untuk mendorong transparansi, namun gerakan tersebut masih bersifat sporadis (gerakan sendiri-sendiri) dan tidak meluas. Upaya yang dilakukan oleh OMS untuk mempengaruhi kebijakan publik cukup besar tetapi masyarakat sipil merasa belum memiliki gerakan tersebut, sehingga ini melemahkan perjuangan untuk mendorong perubahan yang lebih besar. Pada aspek transparansi pelaporan keuangan OMS belum cukup baik, sebab OMS merasa belum melakukan sesuatu yang baik. Selain itu, banyak OMS yang telah berupaya menerapkan transparansi namun disadari masih lemahnya implementasinya. Realitanya, LSM lokal tekun mempromosikan nilai-nilai transparansi kepada masyarakat dampingan dan pemerintah desa, terutama prioritas bantuan, pengelolaan program dan pendanaan tetapi di tahun 2009 dianggap tidak ada perubahan pada indikator transparansi keuangan OMS. Pada Indikator Aksi-Aksi MS untuk Mempromosikan Transparansi perlu dikaji ulang karena kondisi ini mengalami peningkatan di tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2007. Masyarakat sipil kini beriinisiatif untuk mengikuti dan terlibat dalam proses sosialisasi APBD. Tahun 2008 sosialisasi APBD disiarkan Radio Max FM, masyarakat ikut mengkritisi APBD lewat telepon dan SMS saat siaran. Media dijadikan strategi komunikasi dalam mempromosikan isu transparansi melalui pers/lembaga lokal seperti Radio Max FM, Stimulant Institut, Timor Express. Selain lewat media, bebebapa LSM lokal juga tekun mempromosikan nilai-nilai transparansi kepada masyarakat dampingan dan pemerintah desa, terutama prioritas bantuan, pengelolaan program dan pendanaan.

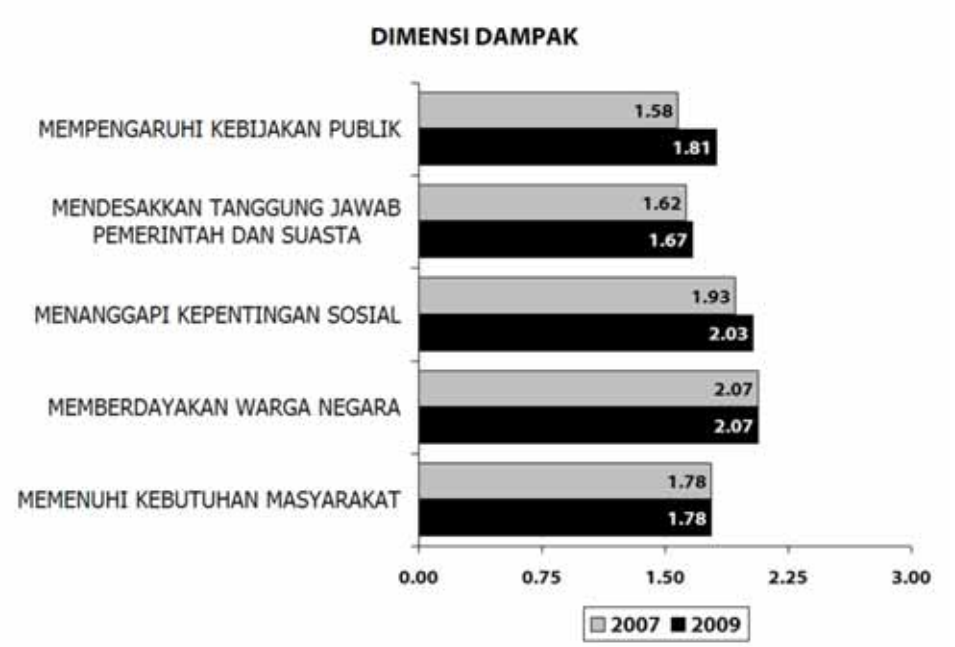
Aset-Aset Dimensi Nilai

- Ada upaya-upaya yang dilakukan OMS Sumba Timur untuk mendorong penegakan nilai-nilai transparansi. Hal ini dapat terlihat pada Bebebapa LSM lokal tekun mempromosikan nilai-nilai transparansi kepada masyarakat dampingan dan pemerintah desa, terutama prioritas bantuan, pengelolaan program dan pendanaan.
- Ada perubahan yang semakin membaik dalam hal keseimbangan gender di dalam OMS. Kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai pertemuan telah terbuka lebar
- Secara umum sudah banyak upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat yang didorong oleh OMS, kelompok keagamaan serta pemerintah.

Pada subdimensi keberlanjutan lingkungan pada indikator Aksi-Aksi MS dalam melestarikan lingkungan perlu dinilai ulang. Kondisi pada tahun 2007, secara umum sudah banyak upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat yang didorong oleh OMS, kelompok keagamaan serta pemerintah. Sebagai contoh, Di Desa Kambatawundut dan Kel. Lambanapu ada program cinta lingkungan sebagai upaya pelestarian lingkungan (menanam tanaman umur panjang seperti tanaman mahoni, gamal, jati). Bahkan di Desa Kambatwundut telah ada Perdes tentang cinta lingkungan. Dari Dinas Kehutanan ada program hutan rakyat, kelompok-kelompok perempuan, anak dan keluarga menggalakkan upaya penanaman pohon yang didampingi oleh lembaga gereja, insiatif ini muncul atas dorongan lembaga gereja dan pemerintah desa, LSM dan tokoh-tokoh di masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat melakukan penanaman bakau melalui program yang didukung oleh LSM dan pemerintah untuk menjaga kelestarian pesisir pantai di Kecamatan Haharu. Di tahun 2009 terlihat bahwa keaktifan MS dalam usaha melestarikan lingkungan meningkat, terlihat pada fakta sebagai berikut dalam 2 tahun terakhir ini terjadi peningkatan daya serap kelompok-kelompok masyarakat untuk memanfaatkan berbagai bantuan anakan dan bibit beraneka tanaman produktif umur panjang. Yayasan Sumba Sejahtera pada beberapa tahun terakhir ini semakin giat melayani, mengajak OMS dan masyarakat umum untuk melaksanakan gerakan menanam. Gerakan menanam juga diinisiasi oleh Pokmas di Kelurahan Kamala Puti, Kawangu, dan Watumbaka dari tahun 2007-2008 telah mendorong aksi masyarakat untuk mendukung kelestarian lingkungan dengan menanam bakau dilingkungan sekitar.

DIMENSI DAMPAK

Dimensi Dampak di Kabupaten Sumba Timur berada pada kondisi cukup sehat (1,87) pada IMS tahun 2009. Secara umum, kondisi Dimensi Dampak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 (1,80). Subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian skor Dimensi Dampak adalah Subdimensi Memberdayakan Warga Negara (2,07) dan Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (2,03). Subdimensi yang perlu memperoleh perhatian untuk keperluan perbaikan adalah Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan Publik (1,81), Subdimensi Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (1,78) dan Subdimensi Mendesakkan Tanggung Jawab Pemerintah dan Perusahaan Swasta (1,67) walaupun nilai tersebut masih dalam kategori cukup sehat.



Skor tertinggi pada Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Memberdayakan warganegara (2,07). Hal ini dapat dilihat dengan terorganisirnya kegiatan yang berpusat untuk masyarakat terpinggir. Semua perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan melibatkan partisipasi warga meskipun hasilnya belum maksimal. Skor terendah pada dimensi dampak diperoleh Subdimensi Mendesakkan Tanggung Jawab Pemerintah dan Perusahaan Swasta (1,67) yang perlu dikaji ulang. Pada tahun 2007 indikator mendesakkan tanggung jawab perusahaan swasta berada pada kondisi kurang sehat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Sumba Timur, antara lain adalah bank swasta, PLN, Penerbangan, Aquamor, PDAM, Kontraktor, ASDP. Dalam upaya-upaya untuk mendesak agar perusahaan swasta lebih bertanggungjawab tampaknya pemerintah lebih banyak menjadi sasaran dari upaya ini. Keberhasilan upaya masyarakat sipil dalam mendesak tanggung jawab perusahaan swasta melalui pemerintah ini dirasa masih menghadapi kendala di birokrasi, seperti upaya mempersulit untuk berhubungan dengan atasannya yang biasanya dilakukan oleh level birokrasi tertentu serta adanya faktor kedekatan yang mempengaruhi tanggapan pemerintah.

Aset-Aset Dimensi Dampak

- Ada upaya OMS untuk menghasilkan Perdes Inisiatif. Ranperdes ini merupakan hasil dari kegiatan pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh Stimulan. Substansi penting yang diusulkan adalah bahwa semua aset milik desa walaupun aset ada di tangan kelompok
- Terjadi peningkatan kualitas kemitraan antara OMS pasca pendampingan.

Di tahun 2007 subdimensi menanggapi kepentingan sosial berada pada kondisi cukup sehat (1,93), meningkat dari skor tahun 2004 sebesar (1,65). Pada tahun 2007 indikator memberikan tanggapan yang berada pada kondisi cukup sehat (2,00) dan peserta merasa indikator ini perlu untuk dikaji ulang. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur adalah daya tanggap yang diberikan baik oleh OMS maupun pemerintah dalam pada isu-isu sosial pokok, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kekerasan terhadap perempuan biasanya terbatas ketika ada program saja. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya isu-isu yang dikerjakan oleh lembaga donor yang bekerja di Sumba Timur. Kondisi agak berbeda pada daya tanggap kelompok-kelompok yang tumbuh dari masyarakat (bukan dibentuk karena ada program), kelompok-kelompok ini umumnya lebih mampu bertahan. Tingkat daya tanggap yang diberikan pada kenyataannya juga dipengaruhi oleh tingkat informasi yang tersedia dari bawah. Misalnya kelompok-kelompok di desa yang bergabung di CD Bethesda membentuk organisasi payung FK Opang Madangu. Setiap kelompok telah memiliki data dari wilayah masing-masing, yaitu jumlah KK miskin dan data kesehatan seperti malaria, TBC, dan filariasis. Forum akan menggunakan data dari kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan dukungan bagi kelompok. Forum menyampaikan data ini kepada mitra kerja yang lebih tinggi. Di tahun 2009 kondisi indikator memberikan tanggapan seperti beberapa usulan yang disampaikan oleh OMS yang berasal dari kebutuhan masyarakat ditanggapi dengan baik oleh pemerintah. Contohnya: Mengusulkan pembangunan jalan dan saluran air yang merupakan kebutuhan Desa Ramuk langsung kepada Bupati dan mendapat respon baik. Mengusulkan pengembangan biogas untuk desa-desa yang berpotensi ternak kepada pemda. Di tahun 2008-2009 Dinas Peternakan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pengembangan biogas.

Di tahun 2007 indikator kepercayaan publik yang berada pada kondisi cukup sehat (1,86) namun indikator ini perlu dikaji ulang. Di pedesaan tingkat kepercayaan publik atau anggota kepada aktor OMS (pengurus) dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam memimpin orang. Kenyataannya masih cukup banyak pengurus yang belum memiliki kapasitas dan hati nurani yang baik dalam menjalankan organisasi. Sementara faktor manajemen keuangan sering menjadi penyebab hilangnya kepercayaan kepada mereka. Terdapat kenyataan juga bahwa di pedesaan tingkat kepercayaan kepada pengurus OMS lokal rendah karena eksistensinya sangat dipengaruhi adanya pendampingan dari luar. Seringkali jika pendampingan berakhir aktivitas OMS lokal ini juga berakhir. Di Sumba Timur juga terdapat oknum-oknum dalam arena MS yang merugikan, misalnya karena tidak transparan mengakibatkan anggota-anggota tidak percaya. Di Sumba Timur sendiri juga terdapat kondisi yang mempengaruhi keterbukaan di kalangan OMS, misalnya jika sebuah organisasi dipimpin oleh orang dari wilayah tertentu maka akan membuat segan pihak lain. Hal ini dipandang sebagai kelemahan utama dalam arena MS yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik, selain itu juga karena tidak adanya otokritik dalam MS.Namun terdapat juga kenyataan mengenai tingkat kepercayaan masyarakat kepada OMS besar masih tinggi berkaitan dengan dilakukannya penyebaran informasi, pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, dan kegiatan pendampingan yang dilakukan.Kondisi indikator kepercayaan publik di tahun 2009 menunjukkan pada Keberhasilan OMS masih ditentukan oleh figur pemimpin sehingga banyak OMS yang kehilangan kepercayaan dari publik ketika pergantian kepemimpinan. Contoh KSM Tapawalambadi di Desa Mbatakapidu.

Kabupaten Sumba Barat

Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sumba Barat memiliki luas daerah 737,42 Km², dan letak geografis pada 9°22'24,47" LS – 9°47'50,14" LS dan 119°6'43,61" BT – 119°32'5,87" BT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Selat Sumba
- Selatan : Samudera Indonesia
- Barat : Kabupaten Sumba Barat Daya
- Timur : Kabupaten Sumba Tengah

Jumlah Penduduk tahun 2010 sebanyak 111.023 orang, Laki-laki 57.567 jiwa dan Perempuan 53.456 jiwa. Pendapatan per kapita penduduk pada tahun 2008 sebesar Rp. 145.289.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Kabupaten Sumba Barat memiliki spektrum OMS yang cukup beragam. Hasil pemetaan OMS yang dilakukan pada tahun 2007 untuk keperluan pengukuran IMS di kabupaten tersebut, berhasil menemukan 15 jenis OMS. Kelima belas jenis OMS tersebut adalah Kelompok Swadaya Masyarakat, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kadin Sumba Barat, Organisasi Perempuan, KMPH (Kelompok Masyarakat Peduli Hutan), Forum Kepala Desa, Forum BPD, Organisasi Tani, LSM, Kelompok Dasa Wisma, Kelompok Keagamaan, Kelompok Kepemudaan, PGRI, KTNA, dan Forum LSM. Keberadaan berbagai spektrum OMS ini untuk mewakili dan bekerja untuk kelompok atau konstituennya masing-masing, seperti perempuan, kepala desa, petani, kelompok

ekonomi, anggota BPD, guru, nelayan, orang miskin, dll. Namun menurut peserta pemetaan OMS pada waktu itu, ternyata masih ada kelompok sosial tertentu yang belum terwakili di dalam arena masyarakat sipil, misalnya kelompok penyandang cacat dan kelompok Lansia (lanjut usia). Selain itu juga masih terbatas OMS yang memperjuangkan hak dan kepentingan anak.

Ditinjau dari tingkat pengaruh maka berbagai OMS yang berada di Kabupaten Sumba Barat di tahun 2007 diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat berpengaruh, berpengaruh, agak berpengaruh, dan kurang berpengaruh. Tingkat pengaruh OMS diklasifikasikan peserta pemetaan berdasarkan kriteria keaktifan dalam isu yang berkembang, besarnya keanggotaan/kelompok dampingan, dan jaringan di tingkat desa. Sembilan organisasi yang sangat berpengaruh adalah YWKW, Pakta, WVI, Satu Visi, Yayasan Karitas, Yumerkris, KTNA, Yapnusda, dan Yapmas. Sementara organisasi yang masuk dalam klasifikasi berpengaruh adalah Yayasan Bahtera, CCF, Pro Air, BLI, Foremba, Forum Jamatada, Kelompok Tenun Dadi Ina, YKK, PMKRI, Kolping, Yayasan Serafine, Delsos, Komite Pemuda Jemaat, YAPPI, Organisasi Ojek, Komisi Anak dan Remaja GKS, Mudika, MUI, dan PGRI.

Agenda-agenda pokok yang didorong di tingkat kabupaten pada waktu itu adalah memperjuangkan ADD, meningkatkan kesetaraan gender, dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada orang miskin, perempuan dan anak. Kerja-kerja OMS dalam agenda-agenda ini mendapatkan dukungan dari Program ACCESS Tahap I. Beberapa OMS yang diidentifikasi telah bekerja sejalan dengan agenda-agenda pokok ini, baik yang mendapat dukungan Program ACCESS Tahap I maupun tidak, contohnya adalah Yayasan Bahtera, Forum Jamatada, Pakta, Foremba, Satu Visi, CCF, YKK, KTNA, BLI, WVI, Pro Air, dan Organisasi Ojeg.

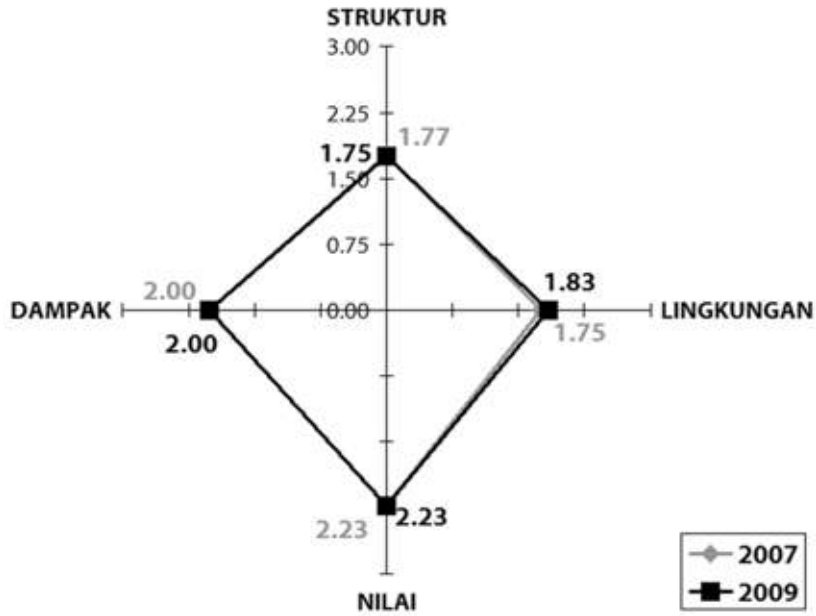
Pemetaan OMS di Kabupaten Sumba Barat tidak dilakukan kembali di tahun 2009 ketika dilakukan pengukuran ulang IMS di kabupaten ini.

Status Masyarakat Sipil

Melalui diskusi, Peserta Lokakarya Kaji Ulang IMS Kabupaten Sumba Barat 2009 menyepakati untuk menilai ulang sejumlah indikator yang diperkirakan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2007. Indikator-indikator tersebut tertera pada tabel berikut:

Table 4 Indikator IMS Kab. Sumba Barat yang Dinilai Ulang

NO	INDIKATOR	SUBDIMENSI	DIMENSI
1	Kerja Sama	Interrelasi	STRUKTUR
2	Jaringan kerja	Tingkat Keorganisasian	
3	Keberadaan Organisasi		
4	Payung	Konteks sosio ekonomi	LINGKUNGAN
5	Konteks sosio ekonomi Hak-hak politik	Konteks politik	



Grafik 4 Intan IMS Kabupaten Sumba Barat

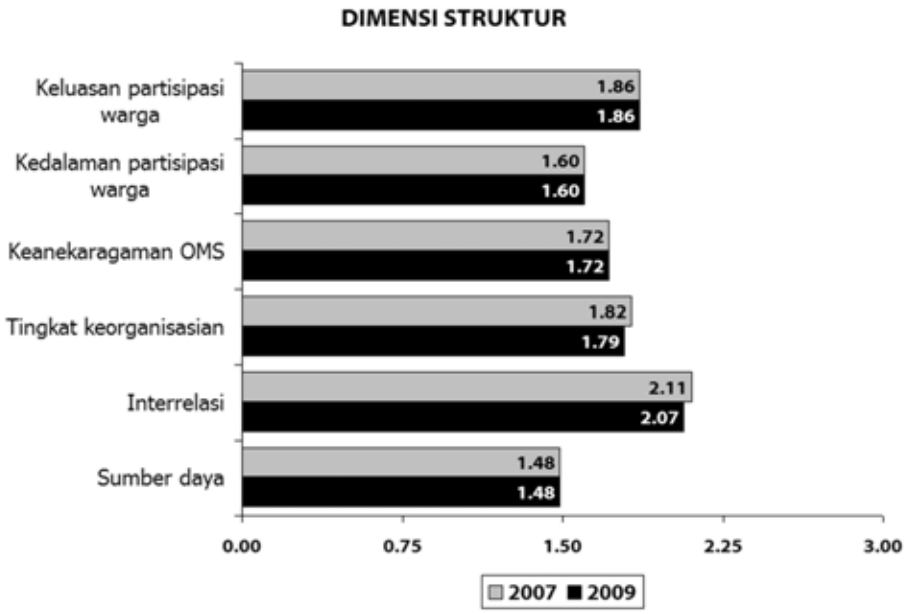
Diagram intan memperlihatkan status masyarakat sipil Kabupaten Sumba Barat di tahun 2009 dan tahun 2007. Terlihat terjadi perubahan skor Dimensi Struktur dan Dimensi Lingkungan masyarakat sipil di tahun 2009. Skor Dimensi Lingkungan meningkat dibandingkan dengan skor tahun 2007, tetapi skor Dimensi Struktur mengalami sedikit penurunan. Grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum, kondisi masyarakat sipil di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2009 dinilai cukup sehat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil skor IMS di semua dimensi berada pada kategori cukup sehat, yaitu *dimensi struktur* (1,75), skor Dimensi Lingkungan (1,83), skor Dimensi Nilai (2,23) dan skor Dimensi Dampak (2,00). Terdapat tiga indikator dalam Dimensi Struktur yang dinilai ulang, dua indikator yaitu Keberadaan Organisasi Payung/Melindungi Bagi OMS

dan Jaringan Kerja berada pada Subdimensi Tingkat Keorganisasian; satu indikator lain yaitu Kerja Sama berada pada Subdimensi Interrelasi/ Hubungan. Apabila dibandingkan dengan hasil skor IMS tahun 2007, kondisi masyarakat sipil pada tahun 2009 menunjukkan perubahan pada dimensi struktur dan dimensi lingkungan yang beberapa indikatornya dilakukan kaji ulang. Sebagian besar indikator yang dikaji ulang mengalami peningkatan dan penurunan hasil skor IMS. Indikator yang dikaji ulang tetapi mengalami peningkatan yang signifikasn dibandingkan pada tahun 2007,terjadi pada dimensi lingkungan di indikator hak-hak politik dan konteks sosio ekonomi. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi masyarakat sipil pada indikator tersebut dibandingkan tahun 2007. Namun hasil skor IMS pada sebagian indikator lainnya mengalami penurunan yang terjadi pada dimensi struktur di indikator kerjasama dan jaringan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009, kondisi masyarakat sipil pada indikator tersebut memburuk dibandingkan tahun 2007. Peserta juga sepakat untuk tidak menilai ulang indikator-indikator yang tergabung dalam dimensi dampak dan dimensi nilai karena perubahan kondisi pada indikator tersebut dianggap tidak signifikan untuk dinilai ulang.

Kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Sumba Barat ada pada Dimensi Nilai yang memperoleh skor tertinggi (2,23) atau masuk kategori sehat, walaupun pada pengukuran IMS tahun 2007, hasil skor dimensi ini tetap sama. Menurut para peserta lokakarya IMS, cukup banyak aksi-aksi masyarakat sipil dalam promosi demokrasi dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan masyarakat sipil Kabupaten Sumba Barat ada pada dimensi struktur yang memperoleh skor terendah (1,75).

DIMENSI STRUKTUR

Dimensi struktur Kabupaten Sumba Barat berada pada kondisi cukup sehat (1,75) pada tahun 2009, mengalami penurunan dari tahun 2007 (1,77). Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari dua subdimensi, yaitu Subdimensi Inter-Relasi (2,07) dan Keluasan Partisipasi Warga (1,86). Ada tiga subdimensi lain yang masuk kategori cukup sehat, yaitu Subdimensi Keanekaragaman OMS (1,72), Tingkat Keorganisasian (1,79) dan Kedalaman Partisipasi Warga (1,60). Subdimensi yang memerlukan perhatian serius adalah Subdimensi Sumber Daya karena masuk kategori kurang sehat (1,48).



Aset-Aset Dimensi Struktur

- Terbukanya ruang-ruang yang cukup bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis
- Keberadaan lembaga payung di Sumba Barat sangat efektif memberikan "nilai tambah" bagi OMS yang ada di Sumba Barat.

Skor tertinggi Dimensi Struktur diperoleh Sub-dimensi Inter-Relasi yang masuk kategori cukup sehat (2,07) pada tahun 2009 namun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari kondisi tahun 2007 (2,11). Dua indikator yang tergabung dalam subdimensi ini adalah Komunikasi (2,24) dan Kerja Sama (1,89) mendapatkan penilaian baik. Pada tahun 2007 indikator-indikator tersebut mendapatkan penilaian cukup sehat, yakni 2,24 dan 1,97. Meskipun demikian subdimensi ini masih berada dalam status yang sama tahun dengan penilaian tahun 2004 (kondisi cukup sehat). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kerja sama dan komunikasi di kalangan OMS Sumba Barat. Walaupun masih banyak pula OMS yang bekerja sendiri-sendiri, yang mengakibatkan sering terjadi benturan dan tumpang tindih program di satu wilayah. Pada tahun 2009 terdapat perkembangan yang cukup signifikan, misalnya terbentuknya forum lintas aktor yang menghasilkan

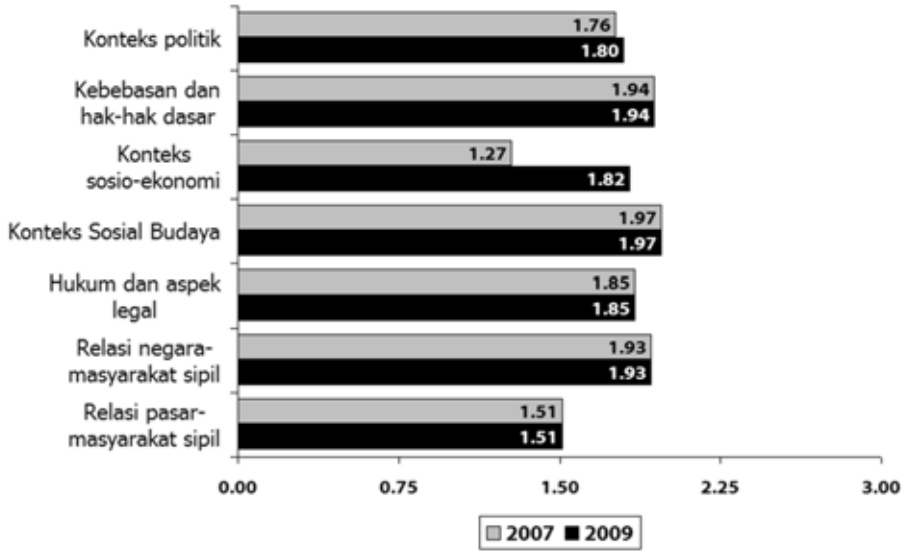
sejumlah agenda kabupaten yang sudah "dibeli" oleh para pihak (OMS/ Pemerintah). Beberapa kondisi memang sudah berubah tapi belum nampak pengaruh dalam implementasinya.

Pada subdimensi ini terdapat indikator yang dikaji ulang ialah indikator keberadaan lembaga payung. Banyak OMS menyadari bahwa untuk memperkuat kerja – kerja OMS di tingkat basis perlu ada lembaga payung. Keberadaan lembaga payung di Sumba Barat seperti Formasi sudah cukup efektif memberikan nilai tambah bagi OMS yang ada di Sumba Barat. Dengan adanya Formasi ada beberapa isu tematik yang dapat memperkuat kerja-kerja advokasi seperti program CRC, untuk menjamin kesetaraan gender. Kondisi pada tahun 2009, keberadaan lembaga payung sudah semakin meluas seperti Gapoktan, Posyantekdes, asosiasi petani, Forum Koordinasi Peningkatan Kwalitas Hidup Perempuan (FKPKHP) dan Forkom Antar Umat Beragama (FKUB). Lembaga payung tersebut telah terorganisir dengan baik dan merancang program yang bersinergis satu sama lain. Untuk indikator jaringan kerja pada tahun 2007 gambarannya adalah berbagai kegiatan FORMASI telah memungkinkan terbukanya jaringan kerja dengan lembaga nasional maupun propinsi bagi OMS yang menjadi anggota FORMASI. Sementara jaringan kerja pada tahun 2009 menjadi lebih luas spektrumnya. Kerja-kerja advokasi anggota jaringan juga meluas, seperti penyusunan RPJMDes dan renstra desa yang dibiayai melalui APBD dan difasilitasi oleh LSM seperti Satu Visi dan Bahtera. Pada tahun 2009, telah direncanakan di 44 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Sumba Barat akan menyusun dokumen perencanaan yang difasilitasi oleh anggota jaringan. Sementara 3 desa telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan.

Skor terendah Dimensi Struktur diperoleh Subdimensi Sumber Daya yang berada pada kondisi kurang sehat (1,48). Di tahun 2007 kondisi pada indikator sumber daya OMS Sumba Barat sudah cukup meningkat walaupun belum merata untuk semua OMS. Kehadiran lembaga donor seperti ACCESS, YAPPIKA, ICW, IFAD, BirdLife Indonesia (Burung Indonesia), WVI, Miserior, Pro Air, dan juga pemerintah telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan sumber daya OMS. Sumber daya yang diberikan oleh berbagai institusi di atas berupa peningkatan kapasitas dalam hal: pengembangan metodologi dan perencanaan partisipatif, legislatif drafting (penyusunan peraturan/ kebijakan), advokasi anggaran pendidikan, konservasi SDA, disain teknis

sederhana/desain sipil, *microfinance* (usaha mikro), lembaga keuangan mikro, pengarusutamaan gender, *living values*, pengolahan hasil/ *proccesing* dan pemasaran, dokumentasi dan publikasi, kesehatan reproduksi, HIV aids, evaluasi partisipatif serta dukungan finansial. Namun demikian hasilnya belum signifikan. Hal ini terjadi karena peningkatan sumber daya masih terbatas untuk LSM dan kelompok dampingannya. Kondisi sumber daya OMS tidak mengalami perubahan di tahun 2009 yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber pendanaan. Misalnya, dalam 2 tahun terakhir ini FORMASI tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam sarana dan prasarana, serta SDM (jumlah dan kualitas). Kondisi sumber daya OMS di tahun 2009 sebenarnya menunjukkan kemunduran.

DIMENSI LINGKUNGAN



Aset-Aset Dimensi Lingkungan

- Adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan perempuan terutama di pedesaan
- Perempuan jauh lebih berani dalam melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingannya pada pemerintah dan aparat hukum lain, terutama untuk kasus-kasus KDRT

Dimensi Lingkungan Kabupaten Sumba Barat berada pada kondisi cukup sehat (1,83) pada tahun 2009, mengalami penurunan dari tahun 2007 (1,75). Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari dua subdimensi, yaitu Subdimensi Konteks Sosial Budaya (1,97) dan Kebebasan hak-hak dasar (1,94). Ada empat subdimensi lain yang masuk kategori cukup sehat, yaitu Subdimensi Relasi negara-masyarakat sipil (1,93), Hukum dan aspek legal (1,85), Konteks Sosio Ekonomi (1,82) dan Konteks Politik (1,80). Sedangkan subdimensi yang memerlukan perhatian serius adalah Subdimensi Relasi pasar-masyarakat sipil karena masuk kategori cukup sehat (1,51).

Skor tertinggi Dimensi Lingkungan diperoleh Sub-dimensi Konteks Sosial Budaya yang masuk kategori cukup sehat (1,97) pada tahun 2009 namun kondisinya masih sama dengan kondisi pada tahun 2007. Pada subdimensi sosio ekonomi ada indikator yang dikaji ulang yaitu konteks sosio ekonomi. Kondisi sosio-ekonomi di Sumba Barat pada tahun 2007 menunjukkan bahwa dalam 2-3 tahun terakhir tidak terjadi banyak perubahan. Dalam 2-3 tahun terakhir perempuan yang mulai terjun dalam upaya-upaya perbaikan ekonomi keluarga semakin banyak (kalau dulu baru dalam tahap penyadaran, saat ini sudah mulai terjun langsung bekerja). Kondisi lain yang berkontribusi pada subdimensi ini adalah perubahan pola pikir terhadap pendidikan perempuan terutama di pedesaan. Semakin banyak orang tua meningkat kesadarannya untuk menyekolahkan anak termasuk anak perempuan. Sementara kondisi keamanan tidak menentu. Kasus pencurian dan pembunuhan yang tinggi di Sumba Barat adalah kondisi yang selama beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Konflik-konflik tanah, baik yang terjadi antar masyarakat di batas wilayah maupun yang diperebutkan oleh klan/keluarga hingga kini masih sering terjadi. Di tahun 2009 terjadi perkembangan kondisi sosial ekonomi, seperti ada perubahan pada pendapatan keluarga karena adanya program-program pemerintah seperti BLT, TKW, PNPM Mandiri, P2KP, P2DTK, maupun pendampingan dari LSM dan Pemerintah. Selain itu, munculnya usaha ekonomi alternatif. Dalam 2 tahun terakhir ada pengembangan usaha-usaha ekonomi alternatif oleh perempuan dan pemuda. Muncul fenomena penjual sayur, ikan dan bahan-bahan lain didominasi oleh orang-orang Sumba Barat, khususnya orang Loli jika dibanding dengan kondisi tahun 2007.

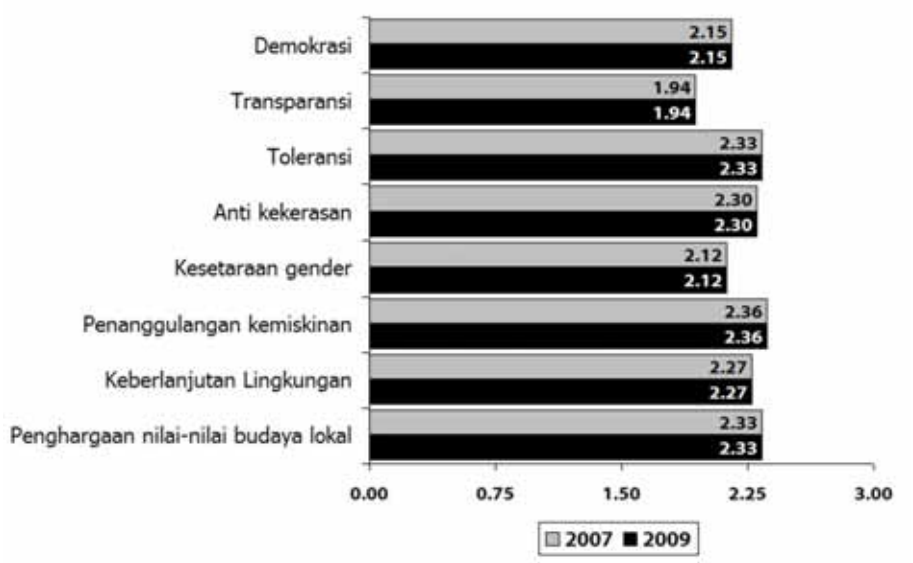
Selain indikator sosio ekonomi yang dikaji ulang, ada juga indikator hak-hak politik yang kembali dikaji ulang karena kondisi ini banyak mengalami perubahan di tahun 2009, seperti adanya peningkatan

pemahaman masyarakat akan politik, kebebasan untuk berkumpul dan bersuara semakin terbuka. Sebelumnya politik didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat, tetapi sekarang sudah menjadi pembicaraan masyarakat kecil dan perempuan. Akses dan kesempatan perempuan dalam politik menjadi lebih terbuka. Sebagai buktinya pada pemilu legislatif tahun 2009 ini terdapat ratusan CALEG berasal dari desa di lingkup Kabupaten Sumba Barat serta warga miskin dan perempuan memiliki akses dalam jabatan struktural di tingkat desa. Contohnya terdapat 1 orang perempuan menjadi kepala desa di Kecamatan lamboya, Lurah Sobawawi, dan Camat di Kecamatan Loli. Pada tahun 2007, indikator hak-hak politik menggambarkan bahwa selama 2-3 tahun terakhir, tidak kelihatan dampak dari ketentuan kuota perempuan 30% dalam lembaga-lembaga politik yang ada. Kisah sukses tentang terbukanya akses perempuan dalam politik (kuota 30% perempuan), seperti beberapa fakta pada tataran lokal menunjukkan bahwa peran perempuan mulai diperhitungkan, terbukti semakin banyaknya perempuan yang menempati posisi strategis di berbagai Parpol. Ada banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik atau maju sebagai CALEG memiliki kapasitas terbatas karena tuntutan partai di tingkat daerah dan pusat. Oleh karena itu, perlu merumuskan strategi peningkatan kapasitas dan kualitas CALEG perempuan, misalnya dengan melakukan pendidikan politik dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Indikator sikap sektor pasar memiliki nilainya 1,51 pada tahun 2007. Selama ini tidak terjadi relasi yang baik antara masyarakat dengan sektor swasta. Daya tawar masyarakat terhadap pasar bahkan sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dialog di antara masyarakat dengan pengusaha. Walaupun pernah ada dialog antar masyarakat untuk bersatu menyepakati posisi mereka terhadap sektor usaha, hanya saja hasil kesepakatan tersebut tidak pernah didialogkan dengan sektor swasta. Sebagai contoh kasus kelompok petani jambu mete. Beberapa contoh bahkan menunjukkan rendahnya daya tawar masyarakat terhadap kalangan usaha, seperti terjadi pada komoditi pertanian misalnya kopra, mete, kemiri. Salah satu faktor yang membuat semakin buruknya relasi pasar masyarakat sipil adalah lemahnya regulasi/pengaturan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kepentingan sektor swasta. Di tahun 2009 kondisi pada indikator ini relatif tidak perubah. Meskipun bisa ditambahkan contoh bahwa mulai terbangun daya tawar masyarakat dengan pihak swasta melalui kelompok pengelola komoditi. Namun karena tidak didukung ketersediaan komoditi yang terus menerus dan komoditi alternatif, daya tawar kelompok ini tidak terlalu kuat. Contoh kelompok pengelola komoditi adalah dua asosiasi petani di Desa Tanarara dan

Beradolu. Untuk indikator tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun 2007 mendapatkan skor 1,31. Faktanya memang hampir tidak pernah ada kesadaran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pengusaha lokal untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha yang dikelolanya. Contohnya penggalian pasir di Desa Kabu Karudi Kecamatan Lamboya yang berakibat pada kerusakan jalan karena truk pengangkut pasir. Buruknya kualitas pembangunan fasilitas umum ini sering beresiko merugikan dan membahayakan masyarakat karena tidak sesuai standar pembangunan. Kondisi ini tidak banyak berubah di tahun 2009. Tanggung jawab pengusaha untuk mereklamasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan usahanya belum ada. Di sisi lain belum ada payung hukum yang memungkinkan OMS untuk menuntut perusahan atau pengusaha lokal yang melakukan kerusakan lingkungan.

DIMENSI NILAI



Dimensi Nilai Kabupaten Sumba Barat berada pada kondisi cukup sehat (2,23) pada tahun 2009 dan tidak mengalami perubahan pada kondisi tahun 2007. Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari tiga subdimensi, yaitu subdimensi penanggulangan kemiskinan (2,36), toleransi (2,33) dan subdimensi penghargaan nilai-nilai budaya lokal (2,33). Ada empat subdimensi lain yang masuk kategori cukup sehat, yaitu subdimensi anti kekerasan (2,30), keberlanjutan lingkungan (2,27) demokrasi (2,15) dan kesetaraan gender (2,12). Sedangkan subdimensi yang memerlukan

perhatian serius adalah subdimensi transparansi karena masuk kategori kurang sehat (1,94).

Di tahun 2007 aktor-aktor OMS telah merespon isu penanggulangan kemiskinan. Aktor-aktor masyarakat sipil aktif mempromosikan upaya penanggulangan kemiskinan seperti dengan mempraktekkan program-program yang berpihak kepada orang miskin. Hanya saja belum ada standar yang jelas untuk indikator kemiskinan. Kondisi ini relatif tidak berubah di tahun 2009. Masyarakat sipil cukup aktif dalam aksi-aksi untuk penanggulangan kemiskinan, seperti kegiatan pembentukan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok-kelompok tenun, tani, ojek, sopir, kolam ikan Desa Lapale, bantuan-bantuan ternak dan bibit-bibit pertanian yang dikelola oleh masyarakat serta pengobatan gratis yang dilakukan oleh lembaga keagamaan dan LSM.

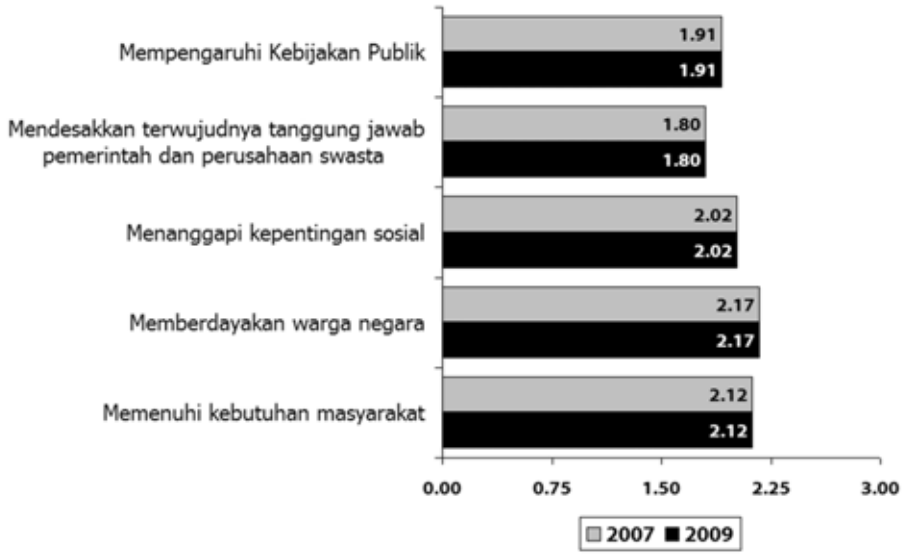
Aset-Aset Dimensi Nilai

- Tingkat partisipasi OMS yang makin meningkat dalam mempraktekkan nilai-nilai budaya.

Subdimensi Transparansi pada tahun 2007 nilainya 1.55 (cukup sehat). Hal ini dipengaruhi adanya dorongan dan praktek yang terus menerus dilakukan oleh OMS. OMS dan MS menyadari bahwa transparansi menjadi syarat berlanjutnya sebuah organisasi. Dengan transparansi tingkat kepercayaan masyarakat pada OMS makin tinggi. Selain itu, pemahaman arti transparansi makin meluas dikelompok masyarakat dalam OMS terkait dengan pelaporan keuangan, diskusi terfokus dll, dan pola pikir ini meningkat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu, tingkat kritis masyarakat meningkat. Indikator yang berkontribusi dalam subdimensi ini ialah Indikator pertanggunggugatan OMS terhadap konstituen (2,27), aksi-aksi OMS dalam mempromosikan transparansi (2,00). Dalam hal keuangan, beberapa OMS telah melakukan proses transparansi keuangan organisasinya. Misalnya, YAPMAS selalu diperiksa keuangannya oleh BPP Sinode GKS. Hasil auditnya dilaporkan dalam Sidang Majelis Sinode. Hampir semua OMS sudah mempunyai sistem dan mekanisme melakukan audit keuangan. Namun pada beberapa kasus, implementasinya belum berjalan secara optimal. Ada korelasi antara semangat menyumbang masyarakat dan transparansi laporan keuangan. Semakin transparan laporan keuangan OMS maka semangat menyumbang masyarakat pun

semakin besar. Beberapa OMS sudah mempunyai mekanisme untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat (transparansinya) melalui papan pengumuman yang dapat diakses setiap waktu oleh masyarakat, buletin internal dan koran lokal. Indikator aksi-aksi masyarakat sipil untuk mempromosikan transparansi. Misalnya, pada program P2KP, pelaksananya adalah masyarakat di tingkat bawah dan KSM (kelompok swadaya masyarakat). Dana-dana yang digunakan harus ditempel (diumumkan) di papan pengumuman yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mulai dari penggalian gagasan sampai penyusunan dan pelaksanaan program dan evaluasi melibatkan masyarakat secara langsung di tingkat kelurahan. Serupa dengan contoh indikator di atas, telah ada OMS yang mempublikasikan laporan keuangannya melalui buletin internal dan koran lokal seperti organisasi Burung Indonesia, FORMASI dan LSM lokal.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi dampak Kabupaten Sumba Barat berada pada kondisi cukup sehat (2,00) pada tahun 2009 dan tidak mengalami perubahan pada kondisi tahun 2007. Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari subdimensi, yaitu subdimensi memberdayakan warganegara (2,17), subdimensi memenuhi kebutuhan masyarakat (2,12) dan subdimensi mempengaruhi kebijakan publik (1,91). Sedangkan subdimensi yang memerlukan perhatian serius adalah subdimensi mendesakkan terwujudnya tanggung

jawab pemerintah dan perusahaan swasta karena masuk kategori cukup sehat (1,80).

Aset-Aset Dimensi Dampak

- Kepercayaan publik terhadap OMS sangat tinggi. Masyarakat menganggap OMS sebagai mitra yang dapat membantu mereka dalam bernegosiasi dengan para pihak untuk menyampaikan aspirasinya atau kebutuhannya
- Perkembangan dalam 2 tahun terakhir OMS telah menjadi perpanjangan tangan dari anggota dan pihak luar dalam menyalurkan dukungan-dukungan sampai pada masyarakat terpinggirkan.

Subdimensi memberdayakan warganegara berkontribusi pada indikator memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok terpinggirkan. Di tahun 2007 pada indikator memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok terpinggirkan peserta melihat bahwa 2-3 tahun terakhir cukup banyak kegiatan yang dilakukan oleh OMS maupun pemerintah yang menggunakan pendekatan sensitif gender (melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan). Perhatian mulai banyak diberikan kepada perempuan dan orang-orang miskin. LSM lebih memilih desa dengan jumlah KK miskin terbanyak sebagai wilayah dampingannya dan menangani isu perempuan khususnya ibu hamil. Saat ini perempuan juga terlihat mulai menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan maupun lembaga nonpemerintah meskipun jumlahnya masih terbatas. Meskipun demikian, hingga saat ini masih ada kelompok terpinggirkan, seperti orang cacat dan lansia yang belum mendapat perhatian secara khusus dari OMS. Di tahun 2009, dilihat bahwa perkembangan dalam 2 tahun terakhir OMS telah menjadi perpanjangan tangan dari anggota dan pihak luar dalam menyalurkan dukungan-dukungan sampai pada masyarakat terpinggirkan yang menjadi anggota dan diluar anggota. Selain itu OMS dapat meningkatkan posisi tawar dengan pihak luar. Sebagai contoh, kelompok masyarakat di Desa Rua dan Lapale mampu mendorong pemerintah desa untuk menghasilkan perencanaan pengelolaan ADD yang lebih fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ada juga kelompok masyarakat sipil berhasil mendorong pemerintah desa untuk menyusun perencanaan desa yang transparan, akuntaber, jujur dan demokratis. Keberhasilan ini terjadi di Desa Rua dan Lapale.

Kondisi pada indikatornya mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah tidak mengalami perubahan di tahun 2009. Beberapa hal yang dirasa menyumbang pada kondisi ini adalah gerakan FORMASI belum nyambung dengan gerakan-gerakan OMS anggotanya sehingga kerja advokasi kurang efektif. Kegiatan advokasi pada pemerintah masih bersifat sendiri-sendiri dan tentatif, serta belum dilihat sebagai isu bersama atau gerakan bersama. Gambaran kondisi indikator mendesakkan terwujudnya tanggung jawab perusahaan swasta relatif masih sama di tahun 2009. Di Kabupaten Sumba Barat masih belum ada OMS yang bekerja dalam isu ini. KADINDA yang seharusnya bisa bekerja dalam isu ini masih belum bisa diharapkan. Kerusakan lingkungan meningkat akibat penambangan galian C, batu potong dan sampah.

Kabupaten Dompu

Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten /Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 2.324,55 Km2. Letak geografis Kabupaten Dompu terlentak antara 117^0 42' – 118^0 30' Bujur Timur dan 8^0 06' – 9^0 05' Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

Jumlah Penduduk tahun 2007 berjumlah 213.185 jiwa, dengan komposisi penduduk perempuan 106.944 jiwa dan penduduk laki-laki 106.241 jiwa. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Bima hasil Pemilu 2009 sebagai berikut: Golkar 6 kursi, Partai Bulan Bintang 3 kursi, PAN 3 kursi, Partai Bintang Reformasi 3 kursi, PPP 3 kursi, Partai Merdeka 2 kursi, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 2 kursi, PKB 2 kursi, Partai NU 1 kursi, PKS 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi sehingga total jumlah kursi DPRD adalah 25.

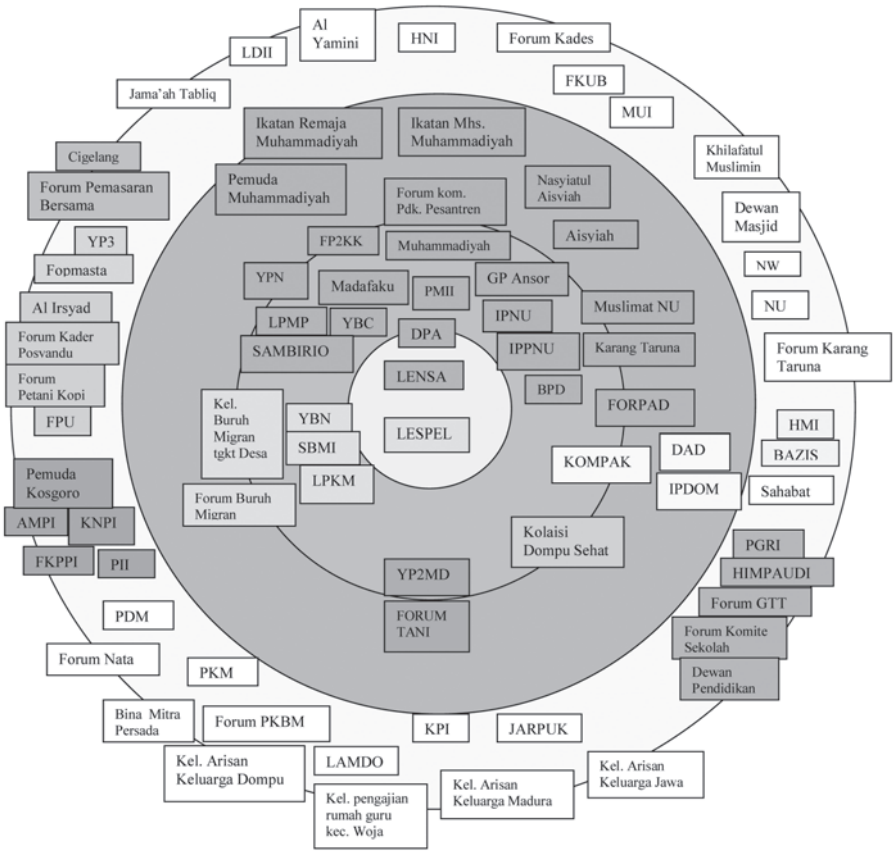
Peta Organisasi Masyarakat Sipil

OMS di Kabupaten Dompu dapat dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu organisasi kepemudaan, keagamaan, forum/jaringan/koalisi/ aliansi, LSM, organisasi etnis/kesukuan dan profesi. Apabila dilihat dari tingkat pengaruh, tidak ada OMS yang masuk dalam kategori sangat berpengaruh. Organisasi keagamaan, kepemudaan dan LSM cukup banyak

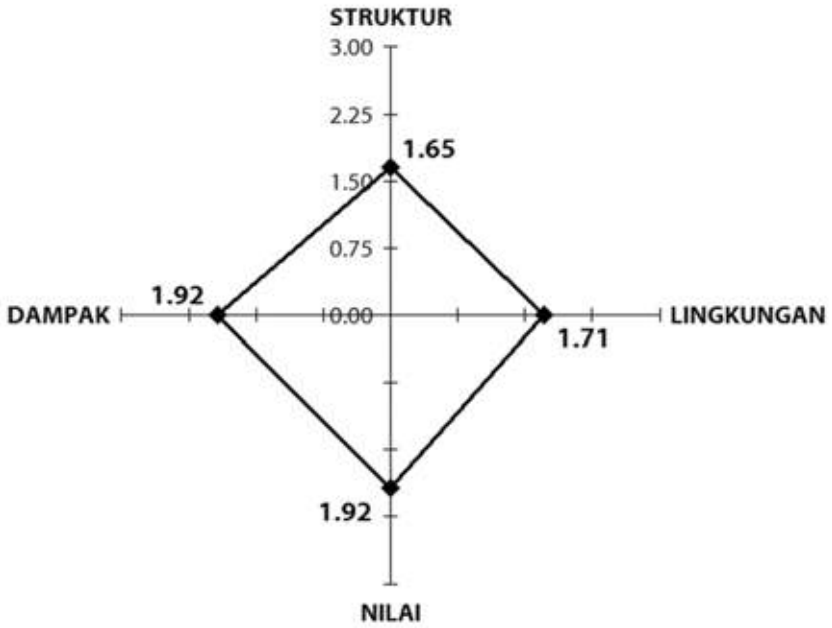
dimasukkan dalam kategori OMS berpengaruh. Dari 29 OMS yang masuk kategori berpengaruh, 14 di antaranya adalah LSM, seperti LESPEL, Lensa, YBC, Sambirio, JARPUK, dan lain-lain.

Di lingkup isu tata kepemerintahan yang demokratis, LSM menjadi motor penggerak kerja-kerja di ranah ini, baik dilakukan sendiri (sebuah organisasi) maupun melibatkan LSM lain atau OMS lainnya. Ada dua organisasi yang berhasil diidentifikasi melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan secara intensif, yaitu Lensa yang melakukan advokasi APBD bidang pendidikan dan kesehatan serta Lespel yang banyak bergerak untuk advokasi isu buruh migran. Dalam melakukan kerja-kerjanya, kedua lembaga tersebut melibatkan LSM maupun OMS lainnya yang berlatar belakang keagamaan, organisasi pemuda maupun kemasyarakatan lainnya. Misalnya Lensa melibatkan YBC, NU, PMII, IPNU, IPPNU, GP Ansor, Muhammadiyah dan lain sebagainya.

Diagram 4 Peta OMS di Kabupaten Dompu terhadap TKLD Tahun 2009



Status Masyarakat Sipil Dompu



Grafik 5 Intan IMS Kabupaten Dompu

Grafik intan menunjukkan bahwa secara umum kondisi OMS di Kabupaten Dompu cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh skor cukup pada keempat dimensi IMS, yaitu dimensi Struktur (1,65), Lingkungan (1,71), Nilai (1,92) dan Dampak (1,92). Pada dimensi Struktur, komunikasi dan kerjasama antar aktor-aktor masyarakat sipil sangat baik dalam mengusung isu-isu publik dan semua kelompok sosial berpartisipasi secara setara dalam arena masyarakat sipil. Pada dimensi Lingkungan, kondisi eksternal MS memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas warga dan OMS.

Kekuatan masyarakat sipil Kabupaten Dompu ada pada dimensi Nilai dan Dampak. Sebagian besar OMS dianggap telah mampu mempromosikan dan menerapkan prinsip dan nilai-nilai 'universal'. Sedangkan hasil-hasil kerja masyarakat sipil di Kabupaten Dompu dinilai berhasil memberikan kontribusi yang cukup aktif dan dalam batas-batas tertentu, serta dapat memenuhi fungsi-fungsi pokok terhadap pemecahan masalah isu-isu sosial, ekonomi, politik yang ada di masyarakat.

Tantangan utama masyarakat sipil Kabupaten Dompu adalah pada Dimensi Struktur yang memperoleh nilai terendah (1,65), walaupun masih dalam kategori cukup sehat. Aspek yang perlu diperbaiki di antaranya

adalah kecukupan sumber daya finansial organisasi, SDM dan teknologi yang dimiliki OMS, regenerasi kemimpinan dan kepemimpinan perempuan dalam arena OMS serta kuantitas dan kualitas keterlibatan perempuan dalam OMS.

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Dompu

Dimensi Struktur

- Kuatnya relasi antar aktor MS, di antaranya LSM – organisasi keagamaan – organisasi kepemudaan – kelompok masyarakat, dalam melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan anggaran dan buruh migran untuk mendorong tata kepemerintahan lokal yang demokratis dan berpihak kepada kelompok rentan (miskin, perempuan).

Dimensi Lingkungan

- Lingkungan eskternal cukup kondusif bagi MS untuk berekspresi mengemukakan pendapatnya baik berupa masukan maupun kritik terhadap pemerintah, tanpa ada tekanan dari pemerintah maupun aparat keamanan, dalam rangka memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
- Toleransi terhadap perbedaan kepercayaan maupun suku telah menjadi budaya yang cukup terpelihara dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Dimensi Nilai

- Promosi nilai-nilai anti kekerasan cukup gencar dilakukan kalangan MS terutama terkait isu KDRT
- Kesadaran dan praktek nilai anti kekerasan cukup berkembang terutama dalam mengelola konflik kekerasan antar warga maupun mulai beraninya warga melaporkan kasus KDRT kepada pihak kepolisian.
- Meningkatnya pemahaman kelompok perempuan terhadap isu KDRT dan cukup tingginya peran perempuan dalam mencegah serta menyelesaikan konflik kekerasan antar warga

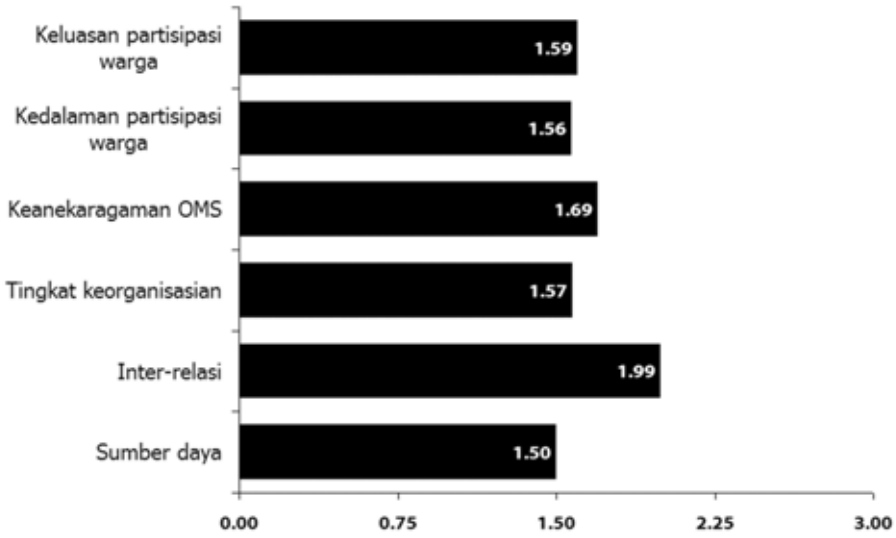
Dimensi Dampak

- Kebijakan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis serta perlindungan buruh migran memberikan jaminan hukum bagi

kelompok rentan (misalnya kelompok miskin dan perempuan) untuk memperoleh hak-hak dasarnya.

- Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan komoditi lokal (kacang mete) serta dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

DIMENSI STRUKTUR



Dimensi struktur di Kabupaten Dompu mendapatkan penilaian cukup (1,65). Beberapa subdimensi yang menyumbang secara positif antara lain Subdimensi Relasi antar aktor-aktor MS (1,99) dan Keragaman Arena MS (1,69). Sementara itu, ada 3 subdimensi lainnya yang masuk dalam kategori cukup sehat namun masih perlu ditingkatkan, yaitu Keluasan Partisipasi Warga (1,59), Tingkat Organisasi (1,57), dan Kedalaman Partisipasi warga (1,56). Penilaian buruk diperoleh Subdimensi Sumber Daya (1,5), yang berarti kecukupan sumber daya OMS untuk mencapai visi, misi dan tujuan-tujuannya dinilai masih rendah.

"Sebagian hidup saya lebih tercurah pada aktivitas sosial. Di Desa Lune, tempat saya tinggal, sebagian besar masyarakatnya lebih suka mengadu nasib menjadi buruh migran ketimbang bekerja dikampungnya sendiri. Prosedur pengiriman calon BMI yang direkrut oleh sponsor PPTKIS, kebanyakan illegal. Kasus-kasus eksploitasi BMI semakin meningkat tiap tahunnya. Di desa saya, banyak calon BMI tertipu, disiksa oleh majikan, gaji tidak dibayar, dll.

Pada bulan Februari 2008, saya berinisiatif mengajak pemerhati buruh migran, Toga dan Toma, BPD dan Pemdes untuk merembuk mencoba menyusun draft Perdes TKW/I. Alasan yang saya sampaikan kepada mereka untuk meberikan payung hukum dan perlindungan sosial bagi TKW/I. Saya meminta bantuan LESPEL Dompu , sebuah NGO lokal untuk menfasilitasi kegiatan tersebut di atas."

Nurondu, aktivis buruh migran.

Skor tertinggi pada dimensi Struktur diperoleh Subdimensi Relasi antar Aktor-Aktor Masyarakat Sipil (1,99), artinya menunjukkan bahwa komunikasi dan kerjasama antar aktor MS mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten dianggap cukup sehat. Ini ditunjukkan oleh skor Indikator Komunikasi (1,96) dan Kerja Sama (2,02) yang merupakan skor tertinggi. Tukar-menukar informasi dan saling bantu melengkapi data-data berkaitan dengan kerja-kerja advokasi kebijakan. Biasanya pertukaran informasi dapat dilakukan jika ada kesamaan program, visi/misi dan kesamaan sasaran atau kesamaan latar belakang organisasi[1] yang kemudian berdampak pada saling mendukung dan menggalang kekuatan untuk mendorong isu yang tengah digulirkan kepada kelompok sasaran mereka. Contoh kerja sama antar OMS di Dompu misalnya dilakukan oleh Lensa dan Dewan Peduli Anggaran yang keduanya juga melibatkan OMS lain seperti Muhammadiyah, NU, organisasi kepemudaan maupun LSM lainnya guna melakukan advokasi anggaran kesehatan dan pendidikan; Forum Buruh Migran dan Lespel melibatkan YBCM, Madafaku, LPMP, Lensa, Sambirio, YBN dan SBMI dalam mendorong pengesahan Ranperda Anti Trafficking.

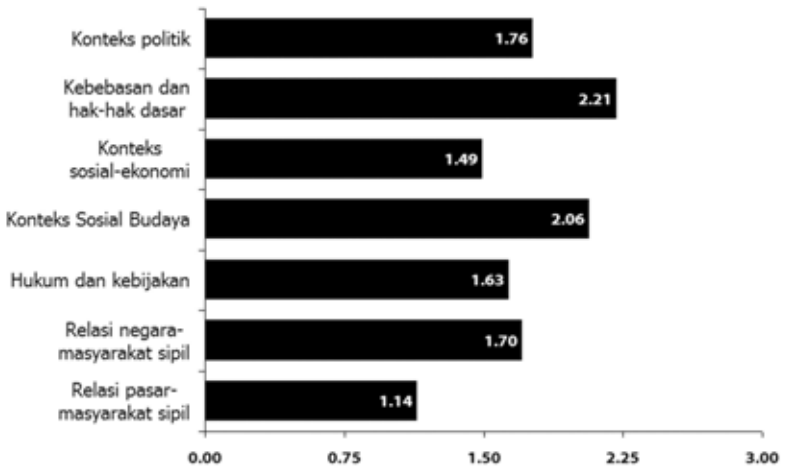
[1] Misalnya sesama organisasi keagamaan, LSM atau organisasi kepemudaan.

Skor terendah Dimensi Struktur diperoleh dari Subdimensi Sumber Daya yang masuk kategori kurang sehat (1,50). SDM MS di Dompu masih kurang untuk mendukung kerja-kerja OMS. Kemampuan riset dan transfer keahlian dinilai masih kurang. Pelatihan-pelatihan yang pernah mereka peroleh kurang diimplementasikan sehingga belum atau kurang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, sumber daya keuangan dianggap masih lemah karena sebagian besar OMS masih bergantung kepada donor. Keberadaan BAZIS sebagai lembaga yang menggalang dana publik beraliran keagamaan cukup menarik untuk dikembangkan sebagai strategi pengembangan pendanaan di luar lembaga donor atau organisasi internasional lainnya bagi OMS. Di bidang teknologi khususnya TIK, meskipun sumber daya di Kabupaten Dompu dapat dikatakan cukup terjangkau namun pemanfaatannya dianggap belum optimal.

Rekomendasi untuk memperbaiki dimensi struktur sebagai berikut:

- Mempertahankan dan mengembangkan kerja sama dan komunikasi intensif antar aktor-aktor OMS di arena MS Kabupaten Dompu untuk saling bertukar pembelajaran maupun mendorong isu-isu tata kepemerintahan yang demokratis, anti korupsi, lingkungan, buruh migran maupun isu lainnya yang sedang maupun akan dikembangkan di masa datang. Peningkatan kemampuan kepemimpinan di arena masyarakat sipil

DIMENSI LINGKUNGAN



"Bekerja sebagai kader posyandu seperti halnya pekerja sosial lainnya, tidak hanya meluangkan waktu, tetapi tenaga dan pikiran ikut berkonstribusi. Kadangkala teman sekampung berkata kepada saya, kenapa sih mau kerja sukarela, lebih baik bekerja di lahan, dapat upah yang layak. Saya bilang kepada mereka, saya ingin hidup ini bermanfaat bagi orang banyak dan suatu kelak nanti jika saya tua, mungkin ada orang-orang yang bisa mewarisi cara saya berpikir dan bertindak untuk peduli sesama dan membangun kesadaran perilaku dan sikap yang baik."

Nurhidayati, Kader Posyandu

Dimensi Lingkungan mendapatkan nilai cukup sehat (1,71). Subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap skor tersebut adalah Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar dengan nilai 2,21 (cukup sehat), Konteks Sosial-Budaya dengan nilai 2,06 (cukup sehat) dan Konteks Politik dengan nilai 1,76 (cukup sehat). Subdimensi lain yang masih berada pada kategori cukup sehat, namun memiliki nilai lebih rendah dari nilai total adalah Relasi Negara dan Masyarakat (1,70) serta Subdimensi Hukum dan Kebijakan (1,63). Sementara itu, ada dua subdimensi yang berada pada kondisi buruk, yaitu Konteks Sosial Ekonomi (1,49) dan Relasi Pasar dengan Masyarakat Sipil (1,14).

Skor tertinggi Dimensi Lingkungan diperoleh dari Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar (2,21). Hal ini menunjukkan bahwa warga dan OMS di Dompu dinilai memiliki kebebasan dalam menyuarakan pendapat, baik secara individual maupun melalui organisasi yang diikuti. Kebebasan juga dirasakan dalam kemudahan membentuk organisasi dan beraktivitas di tengah masyarakat. Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah Kebebasan Pers (2,59). Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa media massa di Dompu dapat melaksanakan kegiatannya secara bebas, tanpa ada hambatan dari pihak pemerintah dan kode etik dalam dunia pers cukup dipatuhi oleh media. Indikator ini belum mencapai nilai tertinggi karena kadangkala masih terlihat adanya oknum-oknum pers yang menggunakan pers untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Indikator Kebebasan Sipil (2,41) juga memberikan kontribusi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan realitas yang ada di Dompu, yaitu masyarakat dianggap bebas menyampaikan pendapat terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Bahkan kegiatan demonstrasi tidak pernah dilarang, selama kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum. Pada tingkat masyarakat, secara individu maupun kelompok telah ada kesadaran untuk menyampaikan aspirasinya. OMS juga memiliki kesempatan mengadakan musyawarah dan rapat-rapat untuk membicarakan masalah-masalah yang mereka hadapi tanpa adanya tekanan dari aparat pemerintah.

Hal menarik dari hasil IMS pada Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak dasar adalah bahwa laki-laki memberikan nilai lebih tinggi (2,27) dibandingkan perempuan (2,16). Nilai ini menunjukkan bahwa kesempatan dan ruang beraktivitas laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan perempuan. Meskipun isu gender sudah berkembang di Dompu, tetapi diakui atau tidak, perempuan masih lebih banyak bergerak di ranah domestik, sehingga kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Interaksi laki-laki dengan berbagai pihak, juga lebih luas dibandingkan perempuan. Selain itu, tidak tersedia media-media yang ditujukan secara khusus kepada perempuan. Perempuan juga lebih sering menitipkan aspirasi kepada laki-laki akibat adanya budaya *kacoi angi* (rasa sungkan dan hormat).

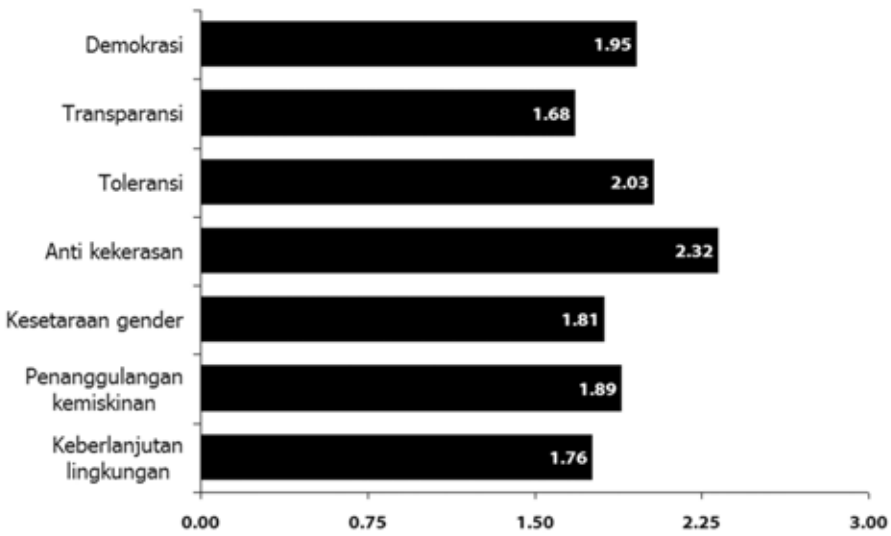
Skor terendah pada Dimensi Lingkungan diperoleh Subdimensi Relasi Pasar–MS (1,14). Keberadaan perusahaan di Dompu belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sipil dan warga. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya kedermawanan perusahaan yang ditunjukkan nilai indikator 0,59 (sangat buruk). Belum adanya kebijakan pemerintah setempat terkait dengan insentif bagi perusahaan yang memberikan dana melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR), ditengarai berkontribusi terhadap kurangnya inisiatif CSR tersebut.

Pada Subimensi Relasi Pasar–MS, perempuan memberikan penilaian jauh lebih tinggi (1,29) dibandingkan laki-laki (0,97), walaupun nilai tersebut masih pada kategori buruk. Hal ini disebabkan karena perempuan lebih sering menjadi pekerja dari perusahaan, kelompok usaha perempuan sering berinteraksi dengan perusahaan dan usaha jual beli lebih banyak dilakukan oleh perempuan.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan sebagai berikut:

- OMS membangun interaksi dengan pers secara lebih intensif
- Pemerintah bertindak terbuka untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui media yang mudah diakses masyarakat
- Mendorong dibentuk lembaga data dan informasi (bank data) yang diperlukan masyarakat
- Pemerintah dan OMS mendorong keterlibatan OMS minoritas dalam kegiatan sosialisasi kemasyarakatan
- Mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang memantau kinerja anggota legislatif dari wilayah pemilihannya
- Membangun jaringan kerja dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional dan lembaga donor untuk mendorong terbentuknya UU yang menjamin keterwakilan perempuan di legislatif
- Pemerintah meninjau ulang ijin HGU yang ada agar lebih bermanfaat bagi masyarakat

DIMENSI NILAI



Berdasarkan hasil IMS tahun 2009, Dimensi Nilai di Kabupaten Dompu masuk dalam kategori cukup sehat (1,92). Subdimensi yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai tersebut adalah Anti Kekerasan 2,32 (sehat), Toleransi 2,03 (cukup sehat) dan Demokrasi 1,95 (cukup sehat). Subdimensi lainnya yang masuk kategori cukup walaupun skornya di bawah rata-rata adalah Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan 1,89 (cukup), Kesetaraan Gender 1,81 (cukup), Keberlanjutan Lingkungan (1,76) dan Transparansi (1,68).

Skor tertinggi dimensi Nilai diperoleh subdimensi Anti Kekerasan (2,32) yang berada pada kondisi sehat. Di Kabupaten Dompu, sebagian besar masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil mempromosikan nilai anti kekerasan dan perdamaian di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sosialiasasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di berbagai kecamatan dilakukan oleh LESPEL, SBMI, YSP, YBC, Plan Indonesia dan YPO. Menurut pengakuan dari beberapa warga, kekerasan di dusun Renda Kelurahan Simpasai, Kelurahan Kandai II, Wawonduru, Montabaru dan Nowa sangat berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tomas dan Toga berperan akti fdalam upaya pencegahan maupun perdamaian jika kekerasan terjadi. Contoh lainnya adalah di lingkungan sekolah-sekolah sudah mulai meningggalkan sistem pembelajaran dengan kekerasan dan warga mulai sadar untuk melaporkan kasus-kasus KDRT ke ranah hukum (polisi). Kondisi tersebut di atas tercermin dari hasil penilaian indikator Anti Kekerasan di dalam Arena MS (2,60) berada pada kondisi sehat dan indikator Arena MS Mempromosikan Anti Kekerasan (2,05) berada pada kondisi cukup sehat.

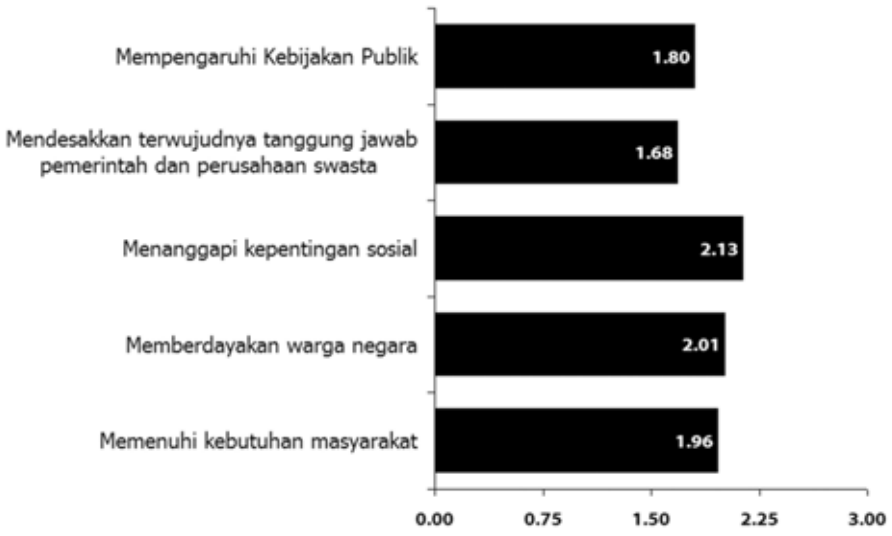
Pada subdimensi Anti Kekerasan ini, kelompok perempuan memberikan nilai lebih tinggi (2,36) daripada kelompok laki-laki (2,29). Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan kelompok perempuan terhadap perlindungan hukum oleh UU KDRT maupun keterlibatannya dalam upaya perdamaian atau pencegahan konflik kekerasan melalui kebiasaan saling menasehati antar warga masyarakat.

Skor terendah dimensi Nilai diperoleh subdimensi Transparansi (1,68) yang berada pada kondisi cukup sehat. Indikator yang berkontribusi pada nilai tersebut adalah Transparansi Keuangan OMS yang berada pada kondisi kurang sehat (1,20). Pertanggungjawaban OMS biasanya hanya terbatas dilakukan kepada lembaga pemberi dana (lembaga donor, organisasi internasional dan pemerintah) dan belum dipublikasikan kepada konstituen dan/atau masyarakat umum. Bahkan sebagian OMS di tingkat desa belum melakukan pelaporan keuangan baik di internal organisasi maupun pihak luar.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan sebagai berikut:

- Mendesak DPRD II Dompu untuk mengesahkan perda tentang *trafficking* perempuan dan anak
- Meningkatkan sosialissai UU KDRT, Perda Miras disetiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Dompu
- Mendorong pihak pemda Dompu untuk membuat perda transparansi informasi
- Diperlukan adanya sebuah wadah/ruang yang mempertemukan organisasi-organisasi yang peduli terhadap perempuan dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan yang seimbang, adil dan demokratis sehingga negara dapat menjamin keberlanjutan hak-hak perempuan.
- Mendorong perluasan jaringan antar MS, OMS dan Non OMS dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan demokratis yang berkesetaraan gender.
- Pembedahan anggaran responsif gender

DIMENSI DAMPAK



Dimensi dampak di Kabupaten Dompu mendapat nilai 1,92 (cukup sehat). Nilai ini ditunjang oleh skor pada Subdimensi Respon terhadap Kepentingan Sosial 2,13 (cukup sehat), Pemberdayaan Masyarakat 2,01 (cukup sehat), serta Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat 1,96 (cukup sehat). Subdimensi lainnya yang memperoleh nilai cukup walaupun di bawah rata-rata perolehan nilai dimensi Dampak adalah subdimensi Mempengaruhi Kebijakan Publik (1,80) dan Akuntabilitas Sektor Negara dan Pasar (1,68).

"Berinteraksi dan membantu masyarakat bukanlah hal asing bagi saya. Inilah seni yang saya jalani. Aksi yang pernah saya lakukan bersama masyarakat yaitu pembebasan tanah tambak yang dikuasai oleh PT Sira di Desa Mbawi. STambak tersebut merupakan hak ulayat warga setempat. Sebelum dikuasai PT Sira, mata pencaharian masyarakat satu-satunya hanya dari tambak. Pendekatan persuasif kepada perusahaan menemui jalan buntu. Akhirnya demonstrasi damai sebanyak 7 kali dalam 7 bulan berhasil membuat PT Sira hengkang dari Mbawi."

Julkarnain MS, staf YBN

Skor tertinggi dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (2,13) yang berada pada kondisi cukup sehat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh OMS terhadap kebijakan yang terkait dengan ekonomi, sosial dan budaya, misalnya: adanya jaringan TKI, penanganan kasus KDRT dan kebijakan terkait dengan Akta Kelahiran. Skor 2,18 (cukup sehat) pada indikator Memberikan Tanggapan terhadap Kepentingan Sosial di bawah subdimensi ini, mempertegas cukup kuatnya respon OMS terhadap kepentingan sosial. Aktor-aktor MS dan OMS cukup aktif memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti pengelolaan air bersih, penanganan gizi buruk, kematian ibu hamil dan bayi, pelayanan kesehatan gratis yang belum memenuhi standar, peningkatan mutu pendidikan, harga komoditi pertanian dan perkebunan yang masih tidak sesuai dengan harga pasar. Kelompok perempuan memberikan skor sehat (2,46) pada indikator tersebut, lebih tinggi daripada kelompok laki-laki (1,86) yang berada pada kondisi cukup sehat. Bahkan skor rata-rata dari kelompok perempuan (2,36) pada total perolehan nilai subdimensi Menanggapi Kepentingan

Sosial, juga lebih tinggi daripada kelompok laki-laki (1,87). Hal ini banyak dipengaruhi oleh karena perempuan biasanya menerima manfaat langsung dari upaya-upaya sosial di bidang Ekonomi, sosial dan budaya, misalnya: pendidikan dan kesehatan gratis, pembebasan biaya *visum et repertum*[2]

Skor terendah Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Akuntabilitas Negara dan Sektor Pasar (1,68) yang berada pada kondisi cukup sehat. Skor buruk yang berkontribusi pada perolehan nilai subdimensi tersebut adalah Indikator Mendesakkan Tanggung Jawab Perusahaan atau Sektor Pasar (1,39). Keterlibatan pihak swasta dinilai sangat kurang, misalnya akses layanan modal masyarakat oleh Bank swasta sangat sulit serta tingginya beban biaya listrik dan PDAM yang harus dibayar masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dirasakan cukup berihak kepada masyarakat, seperti pembudidayaan komoditi unggulan kabupaten Dompu yaitu mete dan rumput laut serta membuat jaringan dengan luar negeri seperti dengan Mohan (perusahaan mete dari India); pemerintah mengeluar kebijakan dana SPP (simpan pinjam perempuan) untuk menalangi produk petani dan masyarakat terkait dengan menjaga kestabilan harga.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai berikut:

- Mendesak pemerintah untuk membuka akses yang seluas-luasnya terhadap aktor-aktor MS, untuk mendapatkan data yang benar tentang keberpihakan negara terhadap MS.
- Mendesak kepada negara dan swasta menyangkut pemasaran produk
- Mendesak alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan, minimal 20 %
- Kerja sama yang intens antara MS, pemerintah dan swasta
- Membentuk forum koordinasi dan komunikasi bagi aktor-aktor MS

[2] Visum et repertum disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia. Visum et repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus untuk perempuan visum et repertum termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak. Wikipedia Online (diakses Oktober 2011).

- Mendesak pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam program pendidikan gratis
- Mendesak pemerintah agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa diskriminasi
- Pelibatan masyarakat sipil, terutama kelompok miskin, dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan

Kabupaten Bima

Wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan kabupaten yang letaknya paling timur di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis berkedudukan pada $118^0$44'–$119^0$22' BT dan $08^0$08' – 08^0 57' LS. Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores.
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia.
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu.

Jumlah Penduduk tahun 2007 sebanyak 416.446 jiwa dengan komposisi penduduk perempuan 210.564 jiwa dan penduduk laki-laki 205.882 jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin sebanyak 52.454 jiwa. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Bima hasil Pemilu 2009 sebagai berikut: Golkar 7 kursi, PAN 6 kursi, PPP 4 kursi, PBB 4 kursi, PKB 4 kursi, PKPI 4 kursi, PKPB 3 kursi, PKS 3 kursi, PDIP 2 kursi, PBR 1 kursi, PIB 1 kursi, Merdeka 1 kursi.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

OMS di Kabupaten BIMA dapat dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu: organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, forum/ jaringan/koalisi/aliansi, LSM, kelompok etnis/kesukuan dan koperasi.

Apabila dilihat dari tingkat pengaruh[1], ada lima OMS yang dikategorikan sangat berpengaruh di Kabupaten Bima, yaitu

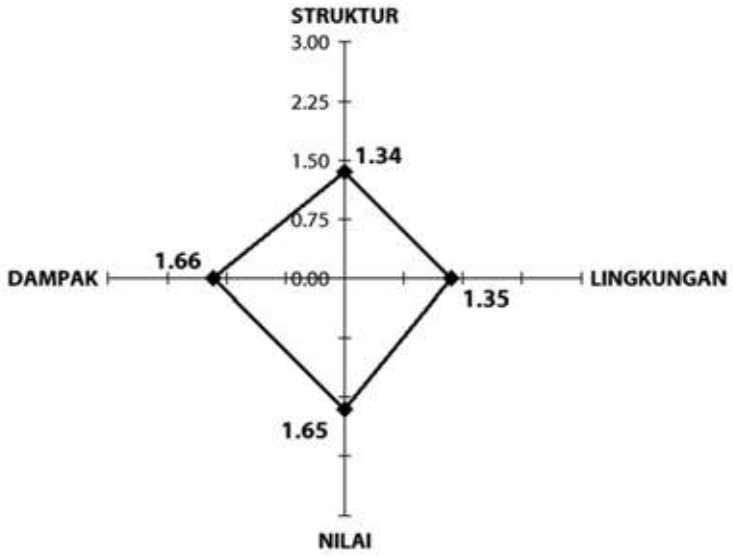
[1] Kekuatan pengaruh OMS dilihat dari kriteria berikut: (1) Keaktifan dalam isu-isu yang berkembang di kabupaten, (2) Besarnya keanggotaan/kelompok dampingan, (3) Sumberdaya keuangan, (4) Keluasan jaringan pada tingkat desa, kabupaten, propinsi dan/atau nasional

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Nasyiatul Aisyiyah, Majelis Taklim Annisa Kabupaten Bima dan Majelis Taklim Aisyiyah Kabupaten Bima. Mereka mempunyai perhatian terhadap isu-isu terkait keagamaan yang berkembang di masyarakat Bima yang mayoritas beragama Islam, terjun langsung memberikan pelayanan-pelayanan di bidang pendidikan melalui pondok pesantren maupun sekolah umum lainnya, di bidang kesehatan menyediakan fasilitas rumah sakit. Keanggotaan cukup besar dan pada umumnya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dan jaringan sangat luas dari desa hingga kota. Sumber daya keuangan cukup kuat dengan adanya dukungan dana dari pusat, publik yang menjadi anggotanya serta ditunjang sumber daya kesukarelawanan yang tinggi dalam mendukung setiap kegiatan yang dilakukan. Keempat lembaga tersebut juga menjadi panutan masyarakat muslim Bima ada umumnya terkait dengan pilihan sikap terhadap isu-isu sosial tertentu yang dikaitkan dengan keagamaan.

Sementara itu, OMS yang diidentifikasi berpengaruh berasal dari kalangan LSM, jaringan organisasi keagamaan serta kepemudaan di bawah payung Muhammadiyah dan NU. Kerja-kerja nyata dalam pengorganisasian dan/atau pemberdayaan masyarakat yang kemudian diangkat dalam ranah kerja-kerja advokasi kebijakan diidentifikasi sebagai faktor berpengaruhnya LSM di Bima, misalnya seperti yang dilakukan oleh LP2DER, SOLUD, HISDI, FMT. Perubahan di tataran kebijakan publik seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang diadvokasi oleh LP2DER beserta kelompok-kelompok masyarakat dapampingan serta OMS lain yang menjadi mitra kerjanya, akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pedesaan termasuk petani dan perempuan, mendorong tersedianya pelayanan listrik dan akses jalan untuk masyarakat; akan berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Di lingkup isu tata kepemerintahan lokal yang demokratis, LSM masih menjadi motor kerja-kerja di ranah ini, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan OMS lain. Misalnya, upaya mendorong adanya kebijakan dan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) cukup intensif dilakukan oleh LP2DER yang juga melibatkan organisasi lain seperti LPSM, LP3M, Solud, FMT, GAPOKTAN, FP3M, LAPKP, For Liberal dan lain-lain.

Status Masyarakat Sipil Kabupaten Bima



Grafik 6 Intan IMS Kabupaten Bima

Dari diagram intan tampak bahwa Dimensi Struktur mendapatkan nilai kurang sehat (1,34). Ini berarti secara umum bangunan MS di Kabupaten Bima dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Penilaian buruk juga didapat Dimensi Lingkungan (1,35), yang menandakan bahwa faktor-faktor eksternal dianggap kurang memberikan ruang bagi perkembangan MS. Sedangkan dalam hal semangat mempromosikan dan mempraktikkan norma-norma, MS di Kabupaten Bima dianggap cukup sehat. Hal ini dapat dilihat dari Dimensi Nilai yang mendapat skor 1,65. Yang terakhir, Dimensi Dampak mendapatkan nilai 1,66, yang berarti hasil kerja dari aktivitas MS dinilai cukup sehat.

Kekuatan masyarakat sipil Kabupaten Bima ada pada dimensi Dampak yang memperoleh nilai tertinggi. Kerja-kerja masyarakat sipil dinilai telah memberikan kontribusi positif dan dalam batas-batas tertentu dapat memenuhi fungsi-fungsi pokok terhadap pemecahan masalah isu-isu sosial, ekonomi, maupun politik yang ada di masyarakat. Sedangkan tantangan utama masyarakat sipil Kabupaten Bima ada pada Dimensi Struktur yang memperoleh nilai terendah. Aspek yang perlu diperbaiki di antaranya adalah perluasan pendanaan untuk mendukung kerja-kerja masyarakat

sipil, peningkatan kualitas SDM dalam isu-isu khusus, kemampuan mengatur diri sendiri seperti pola komunikasi internal yang setara, serta peningkatan pendukung kerja OMS seperti perpustakaan maupun kemudahan akses informasi data ke instansi pemerintah.

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Bima

Dimensi Struktur

- Kedermawanan dan kerja sukarela warga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
- Kedermawanan dan keaktifan kelompok perempuan dalam kerja sukarela berpoteni manjadi pilar gerakan sosial di Kabupaten Bima.
- Aksi-aksi kolektif warga dalam menanggapi persoalan sosial di lingkungannya telah menyentuh kelompok minoritas lintas agama dan suku
- Sebaran OMS mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten Bima

Dimensi Lingkungan

- Budaya toleransi antar agama/kepercayaan dan suku serta kesadaran mendahulukan kepentingan umum tumbuh cukup baik
- Kebebasan bersuara atau berpendapat berjalan cukup baik, termasuk di antaranya adalah OMS mengajukan dialog dengan pemerintah maupun kebebasan mendirikan OMS, mencalonkan diri sebagai calon legislatif

Dimensi Nilai

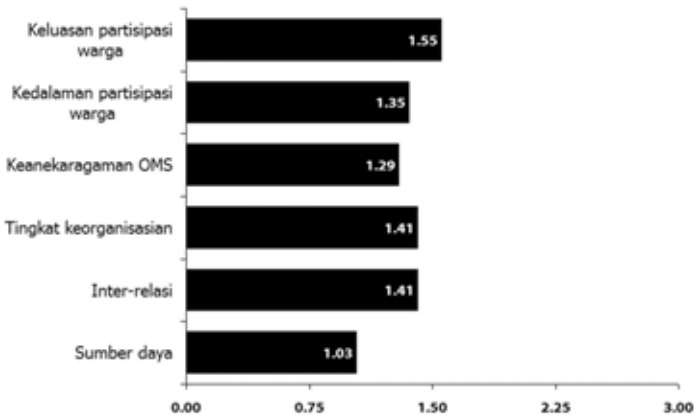
- Nilai toleransi dan anti kekerasan tumbuh subur di kalangan MS dan OMS Bima
- Kelompok perempuan Bima lebih aktif mempromosikan dan mempraktekkan nilai-nilai MS, misalnya anti kekerasan, toleransi, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender, transparansi dan keberlanjutan lingkungan.

Dimensi Dampak

- Aktor-aktor masyarakat sipil di Bima tanggap terhadap isu-isu sosial pokok di masyarakat dan dapat menjadi wakil dari kepentingan publik.
- Kepercayaan masyarakat terhadap OMS dan aktor-aktor MS cukup tinggi

- Beberapa OMS mempunyai kemampuan advokasi yang berhasil mendorong kebijakan publik yang bermanfaat untuk masyarakat (misal Perda ADD, alokasi ADD dalam APBD Bima, kenaikan anggaran ikatan bidan)
- OMS mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas berpendapat dalam forum-forum formal, memperluas jaringan antar MS, membuat kontrak politik.

DIMENSI STRUKTUR



Dari hasil pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) tahun 2009, dimensi Struktur di kabupaten Bima mendapat penilaian 1,34 (kurang sehat). Lima subdimensi yang mendapatkan penilaian kurang sehat adalah Keanekaragaman Arena MS (1,29), Sumberdaya (1,03), Kedalaman partisipasi warga (1,35), Tingkat Keorganisasian (1,41) dan Interrelasi Antaraktor (1,41). Sedangkan Sub Dimensi Keluasan Partisipasi Warga mendapatkan penilaian cukup sehat (1,55).

Nilai yang diperoleh Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga menggambarkan bahwa keterlibatan warga dalam arena MS dan proporsi warga yang terlibat dalam beberapa aktivitas di arena MS cukup luas seperti dalam kerja-kerja sukarela, menyumbang untuk amal dan kegiatan kolektif komunitas. Ada tiga indikator yang menyumbang pada hasil penilaian subdimensi tersebut. Ketiganya dinilai berada pada kondisi cukup sehat yakni Menyumbang Untuk Amal (1,79), Kerja Sukarela (1,91) dan

Kegiatan Kolektif Komunitas (1,72).

Secara umum, sumbangan warga ditujukan untuk pembangunan sarana fisik seperti masjid, jalan, lapangan, dan sebagainya maupun untuk kepentingan sosial kemasyarakatan seperti sumbangan pada hajatan, kematian, hari besar (agama dan nasional), posyandu dan membantu warga miskin mengurus kartu Jamkesmas.

> *"Walaupun OMS banyak membantu namun yang saya tahu interaksi antara OMS dan perusahaan-perusahaan swasta masih kurang. Itu dikarenakan OMS belum memiliki akses terhadap perubahan yang ada di dalam komunitas maupun di luar. Begitu interaksi antara OMS dengan pemerintah. OMS sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah namun pemerintah tidak terbuka terhadap peran OMS.*
>
> **Hayati Nufus (JARPUK)**

Bentuk-bentuk kerja suka rela warga di antaranya adalah gotong royong. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pembersihan masjid, penanganan wabah muntaber dan membantu warga lain dalam mengurus pendaftaran Kejar Paket C oleh PKBM. Terdapat perbedaan penilaian antara peserta dari kelompok perempuan dan laki-laki. Kelompok perempuan memberikan skor 1,88, lebih tinggi daripada laki-laki yang memberikan skor (1,67) pada Indikator Menyumbang untuk amal. Ini juga terjadi pada Indikator Kerja sukarela. Kelompok perempuan memberikan penilaian 2,04, yang lebih tinggi dibandingkan kelompok laki-laki (1,74). Berdasarkan hasil diskusi terungkap bahwa sebagian besar praktek kerja sukarela maupun kedermawanan seperti yang dikemukakan pada contoh-contoh di atas didominasi oleh kaum perempuan. Temuan lainnya adalah keberadaan OMS keagamaan (Islam) perempuan di bawah naungan Muhammadiyah dan NU, banyak ditemukan di wilayah pedesaan, kecamatan sampai kabupaten. Selain melakukan syiar, mereka juga cukup banyak melakukan kerja-kerja sosial.

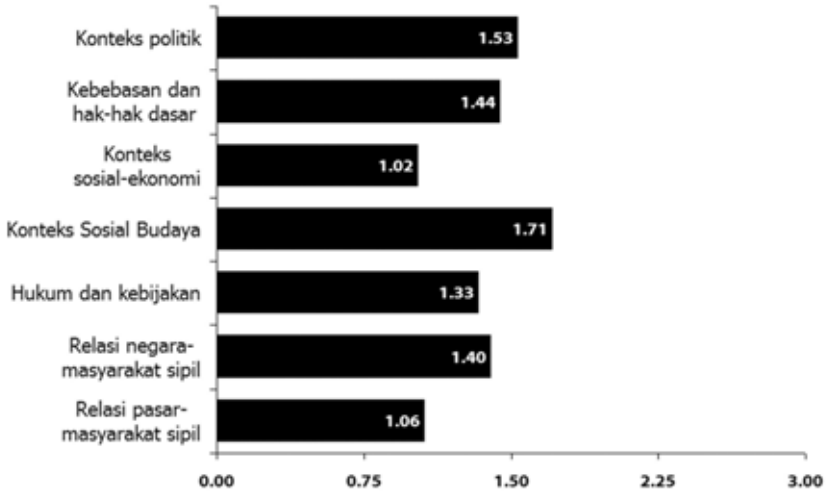
Skor terendah pada Dimensi Struktur diperoleh subdimensi Sumber Daya (1,03). Salah satu penyebabnya adalah masih tergantungnya sumberdaya OMS terhadap dana dari pihak lain (lembaga donor,

pemerintah, swasta, dan sebagainya). Belum ada kemampuan pengelolaan dan keterampilan dalam menggali sumberdaya/potensi diri dari OMS itu sendiri. Keberadaan lembaga donor yang memungkinkan untuk memberikan dukungan juga sedikit. Akses terhadap dana dari Pemerintah Kabupaten belum banyak diketahui OMS kecuali untuk bidang-bidang pemberdayaan perempuan, koperasi dan usaha kecil. Namun akses untuk memperoleh dana tersebut sangat sulit, dan seandainya berhasil bisanya dana yang turun mengalami pemotongan. Di sisi lain, kurangnya kapasitas SDM merupakan tantangan yang harus segera dijawab. Kapasitas personil di OMS cenderung didominasi oleh beberapa orang saja dan hampir tidak tampak adanya regenerasi. Sedangkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi juga masih tertinggal.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Struktur sebagai berikut:

- Membangun dan mengembangkan mekanisme komunikasi dan kerjasama antar aktor-aktor MS guna meningkatkan sinergi antar OMS.
- Meningkatkan partisipasi perempuan untuk mengambil peran pada posisi strategis dalam sebuah musyawarah maupun kepemimpinan di organisasi di Kabupaten Bima, guna mewujudkan kesetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan.
- Menekankan proses pembelajaran terhadap kaderisasi kepemimpinan tanpa membedakan jenis kelamin, kelas sosial, kelompok tua dan muda.
- Memanfaatkan potensi kebersamaan warga dalam hal amal atau sumbangan sangat memungkinkan untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Untuk itu warga perlu didorong untuk memiliki tabungan desa secara swadaya, yang dikelola oleh OMS di desa/kecamatan setempat.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi Lingkungan mendapatkan nilai buruk (1,35). Beberapa subdimensi yang berada pada kondisi kurang sehat adalah Konteks Sosial-Ekonomi (1,02), Relasi Pasar-MS (1,06), Hukum dan kebijakan (1,33), Relasi negara-MS (1,40), serta Kebebasan Dasar (1,44). Meskipun demikian ada beberapa subdimensi yang dapat menjadi aset untuk memperbaiki kondisi yang ada, karena nilainya berada pada kategori cukup sehat, yaitu Konteks Sosial Budaya (1,71) dan Konteks Politik (1,53).

Skor tertinggi Dimensi Lingkungan ada pada Subdimensi Konteks Sosial-Budaya (1,71). Peserta lokakarya menilai bahwa norma dan budaya setempat masih dapat merekatkan hubungan sosial, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat suku, agama maupun ras. Toleransi dan kerja sama antar pemeluk agama berbeda dipandang cukup baik. Para pemeluk agama yang berbeda saling menghormati, bahkan saling membantu dalam membangun rumah ibadah. Di desa Palama dan Mbawa, Kecamatan Donggo, toleransi yang terjadi antara pemeluk agama Islam, Kristen dan Katolik sangat tinggi. Jika ada orang yang meninggal dunia, semua masyarakat saling membantu tanpa melihat agama yang dianutnya. Hal ini dipertegas dengan hasil IMS pada Indikator Toleransi yang memperoleh skor 1,98.

Kesadaran mendahulukan kepentingan umum juga dinilai tumbuh di masyarakat Bima. Skor yang diperoleh pada indikator tersebut berada pada kondisi cukup sehat (1,88). Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersedia untuk menyerahkan lahannya dalam pembangunan jalan dan pelebaran gang, baik lahan kebun maupun halaman rumahnya. Di desa Palawa, Kecamatan Donggo, masyarakat pun bersedia bergotong royong untuk memperpanjang pembangunan jalan dari rencana semula 0,5 km (sesuai anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28 juta) menjadi 1,5 km dengan biaya ditanggung masyarakat secara swadaya.

Skor terendah pada dimensi ini ada pada Subdimensi Konteks Sosial-Ekonomi yang memperoleh nilai kurang sehat (1,02). Hal ini terkait dengan pendapatan masyarakat yang masih di bawah UMR[2]. Namun perempuan memberikan nilai lebih tinggi pada subdimensi ini ditunjukkan oleh skor peserta perempuan 1,08 dan laki-laki 0,95. Dalam lokakarya IMS peserta menganggap bahwa perempuan lebih memahami pengelolaan ekonomi rumah tangga.

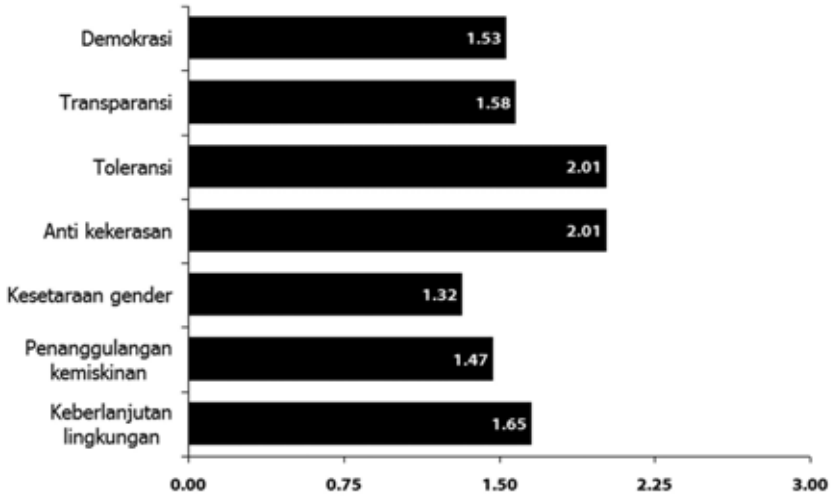
Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan sebagai berikut:

Melihat tantangan dan aset di berbagai sudimensi dan indikator di atas, prioritas rekomendasi untuk perbaikan Dimensi Lingkungan di antaranya adalah:

- ADD disalurkan sesuai dengan UU yang berlaku
- Mendesak terbentuknya Perda transparansi informasi
- Menegakan supremasi hukum untuk memberantas korupsi/ pungli
- Meningkatkan kerjasama OMS dan sektor swasta
- Meningkatkan interaksi yang intensif antara OMS dengan pemerintah agar kepedulian pemerintah terhadap OMS meningkat
- Mendesak pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan.

[2] Di Kabupaten Bima pada 2009, Upah Minimum Ratio per hari sebesar Rp. 20.000,-, sementara pendapatan masyarakat masih berkisar pada pendapatan Rp. 7.000 per hari.

DIMENSI NILAI



Pada penilaian IMS tahun 2009, Dimensi Nilai memperoleh skor cukup (1,65). Subdimensi Toleransi (2,01) dan Anti Kekerasan (2,01) dan Keberlanjutan Lingkungan (1,65) menjadi penyumbang positif. Subdimensi Transparansi mendapatkan skor 1,58, Demokrasi (1,53). Sementara dua subdimensi lainnya berada pada kategori kurang sehat yaitu Penanggulangan Kemiskinan 1,47 dan Kesetaraan Gender 1,32.

Skor tertinggi pada dimensi Nilai diperoleh subdimensi Toleransi (2,01) dan Anti Kekerasan (2,01), artinya MS Kabupaten Bima dinilai cukup berhasil dalam mempraktikkan kedua nilai tersebut di dalam jajarannya dan mempromosikannya kepada masyarakat luas. Nilai toleransi juga dikembangkan oleh organisasi keagamaan dalam kegiatan sarasehan lintas agama yang pernah dimotori oleh NU.

> *Yang paling membuat saya merasa hebat dan merasa begitu berharga yaitu pada saat memprotes pemerintah daerah terhadap rendahnya kesetaraan gender dalam struktur pemerintahan daerah. Bagi saya ini penting dilakukan karena sangat banyak perempuan-permpuan potensial yang harus diberikan kesempatan dalam mengabdikan diri di jenjang yang sama dengan laki-laki. Pemegang jabatan penting dalam struktur keperintahan tidak hanya harus di pegang oleh kaum*

adam akan tetapi harus pula ada sentuhan dari kaum hawa, saya merasa mereka lebih memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi

. **Dedi Apriadi (Direktur LEINTSA)**

Kelompok perempuan memberikan skor Subdimensi Toleransi (2,10), lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (1,90). Menurut penilaian peserta lokakkarya hal ini disebabkan karena perempuan dinilai lebih aktif bila dibandingkan dengan laki-laki dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang terdiri dari beragam suku dan agama sehingga pemahaman dan praktik-praktik toleransi lebih tinggi.

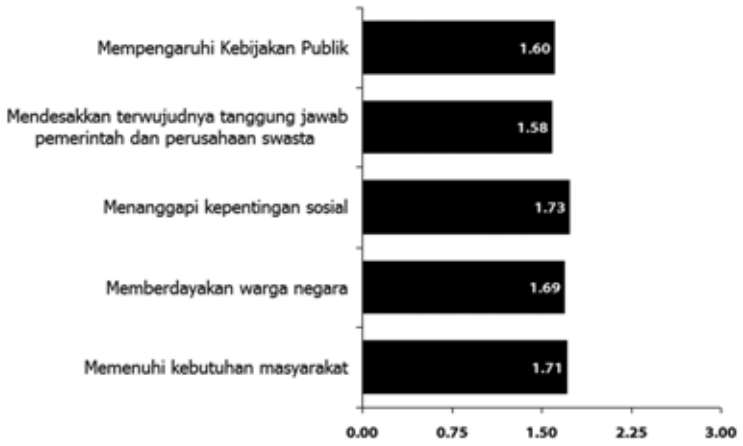
Subdimensi Anti Kekerasan mendapat nilai 2,01 (cukup sehat), artinya di Kabupaten Bima, sebagian besar masyarakatnya mempromosikan anti kekerasan dan perdamaian di dalam arena MS kepada masyarakat luas. Faktor pendukung nilai tersebut di antaranya adalah UU KDRT sering disosialisasikan dalam bentuk seminar, *hearing* antara OMS - pemerintah, diseminarkan oleh berbagai aktivis MS, OMS dan non-OMS ke pemerintah dan pihak legislatif. Kesadaran perilaku dan sikap anti kekerasan masyarakat Bima dapat dibuktikan bilamana terjadi perkelahian antar kampung atau warga, maka ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh tomas, toga dan pemerintah desa maupun dari pihak keluarga. Pada umumnya nasehat-menasehati antar warga masyarakat merupakan cara mempromosikan perdamaian di Kabupaten Bima. Perempuan cukup berperan dalam mempromosikan anti kekerasan, misalnya ketika ada perkelahian, perempuan selalu melerai, sehingga kericuhan tidak merambat.

Skor terendah diperoleh Subdimensi Kesetaraan Gender yang masuk kategori kurang sehat (1,32). Perolehan skor ini dipengaruhi oleh fakta bahwa perempuan masih diposisikan untuk mengurus administrasi di kalangan OMS yang beranggotakan laki-laki dan perempuan. Misalnya posisi pada struktur organisasi, pengorganisasian seminar, pelatihan, dan sebagainya. Walaupun secara umum berada dalam kondisi buruk, masih ada indikator yang memperoleh nilai cukup yaitu Mempromosikan Kesetaraan Gender (1,60). Perempuan banyak terlibat dalam kegiatan diskusi di komunitas, pelatihan-pelatihan, pendampingan kelompok-kelompok perempuan usaha kecil dan seminar.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Nilai sebagai berikut:

- Adanya upaya OMS, Non OMS dan MS untuk mendorong adanya perda partisipasi perempuan dalam pembangunan di tingkat kabupaten Bima
- Perlunya ada gerakan bersama anti kekerasan perempuan oleh MS, OMS dan MS di ranah publik.
- Memperjuangkan kebijakan kepada pihak legislatif dan eksekutif agar peran perempuan lebih diutamankan di bidang sosial budaya, politik dan ekonomi
- Peningkatan kapasitas, promosi kesadaran dan praktek kesetaraan gender di kalangan OMS maupun pemerintah. Misalnya melalui pelatihan mainstreaming gender, lokakarya anti kekerasan terhadap perempuan terutama perempuan yang termarjinalkan.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi dampak di Kabupaten Bima mendapat nilai 1,66 (cukup sehat). Nilai ini ditunjang oleh subdimensi respon terhadap kepentingan sosial 1,73 (cukup sehat), pemenuhan kebutuhan masyarakat 1,71 (cukup sehat) dan pemberdayaan masyarakat 1,69 (cukup sehat). Adapun nilai-nilai yang kurang menyumbang terhadap pencapaian dampak adalah

subdimensi mempengaruhi kebijakan publik yang memperoleh nilai 1,60 dan akuntabilitas sektor Negara dan pasar mendapat nilai 1,58 walaupun kedua subdimensi tersebut dalam kategori cukup sehat.

> *"Apa yang saya peroleh dari teman, masyarakat, LSM dan pemerintah melalui diskusi-diskusi, pertemuan atau moment-moment lainnya, dari pengalaman yang saya dapatkan tersebut biasanya saya transferkan/berikan kepada masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa yang didapatkan dari semua itu saya terapkan pada diri, keluarga, lingkungan, misalnya bagaimana merubah perilaku.*
>
> **Dahlia Jufri (Pengurus Forum Masyarakat Tani Pajurasa).**

Skor tertinggi dimensi Dampak diperoleh subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (1,73). Aktor-aktor masyarakat sipil di Bima tanggap terhadap isu-isu sosial pokok di masyarakat dan dapat menjadi wakil dari kepentingan publik. Beberapa contoh aksi-aksi masyarakat sipil yang menujukkan kondisi tersebut di antaranya adalah masyarakat di Desa Ngali Kecamatan Belo berusaha untuk mempengaruhi pemerintah mencabut izin eksplorasi tambang mangaan, masyarakat Oi Panihi Kecamatan tambora mengusulkan ke Pemda pengadaan Pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk penerangan desa dan masyarakat di kawasan Tambora mendorong dicabutnya ijin IPK (Ijin Pengelolaan Kayu). Kelompok perempuan memberikan skor lebih tinggi (1,75) daripada kelompok laki-laki (1,72) pada subdimensi tersebut. Perempuan dinilai lebih peka dalam merespon/menanggapi isu-isu sosial yang dekat dengan kehidupannya. Sebagai contoh, ketika ada kejadian luar biasa (KLB) malaria dan gizi buruk, kelompok perempuan dinilai lebih cepat tanggap dibanding laki-laki.

Skor terendah dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Akuntabilitas Sektor Negara dan Pasar (1,58), walaupun skor tersebut masuk kategori cukup baik. Beberapa aksi OMS telah dilakukan untuk mendesakkan pemenuhan tanggung jawab negara, seperti lobi dan hearing ke DPRD untuk mendesak diimplementasikannya Perda ADD di Kabupaten Bima dan aksi damai menuntut penghentian penambangan besi di Desa Wera. Contoh aksi OMS dalam menuntut tanggung jawab sektor swasta antara lain adalah warga Desa Ndano meminta kepada perusahaan air mineral Lam-Lam mempekerjakan orang lokal.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai berikut:

- Mendorong kesadaran kritis masyarakat sipil terhadap nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas pembangunan di semua level;
- Mendorong lahirnya/meningkatkan peran-peran OMS terhadap pengawasan/daya kritis terhadap penggunaan dan pengelolaan aset-aset daerah yang lebih efektif dan efisien;
- Mendorong lahirnya Perda partisipatif, transparansi dan akuntabilitas serta Perda Pelayanan Publik
- Mendorong pengusaha-pengusaha untuk bertanggung jawab terhadap dampak kerusakan lingkungan baik lingkungan social maupun lingkungan alam
- Mendesak pemerintah dan pengusaha untuk membuka peluang pasar bagi hasil-hasil industri kecil
- Mendorong kepedulian sosial bagi pengusaha besar terhadap lingkungan sosial
- Menciptakan rasa solidaritas dan profesionalisme yang bertanggung-gugat dalam kerja sama untuk membangun jaringan kerja antara MS.

Kabupaten Lombok Tengah

Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, kabupaten ini berada di 116^0 -116^024^0 Bujur Timur dan 8^024 - 8^057 Lintang Selatan. Batas wilayah administratif Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2009, jumlah penduduk tercatat sebanyak 856.675 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 382.531 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 474.144 jiwa. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 Km persegi, maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 709 jiwa/Km persegi. Dilihat kondisi kecamatan, maka kecamatan Praya masih merupakan kecamatan terpadat, karena untuk setiap kilo meter persegi dihuni oleh 1.657 jiwa, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh kecamatan Batukliang dan Kopang. Sebaliknya Kecamatan Batukliang Utara merupakan kecamatan paling jarang karena untuk satu kilo meter persegi hanya dihuni oleh 254 jiwa penduduk.

Status Organisasi Masyarakat Sipil

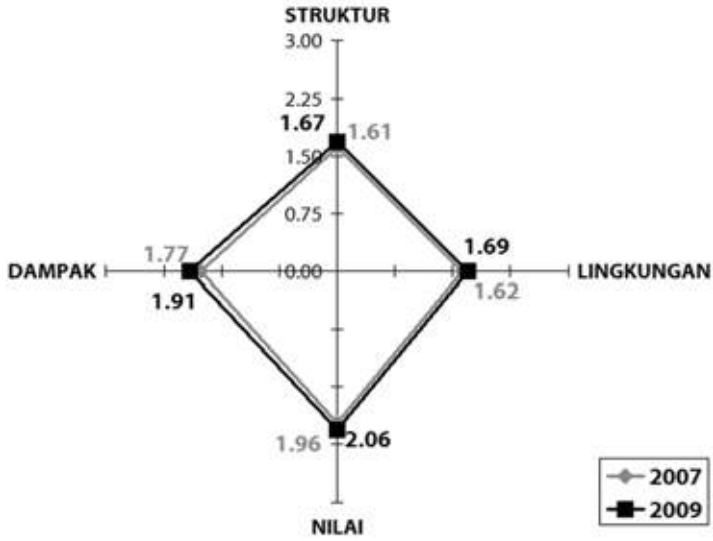
Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang dilakukan kaji ulang pengukuran Indeks Masyarakat Sipil pada tahun 2009. Kaji ulang ini dilakukan berdasarkan hasil diskusi para peserta lokakarya IMS yang menunjukkan terjadinya perubahan cukup signifikan

terhadap kondisi masyarakat sipil di Lombok Tengah pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2007. Kaji ulang dilakukan pada beberapa indikator subdimensi di semua dimensi, yaitu:

1. **Dimensi Struktur**
   - Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga: Indikator Aksi Politik Non Partisan dan Indikator Keanggotaan di OMS
   - Subdimensi Kedalaman Partisipasi Warga: Indikator Keanggotaan di OMS
   - Subdimensi Keanekaragaman MS: Indikator Keanekaragaman OMS, Indikator Kepemimpinan OMS dan Indikator Distribusi OMS
   - Subdimensi Inter-relasi: Indikator Komunikasi dan Indikator Kerjasama
2. **Dimensi Lingkungan**
   - Subdimensi Konteks Politik: Indikator Hak-Hak Politik, Indikator Penegakan Hukum dan Pengakuan Hukum Adat dan Indikator Desentralisasi Anggaran
   - Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar: Indikator Kebebasan Sipil
   - Subdimensi Konteks Sosio-Ekonomi: Indikator Konteks Sosio-Ekonomi
   - Sudimensi Konteks Sosial Budaya: Indikator Budaya Patriarkhi
   - Subdimensi Relasi Negara – Masyarakat Sipil: Indikator Kerjasama/Dukungan
3. **Dimensi Nilai**
   - Subdimensi Demokrasi: Indikator Aksi-Aksi MS untuk Mempromosikan Demokrasi dan Indikator Aksi-Aksi MS untuk Mempromosikan Transparansi
   - Subdimensi Kesetaraan Gender: Indikator Kesetaraan Gender di dalam Arena MS, Indikator Praktek-Praktek Kesetaraan Gender di dalam OMS dan Indiator Aksi-Aksi MS untuk Mempromosikan Kesetaraan Gender
4. **Dimensi Dampak**
   - Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial: Indikator Memberikan Tanggapan dan Indikator Kepercayaan Publik

- Subdimensi Memberdayakan Warga Negara: Subdimensi Memberikan Informasi/Mendidikan Warga Negara
- Subdimensi Memenuhi Kebutuhan Masyarakat: Indikator Memenuhi Kebutuhan Kelompok-Kelompok Ter–pinggirkan

Grafik di bawah ini merupakan intan IMS hasil pengukuran tahun 2009 dan 2007.



Grafik 7 Intan IMS Kabupaten Lombok Tengah

Secara umum, masyarakat sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2009 berada pada kondisi cukup sehat. Hal ini digambarkan oleh perolehan skor IMS di semua dimensi yang berada pada kategori cukup sehat, yaitu struktur (1,67), lingkungan (1,69), nilai (2,06) dan dampak (1,91). Jika dibandingkan dengan tahun 2007, skor IMS pada tahun 2009 mengalami peningkatan di semua dimensi, artinya terjadi perbaikan kondisi masyarakat sipil baik dari sisi struktur, lingkungan, nilai dan dampak pada tahun tersebut.

Kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Tengah ada pada Dimensi Nilai (2,06) yang memperoleh skor paling tinggi. Menurut para peserta lokakarya IMS, kondisi tersebut didukung oleh cukup banyaknya aksi-aksi OMS untuk mengatasi masalah kemiskinan, baik dengan dukungan lembaga dana maupun dari program-program pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan biasanya dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kapasitas perempuan. Sedangkan tantangan utamanya ada pada Dimensi Struktur (1,67) yang memperoleh skor paling rendah. Sumber daya merupakan tantangan bagi kemandirian, keberlanjutan dan eksistensi masyarakat sipil di Lombok Tengah. Kondisi ini tidak mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2007.

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Tengah

Dimensi Struktur

- Semakin banyak aksi masyarakat sipil mempertanyakan pemenuhan hak-haknya
- Kedermawanan masyarakat untuk membantu sesama seperti sumbangan untuk amal cukup tinggi
- Sebaran OMS cukup meluas di wilayah Lombok Tengah dan aktivitasnya pun cukup beragam

Dimensi Lingkungan

- Masyarakat cukup leluasa menggunakan hak-hak politiknya
- Dalam konteks desentralisasi, desa mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan APBDes dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

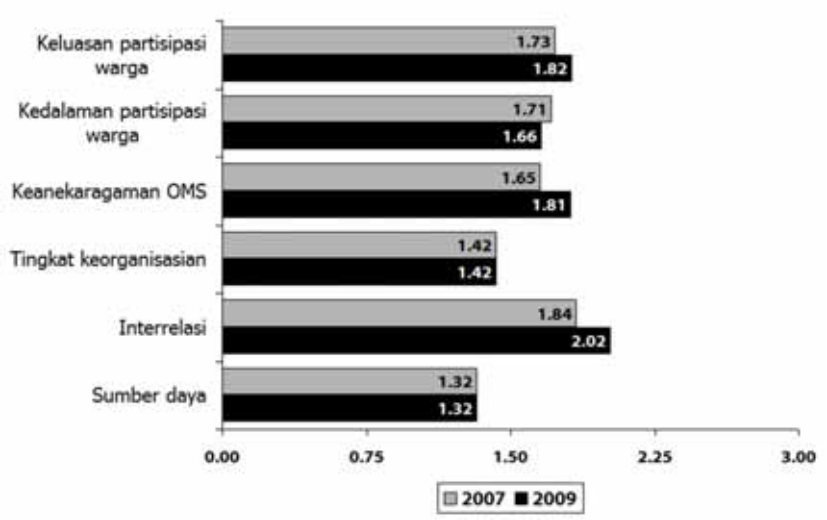
Dimensi Nilai

- Promosi kesetaraan gender cukup giat dilakukan oleh masyarakat sipil
- Mulai muncul kelompok-kelompok perempuan seperti kelompok tani
- Keberanian dan keberdayaan perempuan mulai meningkat dengan munculnya caleg-caleg perempuan dalam Pemilu

Dimensi Dampak

- Masyarakat sipil relatif tanggap terhadap kepentingan sosial melalui tindakan-tindakan fasilitasi, mediasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat yang mengalami persoalan/kasus.

DIMENSI STRUKTUR



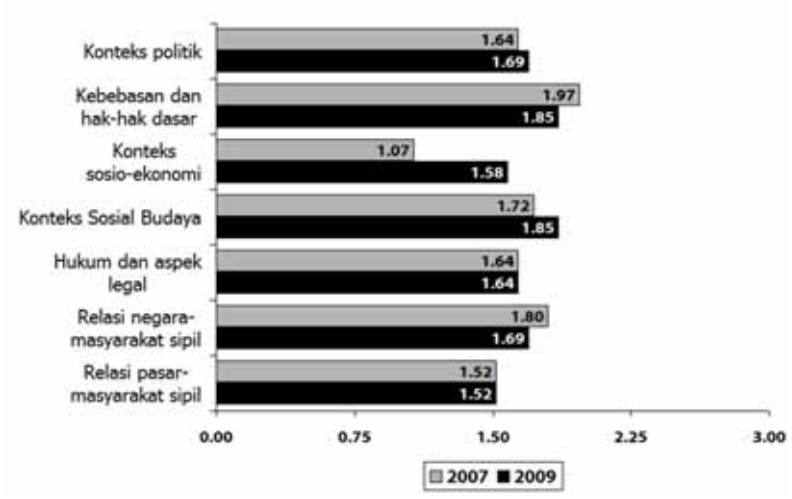
Dimensi Struktur menggambarkan sejauh mana kekuatan internal masyarakat sipil untuk dapat memerankan dirinya sebagai unsur penyeimbang antara ranah negara dan sektor pasar. Hasil Kaji Ulang IMS tahun 2009 menunjukkan bahwa Dimensi Struktur (1,67) mengalami peningkatan meskipun tidak siginifikan bila dibandingkan dengan hasil IMS pada tahun 2007 (1,61). Subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap kondisi tersebut adalah subdimensi-subdimensi Inter-Relasi (2,02), Partisipasi Warga (1,82) dan Keanekaragaman OMS (1,81). Subdimensi-subdimensi yang masih perlu peningkatan adalah Kedalaman Partisipasi Warga (1,66) yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan skor pada tahun 2007 (1,77). Tingkat Keorganisasian (1,42), dan Sumber Daya (1,32). Dua subdimensi terakhir berada pada kondisi kurang sehat dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2007.

Skor tersebut menunjukkan bahwa di Lombok Tengah, relasi antar sesama entitas masyarakat sipil terjalin cukup sehat. Keterlibatan warga dalam ranah sosial dan politik juga cukup luas. Keberadaan OMS juga cukup beragam, tersebar cukup luas di wilayah Lombok Tengah dan mulai muncul penggerak OMS dari kalangan perempuan. Sementara itu, kemampuan masyarakat sipil Lombok Tengah untuk mengorganisir dan mengatur dirinya sendiri serta kemampuan sumber daya dalam hal menggali sumber daya maupun kapasitas SDM masih lemah.

Skor tertinggi dimensi struktur diperoleh subdimensi Inter-Relasi (2,02) yang masuk kategori cukup cukup sehat. Kondisi ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan hasil IMS tahun 2007 yang memperoleh skor (1,84). Saat ini situasi inter-relasi antar OMS di Lombok Tengah makin baik dan komunikasi maupun kerja sama antar OMS juga meningkat. Misalnya, ada pertemuan berkala berkaitan dengan program atau agenda yang akan dilakukan bersama. Sebelumnya, OMS mempunyai kecenderungan untuk bergerak sendiri-sendiri, namun akhir-akhir ini sudah mulai membangun jejaring. Misalnya Berugak Desa dan Jarpuk berjaringan dalam Konsorsium OMS, Suaka dengan Lesa Demarkasi, PKK dengan Posyandu dan Konsorsium OMS dengan KKMSK. Untuk kasus Konsorsium OMS, anggota cukup aktif, misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan atau terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan Konsorsium atau sesama anggota walaupun undangan hanya disampaikan melalui SMS.

Skor terendah dimensi struktur diperoleh Subdimensi Sumber Daya (1,32) yang masuk kategori kurang sehat. Kondisi kurang sehat ini sama dengan kondisi pada saat pengukuran IMS tahun 2007 sehingga indikator-indikator pada subdimensi ini tidak dilakukan penilaian ulang. Sumber daya yang dimiliki dan/atau mampu diakses oleh kalangan OMS dinilai belum mampu mencukupi untuk mendukung keleluasaan kiprah OMS dalam bekerja di ranah sosial dan non-profit. Diakui oleh para peserta lokakarya bahwa sebagian besar OMS berada pada kondisi survival untuk menghidupi operasional lembaga dan kerja-kerjanya.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi Lingkungan menggambarkan kondisi lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya dan aspek legal (hukum) yang berkembang di sekitar ranah masyarakat sipil. Pada Lokakarya IMS tahun 2009 dimensi terebut mendapatkan penilaian cukup sehat (1,69), dan mengalami peningkatan 0,07 dibandingkan hasil penilaian tahun 2007 (1,62). Subdimensi-subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap kondisi tersebut adalah kebebasan dan hak-hak dasar (1,85), konteks sosial budaya (1,85), konteks politik (1,69) dan relasi negara– masyarakat sipil (1,69). Sedangkan subdimensi yang perlu memperoleh perhatian adalah Subdimensi Konteks Sosio–Ekonomi, Subdimensi Hukum dan Aspek Legal (1,64), Subdimensi Relasi Pasar – Masyarakat Sipil (1,52).

Skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil dan pers di Lombok Tengah mempunyai kebebasan untuk berekspresi walaupun cukup terbatas, ada rasa saling percaya dan menghargai serta lingkungan politik seperti hak politik dan Pemilu, kebijakan anggaran terkait desentralisasi dan keberadaan hukum cukup mendukung gerak OMS.

Skor tertinggi Dimensi Lingkungan diperoleh dua subdimensi, yaitu Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar (1,85) serta Dimensi Konteks Sosial Budaya (1,85). Keduanya masuk kategori cukup sehat. Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar nilainya mengalami penurunan sebesar 0,12 dari skor tahun 2007 yang mencapai angka 1,97. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya skor pada Indikator Kebebasan Sipil yang memperoleh nilai 1,84 pada hasil IMS 2009, lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang mencapai nilai 2,19. Menurut para peserta lokakarya IMS, di tahun 2009, kebebasan menyampaikan pendapat agak oleh kalangan OMS terbelenggu dengan intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak tertentu. Hal ini dialami oleh Suaka, yaitu ketika menyampaikan pendapat melalui proses hearing dengan Pemda kurang memperoleh tanggapan. Namun, ketika mereka mengubah strategi dengan melakukan demonstrasi, aktivis OMS memperoleh intimidasi dari oknum pejabat Pemda.

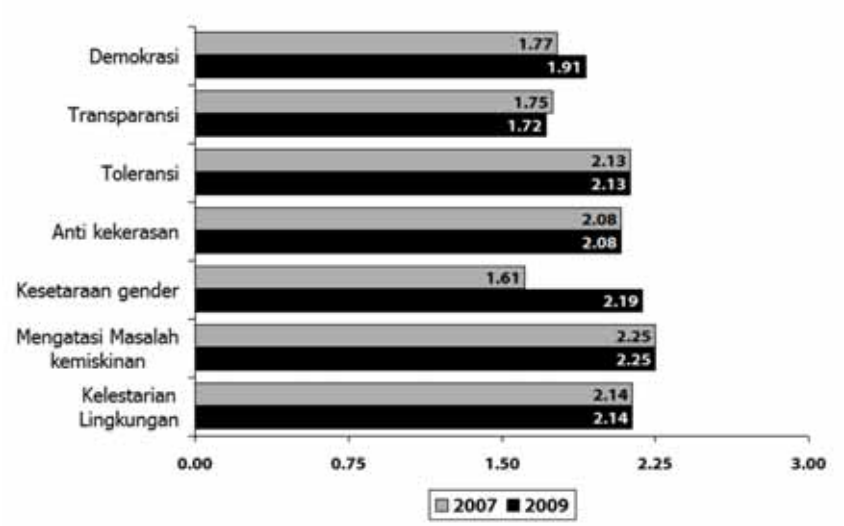
Kekuatan Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar disumbang oleh Indikator Kebebasan Pers. Pada Lokakarya IMS 2007 terungkap bahwa lahirnya UU Pers memungkinkan pertumbuhan baik media cetak dan elektronik di berbagai daerah. Radio Komunitas tumbuh subur di Kabupaten Lombok Tengah, misalnya radio GS (Gema Suara), Radio Bayangkara, Radio Yatofa, Radio CDS dan Radio Mandalika. Hal yang sama namun dalam jumlah yang relatif lebih sedikit juga terjadi pada media

cetak dengan lahirnya Koran Nurani Rakyat dan Lintas. Jumlah wartawan di Lombok Tengah juga meningkat dari 3 orang pada tahun 2003 menjadi 21 orang pada tahun 2007. Media juga telah leluasa memuat berita berkaitan dengan isu korupsi dan KDRT meskipun belum ada radio yang khusus mengangkat isu-isu gender. Meski demikian masih ditemui sejumlah hambatan dalam kebabasan pers karena ternyata muncul juga tekanan-tekanan kepada jurnalis yang memberitakan hal-hal bernuansa buruk tentang Pemda Lombok Tengah. Para jurnalis tersebut mendapat ancaman melalui telepon. Kondisi ini berdampak pada pemberitaan pers cenderung memuat sisi positif Pemda Loteng. Pada beberapa kasus, kalau ada informasi yang mengkritik pemerintah, maka ada kemungkinan media tersebut tidak mendapat ijin terbit.

Subdimensi Konteks Sosial Budaya (1,85) merupakan salah satu subdimensi yang memperoleh nilai tertinggi pada Dimensi Lingkungan dan masuk kategori cukup sehat. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hasil IMS tahun 2007 (1,72). Perubahan cukup besar terjadi pada relasi antara perempuan dan laki-laki yang ditunjukkan oleh meningkatnya penilaian atas Indikator Budaya Patriarki, dari kurang sehat (1,34) pada tahun 2007 menjadi cukup sehat (2,00) pada tahun 2009. Budaya partriarki mulai mengalami penurunan disebabkan adanya pendidikan-pendidikan tentang pemahaman gender. Kampanye tentang kesetaraan gender juga semakin banyak yang memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan. Contoh konkret dapat dilihat dari jumlah murid perempuan di sekolah-sekolah lebih banyak dibandingkan murid laki-laki. Kondisi ini tak lepas dari kontribusi berbagai program dan inisiatif, baik dari OMS maupun pemerintah, yang memberikan kesempatan lebih besar kepada perempuan untuk bersekolah melalui program-program beasiswa. Contoh lainnya adalah semakin banyak perempuan mengajukan diri sebagai calon legislatif dan semakin banyak perempuan yang memberanikan diri untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Situasi positif mengenai relasi perempuan dan laki-laki ini tidak serta merta mencerminkan bahwa persoalan kesetaraan gender di Lombok Tengah sudah selesai. Perhatian harus terus diberikan kepada isu ini karena diakui oleh peserta lokakarya bahwa kondisi tersebut tercipta karena tingginya dukungan dan desakan dari pihak luar. Sementara itu, mindset masyarakat sebenarnya belum mengalami perubahan signifikan terkait upaya mengedepankan peran dan kesempatan bagi perempuan.

Skor terendah Dimensi Lingkungan diperoleh Subdimensi Relasi Pasar–Masyarakat Sipil (1,52) yang masuk kategori sehat. Subdimensi ini masih tetap sama nilainya dengan hasil IMS tahun 2007. CSR di Lombok Tengah relatif kecil bila dibandingkan dengan skala usaha dari perusahaan yang ada di Lombok Tengah. Di sektor pasar belum ada kebijakan perusahaan yang berpihak pada OMS, bahkan juga kepada usaha-usaha kecil dan mikro.

DIMENSI NILAI



Dimensi Nilai memberikan gambaran tentang nilai-nilai tertentu yang dikampanyekan maupun dipraktekkan oleh masyarakat sipil. Berdasarkan hasil IMS 2009, dimensi nilai masuk kategori cukup sehat dengan perolehan skor 2,06. Skor tersebut merupakan sumbangan dari Subdimensi Mengatasi Masalah Kemiskinan (2,25), Subdimensi Kesetaraan Gender (2,19), Subdimensi Kelestarian Lingkungan (2,14), Subdimensi Toleransi (2,13) dan Subdimensi Anti Kekerasan (2,08). Subdimensi yang perlu memperoleh perhatian karena perolehan skor di bawah skor total dimensi adalah Subdimensi Demokrasi (1,91) dan Subdimensi Transparansi (1,72), walaupun keduanya masuk kategori cukup sehat.

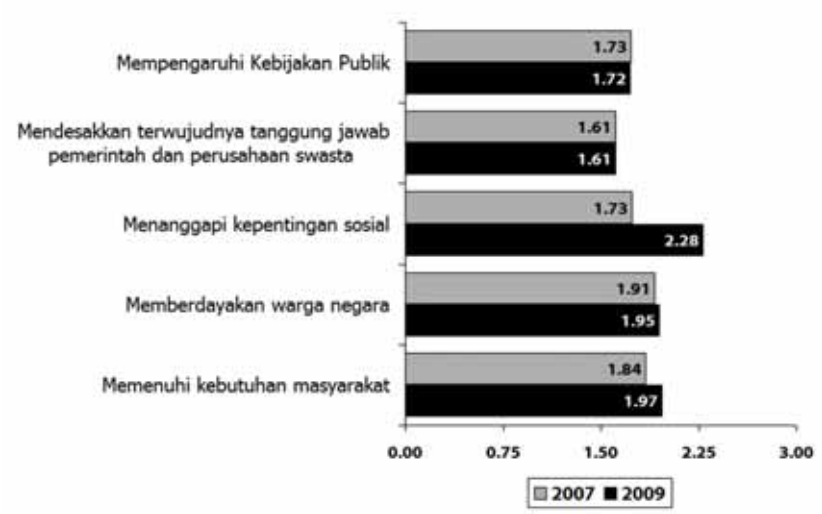
Hasil skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Lombok Tengah cukup aktif mengkampanyekan dan mempraktekkan nilai-nilai keberpihakan kepada masyarakat miskin, kesetaraan gender, melestarikan

lingkungan, toleransi dan anti kekerasan kepada pihak-pihak lainnya. Namun promosi dan praktek demokrasi dan transparansi dinilai masih memerlukan banyak perbaikan.

Skor tertinggi Dimensi Nilai diperoleh Subdimensi Mengatasi Masalah Kemiskinan (2,25) yang masuk kategori cukup sehat. Para peserta Lokakarya Kaji Ulang IMS memandang tidak perlu dilakukan penilaian pada subdimensi tersebut di atas. Cukup banyak aksi-aksi MS untuk mengatasi masalah kemiskinan, karena cukup banyak program dari lembaga dana maupun pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain pemberdayaan ekonomi, program-program ini juga mendorong pengembangan kapasitas perempuan. Hal ini juga menyumbang kepada besarnya partisipasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Beberapa contoh program yang aktif melibatkan perempuan misalnya peningkatan kapasitas perempuan buruh migran dalam hal kesetaraan gender dan pengembangan ekonomi rumah tangga, program dari PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan P2KP yang salah satunya ada alokasi dana untuk modal kelompok perempuan. Di Janapria misalnya, ada sekitar 100 kelompok perempuan, dan masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang.

Skor terendah Dimensi Nilai diperoleh Subdimensi Transparansi (1,72), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007 yang mencapai nilai 1,75, walaupun penurunannya tidak signifikan. Penurunan disebabkan oleh Indikator Korupsi di dalam OMS (1,61) pada hasil IMS 2009, padahal pada tahun 2007 mencapai 1,77. Contoh yang bisa diambil untuk menunjukkan penurunan tersebut misalnya di bidang pengelolaan koperasi. Dalam hal ini pengelola tidak mampu memberikan laporan kepada anggota meskipun iuran anggota ditarik secara rutin. Hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi organisasi per-koperasian tersebut. Di Batu Tulis misalnya, ada kelompok pengrajin yang ketua kelompoknya tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang digunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Beberapa sebab yang ditengarai menyumbang terhadap menurunnya nilai Subdimensi Transparansi di antaranya adalah kapasitas pengelola keuangan yang masih terbatas yang menyebabkan rendahnya profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan masih lemahnya kontrol publik terhadap OMS. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sering dijadikan alasan pembenar untuk tidak melakukan pertanggunggugatan terhadap konstituen.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi Dampak memberikan gambaran sejauh mana masyarakat sipil aktif dan berhasil (sukses) dalam memenuhi fungsi-fungsi pokoknya. Hasil IMS tahun 2009 menunjukkan bahwa secara umum Dimensi Lingkungan berada pada kondisi cukup sehat dengan peroleh skor 1,91 dan mengalami peningkatan dibandingkan hasil IMS tahun 2007 yang hanya memperoleh skor 1,77. Tiga subdimensi memberikan kontribusi positif. Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial mendapatkan penilaian sehat (2,28). Subdimensi Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (1,97) dan Memberdayakan Warga Negara (1,95) masuk ke dalam kategori cukup sehat. Subdimensi lainnya yang memerlukan perhatian lebih besar karena hasil skornya di skor dimensi adalah Subdmensi Mempengaruhi Kebijakan Publik (1,72) turun 0,01 dari tahun 2009 dan Subdimensi Mendesakkan Terwujudnya Tanggung Jawab Pemerintah dan Perusahaan Swasta (1,61), walaupun keduanya masuk kategori cukup sehat.

Hasil skor IMS tersebut menunjukkan masyarakat sipil Lombok Tengah pada tahun 2009 lebih aktif dan lebih berhasil memerankan fungsi-fungsi pokoknya, seperti responsif dalam menanggapi kebutuhan sosial masyarakat di lingkungannya, aktif mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta memberdayakan warga negara. Hasil-hasil kerja pada tiga subdimensi tersebut juga diakui serta diapresiasi oleh berbagai pihak yang terlibat sebagai peserta lokakarya IMS. Namun, upaya-upaya advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mendesakkan

tanggung jawab negara maupun swasta masih dinilai perlu ditingkatkan dan diupayakan secara serius di masa datang.

Skor tertinggi Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (2,28) yang masuk kategori sehat. Patut dicatat bahwa skor ini mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2007 (1,73). Skor tersebut merupakan sumbangan dari skor pada Indikator Memberikan Tanggapan (2,56) yang masuk kategori sehat. Nilai tersebut dianggap cukup mencerminkan kondisi masyarakat sipil di Lombok Tengah. OMS dinilai tanggap dalam menyuarakan, memfasilitasi, maupun memediasi masyarakat yang sedang mengalami kasus-kasus ketidakadilan. Masyarakat juga makin sering melapor ke OMS dan Konsorsium ketika menghadapi persoalan dengan pemerintah. Misalnya, kasus BLK. Sejumlah Kepala Desa bahkan menelpon OMS tentang kasus-kasus menyangkut program pemerintah di desa yang bersifat siluman. YKSSI melakukan advokasi untuk mendorong percepatan perijinan HKM untuk pengelolaan HKM. Bahkan pemantauan ADD pun dilakukan oleh beberapa OMS. Namun, terkadang sulit bagi OMS untuk menindaklanjuti beberapa isu yang diutarakan oleh masyarakat ketika tidak tersedia bukti-bukti yang akurat. Penurunan skor dari tahun 2007 terjadi karena para peserta lokakarya menganggap upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut belum membuahkan hasil yang cukup siginifikan dan dirasakan oleh masyarakat.

Skor terendah Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Mendesakkan Terwujudnya Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan Swasta (1,61) yang masuk kategori cukup sehat. Para peserta lokakarya menyatakan bahwa upaya maupun hasil-hasil kerja masyarakat sipil pada subdimensi tersebut tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2007. Upaya-upaya OMS untuk melakukan advokasi kepada pemerintah terkait dengan pelayanan dasar dinilai belum membuahkan hasil karena belum ada perubahan perilaku pemerintah yang dapat dilihat atau dirasakan oleh masyarakat. Misalnya dalam pengadaan air bersih dan pemanfaatan dana-dana program yang disalahgunakan. Upaya-upaya untuk mempengaruhi sektor perusahaan seperti PLN (di Desa Lantan) dan PDAM (di Desa Propok, Kelurahan Semayan) pernah dilakukan, namun dinilai masih sangat kecil dari segi upaya maupun hasilnya

Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, kabupaten ini berada di $115,46^0$ – $116,28^0$ Bujur Timur dan $8,12^0$ – $8,55^0$ Lintang Selatan. Luas wilayah sebesar 1672,15 Km^2 yang merupakan kabupaten terluas di Pulau Lombok dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram
- Sebelah Timur : Lombok Tengah dan Lombok Timur

Penduduk Kabupaten Lombok Barat pada akhir tahun 2009[1] berjumlah 612.976 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 298.365 jiwa dan prempuan sebanyak 314.611 jiwa. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilu 2009 terdiri dari Partai Golkar 5 orang, Partai Demokrat 5 orang, Partai Hanura 5 orang, PBB 5 orang, PPP 4 orang, PKS 4 orang, PBR 2 orang, PPD 2 orang, PPPI 2 orang, PKPB 2 orang, Partai Patriot 1 orang, PKB 1 orang, Partai Gerindra 1 orang, PAN 1 orang, PDK 1 orang dan PNBKI 1 orang.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Peta organisasi masyarakat sipil Kabupaten Lombok Barat yang disajikan dalam buku ini adalah hasil pemetaan yang dilakukan pada tahun 2007. Menurut para peserta diskusi terfokus mengidentifikasi ada 58

[1] BPS Kabupaten Lombok Barat

organisasi masyarakat sipil di Lombok Barat yang dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa dan keagamaan, forum/koalisi/aliansi, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Organisasi Rakyat (OR).

Apabila dilihat dari tingkat pengaruh, ada 25 organisasi yang masuk dalam kategori sangat berpengaruh, sebagian besar di antaranya adalah kategori lembaga keagamaan dan LSM. Lembaga-lembaga tersebut di antaranya adalah FKSPP, ASPUK, Koslata, Kopwan Sandik, SANTAI, Perakat Ombara, WALUBI, PHDI, ANNISA, Konsepsi, YKPR, YKSSI, SOMASI, NW, NU, PMKRI, Muhammadiyah, GMKI, Santiri dan PSP. Kedua kategori OMS ini cukup banyak berkiprah di isu pendidikan, baik formal maupun nonformal. Isu pendidikan dianggap merupakan isu prioritas yang perlu dikelola di Kabupaten Lombok Barat, mengingat Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten ini termasuk rendah. OMS keagamaan banyak bergerak menyediakan pelayanan pendidikan formal, sedangkan LSM banyak melakukan pendidikan kritis kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam bingkai beberapa isu sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara itu, ada 14 OMS yang diidentifikasi berpengaruh di Kabupaten Lombok Barat, yaitu Fatayat NU, SP Mataram, Paradah, Yayasan dewi uma, Jatam, GravitasiPHI, KSM Kartika, Dewan Anggaran, Lesa Demarkasi, YPMP, Dharma Wisesa, LPA dan KPI.

Status Masyarakat Sipil

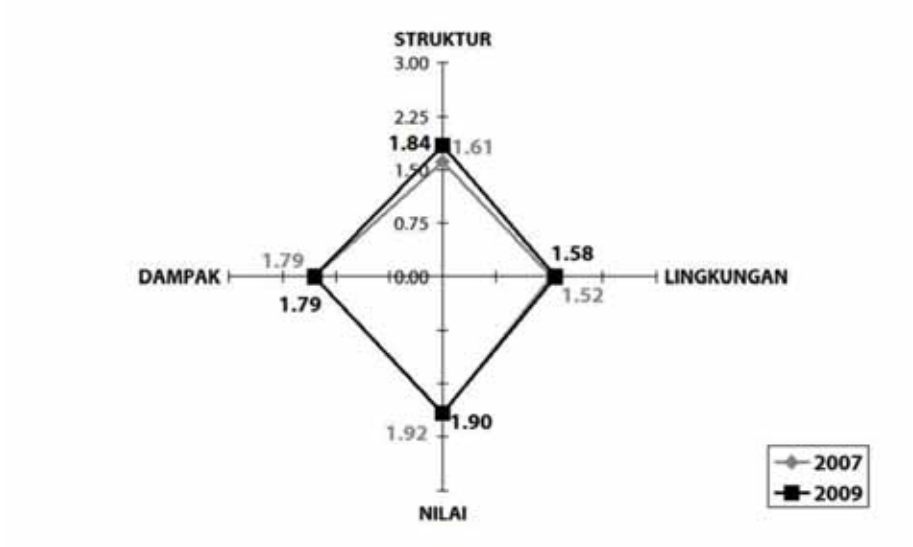
Melalui diskusi, Peserta Lokakarya Kaji Ulang IMS Kabupaten Lombok Barat 2009 menyepakati untuk menilai ulang sejumlah indikator yang diperkirakan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2007. Indikator-indikator tersebut tertera pada tabel berikut:

Table 5 Indikator IMS Kab. Lombok Barat yang Dinilai Ulang

NO	INDIKATOR	SUBDIMENSI	DIMENSI
1	Keanekaragaman OMS	Keanekaragaman MS	STRUKTUR
2	Penyebaran OMS		
3	Keberadaan Organisasi Payung Bagi OMS	Tingkat Keorganisasian	
4	Keefektifan Organisasi Payung OMS		

NO	INDIKATOR	SUBDIMENSI	DIMENSI
5	Komunikasi	Interrelasi	STRUKTUR
6	Kerja Sama		
7	Efektivitas Negara	Konteks Politik	LINGKUNGAN
8	Hak-Hak atas Informasi	Kebebasan dan Hak-Hak Dasar	
9	Kerja Sama/Dukungan	Relasi Negara–MS	
10	Anti Kekerasan di dalam Ruang MS	Anti Kekerasan	NILAI
11	Aksi-Aksi MS untuk Mempromosikan Anti Kekerasan dan Perdamaian		
12	Praktek-Praktek Kesetaraan Gender di dalam OMS	Kesetaraan Gender	
13	Aksi-Aksi MS untuk Mempromosikan Keadilan Gender		
14	Indikator Aksi-Aksi MS untuk Melestarikan Lingkungan	Keberlanjutan Lingkungan	

Peserta juga sepakat untuk tidak menilai ulang indikator-indikator yang tergabung dalam *dimensi dampak* karena perubahan kondisi pada indikator tersebut dianggap tidak signifikan untuk dinilai ulang.



Grafik 8 Intan IMS Kabupaten Lombok Barat

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum, kondisi masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2009 dinilai cukup sehat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil skor IMS di semua dimensi berada pada kategori cukup sehat, yaitu Dimensi Struktur (1,85), skor Dimensi Lingkungan (1,58), skor Dimensi Nilai (1,90) dan skor Dimensi Dampak (1,79).

Apabila dibandingkan dengan hasil skor IMS tahun 2007, kondisi masyarakat sipil pada tahun 2009 menunjukkan perubahan pada ketiga Dimensi yang beberapa indikatornya dilakukan kaji ulang. Sebagian besar indikator yang dikaji ulang mengalami peningkatan hasil skor IMS cukup signifikan, yang menunjukkan perbaikan kondisi masyarakat sipil pada indikator tersebut dibandingkan tahun 2007. Namun hasil skor IMS pada sebagian indikator lainnya mengalami penurunan. Artinya, pada tahun 2009, kondisi masyarakat sipil pada indikator tersebut memburuk dibandingkan tahun 2007. Beberapa indikator yang mengalami penurunan tersebut berada di dalam Subdimensi Konteks Politik (dalam Dimensi Lingkungan) dan Subdimensi Anti Kekerasan (dalam Dimensi Nilai). Penurunan hasil skor pada indikator dalam Subdimensi Anti Kekerasan cukup signifikan sehingga berpengaruh pada penurunan total skor di Dimensi Nilai.

Kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat ada pada Dimensi Nilai yang memperoleh skor tertinggi (1,90) atau masuk kategori

cukup sehat, walaupun jika dibandingkan pada pengukuran IMS tahun 2007, hasil skor dimensi ini menurun. Menurut para peserta lokakarya IMS, cukup banyak aksi-aksi masyarakat sipil dalam penanggulangan kemiskinan, promosi demokrasi dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan masyarakat sipil Kabupaten Lombok Barat ada pada Dimensi Lingkungan yang memperoleh skor terendah (1,58)

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Barat

Dimensi Struktur

- Masyarakat sipil cukup aktif berpartisipasi dalam menuntut kebutuhan dasar (misal dana BOS an Jamkesmas) dalam bentuk aksi-aksi damai
- Kader-kader desa cukup aktif mendorong masyarakat untuk memberikan usulan-usulan terkait implementasi program pembangunan (misalnya PNPM)
- Budaya menyumbang untuk kepentingan sosial masih tinggi
- Kalangan muda cukup aktif di organisasi kepemudaan maupun organisasi underbow partai politik
- Komunikasi dan kerja sama antar OMS semakin sering dilakukan

Dimensi Lingkungan

- Keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik telah diketahui oleh pemerintah maupun OMS, bahkan sebagian telah diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh OMS untuk mengakses informasi dari pemerintah

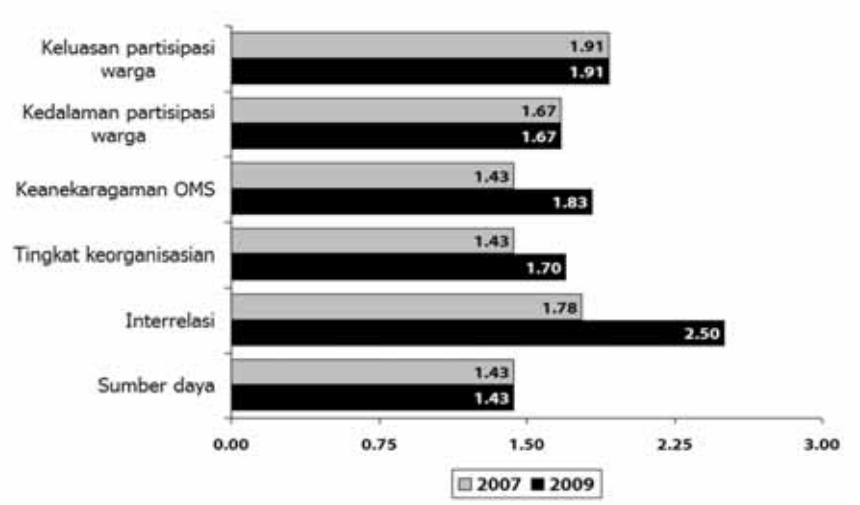
Dimensi Nilai

- Promosi nilai demokrasi, transparansi dan kesetaraan gender cukup banyak dilakukan oleh masyarakat sipil

Dimensi Dampak

- Masyarakat sipil cukup tanggap terhadap kepentingan sosial warga seperti penanganan kasus TKI dan HIV/AIDS
- Masyarakat sipil aktif memberikan informasi ataupun penyuluhan kepada warga melalui pertemuan-pertemuan diskusi dan pelatihan maupun pendampingan terkait beberapa isu perempuan, kesehatan atau pengembangan ekonomi kecil (simpan pinjam)
- Masyarakat sipil cukup banyak melakukan upaya advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik terkait dengan praktek transparansi pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik

DIMENSI STRUKTUR



Dimensi Struktur Kabupaten Lombok Barat berada pada kondisi cukup sehat (1,84) pada tahun 2009, mengalami kenaikan dari tahun 2007 (1,61). Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari dua subdimensi, yaitu Subdimensi Inter-Relasi (2,50) dan Keluasan Partisipasi Warga (1,91). Ada tiga subdimensi lain yang masuk kategori cukup sehat, namun masih di bawah skor dimensi, yaitu Subdimensi Keanekaragaman OMS (1,83), Tingkat Keorganisasian (1,70) dan Kedalaman Partisipasi Warga (1,67). Subdimensi yang memerlukan perhatian serius adalah Subdimensi Sumber Daya karena masuk kategori kurang sehat (1,43).

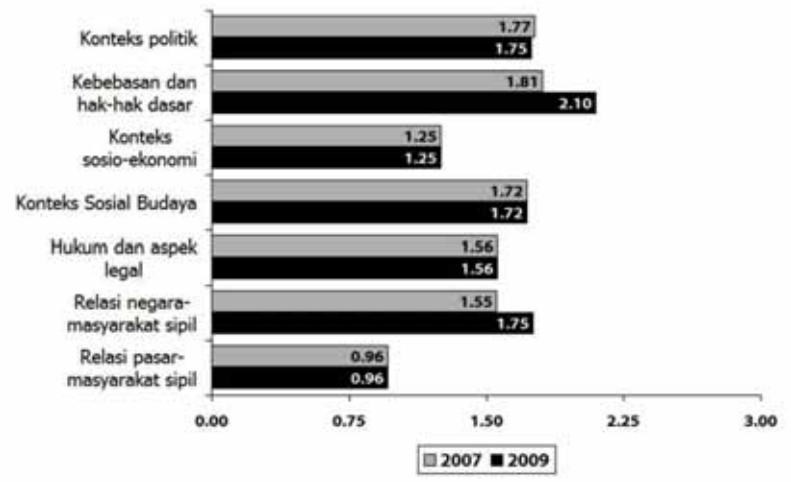
Skor tertinggi Dimensi Struktur diperoleh Sub-dimensi Inter-Relasi yang masuk kategori sehat (2,50) pada tahun 2009, meningkat cukup signifikan dari kondisi tahun 2007 (1,78). Dua indikator yang tergabung dalam subdimensi ini adalah Komunikasi (2,54) dan Kerja Sama (2,46) mendapatkan penilaian sehat. Pada tahun 2007 indikator-indikator tersebut mendapatkan penilaian cukup sehat, yakni 1,82 dan 1,73. Banyak pertemuan antar LSM maupun OMS lain seringkali dilakukan secara swadaya- yang dilakukan untuk berbagi informasi dan saling memberikan masukan. Salah satu hasil pentingnya adalah gerakan bersama untuk mengawal Pemilihan Bupati Lombok Barat. Hasil penting lainnya adalah sinergi dalam mepromosikan capaian kerja maupun pembelajaran berharga yang terjadi di OMS basis. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh OMS pendampingnya, namun juga dilakukan oleh OMS lain.

Skor terendah Dimensi Struktur diperoleh Subdimensi Sumber Daya yang berada pada kondisi kurang sehat (1,43). Terdapat perkembangan yang cukup menarik yakni semakin banyak OMS yang saling bantu untuk mencari sumber-sumber pendanaan. Selain itu terdapat kelompok yang mampu tumbuh tanpa dukungan dana dari luar, seperti kelompok dampingan YSDM. Secara swadaya, mereka membangun lumbung-lumbung desa sebagai perwujudan gagasan ketahanan pangan pada lokal. Dalam waktu dua tahun jumlah lumbung berkembang dari 3 menjadi 39. Meski demikian, perkembangan tersebut dinilai belum signifikan sehingga peserta lokakarya sepakat untuk tidak melakukan pengkajian ulang terhadap subdimensi sumberdaya.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Struktur sebagai berikut:

- Diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan OMS dalam rangka melepas ketergantungan dari donor perlu terus ditindak-lanjuti
- Sustainability yang sering didengungkan oleh donor perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret, yaitu memberikan kesempatan bagi OMS yang didukungnya untuk mengembangkan usaha produktif demi kepentingan gerakan.

DIMENSI LINGKUNGAN



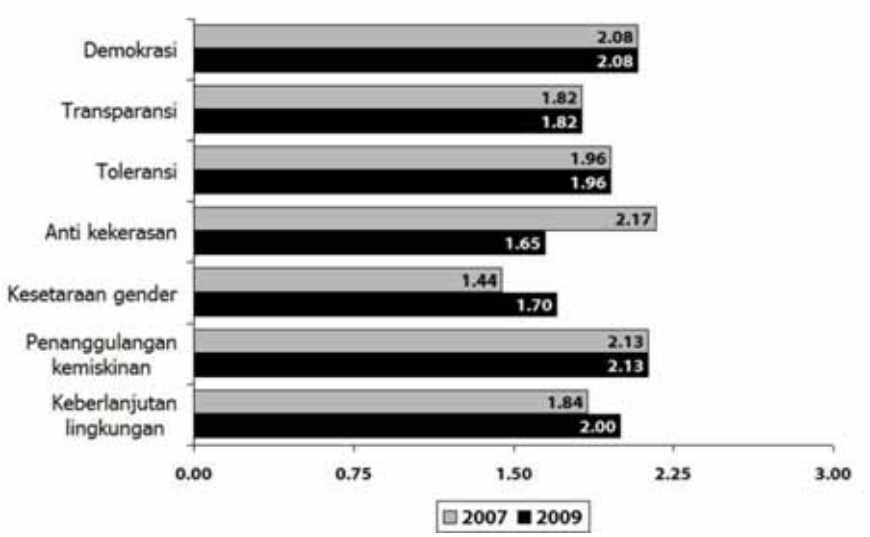
Dimensi Lingkungan Kabupaten Lombok Barat berada pada kondisi cukup sehat (1,58) - meningkat dibandingkan dengan skor tahun 2007 (1,52). Subdimensi yang memberikan sumbangan positif pada hasil tersebut adalah Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar (2,10), Konteks Politik (1,75), Relasi Negara–Masyarakat Sipil (1,75) dan Konteks Sosial Budaya (1,72). Hasil skor tersebut menunjukkan bahwa lingkungan eksternal yang tercakup dalam ketiga subdimensi tersebut dinilai cukup mendukung bagi kiprah masyarakat sipil. Subdimensi yang masuk kategori cukup sehat namun masih di bawah skor dimensi adalah Hukum dan Aspek Legal (1,56). Sementara itu, ada dua subdimensi yang berada pada kondisi kurang sehat, yaitu Subdimensi Konteks Sosio-Ekonomi (1,25) dan Subdimensi Relasi Pasar–Masyarakat Sipil (0,96). Buruknya nilai pada kedua subdimensi tersebut mencerminkan lingkungan eksternal yang dapat menghambat atau menjadi tantangan bagi kesehatan masyarakat sipil.

Dari hasil IMS tahun 2009, skor tertinggi pada Dimensi Lingkungan diperoleh Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar yang berada pada kondisi cukup sehat (2,10). Kondisi tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan kondisi tahun 2007 (1,81). Indikator yang memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kondisi tersebut adalah Indikator Hak-Hak atas Informasi yang mendapatkan penilaian sehat (2,38), meningkat secara drastis dari kategori cukup (1,51) pada tahun 2007. Disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 –yang dipandang akan mempengaruhi secara signifikan terhadap hak-hak warga untuk mengakses informasi publik- merupakan faktor yang menjadi dasar penilaian di atas. Meski demikian, kemajuan ini bukannya tanpa catatan. Sebagai contoh, kepala desa masih sering tidak memberikan informasi yang tepat tentang program pemerintah kepada warganya. Kurangnya sarana juga masih menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk berbagi informasi. Ketiadaan dukungan finansial membuat radio-radio komunitas mati suri. Dukungan dana yang diharapkan datang dari alokasi dana desa (ADD) tidak kunjung datang.

Indikator Kebebasan Pers (1,89) tidak dinilai ulang. Secara umum, media dijamin kebebasannya dalam melakukan aktivitasnya. Dalam banyak segi ini membawa manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, sosialisasi RAPBD Lombok Barat, termasuk proses pembahasannya, dimuat oleh media lokal (Lombok Pos). Namun, media juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Misalnya kampanye tersamar atau penyampaian dukungan politis secara terselubung terhadap individu tertentu.

Skor terendah pada Dimensi Lingkungan diperoleh Subdimensi Relasi Pasar–Masyarakat Sipil yang berada pada kondisi kurang sehat (0,96). Kondisi ini dinilai tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2007. Sektor pasar dianggap masih belum kooperatif terhadap masyarakat sipil, sehingga relasi pasar-masyarakat sipil dinilai masih kurang sehat.

DIMENSI NILAI



Dimensi Nilai di Kabupaten Lombok Barat berada pada kondisi cukup sehat (1,90) pada tahun 2009, meski menurun bila dibandingkan tahun 2007 (1,92). Penurunan skor dianggap tidak signifikan. Subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap Dimensi Nilai adalah Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan (2,13), Subdimensi Demokrasi (2,08), Subdimensi Keberlanjutan Lingkungan (2,00) dan Subdimensi Toleransi (1,96), subdimensi Transparansi (1,82), Kesetaraan Gender (1,70) dan Subdimensi Anti Kekerasan (1,65) juga berada pada kondisi cukup sehat, namun masih di bawah skor rata-rata dimensi.

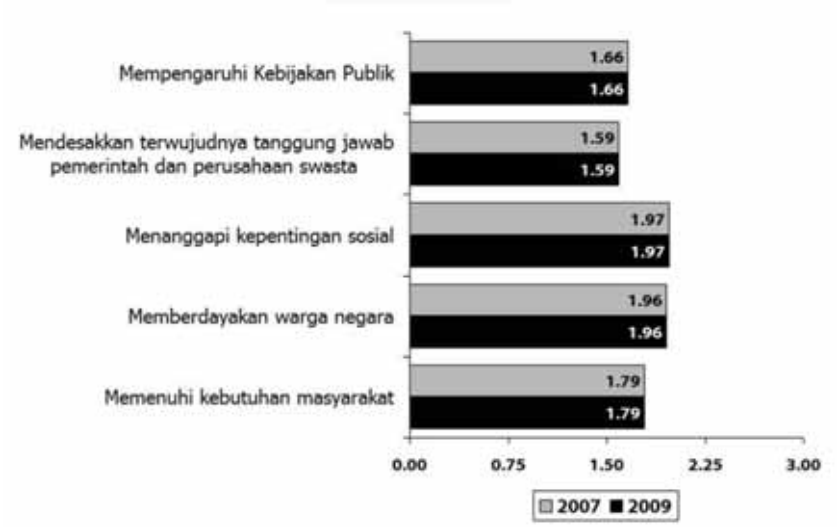
Hasil skor Dimensi Nilai di atas menunjukkan bahwa upaya masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat dalam mempromosikan dan mempraktikkan nilai-nilai 'universal' dianggap cukup efektif. Namun, perhatian serius perlu diberikan pada upaya promosi dan praktek nilai anti kekerasan untuk perbaikan di masa datang.

Skor tertinggi pada Dimensi Nilai diperoleh Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan (2,13) pada IMS tahun 2009. Kondisi ini masih relatif sama dengan kondisi pada tahun 2007. Cukup banyak aksi-aksi masyarakat sipil dalam penanggulangan kemiskinan, seperti Bumdes, simpan pinjam khusus perempuan dan lembaga ekonomi desa. Aksi-aksi penanggulangan kemiskinan tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan praktis berupa pemenuhan kebutuhan dasar (peningkatan pendapatan atau modal usaha), namun juga berupa peningkatan kapasitas kelompok miskin dan perempuan. Masyarakat diajak untuk menganalisa penyebab atau akar kemiskinan dan mendiskusikan bagaimana solusinya atau menyikapinya.

Skor terendah pada Dimensi Nilai diperoleh Subdimensi Anti Kekerasan (1,65) pada IMS tahun 2009, mengalami penurunan signifikan dibandingkan hasil IMS tahun 2007 (2,17). Indikator yang mengalami penurunan paling tinggi terjadi pada Indikator Anti Kekerasan di dalam Ruang Masyarakat Sipil, dari 2,20 pada tahun 2007 menjadi 1,46 pada tahun 2009. Hal ini dapat ditunjukkan oleh semakin banyaknya aksi kekerasan, baik horisontal maupun vertikal, yang dimuat di media massa. Aksi-aksi kekerasan tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam berkeyakinan, misalnya kasus perusakan terhadap rumah-rumah jamaah Salafiah di Gerung dan Sesela, juga terhadap jamaah Ahmadiyah di Lingsar. Tindak kekerasan juga terjadi dalam proses pemilihan pejabat publik, seperti perusakan kantor desa, pos polisi, dan gedung dewan sebagai bentuk protes karena calon yang didukung kalah. Amuk masa juga terjadi karena dipicu oleh buruknya pelayanan pemerintah.

Para peserta lokakarya IMS berpendapat bahwa terbukanya ruang demokrasi tidak memberikan pendidikan politik/pendewasaan masyarakat sehingga kekerasan masih marak di arena masyarakat sipil. Sebenarnya nilai-nilai anti kekerasan telah dipahami oleh warga, akan tetapi situasi eksternal yang memicu lahirnya kekerasan. Pemilihan kades di Babussalam misalnya, ketidaksiapan dalam sistem demokrasi yang terbuka telah memicu warga untuk melakukan aksi perusakan kantor desa. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan bahkan merambat ke isu yang lain.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi Dampak di Kabupaten Lombok Barat berada pada kondisi cukup sehat (1,79) pada IMS tahun 2009. Ini berarti bahwa kerja-kerja masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat berpengaruh positif terhadap masyarakat yang menjadi konstituennya. Kondisi ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi tahun 2007. Subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian skor Dimensi Dampak adalah Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (1,96), Memberdayakan Warga Negara (1,96) dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (1,79). Sedangkan Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan Publik (1,66) dan Subdimensi Mendesakkan Tanggung Jawab Pemerintah dan Perusahaan Swasta (1,59) berada dalam kategori cukup namun masih di bawah skor dimensi.

Skor tertinggi pada Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (1,96) yang terdiri dari Indikator Memberikan tanggapan (2,11) dan Kepercayaan Publik (1,83), Subdimensi ini disepakati untuk tidak dinilai ulang. Hasil-hasil Lokakarya IMS 2007 menunjukkan penilaian bahwa tokoh-tokoh OMS cukup tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat Miskin (AMPRM) -gabungan sepuluh LSM di Lombok Barat dan Mataram- melakukan advokasi kepada masyarakat yang terkena gizi buruk di Desa Lingsar, Gerung dan Gunung Sari. Contoh lainnya adalah advokasi terhadap hak-hak buruh migran (TKI) di Desa Pemenang Barat oleh Koslata dan Panca Karsa. Sementara, LeSA Demarkasi melakukan

pendampingan terhadap masyarakat korban longsor di Desa Pemenang untuk mendapatkan perhatian pemerintah berkenaan dengan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Dalam menanggapi kepentingan sosial tersebut, OMS melakukan penguatan di tingkat basis dan bersinergi dengan OMS lainnya. Kepercayaan publik pada OMS dinilai cukup tinggi. Misalnya, *community center* (di Desa Kekeri, Gerung, Narmada dan Senteluk) yang tadinya hanya menangani pelayanan informasi di bidang kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan, kini berkembang dengan dipercayanya para pengelola *community center* tersebut untuk menangani permasalahan yang lebih kompleks seperti kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, kekerasan dalam rumah tangga dan buruh migran.

Tantangan yang cukup besar terletak pada Subdimensi Mendesakkan Tanggung Jawab Pemerintah dan Perusahaan Swasta (1,59), khususnya pada indikator Mendesakkan Tanggung Jawab Perusahaan Swasta (1,51). Dari hasil penilaian tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa hasil upaya OMS untuk mendesak perusahaan swasta dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat masih rendah. Salah satunya adalah upaya penggalian *resources* dari perusahaan yang dilakukan oleh SANTIRI.

Kabupaten Buton Utara

Kabupaten Buton Utara terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu meliputi sebagian Pulau Buton bagian utara, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar kawasan tersebut. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU 14 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna.

Kabupaten Buton Utara terletak di bagian selatan katulistiwa pada garis lintang 4°06' sampai 5°15' LS dan dari barat ke timur 122°59' Bujur Timur sampai dengan 123°15' Bujur Timur. Adapun Batas-batas administrasi Kabupaten Buton Utara yaitu[1]:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Wawonii.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Wakorumba

Kabupaten Buton Utara secara administratif terdiri dari 6 kecamatan definitif selanjutnya terbagi atas 49 desa, 8 kelurahan dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang masih dalam tahap pembinaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten buton Utara.[2] Jumlah penduduk[3] keseluruhan 48.700 jiwa dengan komposisi laki-laki 23.389 jiwa dan perempuan 25.311 jiwa. Data BPS 2009 menyebutkan bahwa prosentasi penduduk miskin sebesar 22,86%. Gambaran pendapatan per kapita penduduk sebesar Rp. 162.080, artinya masih di bawah garis kemiskinan.

[1] UU no. 14 tahun 2007 pembentukan Kabupaten Buton Utara
[2] Kab. Buton Utara Dalam Angka 2009
[3] Kab. Buton Utara Dalam Angka 2009

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

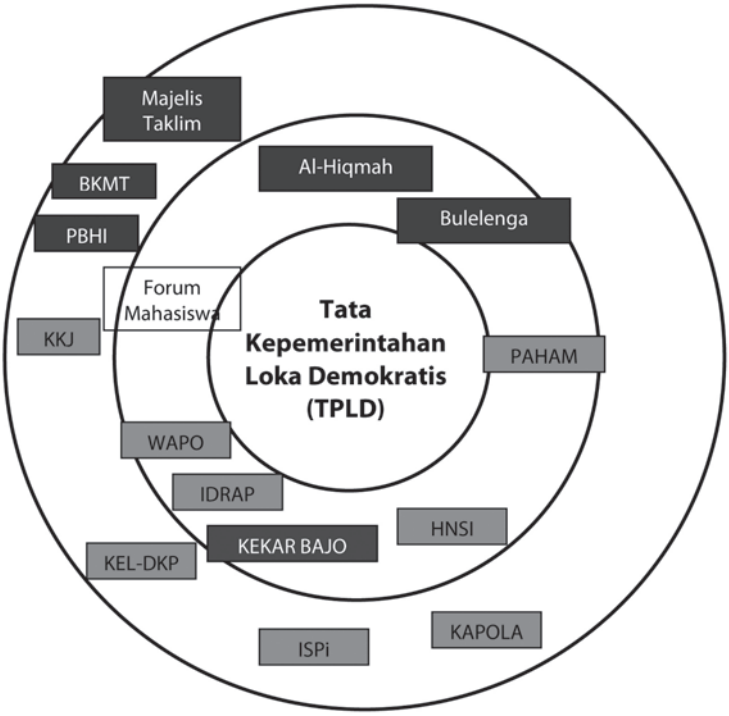
Di Kabupaten Buton Utara terdapat 32 OMS yang berhasil diidentifikasi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah OMS yang terdaftar di Kantor Kesbang. OMS-OMS tersebut terdiri dari organisasi berbasis keagamaan (5), organisasi berbasis keanggotaan/ perkumpulan/forum (7), LSM/Yayasan (10), organisasi kepemudaan dan perempuan (5); dan kelompok tradisional/klan/keluarga/etnis (5).

Berbagai organisasi yang teridentifikasi ini memiliki aktivitas mulai dari sangat lokal di lingkungan tempat tinggalnya -seperti pesisir laut, komunitas tertentu, desa- hingga kabupaten. Beberapa organisasi memiliki relasi hingga tingkat propinsi serta nasional, dan bahkan dua lembaga berkomunikasi dan berelasi sampai di tingkat internasional.

OMS yang teridentifikasi berpengaruh di Buton Utara ada 3 OMS, yaitu IDRAP, PAHAM dan KKJ. IDRAP berpengaruh kerena memiliki jumlah kelompok dampingan yang tersebar di beberapa desa di kabupaten ini, memiliki jaringan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional. PAHAM -yang aktif melakukan pendampingan hukum di Buton Utara dan berbagai daerah untuk kasus-kasus pelecehan seksual, tindak kriminal- merupakan lembaga yang berskala nasional dan memiliki beberapa kantor perwakilan di beberapa kabupaten. KKJ di Kabupaten Buton Utara memiliki anggota aktif ratusan orang yang tersebar di seluruh kecamatan, memiliki sumber daya keuangan yang cukup dari iuran bulanan anggota, dan organisasinya ada di setiap kabupaten.

Diagram 5. Peta OMS di Kabupaten Buton Utara terhadap TKLD

Tahun 2009



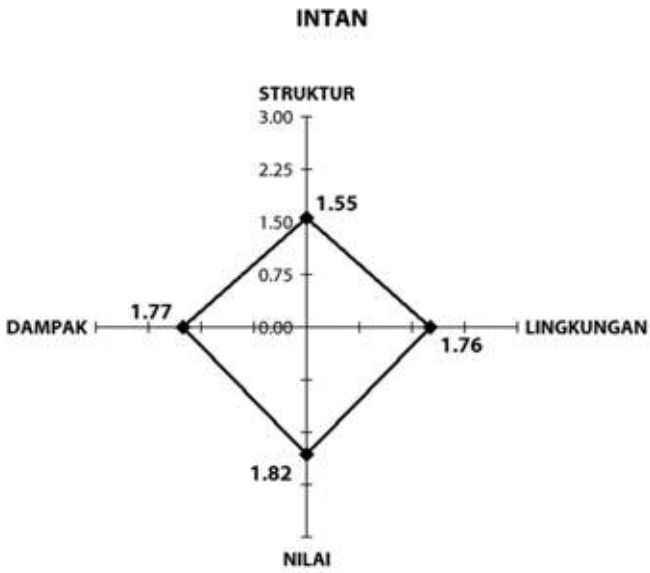
Di Kabupaten Buton Utara belum ada organisasi yang bekerja untuk advokasi tata kepemerintahan lokal yang demokratis hingga tahap melahirkan rekomendasi kebijakan. Juga belum ada jaringan koordinasi OMS untuk mendorong upaya-upaya tata kepemerintahan lokal yang demokratis.

Beberapa OMS memang telah bekerja dalam beberapa tema TKLD meski pada ranah yang masih terbatas seperti pemberdayaan masyarakat/kelompoknya, advokasi kasus, dan pengorganisasian anggota untuk melakukan aksi massa. Selain itu, terdapat OMS (Yayasan Bulelengadan Al-Hiqmah) yang telah bekerja untuk memberikan layanan dasar pendidikan, khususnya bagi pendidikan anak usia dini. Mereka juga berencana memberikan layanan Kejar Paket A, B, dan C. IDRAP bekerja dalam isu lingkungan dan melakukan pemberdayaan masyarakat adat. Lembaga ini juga memberikan bantuan kredit untuk usaha mikro bagi perempuan pedesaan. PAHAM bekerja untuk advokasi kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh warga. Pendampingan kasus dilakukan hingga tingkat kepolisian dan pengadilan. Namun, hingga saat ini belum

melakukan upaya untuk mendorong lahirnya kebijakan daerah untuk anti kekerasan. WAFO -yang fokus bekerja untuk masyarakat miskin- saat ini telah mulai bekerja membangun fasilitas air bersih di Desa Jampaka. KEKAR Bajo berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, salah satunya dengan membangun sarana air bersih bagi seluruh warga yang tinggal di Lingkungan Bajo, melakukan aksi-aksi massa, dan melakukan advokasi kasus bagi komunitasnya. Forum mahasiswa juga sangat dikenal oleh peserta sebagai kelompok yang sering melakukan aksi massa untuk merespon isu yang berkembang di kabupaten, seperti masalah pemekaran, anggaran dan korupsi. Forum mahasiswa ini merupakan forum *ad hoc* yang baru dibentuk jika akan melakukan aksi. Mereka terdiri dari berbagai himpunan mahasiswa kecamatan yang sekolah di Kendari.

Status Masyarakat Sipil

Grafik 9 Intan IMS Kota Buton Utara



Dari diagram intan di atas status masyarakat sipil Kota Buton Utara terlihat cukup sehat Hal ini terlihat pada skor-skor Dimensi Struktur (1.55), Lingkungan (1.76), Nilai (1.82) dan Dampak (1.77). Dari skor di atas dapat dilihat bahwa dimensi nilai merupakan kekuatan utama dengan subdimensi sebagai penyumbang utama. Di sisi lain, dimensi struktur menjadi tantangan yang harus segera dijawab.

Buton Utara baru mekar 2 tahun lalu, jadi belum banyak program OMS yang dilakukan di Buton Utara. Selama ini Program yang berkembang adalah program dari pemerintah seperti PNPM dan *block grant*. OMS yang ada di Buton Utara juga pada umumnya masih baru dan belum memiliki kegiatan yang nyata. Sehingga masih ada keterbatasan informasi yang dimiliki oleh Masyarakat.

Aset-aset utama masyarakat sipil yang bekerja di Kabupaten Buton Utara

Dimensi Struktur

- Kerja Suka rela, menyumbang untuk amal
- Perempuan lebih aktif berorganisasi

Dimensi Lingkungan

- Rasa percaya masyarakat kepada OMS tinggi, terutama pada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari bantuan/ pendampingan program dari OMS

Dimensi Nilai

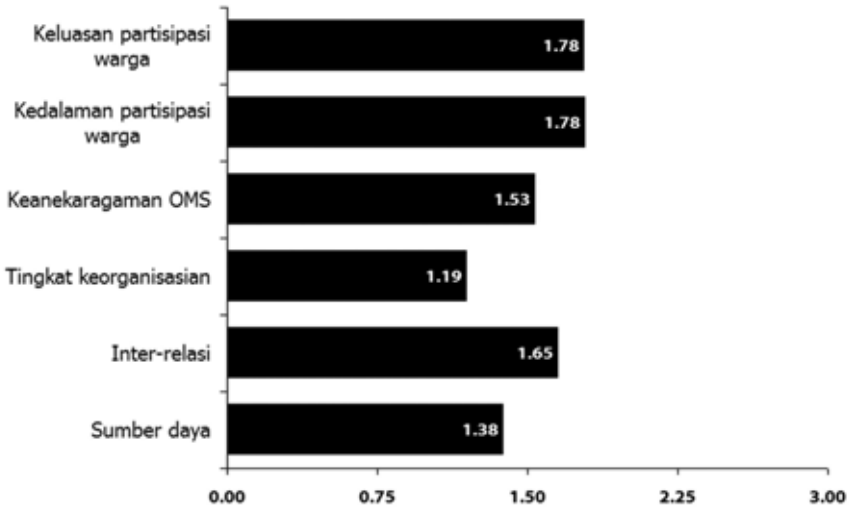
- nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, kesetaraan gender dan transparansi cukup baik dipahami dan dipraktekkan di Kabupaten Buton Utara Dimensi

Dampak

- Pengalaman OMS dalam aksi untuk mendesakkan terwujudnya tanggung jawab negara melalui forum-forum
- Pengalaman OMS dalam pelaksanaan program di masyarakat.

Hambatan yang dialami Kabupaten Buton Utara yang masih baru ini antara lain: SDM masih kurang khususnya dalam melakukan pengorganisasian, aturan main organisasi tidak tersosialisasi dengan baik pada semua anggota, banyak organisasi yang belum memiliki anggaran organisasi, belum banyak jaringan kerja, belum memiliki informasi yang cukup memadai tentang aturan–aturan Organisasi, dan peraturan perundang-undangan. Perempuan masih kurang mendapatkan kesempatan dalam berorganisasi dan belum banyak ruang bagi perempuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kesadaran kritisnya.

DIMENSI STRUKTUR



Dimensi Struktur mendapat skor 1,55, yang menunjukkan susunan masyarakat sipil Kabupaten Buton Utara dinilai berada pada kondisi cukup sehat. Tetapi, keadaan ini masih mengkhawatirkan karena sangat dekat dengan ambang batas kondisi kurang sehat (1,50). Ada tiga Subdimensi yang menyumbang secara positif terhadap perolehan skor Dimensi Struktur, masing-masing adalah Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga (1,78), Kedalaman Partisipasi Warga (1,78) dan Interrelasi (1,65). Sementara dua Subdimensi yang mesti menjadi perhatian serius pada dimensi ini adalah Subdimensi Tingkat Keorganisasian (1,19) dan Sumber Daya (1,38). Kedua subdimensi tersebut masuk dalam kategori kurang sehat.

Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga mendapatkan penilaian yang cukup sehat, yang artinya proporsi warga yang terlibat dalam MS dan aktivitas MS dinilai cukup sehat. Indikator yang paling berkontribusi pada subdimensi ini adalah Kerja Sukarela (2,45) dan Menyumbang Untuk Amal (1,75). Kerja sukarela pada umumnya melibatkan cukup banyak warga dan diwujudkan dalam bentuk bantuan tenaga, seperti membantu membangun rumah, membantu untuk keperluan hajatan dan sebagainya. Sedangkan sumbangan diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang untuk kegiatan keagamaan, pesta perkawinan maupun kematian. Sementara itu, kelompok arisan di tingkat desa sudah mulai memberikan

bantuan untuk pendidikan dan kesehatan bagi warga yang dinilai kurang mampu. Majelis taklim juga melakukan hal yang lebih kurang sama.

Skor Subdimensi Kedalaman Partisipasi Warga (1,78) menunjukkan bahwa dari sisi kedalaman, tingkat partisipasi warga juga dinilai cukup sehat. Skor Indikator Sumbangan Amal (1,95) dan Kerja Sukarela (1,75) merupakan faktor yang mendukung. Dalam kurun waktu enam bulan (Oktober 2008-Maret 2009) sumbangan amal dilakukan warga kurang lebih sebanyak dua sampai tiga kali, dalam bentuk tenaga, uang dan barang. Sebagai contoh, dalam bulan Ramadhan sumbangan diwujudkan dalam bentuk makanan untuk buka puasa di masjid-masjid. Sedangkan kerja sukarela dilakukan secara rutin satu kali tiap minggu pada "Jumat Bersih" di lingkungannya selama setengah hari. Dalam kegiatan membersihkan kebun, biasanya dilakukan selama satu hari.

Hal yang menarik dari subdimensi ini adalah terkait dengan keanggotaan di OMS yang menjelaskan bahwa organisasi yang beranggotakan perempuan cenderung lebih aktif dibanding laki-laki dan hampir semua perempuan menjadi anggota lebih dari satu organisasi, seperti majelis taklim, kelompok arisan dan PKK. Satu-satunya organisasi di tingkat desa yang beranggotakan hanya laki-laki adalah karang taruna, sedangkan organisasi lain seperti gapoktan, kelompok nelayan, remaja mesjid memiliki anggota laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dalam perbandingan skor Indikator Keanggotaan di OMS antara peserta Lokakarya IMS perempuan dan laki-laki. Kelompok perempuan menilai lebih tinggi dibanding dengan kelompok laki-laki. Hal ini terjadi karena kaum perempuan lebih aktif untuk berorganisasi dibandingkan dengan laki-laki, perempuan juga lebih punya kemauan berkelompok. Hal ini ditunjukan dengan masuknya perempuan menjadi anggota PPS, KPPS dan PPK.

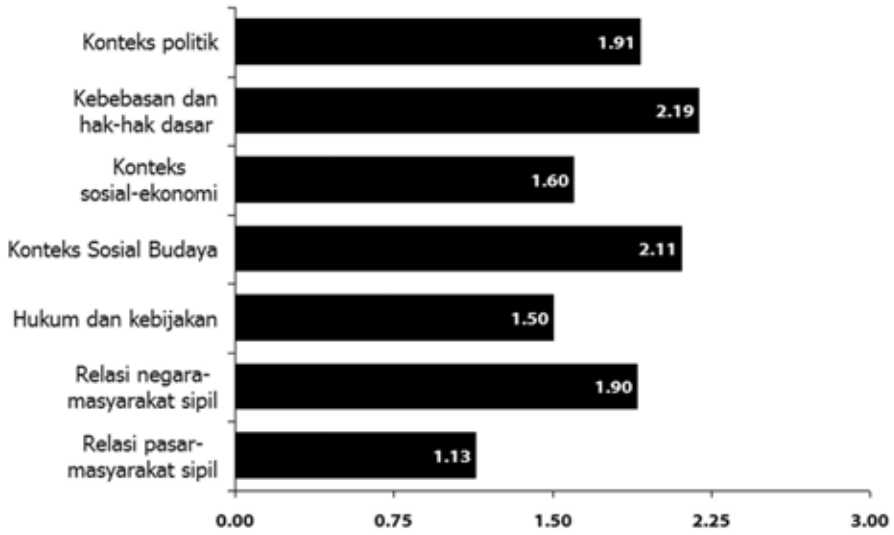
Subdimensi Tingkat Keorganisasian (1,19) menjadi tantangan yang cukup kuat bagi MS di Buton Utara. Indikator-indikator Keberadaan Organisasi Payung (0,50) dan Jaringan (0,80) menegaskan hal itu. OMS yang sudah memiliki payung seperti majelis taklim, PKK, kelompok tani masih kurang mendapat pembinaan dari organisasi payungnya terutama dalam membangun kerjasama dan kebersamaan dengan OMS lainnya. Sementara itu, kondisi geografis, rusaknya infrastruktur penghubung (jalan raya) menjadi serta kurangnya prasarana telekomunikasi menjadi kendala untuk membangun jaringan kerja. Lembaga Bulelenga, misalnya, masih memiliki kesulitan dalam hal tranportasi sehingga tidak bisa secara langsung turun ke tingkat desa.

Sedangkan jaringan telepon seluler –sampai dengan lokakarya dilakukan- hanya ada di Ereke saja. Komunikasi antar aktor OMS, khususnya antara yang ada di desa dan kota sangat sulit dilakukan. Masalah lainnya, OMS yang ada di Kabupaten Buton Utara masih cenderung bergerak sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, organisasi mahasiswa yang selama ini bergerak di Buton Utara masih sebatas menggarap isu-isu politik tertentu saja.

Rekomendasi untuk memperbaik Dimensi Struktur sebagai berikut:

- Membuat stategi penyebaran informasi dan membangun komunikasi yang lebih luas ke masyarakt mengingat kondisi geografis Buton Utara yang masih sulit. OMS dan aktor-aktor yang ada di pedesaan harus pro-aktif mencari informasi yang diperlukan.
- Organisasi masyarakat perlu mencari informasi yang dibutuhkan kepada DPRD setempat tentang program-program pembangunan yang akan dilakukan di daerah Buton Utara.
- Memperbanyak pendidikan atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat (termasuk perempuan). Terutama pendidikan pemberdayaan dan pendidikan kritis warga untuk mendorong kesadaran kolektif masyarakat.
- Mengintensifkan forum-forum diskusi dengan mengangkat isu arena MS dengan menghadirkan banyak pihak terutama OMS-OMS baik di desa maupun di kabupaten. Diskusi ini diharapkan menjadi sarana komunikasi antar aktor untuk membangun agenda aksi bersama. Forum diskusi juga harus diperluas tidak saja di ibukota kabupaten tapi harus sampai ke desa-desa.
- Meningkatan keterampilan OMS untuk membangun kreatifitas dalam menggali sumber daya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
- OMS dan pemerintah harus membuka akses informasi paling tidak menginsiasi pembentukan jaringan kerjasama yang lebih luas misalnya dengan menciptakan media yang efektif sebagai sarana komunkasi antar aktor maupun antar OMS.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi Lingkungan Kabupaten Buton Utara memperoleh nilai 1,76, yang berarti faktor-faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kekuatan masyarakat sipil dinilai cukup sehat. Kondisi ini disumbang secara positif oleh Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar (2,19), Konteks Sosial-Budaya (2,11), Konteks-Politik (1,91), Relasi Negara-MS (1,90) dan Konteks Sosial-Ekonomi (1,60). Hanya ada satu subdimensi yang dianggap kurang sehat, yaitu Subdimensi Relasi Pasar-MS (1,13).

Secara umum, meskipun Dimensi Lingkungan mendapatkan penilaian cukup sehat, tetapi dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, bahkan hampir bertolak belakang dengan gambaran umum yang ada di Buton Utara. Gambaran ketidaksesuaian tersebut muncul dalam diskusi peserta lokakarya IMS. Merujuk pada hasil penilaian, salah satu indikator yang berkontribusi pada perolehan skor Subdimensi Konteks Politik (1,91) adalah Indikator Hak-hak Politik (2,45). Tetapi, hal ini dinilai sangat berbeda dengan kondisi yang ada. Meskipun secara formal hak-hak politik warga untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum sudah cukup terjamin, ternyata masih banyak intimidasi yang dilakukan oleh oknum birokrasi. Para camat ditekan supaya wilayah mereka satu warna. Kalau tidak, ada kemungkinan mereka dimutasi. Akibatnya terjadi intimidasi terhadap warga. Politik uang juga memberi andil dalam situasi di atas.

Kesenjangan antara hasil penilaian dan dengan kondisi sesungguhnya juga terjadi pada pembahasan Indikator Korupsi yang memperoleh skor 1,80. Menurut peserta lokakarya, terdapat sejumlah kasus korupsi — mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan kendaraan dinas, sampai dengan pemotongan dana BLT— yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi di daerah ini masih cukup tinggi.

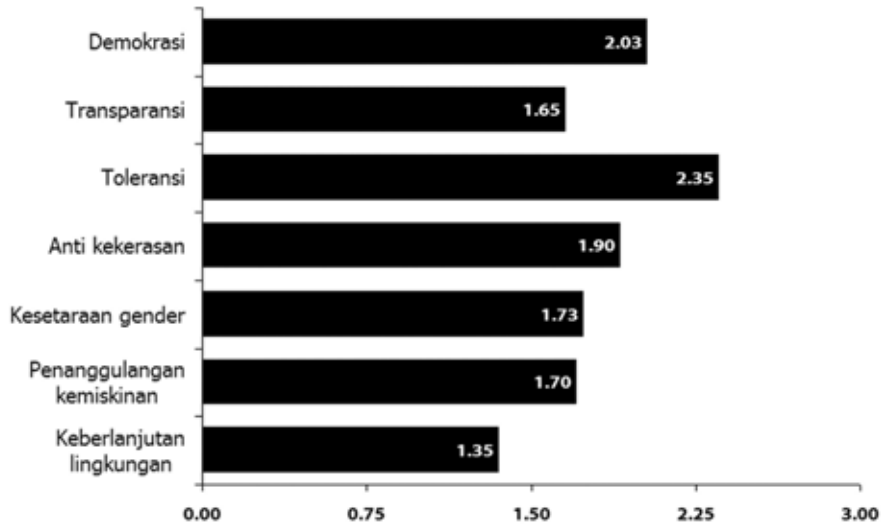
Pada Indikator Budaya Patriarki (1,45) peserta perempuan memberikan nilai kurang sehat (1,09) yang dinilai mendekati keadaan sebenarnya. Sementara laki-laki memberikan nilai cukup sehat (1,89). Faktanya, perempuan belum banyak diberi kesempatan untuk mengisi beberapa jabatan dalam struktur pemerintahan, meskipun memiliki potensi dan kemampuan yang memadai. Dalam masyarakat pedesaan seperti di Kelurahan Bonelipu, masih terjadi penomorduaan perempuan dalam hal kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Peserta laki-laki tidak terlalu melihat kondisi ini sebagai sebuah persoalan mendasar. Cara pandang yang bersifat patriarki ini yang turut mempengaruhi tingginya nilai yang diberikan laki-laki.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan sebagai berikut;

- Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan.
- Meningkatan kapasitas dalam analisis anggaran bagi OMS penggiat advokasi anggaran. Termasuk mendorong konsistensi dalam melakukan advokasi kasus-kasus korupsi di tingkat Organisasi Masyarakat Sipil.
- Mendorong Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang makanisme dan tata cara memperoleh dokumen-dokumen publik yang diperlukan seperti dokument APBD, Perda, dan lain-lain.
- Mendesak Pemerintah untuk melakukan pemenuhan pelayanan dasar pada warganya. Menambah kapasitas pembangkit listrik agar mampu melayani masyarakat secara keseluruhan, jaringan telepon serta fasilitas jalan raya.

- Mendorong adanya lembaga pengontrol yang akan mengawasi setiap bantuan yang turun ke desa. Mengingat saat ini sudah cukup banyak bantuan untuk pengentasan kemiskinan, hanya saja implementasinya belum tepat sasaran.
- OMS-OMS yang ada perlu melakukan pemantauan atas pelaksanaan musrenbang di desa sampai tingkat Kabupaten dan mendorong Peraturan Daerah (PERDA) tentang tatacara pelaksanaan MUSRENBANG yang menegaskan keterlibatan masyarakat khususnya perempuan.

DIMENSI NILAI



Secara umum dimensi nilai mendapatkan penilaian cukup sehat (1,82). Penyumbang-penyumbang terbaik dalam dimensi ini adalah Subdimensi Toleransi (2,35), Demokrasi (2,03) dan Anti Kekerasan (1,90). Subdimensi Kesetaraan Gender memperoleh 1,73 dan Transparansi mendapatkan 1,65. Satu-satunya subdimensi yang berada dalam kondisi kurang sehat adalah Keberlanjutan Lingkungan (1,35).

> Dana PNPM di desa kami sebesar 320 juta. Masyarakat mendukung program ini, tidak ada kecemburuan yang muncul dari masyarakat. Saya merasa bangga karena program dilaksanakan tepat waktu, dikerjakan sesuai bestek, masih ada saldo yang diumumkan kepada masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat saya perhatikan sangat senang karena keuangan program dikelola secara transparan.
>
> **LA UTE Ketua BPD Desa Morindino**

Meski penilaian dimensi nilai menunjukkan kondisi cukup sehat namun menurut peserta lokakarya IMS 2009, jika dibandingkan dengan kondisi nyata di Buton Utara agak jauh berbeda, yakni masih kurang sehat (buruk). Perbedaan kondisi ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima sehingga pengetahuan yang didapat hanyalah yang ada dikelompoknya. Basis pengetahuan itu saja yang kemudian dijadikan pijakan dalam memberikan penilaian.

Subdimensi toleransi memperoleh skor tertinggi pada subdimensi ini yaitu 2,36 nilai-nilai toleransi cukup baik dipahami dan dipraktekkan di Kabupaten Buton Utara. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Buton Utara yaitu saling tolong menolong dan saling menghargai masih terbangun diantara sesama OMS di Buton Utara. Sampai saat ini belum ada konflik antara sesama OMS. Hampir semua nilai di kabupaten ini cukup baik dipahami dan dipraktekkan seperti nilai demokrasi, anti kekerasan, kesetaraan gender dan transparansi.

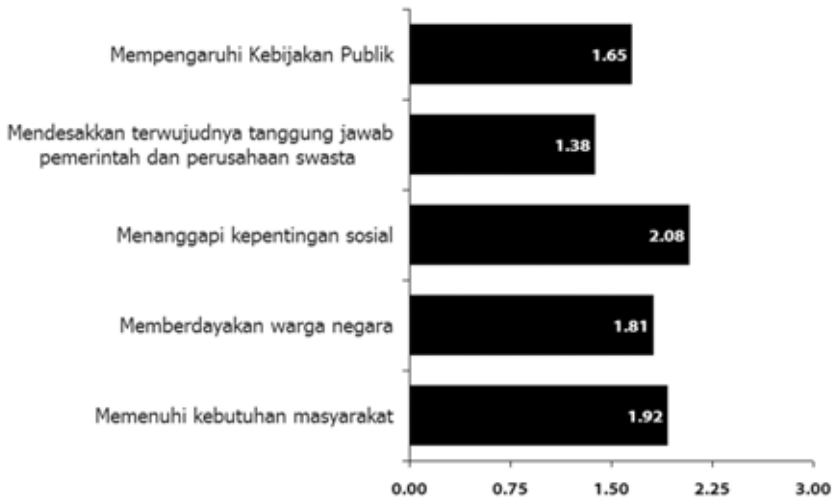
Untuk subdimensi transparansi, meskipun nilainya cukup sehat, namun sebagian besar indikator menunjukkan berada pada posisi kurang sehat. Pada indikator transparansi keuangan OMS nilainya 1,50 (kurang sehat), pertanggunggugatan OMS (1,30) dan arena MS untuk mempromosikan Transparansi nilainya 1,50 (kurang sehat). Hanya indikator korupsi yang memiliki nilai yang tinggi 2,30 (cukup sehat) yang memberikan kontribusi pada subdimensi transparansi. Tingginya nilai dari indikator korupsi disebabkan oleh tidak banyak ditemukan Informasi yang cukup memadai dan contoh-contoh korupsi. Namun ada satu kasus penggelapan/ manipulasi uang PPK oleh Ketua di Kelurahan Lakonea dan Bonelipu. Di kelurahan Lakonea, Bendahara PPK kemudian mengundurkan diri karena kerjanya diambilalih oleh Ketua. Contoh ini memberikan gambaran bahwa transparansi keuangan tidak terjadi dan mekanisme pertanggungjawaban juga tidak dilakukan, termasuk dalam pengelolaan dana block grant pada program pemerintah.

Subdimensi keberlanjutan lingkungan mendapatkan skor terendah yaitu 1,35 artinya kurang sehat. Pada subdimensi ini belum banyak contoh yang ditemukan. Yang ada adalah program MCK untuk menghindari buang air besar di sembarang tempat dan sosialisasi tentang pelestarian hutan yang dilakukan oleh IDRAP.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Nilai sebagai berikut:

- Melakukan penguatan ekonomi pada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dengan bekerjasama dengan OMS diluar BUTON UTARA, pemerintah kabupaten maupun donor.
- Melakukan penguatan kelembagaan, untuk mengetahui tentang sistem pengaturan organisasi (struktur, pembagian tugas, dan aturan main).
- Mengaktifkan OMS yang ada dan membangun jaringan yang kuat.
- Melakukan pendidikan politik/kritis kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahamannya tentang hak-haknya sebagai warga sehingga mampu menjalankan demokrasi.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi Dampak mendapat penilaian cukup sehat (1,77). Subdimensi yang dianggap menyumbang secara positif adalah Menanggapi Kepentingan Sosial (2,08), Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (1,92) dan Pemberdayaan Masyarakat (1,81). Namun, terdapat hal yang menarik untuk dianalisa, yakni kesenjangan yang cukup tinggi antara penilaian dan realitas yang terungkap dalam diskusi.

Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial mendapatkan skor tertinggi yaitu 2.08 yang berarti MS dianggap responsif terhadap kepentingan sosial di Kabupaten Buton Utara. Dalam diskusi terungkap bahwa kondisi ini dinilai sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Kenyataanya, belum banyak ditemukan OMS dan aktor-aktornya yang memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang menjadi persoalan pokok masyarakat (penerangan, pendidikan, akses/sarana informasi, kesehatan, akses transportasi). Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada OMS dan aktor-aktor juga tidak kuat, karena masyarakat belum melihat ada aktivitas berarti yang dilakukan oleh aktor OMS yang sifatnya mewakili kepentingan kelompok-kelompok masyarakat.

> *Saya mengharapkan OMS seharusnya bekerja untuk kepentingan sosial dan bukan untuk mencari keuntungan, seperti PNPM yang dikelola di desa masih didasarkan pada orientasi keuntungan ekonomi. Nilai-nilai yang seharusnya dimiliki aktor MS/OMS adalah terbuka, jujur dan bertanggung jawab*
>
> **GUSRIN Warga/Ketua Kerukunan Keluarga Bajo**

Demikian juga untuk Subdimensi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat (1,92). Realitasnya, tidak banyak ditemukan upaya-upaya lobi untuk penyediaan pelayanan negara yang dilakukan oleh OMS dan aktor-aktornya. Kalaupun ada, upaya yang dilakukan OMS lingkupnya masih sangat kecil, misalnya Kekar Bajo melakukan lobbi untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penerangan (listrik) tetapi hanya untuk lingkup kelompok masyarakat Bajo, bukan representasi dari kepentingan pada lingkup kabupaten. Begitu juga lobi-lobi yang ada di tingkat desa yang dilakukan oleh beberapa tokoh OMS hanya untuk isu-isu di tingkat desa, misalnya melobi pemerintah desa untuk pembagian raskin dan BLT secara adil. Indikator lainnya adalah Memenuhi Kebutuhan Kelompok-Kelompok Terpinggirkan (2,00). Beberapa OMS memang memberikan kebutuhan

langsung, misalnya memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat, tapi lingkupnya sangat terbatas seperti yang dilakukan oleh IDRAP.

Contoh lain yang menjelaskan bahwa hasil penilaian berbeda dengan kondisi nyata ada pada Subdimensi Pemberdayaan Masyarakat (1,81). Dalam kenyataannya, hanya sedikit ditemukan upaya pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat oleh OMS dan aktor-aktornya. Contoh detilnya bisa dilihat pada Indikator Dukungan Terhadap Lapangan Pekerjaan (1,85). Kenyataannya hanya IDRAP yang melakukan tetapi sangat terbatas hanya pada beberapa desa dan untuk isu tertentu saja seperti program DKP. Sementara pemberdayaan untuk pemenuhan hak dasar lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, belum ditemukan aktivitas yang dilakukan OMS lain. Indikator lainnya adalah Indikator Memberdayakan Perempuan (1,95). Realitasnya, belum banyak upaya pemberdayaan kepada perempuan, termasuk memberikan kesadaran kritis atas hak-haknya. Belum ada penyadaran-penyadaran kritis yang dilakukan di masyarakat untuk isu kesetaraan gender yang dilakukan, khususnya yang dilakukan oleh kalangan OMS.

Beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan yang cukup besar antara kenyataan lapangan dan penilaian adalah adanya kesenjangan informasi antara organisasi-organisasi di tingkat desa dengan organsiasi yang di perkotaan dan kesenjangan pemahaman di berbagai kelompok dalam masyarakat terhadap isu-isu penyadaran kritis, sehingga beberapa isu kritis dalam penilaian IMS yang sangat relevan terhadap kondisi OMS tidak dipahami peserta. Faktor lainnya adalah tidak tersedianya ruang-ruang komunikasi dan jaringan antara organisasi kemasyarakatan yang dapat dijadikan tempat bertukar informasi, pengalaman dan belajar bersama; dan masih kurangnya kerja-kerja pemberdayaan yang dilakukan oleh OMS kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak:

- OMS melakukan pendampingan atau pemberdayaan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kritis di masyarakat.
- OMS mendesakkan tanggungjawab Pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat terpinggirkan
- Memperluas dan memperbanyak kelompok-kelompok masyarakat terorganisir di Kabupaten Buton Utara

Kota Bau-Bau

Secara geografis Kota Bau-Bau terletak di bagian Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi koordinat sekitar $0{,}5015^0$ hingga 0,5032p Lintang Selatan dan $122{,}046^0$, Bujur Timur. Kota Bau-Bau berada di Pulau Buton, dan tepat terletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap Utara. Di kawasan selat inilah aktivitas lalu lintas perairan baik nasional, regional maupun lokal sangat intensif. Batas-batas administratif:

- Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.
- Timur : Batasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton.
- Barat : Berbatasan dengan Selat Buton.

Jumlah penduduk[1] sebanyak 30.859 KK yang terdiri atas 25.988 kepala keluarga yang laki-laki, 4.871 kepala keluarga yang perempuan. Anggota DPRD Kota Baubau tahun 2010[2] sebanyak 25 orang terdiri dari 5 orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, 4 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 5 orang dari Fraksi Bulan Bintang Amanat, 5 orang Fraksi Pejuang Pekerja Nasionalis Sejahtera dan 6 orang dari Fraksi Karya Kesejahteraan Daerah.

---

[1] Data BKKBN Kota Bau-Bau, Tahun 2008

[2] BPS Kota Baubau tahun 2011

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Di Kota Bau-Bau dapat terdapat berbagai OMS, organisasi tradisional, organisasi berbasis keagamaan, organisasi berbasis keanggotaan, dan organisasi gerakan sosial.

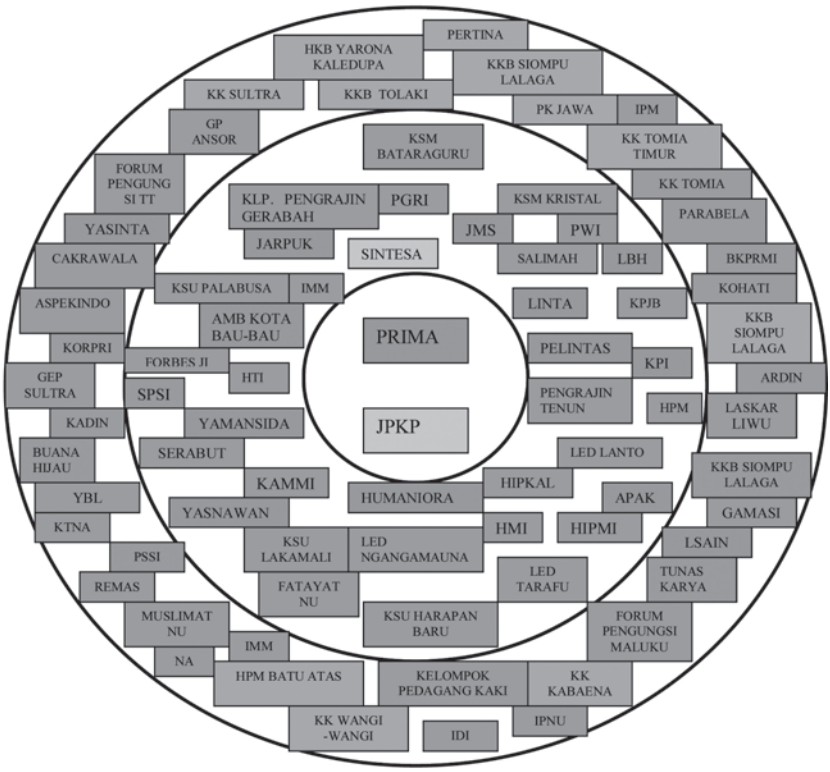
Berdasarkan kriteria keaktifan dalam isu yang dikembangkan di kabupaten, besarnya anggota/kelompok dampingan, sumber daya keuangan dan keluasan jaringan pada tingkat desa, kabupaten, propinsi dan/atau nasional, teridentifikasi ada dua OMS yang sangat berpengaruh di Kota Bau-Bau, yaitu JPKP dan SINTESA. Kedua lembaga ini dinilai sangat berpengaruh karena merupakan organisasi yang sangat aktif mendiskusikan isu-isu yang berkembang di Kota Bau-Bau, memiliki kelompok dampingan yang cukup banyak, memiliki sumber daya keuangan yang memadai dilihat dari program-program yang dilaksanakannya, serta memiliki jaringan hingga di tingkat propinsi.

Terdapat 14 OMS yang berada pada kategori berpengaruh. OMS yang berpengaruh ini dinilai cukup aktif dalam mendiskusikan isu-isu yang berkembang di kabupaten, namun kondisinya bervariasi pada tiga kriteria yang lain seperti keanggotaan atau jumlah kelompok dampingan, sumber daya keuangan, dan keberadaan jaringan kerjanya. Pada umumnya, jaringan kerja yang dimiliki masih di tingkat kabupaten. Ke 14 OMS yang berpengaruh itu adalah PRIMA, HUMANIORA, LAKAMALI, LINTAS, LBH BAU-BAU, LSAIN, PELINTAS, YASNAWAN, YAMANSIDA, YASINTA, JMS, PMII, HMI, dan AMB Kota Bau-Bau. Sementara itu 54 OMS lainnya masuk dalam kategori agak berpengaruh dan 19 OMS yang kurang berpengaruh.

Kekuatan OMS di Kota Bau-Bau dalam advokasi kebijakan mendorong TKLD ada pada PRIMA dan JPKP. Advokasi kebijakan yang dimaksudkan adalah kerja-kerja untuk menyusun rancangan kebijakan daerah seperti Ranperda atau menyusun dan mengajukan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah kabupaten. PRIMA melakukan advokasi anggaran pendidikan dengan mengajukan rekomendasi hasil penelitian/ pemantauan menggunakan *Citizen Report Card (CRC)*. Sedangkan JPKP melakukan advokasi dalam isu pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan JPKP telah mengajukan rekomendasi berdasarkan hasil penelitiannya namun belum disetujui oleh pemda. Untuk isu kesehatan, JPKP telah mengajukan rancangan standar pelayanan prima bidang kesehatan. Selain itu, JPKP juga melakukan advokasi rancangan Perda pesisir melalui *Program Driving Change*.

Selain PRIMA dan JPKP sebenarnya ada 27 lembaga yang dianggap telah bekerja dalam isu-isu TKLD meskipun belum sampai mengajukan usulan kebijakan kepada pemda. Beberapa lembaga bekerja dalam isu pemenuhan hak dasar masyarakat atau anggotanya khususnya pada bidang pemenuhan mata pencarian, seperti memberikan bantuan ekonomi, melakukan pendampingan usaha mikro dan melakukan studi ekonomi bawah. Selain itu ada organisasi-organisasi yang sering melakukan aksi untuk merespon kebijakan pemda yang tidak memihak rakyat misalnya mengangkat isu tambang, listrik dan air.

Diagram 6. Peta OMS di Kota Baubau terhadap TKLD Tahun 2009

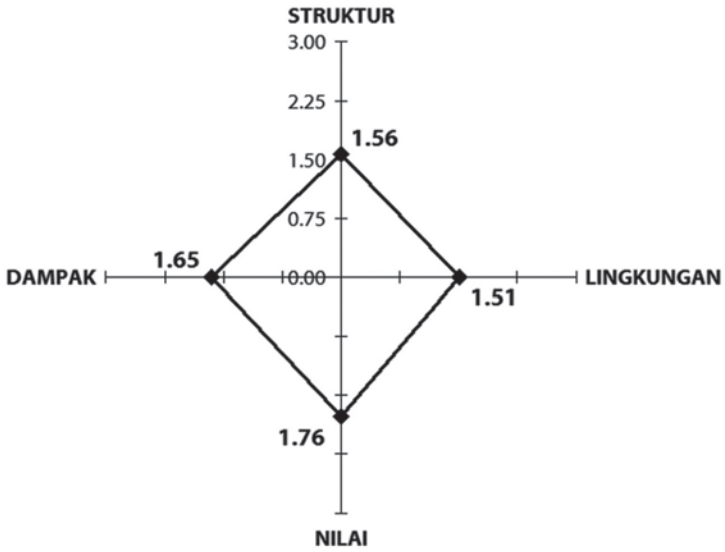


Status Masyarakat Sipil

Grafik intan menunjukkan status masyarakat sipil Kota Bau-Bau terlihat cukup sehat. Hal ini nampak pada dimensi struktur (1,68), lingkungan (1,61), nilai (1,76) dan dampak (1,86). Pada dimensi struktur, aktor-aktor masyarakat sipil di Kota Bau-Bau dinilai cukup sehat bermain

di arena masyarakat sipil, memiliki karakteristik dan relasi baik diantara mereka. Pada dimensi lingkungan, kondisi lingkungan berbagai faktor luar Kota Bau-Bau dinilai memberi pengaruh cukup sehat atau memberikan kontribusi bagi perkembangan arah masyarakat sipil yang kuat. Faktor-faktor luar tersebut mencakup lingkungan politik, institusional, sosial, kultural dan ekonomi. Pada dimensi nilai nampak terlihat bahwa masyarakat sipil di Kota Bau-Bau ini cukup baik dalam memfokuskan perhatiannya pada prinsip dan nilai-nilai yang dianut, dipraktekkan dan dipromosikan. Sedangkan pada dimensi dampak, masyarakat sipil di Kota Bau-Bau dinilai cukup baik memberikan dampak terhadap kehidupan warganegara dan masyarakat secara keseluruhan.

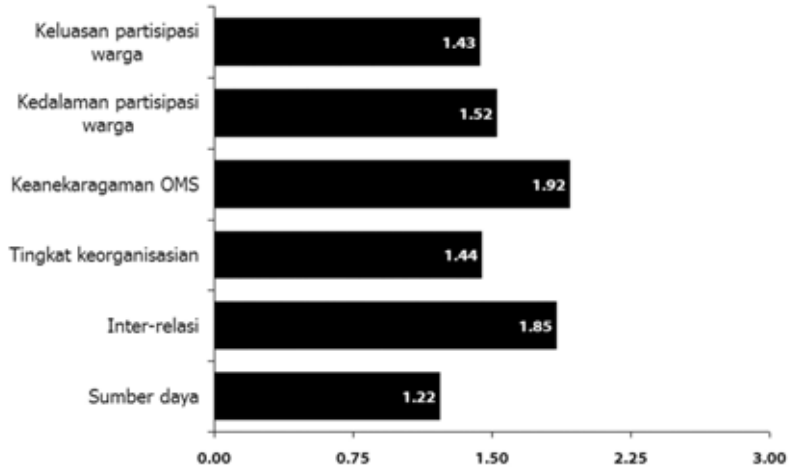
Grafik 10 Intan IMS Kota Baubau



Kekuatan masyarakat sipil di kota Bau-Bau ada pada dimensi dampak yang mendapat skor tertinggi (1,86). Dampak kerja masyarakat sipil dinilai telah berhasil memberdayakan masyarakat. Sedangkan skor terendah ada pada dimensi lingkungan. Aspek yang masih perlu diperbaiki adalah kemudahan proses pendaftaran OMS yang dinilai masih dipersulit. Tantangan lainnya adalah komunikasi antara perusahan-perusahaan swasta dan OMS yang perlu diperbaiki, serta tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang belum terealisasi. Selain itu masih ada kelemahan pada

indikator korupsi karena sering terjadi kesepakatan di luar aturan main resmi dalam proses belanja publik. Sejauh ini praktek transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran publik belum menguat.

DIMENSI STRUKTUR



Hasil pengukuran IMS Kota Bau-Bau tahun 2009 menunjukkan bahwa dimensi struktur pada kondisi cukup sehat (1,56). Kategori cukup sehat ini disumbang oleh subdimensi keragaman arena OMS (1,92), relasi antar aktor-aktor MS (1,85) dan kedalaman partisipasi warga (1,52).

Meskipun ketiga subdimensi di atas berada dalam kondisi cukup sehat, masih ada tiga subdimensi lain dalam dimensi struktur yang berada dalam kategori kurang sehat yaitu: Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga (1,43), Tingkat Organisasi (1,44), dan Sumber Daya (1,22).

Subdimensi Keragaman Arena OMS mendapatkan skor tertinggi pada dimensi ini (1,92) yang menunjukkan bahwa keragamaan OMS di Kota Bau-Bau dirasakan cukup baik terdistribusi di semua wilayah kota dengan karakteristik yang beragam dan telah mewakili semua kelompok sosial yang ada. Berdasarkan hasil penelitian terdapat lebih dari sepuluh jenis OMS.

Keragaman OMS yang ada di wilayah Bau-bau dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keragaman aktivitas masyarakat, keragaman kebutuhan dan kepentingan, dan keragaman isu, keragaman suku. Kepentingan ekonomi misalnya ditunjukan oleh adanya organisasi

koperasi, kepentingan agama ditunjukkan oleh organisasi majelis taklim dan remaja mesjid. Selain itu terdapat organisasi yang dibentuk berdasarkan mata pencarian seperti organisasi pedagang, pengrajin, petani, pedagang asongan, kelompok ojek, penjual RB, tukang kayu/meubel, pengamen, waria, buruh, kelompok orang tua murid, kelompok nelayan, kelompok budidaya rumput laut, kelompok guru dan lain-lain. Munculnya banyak OMS juga disebabkan karena adanya isu aktual yang berkembang, seperti isu lingkungan (forum masyakarat Bungi Sorawolio/Buso), isu pendidikan (kelompok orang tua murid, kelompok guru), isu kemiskinan (forum BKM, kelompok belajar perkotaan) dan lain-lain. Selain itu banyak OMS berbasis anggota perempuan seperti PKK, majelis ta'lim, kelompok arisan, kelompok penenun dan fatayat NU. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut tersebar luas baik di kota maupun dipelosok desa/ kelurahan. Banyak perempuan terlibat atau menjadi anggota dalam lebih dari satu organisasi, populasi perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, serta banyak program-program dari OMS yang mengharuskan keterlibatan perempuan dalam programnya.

Subdimensi yang memperoleh skor paling rendah pada dimensi struktur adalah sumber daya (1,22) yang artinya berada pada kondisi kurang sehat. Kondisi ini dipengaruhi oleh minimnya sumber daya yang dimiliki serta rendahnya kemampuan OMS dalam menggali sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya finansial menjadi masalah paling krusial bagi OMS terutama pada kelompok OKP dan sebagian LSM. Hampir seluruh OKP tidak memiliki sumber pendanaan untuk menjalankan aktivitas organisasinya dan sebagian LSM tidak memiliki sumber pendanaan untuk menghidupkan organisasinya. Rendahnya kemampuan mengggali sumber-sumber keuangan menjadi penyebab kurangnya sumber daya finansial.

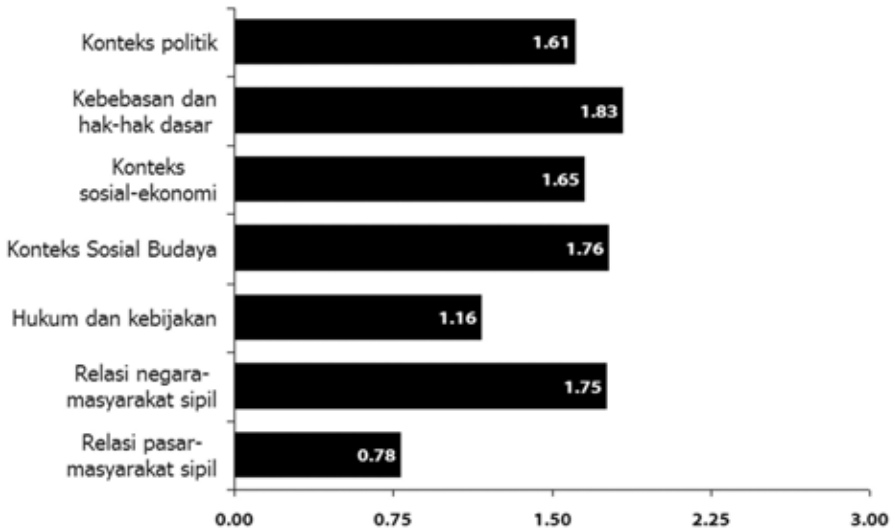
Keterbatasan sumber daya teknologi di kalangan OMS di Kota Bau-Bau juga merupakan tantangan serius. Hanya lembaga-lembaga yang sudah cukup mapanlah dan yang sudah memiliki pengalaman serta jaringan kerja lebih luas saja yang mampu mencukupi kebutuhan teknologi termasuk akses internet untuk kerja-kerjanya, seperti Sintesa, Prima dan JPKP. Di sisi lain, walaupun cukup tersedia tempat untuk dapat mengakses internet namun tidak semua aktor-aktor MS mempunyai kapasitas untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini terkait dengan masih perlu ditingkatkannya pengetahuan dan ketrampilan aktor-aktor MS itu sendiri. Peralatan kantor seperti komputer juga belum dimiliki oleh sebagian besar OMS. Tantangan lainnya adalah kapasitas pada sumber daya manusia

yang terkait dengan kapasitas individu. Keterampilan mengelola ekonomi, mengorganisasi diri, kemampuan menangkap peluang sumber daya finansial dari luar (pasar dan pemerintah) hanya bisa ditemukan pada beberapa LSM saja, sedangkan bagi kebanyakan OMS keterampilan/ kemampuan tersebut belum dimiliki. Demikian juga dengan kapasitas sumber daya manusia OMS untuk menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat, kapasitas membangun jaringan dengan lembaga donor hanya bisa dilakukan oleh LSM tertentu saja seperti JKPP, Sintesa dan Prima.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Struktur sebagai berikut:

- Memperkuat kepemimpinan OMS terutama kepemimpinan perempuan dengan memberikan kesempatan kepada semua kelompok sosial secara setara untuk menjadi memimpin OMS, memberi ruang yang cukup kepada semua kelompok yang memiliki semangat keorganisasian untuk melakukan proses belajar dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan OMS.
- Membangun kerja-kerja jaringan di tingkat lokal, regional dan nasional yang lebih luas dan lintas isu, sehingga terjadi interaksi yang saling memperkuat terutama dalam mengusung ide-ide perubahan.
- Meningkatkan kemampuan organisasi OMS agar terjadi pemerataan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat kelembagaan OMS dan masyarakatat sipil dan membuat mekanisme belajar bersama, distribusi informasi untuk membangun kapasitas OMS yang ada di Bau-Bau.
- Memperkuat jaringan kerja OMS di semua wilayah dan secara aktif melakukan aksi-aksi promosi demokrasi, khususnya berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan anti-kekerasan di wilayah kerjanya.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi lingkungan di Kota Bau-Bau berada pada kondisi cukup sehat (1,51). Subdimensi yang menyumbang perolehan cukup sehat pada dimensi ini adalah kebebasan dan hak-hak dasar (1,83), konteks sosial budaya (1,76), relasi antara Negara dengan masyarakat sipil (1,75), konteks sosial–ekonomi (1,65) serta konteks politik (1,61).

Di sinilah letak beberapa kekuatan masyarakat sipil di Kota Bau-Bau. Dialog antara masyarakat sipil dengan pemerintah terbangun dengan cukup baik, kebebasan pers yang terjamin, sikap toleran masyarakat yang tinggi terhadap orang yang berbeda agama, suku, ras, serta dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang lebih mendahulukan kepentingan umum. Selain itu, aktivitas untuk melakukan advokasi kebijakan publik juga berjalan dengan cukup intens di kalangan OMS.

Subdimensi kebebasan dan hak-hak dasar mendapatkan skor tertinggi (1,83) yang menunjukkan kebebasan dasar di Kota Bau-bau cukup baik dijamin oleh hukum dan dilaksanakan dalam prakteknya. Kebebasan sipil di Kota Bau-Bau dijamin oleh negara seperti kebebasan dalam berkumpul dan mendirikan organisasi. Begitu juga kebebasan berekspresi cukup terakomodasi dengan diberinya kebebasan untuk penyampaian aspirasi di muka umum.

Tantangan Kota Bau-Bau ada pada subdimensi relasi antara pasar dengan masyarakat sipil (0,78). Ini berarti sifat dan kualitas relasi antara masyarakat sipil dengan pasar dinilai kurang sehat. Dalam hal relasi pasar-masyarakat sipil, indikasi di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi antara perusahaan-perusahaan swasta dan OMS masih perlu diperbaiki. Sementara, tanggung jawab sosial perusahaan juga banyak yang belum terealisasi.

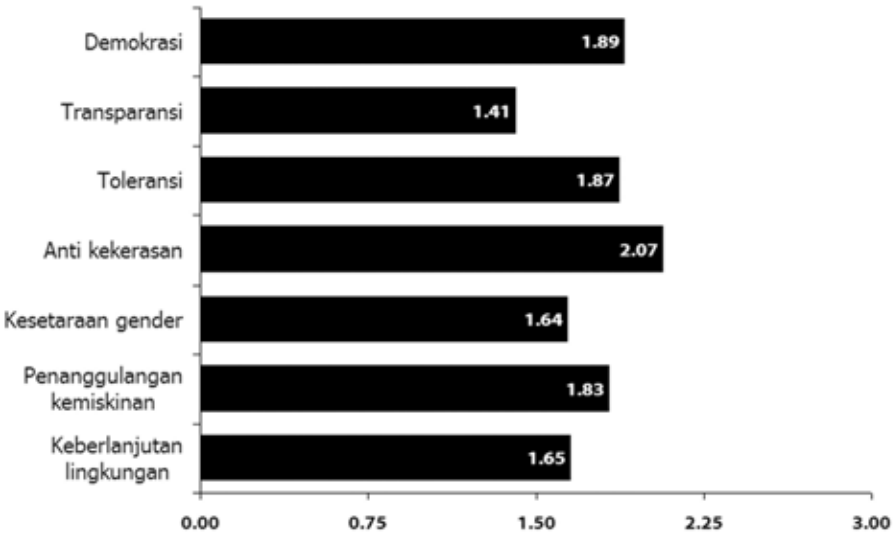
Hal yang cukup menarik terkait penilaian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan misalnya pada indikator hak-hak atas informasi dalam subdimensi kebebasan dan hak-hak dasar, perempuan memberikan penilaian cukup sehat (1,64) sementara laki-laki memberikan penilaian kurang sehat (0,78). Perbedaan penilaian ini disebabkan karena perempuan lebih proaktif dalam mencari informasi-informasi yang terkait dengan dokumen publik dan sifatnya lebih ringan sementara laki-laki menilai bahwa dokumen-dokumen publik mulai dari dokumen-dokumen pada tingkat RT/RW sampai dengan RPJM sangat sulit diperoleh.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan sebagai berikut:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengunakan hak politik misalnya dalam perumusan perda.
- Proses pelelangan proyek-proyek belanja publik secara transparan; masyarakat diberi akses untuk memperoleh dan menilai dokumen laporan pertanggung jawaban pelaksanaan project. Disisi lain masyarakat harus lebih pro aktif dalam mengawasi proses pengelolaan pemerintahan; melakukan advokasi terhadap kasus-kasus korupsi, membangun posko pengaduan tentang pelayanan publik dll.
- Melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan publik. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses dan tata cara dalam mengakses informasi di daerah.
- Optimalisasi pelayanan dengan mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat dalam hal pendaftaran OMS.
- Porsi anggaran yang cukup dalam APBD untuk dukungan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan kerja-kerja sosial maupun peningkatan kapasitas.

- Interaksi intensif antara masyarakat sipil dengan perusahaan-perusahaan swasta di kota Bau-Bau.
- Membuat aturan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan swasta yang ada di Kota Bau-Bau.

DIMENSI NILAI



Dimensi Nilai di Kota Bau-Bau mendapat nilai yang cukup sehat (1,76). Artinya masyarakat sipil kota Bau-Bau memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diyakini, dipraktekkan, dan dipromosikan di dalam arena MS. Sumbangan nilai cukup sehat pada dimensi ini disumbang oleh subdimensi anti kekerasan dengan nilai 2,07, demokrasi (1,89), toleransi (1,87), kesetaraan gender (1,64), penanggulangan kemiskinan (1,83) dan keberlanjutan lingkungan (1,65). Namun ada subdimensi yang masih dalam kategori kurang sehat yaitu subdimensi transparansi (1,41).

Di Kabupaten Bau-Bau tingkat pemahaman OMS tentang anti kekerasan cukup baik. Kaum perempuan yang selama ini dianggap sering menjadi korban kekerasan juga sudah mampu mengadvokasi dirinya jika mengalami tindak kekerasan. Selain itu ada upaya saling mengingatkan diantara aktor OMS jika terjadi tindak kekerasan dalam melakukan aksi.

Faktor yang mempengaruhi dimensi nilai ini adalah kesadaran OMS untuk mempraktekkan nilai anti kekerasan, demokrasi, toleransi dalam

kerja-kerja OMS. Masyarakat dinilai memiliki rasa saling menghargai yang cukup tinggi yang dibuktikan dengan kebiasaan saling mengunjungi pada hari lebaran termasuk dengan yang mereka yang berbeda agama. Pada saat Natal kaum muslim ikut meramaikan di Pantai Kamali. Masyarakat menerima keberadaan kaum waria. Sedangkan yang masih perlu ditingkatkan adalah penanggulangan kemiskinan. Mekipun telah ada bantuan berupa pelibatan pengangguran dalam pembangunan fisik (misalnya: MCK, dan drainase), namun upaya ini sebagian besar dilakukan di daerah pinggiran kota dan tidak terlalu memperhatikan kaum miskin di tengah kota seperti pengemis, anak-anak putus sekolah yang mengelola parkir (pekerja anak). Tantangan lainnya adalah pada subdimensi kesetaraan gender. Meskipun perempuan sudah dilibatkan dalam program pemberdayaan tapi belum dilibatkan dalam semua aspek perencanaan pembangunan seperti Musrenbang. Keterlibatan perempuan pada Musrenbang hanya di tingkat kelurahan.

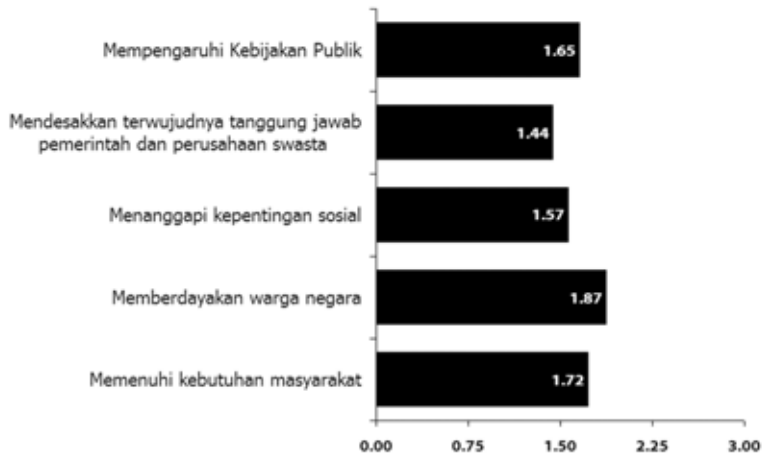
Faktor lain yang masih menjadi tantangan adalah pemahaman beberapa OMS terkait dengan transpansi keuangan. Subdimensi transpansi (1,41), menjadi tantangan tersendiri bagi OMS di Kota Bau-Bau. Indikator transparansi keuangan OMS memang mendapatkan skor rendah (1,09). Bahkan kelompok perempuan memberikan nilai lebih rendah lagi, yakni hanya 0,86. Secara umum ini disebabkan belum banyak OMS yang mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat secara luas sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik. Bahkan di kalangan anggota organisasi banyak yang tidak mengetahui keuangan lembaganya kecuali dia menjabat sebagai pengurus. Selain itu juga disebabkan oleh pemahaman sebagian kecil OMS yang masih perlu ditingkatkan dalam hal keterbukaan dalam pengelolaan keuangan.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Nilai sebagai berikut:

- Adanya perhatian khusus tentang peningkatan peran perempuan. OMS harus memperjuangkan aturan yang lebih tegas tentang *affirmative action* baik dalam kerja OMS maupun pemerintah kota. Membuka ruang yang lebih luas kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi dan memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi ketua atau pengurus inti dalam struktur organisasi.

- OMS dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus bagi anak-anak jalanan, membuat program pemberdayaan anak-anak jalanan sehingga mereka bisa mandiri dan memperoleh hak-haknya. Seperti membuat: rumah singgah, pendidikan alternatif (penyediaan tenaga pengajar sukarela, rumah baca), mengadakan ajang-ajang kreatif untuk menyalurkan bakat seperti lomba dll
- OMS harus melakukan pengawasan agar dana alokasi anggaran APBD khusus untuk anak-anak putus sekolah dan anak jalanan sampai pada sasaran.
- OMS bersama dengan masyarakat serta pemerintah dan pihak swasta harus melakukan pengawasan kerusakan terumbu karang di wilayah pantai Lakorapu sebagai upaya melestarikan terumbu karang.
- OMS dan masyarakat melakukan kerja bakti sekaligus memberikan pendidikan dan penyuluhan agar tidak membuang sampah sembarangan
- Meningkatkan kemampuan/kapasitas OMS dalam pelaporan keuangan berdasarkan SAI (standar akuntasi internasional). Saling belajar dan saling tukar informasi dan pengalaman dalam melakukan pelaporan keuangan antar sesama OMS dengan jaringannya dengan berbagi format laporan keuangan)
- Mendorong adanya PERDA Transparansi di kota Bau-Bau.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi dampak, memperoleh nilai 1,65, yang artinya kinerja masyarakat sipil sebagai arena yang efektif untuk memecahkan problem sosial/ekonomi/politik dan melayani kebaikan bersama dinilai cukup sehat. Kondisi ini disumbang oleh subdimensi pemberdayaan masyarakat (1,87), subdimensi pemenuhan kebutuhan masyarakat (1,72), subdimensi mempengaruhi kebijakan publik (1,65) dan subdimensi respon terhadap kepentingan sosial (1,57). Ada satu subdimensi yang berada dalam kondisi kurang sehat yaitu subdimensi akuntabilitas sektor negara dan pasar (1,44).

Skor tertinggi dimensi dampak ada pada subdimensi memberdayakan warga negara (1,87) yang artinya kinerja masyarakat sipil dalam memberdayakan masyarakat dinilai cukup sehat. Indikator yang paling menyumbang terhadap subdimensi ini adalah membangun modal sosial (2,09). Kondisi ini sesuai dengan beberapa fakta yang ditemukan di kota Bau-Bau, yaitu tingginya kerjasama pada organisasi-organisasi yang ada di tingkat masyarakat, masih ada agenda-agenda kerja bakti untuk pembersihan lingkungan yang digagas oleh kelompok-kelompok remaja masjid, karang taruna, dsb. OMS juga kerap mengajak anggota dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kerja-kerja bersama. Kelompok-kelompok di masyarakat juga masih menekankan toleransi di antara anggota kelompok dalam organisasi, misalnya toleransi antara anggota kelompok yang muslim dan non-muslim. Contoh lain, masih ada kelompok dasawisma yang melakukan sumbangan kolektif untuk warga lain yang membutuhkan.

Faktor yang mendukung dimensi dampak ini adalah dukungan berbagai donor untuk pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh OMS, selain itu OMS sendiri telah berhasil melaksanakan program-programnhya dan mendesakkan kepentingan masyarakat terhadap pemerintah. Inisiatif tidak hanya muncul dari laki-laki tapi juga perempuan. Banyaknya inisiatif yang muncul dari aktor-aktor OMS perempuan di tingkat masyarakat, seperti menuntut akses pelayanan persalinan bagi ibu melahirkan, mempersoalkan minimnya air bersih dan sebagainya. Sementara laki-laki biasanya cenderung lebih sering merespon kasus-kasus yang lebih politis, misalnya kasus korupsi, pelanggaran pemilu, dan lain-lain.

Tantangan pada dimensi dampak ada pada subdimensi akuntabilitas sektor negara dan pasar yang mendapat nilai kurang, pada indikator mendesakkaan terwujudnya tanggungjawab perusahaan swasta (1,09). Kondisi di lapangan menunjukkan aktivitas-aktivitas aktor-aktor MS yang

mendesak perusahaan untuk mewujudkan tanggungjawabnya belum kelihatan signifikan. Misalnya aktor MS di kelurahan Sula'a telah berupaya melakukan desakan terhadap limbah ikan perusahaan ikan yang berdampak pada kerusakan rumput laut, namun belum berhasil. Gerakan untuk mendesak tanggungjawab perusahaan biasanya baru muncul jika ada kasus-kasus yang memberikan kerusakan skala besar di lingkungan dan masyarakat. Padahal, dari beberapa perusahaan yang ada, berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kerugian di masyarakat cukup besar.

Tantangan lain OMS di Kabupaten Bau-Bau adalah belum maksimalnya indentifikasi awal yang dilakukan oleh OMS untuk melihat kebutuhan masyarakat terkait dengan program-program yang mereka jalankan. Kebutuhan di tingkat masyarakat kadang kala mengalami perubahan dipengaruhi oleh adanya program-program baru yang masuk melalui berbagai pihak, baik OMS maupun program yang dilakukan pemerintah. Selain itu, masih ada anggapan-anggapan di masyarakat yang melihat bahwa program-program bantuan modal usaha yang diberikan LSM merupakan dana hibah yang berasal dari bantuan luar negeri yang tidak perlu dikembalikan, sehingga menyebabkan rendahnya tanggungjawab untuk mengembangkan bantuan yang ada. Persoalan lainnya adalah beberapa program-program modal usaha yang dilakukan oleh OMS tidak berkelanjutan di tingkat komunitas.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai berikut:

- Perlu memperkuat efektivitas bantuan-bantuan OMS di tingkat masyarakat agar bantuan yang diberikan OMS kepada masyarakat lebih berkelanjutan. Strategi yang dapat dilakukan:
  - ✔ Memberi penyadaran kritis kepada masyarakat bahwa dana-dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat meskipun hibah tapi merupakan milik bersama. Sehingga perlu ada tanggungjawab bersama untuk menjaga dan memelihara keberlanjutan program-program tersebut.
  - ✔ Mengajak masyarakat untuk membangun mekanisme kontrol di internal kelompoknya untuk mengawasi program-programnya.
- Membangun komunikasi dan relasi yang intensif diantara OMS untuk menggulirkan wacana dan mulai memetakan

dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh keberadaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kota Bau-Bau.

- Memperluas gerakan OMS untuk melakukan advokasi kebijakan terutama kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelayanan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan. Strategi yang bisa dilakukan misalnya, mengembangkan jaringan OMS untuk isu kebijakan dengan memanfaatkan OMS-OMS yang sebelumnya sudah melakukan advokasi kebijakan, misalnya dengan JMS Buton.

Kabupaten Buton

Kabupaten Buton secara geografis terletak di bagian selatan garis katulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4,96º - 6.25 º LS (dan membentang dari barat ke timur diantara $120{,}00^0$ – $123{,}34^0$ BT, meliputi sebagian P. Muna, Buton dan sebagian wilayahnya berada di jazirah Tenggara P. Sulawesi. Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ± 2.488,71 km² atau 248.871 ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas ± 21.054 km2. Penduduk di Kabupaten Buton pada tahun 2008 berjumlah 265.724 Jiwa. Batas administrasi wilayahnya sebagai berikut[1]:

- Sebelah Utara : Kabupaten Muna.
- Sebelah Selatan : Laut Flores.
- Sebelah Timur : Kabupaten Wakatobi.
- Sebelah Barat : Kabupaten Bombana.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Buton 2009 anggota DPRD berjumlah 30 orang. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Buton menurut partai sebagai berikut: PBB berjumlah 3 orang, PPP berjumlah 3 orang, PNBK berjumlah 3, Keadilan & Persatuan Indonesia berjumlah 1 orang, PAN berjumlah 3 orang, Karya Peduli Bangsa berjumlah 1orang, PDIP berjumlah 3, Golkar berjumlah 6 orang, Indonesia berjumlah 1 orang, PK Sejahtera berjumlah 2 orang, PBR berjumlah 2 orang, Demokrasi Kebangsaan berjumlah 1 orang, PKB berjumlah 1 orang,

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

OMS Kabupaten Buton terdistribusi di pusat kabupaten, wilayah kecamatan dan daerah terpencil. Dari 28 OMS yang ada di Kabupaten

[1] Buton Dalam Angka, BPS 2008

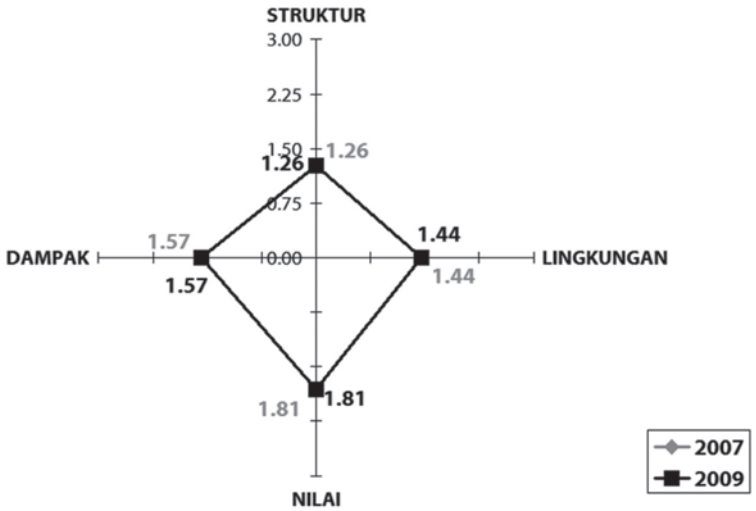
Buton, 25 OMS (89,28%) berdomisili di kota Bau-Bau, 1 OMS (3.58%) berada di kecamatan, 2 OMS (7.14%) merupakan OMS Nasional (PEKKA & KPI) yang tidak mempunyai sekretariat hanya menempatkan FO/Fokal Point. Sedang organisasi LDII dan BKMT terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk organisasi kemahasiswaan seperti HMI & KOHATI ada pada setiap fakultas perguruan tinggi di Kabupaten Buton. Persentase OMS yang memiliki jaringan kerja adalah sebagai berikut 19 OMS (87.85%) memiliki jaringan kerja dari desa sampai kabupaten. Kelompok swadaya masyarakat dan pengrajin hanya ada ditingkat desa dan khusus HMI, KOHATI BKMT & LDII adalah lembaga payung yang mempunyai jaringan sampai tingkat pusat dan mempunyai cabang pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Sedangkan OMS yang melakukan/mengorganisasi aksi politik non-partisan tercatat 12 OMS (42,85%) sudah melakukan aksi politik non partisan dengan menggelar aksi massa, menulis opini, dan tayang TV. Sisanya (57,15%) masih sebatas simpatisan dalam aksi masa saja. Untuk kemampuan OMS menggali sumberdaya, dari hasil pemetaan OMS Kabupaten Buton tahun 2007 tecatat ada 8 OMS memperoleh dukungan dana dari donor internasional. Sumber dana lain didapat dari dukungan bisnis jual buah dan jual buletin seperti LBH-R. untuk HMI dan KOHATI mendapat dukungan dana dari alumni. Sedangkan Organisasi bisnis mendapat dukungan sumberdaya dari rekanan. Baru sekitar 28.57% OMS yang sudah punya mekanisme penggalangan dana swadaya (fundraising) cukup memadai bagi keberlanjutan organisasinya.

Berdasarkan kriteria keaktifan dalam isu yang dikembangkan di kabupaten, besarnya anggota/kelompok dampingan, sumber daya keuangan dan keluasan jaringan pada tingkat desa, kabupaten, propinsi dan/atau nasional, teridentifikasi ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh dan relasi OMS yaitu; (1) SINTESA: sebagai anggota/pemberi mandat JMS-B, aktif dalam pertemuan dan kegiatan JMS-B seperti melakukan riset pemetaan masalah perempuan dan berkontribusi dalam kepengurusan JMS-B. (2) PRIMA: sebagai lembaga payung JMS-B yang menaungi secara hukum dan memberikan asisistensi keuangan & program pada JMS-B, (3) JPKP: terlibat dalam desain program-program JMS-B, juga terlibat dalam lokakarya penguatan OMS dan (4) YASINTA: anggota/pemberi mandat JMS-B, sering terlibat dalam pertemuan JMS-B, sebagai tim implementasi riset pemetaan masalah perempuan Kabupaten Buton.

OMS yang memiliki pengaruh besar terhadap agenda perubahan adalah SINTESA, PRIMA dan YASINTA, ketiga lembaga ini mempunyai hubungan kedekatan yang sama karena selalu berhubungan secara institusi yang saling bersinergi dalam mobilisasi sumberdaya dan finansial. Ketiga lembaga ini saling mendukung dalam upaya pelaksanaan program baik program internal lembaga maupun eksternal dan sering melakukan sharing pembelajaran. Sedangkan lembaga yang dinilai berpengaruh di Kabupaten Buton lama adalah YLAI, Pelintas, Yamansida, Humaniora, Tunas Karya, LBH–R dan LSM PEKKA.

Status Masyarakat Sipil



Grafik 11 Intan IMS Kabupaten Buton

Dari grafik di atas status masyarakat sipil Kabupaten Buton nampak cukup sehat pada Dimensi Nilai (1,81) dan Dampak (1,57). Namun untuk Dimensi Struktur dan Lingkungan terlihat kurang sehat. Hal ini nampak pada perolehan skor pada dimensi Struktur yaitu 1,26 dan Lingkungan mendapat skor 1,44.

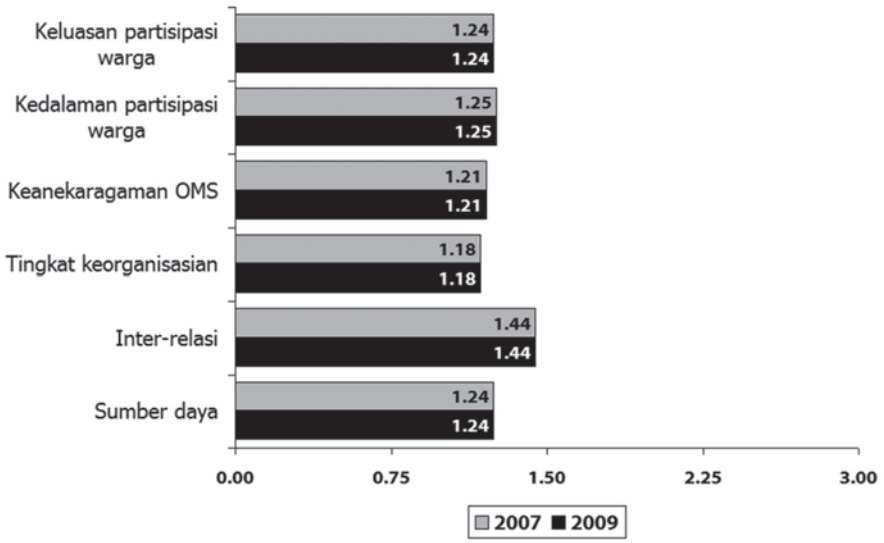
Kekuatan masyarakat sipil di kabupaten Buton ada pada Dimensi Nilai. Masyarakat sipil Kabupaten Buton dianggap cukup sehat dalam mempraktikkan dan mempromosikan prinsip dan nilai-nilai yang diyakini didalam arena MS. Pada Subdimensi Penanggulangan kemiskinan, aktor-

aktor MS terlihat cukup responsif dan mempromosikan kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti yang dilakukan Sintesa yang mendampingi Lembaga Ekonomi Desa (LED) di 50 desa dari 12 kecamatan, dan Bahteramas untuk seluruh desa.

Tantangan Kabupaten Buton terletak pada Dimensi Struktur, khususnya pada Subdimensi Tingkat Keorganisasian. Tantangan lainnya adalah gerakan bersama karena secara politik kelompok-kelompok MS terpolarisasi pada kelompok kepentingan tertentu. Partai politik juga belum memiliki kader perempuan yang cukup memadai. Hambatan lainnya yang dialami MS adalah kurangnya sumber daya dan sumber dana untuk dapat mengunakan hak politiknya untuk dipilih baik dalam pilkada maupun pemilu.

Peserta Lokakarya IMS 2009 Kabupaten Buton menyepakati tidak melakukan penilaian ulang terhadap indikator-indikator IMS karena menilai belum terjadi perubahan yang signifikan selama dua tahun terakhir. Dengan demikian perolehan nilai IMS 2007 menjadi pijakan dalam mengkaji kondisi dimensi IMS untuk tahun 2009.

DIMENSI STRUKTUR



Secara umum, hasil penilaian dimensi struktur pada IMS 2009 berpijak pada penilaian IMS pada tahun 2007 menunjukkan kondisi kurang sehat (1,26). Semua penilaian subdimensi ini berkontribusi pada dimensi struktur

yang kurang sehat. Hal ini terlihat pada subdimensi keluasan partisipasi (1,24), kedalaman partisipasi (1,25), keanekaragaman OMS (1,21), tingkat keorganisasian (1,18), interrelasi MS (1,44) dan sumber daya (1,23).

Dari semua subdimensi yang ada di dimensi struktur, subdimensi interrelasi memiliki nilai paling tinggi yaitu 1,44. Fakta lapangan memang menunjukkan sedikit perkembangan pada subdimensi ini. Komunikasi antar sesama OMS telah terbangun untuk mendorong sebuah isu seperti pendidikan politik di masyarakat. Selain itu Program ACCESS, JPKP, LEAD UNDP, LBHR, AMB dll, mendorong komunikasi dan interaksi antara aktor OMS di Buton. Komunikasi/interaksi tidak hanya terjadi di antara OMS tapi juga OMS dengan masyarakat desa. Meski demikian kerjasama antar sesama OMS dirasa masih kurang. Meskipun terjadi peningkatan frekuensi pertemuan antara aktor MS maupun antar anggota jaringan OMS di Buton, namun belum mendorong peningkatan kolaborasi dan kerja-kerja bersama. Kecenderungan yang terjadi saat ini, meningkatnya jumlah program di Buton mengakibatkan OMS maupun aktor MS sibuk dengan programnya sendiri-sendiri (termasuk kelompok-kelompok di desa). Kondisi ini menjadi tantangan bagi relasi antar OMS ke depan.

Salah satu tantangan di Kabupaten Buton terletak pada subdimensi tingkat keorganisasian (1,18). yang ditandai dengan kurangnya efektivitas organisasi payung. Selain JMS, di Buton juga terdapat beberapa jaringan atau organisasi payung lain, seperti JPKP, PNPM Mandiri, PEKKA. Namun keberadaan organisasi payung ini masih belum maksimal. Tantangan lainnya pada indikator pengaturan diri. Meskipun cukup banyak OMS di Kabupaten Buton yang sudah memiliki AD/ART, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan standar pengelolaan lembaga yang baku dan masih berdasarkan kebutuhan saja.

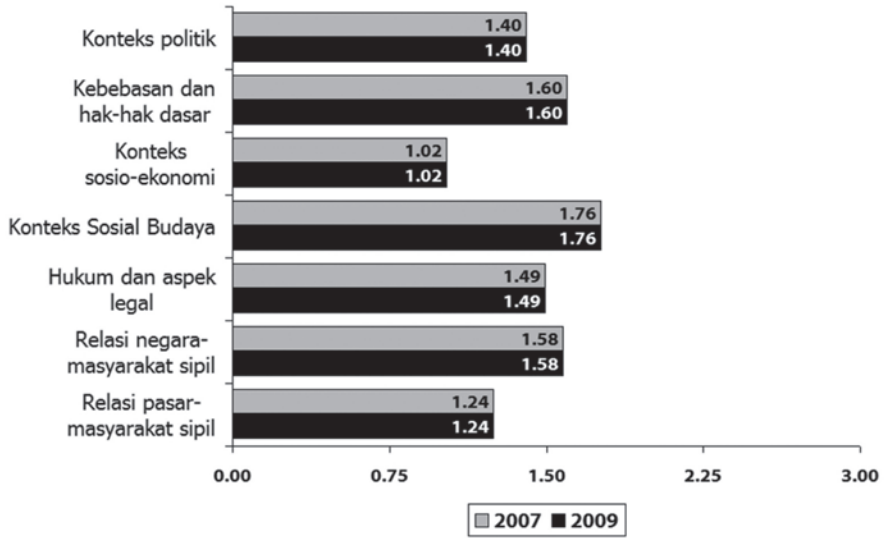
Dimensi Struktur di Kabupaten Buton ini dipengaruhi oleh peningkatan dukungan dari luar (donor) dan relasi negara-masyarakat sipil. Dukungan donor ini memberikan peningkatan aktivitas warga di masyarakat desa maupun kota seiring meningkatnya jumlah program di masyarakat. Hal ini berkontribusi pada pengembangan budaya masyarakat dalam berswadaya dan gotong royong. Hubungan masyarakat sipil dengan pihak pemerintah yang relatif harmonis (tidak banyak gesekan) mendorong pemerintah turut mendukung/meningkatkan program-program yang dilakukan OMS melalui program-program pemerintah yang dikelola oleh OMS.

Faktor penghambat untuk dimensi struktur ini adalah adanya kecenderungan elitis dalam pola pikir dan kerja-kerja yang dilakukan OMS. Selain itu juga terlihat kurangnya keterlibatan dan rasa memiliki warga terhadap program yang sedang dijalankan. Di antara OMS juga belum terjadi kolaborasi untuk mengusung isu bersama, walau sesungguhnya sudah ada jenis isu yang diperjuangkan oleh beberapa OMS.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Struktur sebagai berikut:

- Meningkatkan inisiatif dan penggerak dalam mendorong kerja-kerja kolaborasi atas isu yang prioritas dalam masyarakat yang sesungguhnya merupakan fokus program beberapa OMS di Buton.
- OMS khususnya LSM di Buton lebih serius mengawal kerja-kerja masyarakat sipil yang dilakukan di tingkat desa dan mempromosikannya ketingkat yang lebih luas (kecamatan maupun kabupaten).
- Internalisasi nilai-nilai pada aktor MS maupun OMS menjadi mutlak, untuk memperjelas jati dirinya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat termarginal. Sehingga yang dilakukan bukan sekedar melakukan aktivitas dan menyelesaikan program.
- Perlu fokus mendorong aliansi/serikat bagi masyarakat sipil di tingkat desa seperti serikat tani, serikat nelayan dll
- Membangun kekuatan bersama melalui kelompok-kelompok.
- Memberikan motivasi terhadap warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan OMS
- Membangun kembali kesadaran MS/OMS dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap kegiatan-kegiatan sosial
- Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan warga negara dalam memenuhi kebutuhan sosial.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi ini menguraikan dan menganalisis keseluruhan lingkungan politik, sosial, ekonomi, kultural dan hukum (legal) di mana masyarakat sipil berada dan berfungsi. Secara umum, hasil penilaian Dimensi Lingkungan pada IMS 2007 menunjukkan kondisi kurang sehat (1,44). Sebagian besar subdimensi pada dimensi ini berkontribusi terhadap perolehan kondisi tersebut. Subdimensi Konteks Sosio-Ekonomi (1,02), Relasi Pasar-MS (1,24), Konteks Politik (1,40) dan Hukum dan Aspek Legal (1,49) mendapatkan nilai kurang sehat. Tiga Subdimensi lainnya yakni Subdimensi Konteks Sosial-Budaya (1,76), Kebebasan dan Hak-hak Dasar (1,60) dan Relasi Negara-MS (1,58) berada pada kondisi cukup sehat;.

Kekuatan di dimensi ini ada pada Subdimensi Konteks Sosial-Budaya (1,76). Subdimensi ini dinilai cukup sehat yang menunjukkan bahwa norma dan sikap warga masyarakat dinilai cukup kondusif dalam perkembangan masyarakat sipil. Beberapa fakta di lapangan yang dapat dijadikan contoh adalah tingkat kepercayaan antar warga mulai terbangun dengan baik, semakin transparannya kelompok-kelompok masyarakat dalam berorganisasi yang mendorong peningkatan kepercayaan di antara sesama warga, dan semakin terbukanya masyarakat terhadap perbedaan identitas. Kekuatan lainnya ada pada pemahaman relasi gender di masyarakat semakin meningkat, meskipun belum sepenuhnya menyejajarkan relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat. Semakin berkembangnya pemahaman pluralisme (keberagaman) di masyarakat, sehingga memperkecil praktik-praktik feodalisme.

Tantangan Kabupaten Buton terletak pada Subdimensi Konteks Sosial-Ekonomi (1,02) yang artinya kurang sehat. Kondisi sosial ekonomi Kabupaten Buton memang nampak kurang sehat. Namun demikian ada beberapa fakta yang menunjukkan perubahan yang lebih baik seperti program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah, hubungan OMS dan Masyarakat yang berjalan baik, pengetahuan dan keterampilan pengelolaan usaha meningkat, adanya skema-skema kredit yang berpihak kepada UKM dan iklim investasi terbuka bagi pengusaha dari luar daerah.

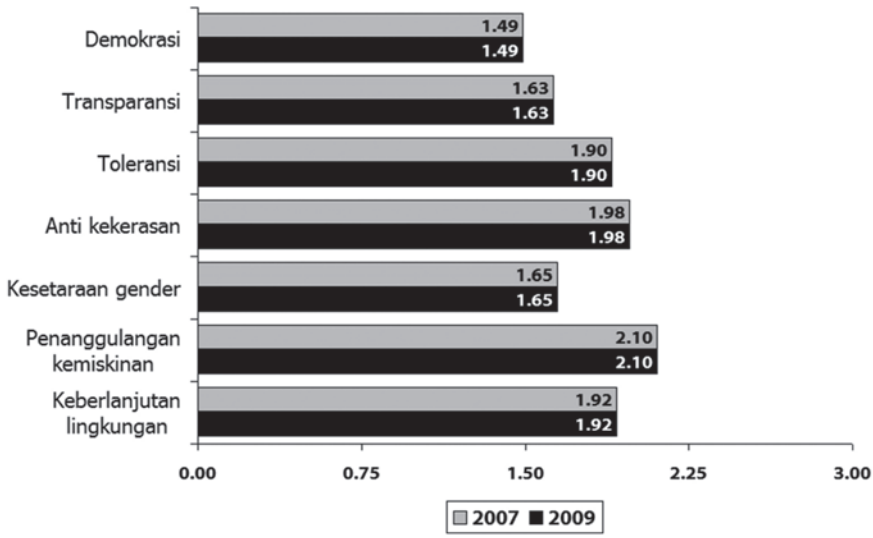
Perubahan iklim ketatanegaran yang memberikan ruang bagi kebebasan masyarakat untuk berorganisasi dan mengeluarkan pendapat mempengarungi dimensi lingkungan di kabupaten Buton, yang mendorong minat masyarakat sipil untuk memanfaatkan hak-haknya. Selain itu pelayanan administrasi semakin baik, tidak berbelit-belit dan semakin transparan yang memudahkan pelayanan administrasi dalam kegiatan OMS. Sedangkan faktor yang masih membutuhkan perhatian adalah pelaksanaan desentralisasi kewenangan yang masih didominasi oleh penentu kebijakan ditingkat daerah, juga masuknya budaya luar lewat teknologi yang menyebabkan terjepitnya budaya lokal masyarakat.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan sebagai berikut:

- Supermasi hukum dalam pemberantasan korupsi harus ditegaskan dan tidak tebang pilih.
- Kewenangan dalam desentralisasi harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan pada masing-masing pihak.
- Memilih pimpinan berdasarkan visi & misinya
- Ruang advokasi untuk mendorong minat masyarakat sipil dalam memanfaatkan hak-hak sipilnya
- Akses informasi dan prosedur tentang skem dan investasi oleh semua lapisan masyarakat.
- Tindak lanjut rencana aksi terhadap pelatihan-pelatihan yang dibuat.
- Pengawasan pada skem-skem kredit yang lebih ketat, seperti: skem kredit yang diberikan oleh pemerintah dan OMS.
- Meningkatkan budaya transparansi

- Pelestarian kearifan lokal yang mendukung orang miskin dan keadilan gender
- Meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang pluralisme
- Meningkatkan pemahaman kaum perempuan dalam hal pendidikan politik.
- Pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi dan legalitas OMS
- Mendorong sektor swasta yang lain untuk mengalokasikan sebagaian keuntungannya bagi kegiatan sosial kemasyarakatan

DIMENSI NILAI



Analisis dalam dimensi nilai akan meninjau prinsip dan nilai-nilai yang diyakini, dipraktikkan, dan dipromosikan di dalam arena MS. Secara umum, hasil penilaian Dimensi Nilai menunjukkan kondisi cukup sehat (1,81). Hampir seluruh subdimensi pada dimensi ini memberikan kontribusi positif. Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan (2,10), Anti-kekerasan (1,98), Keberlanjutan Lingkungan (1,92), Toleransi (1,90), Kesetaraan Gender (1,65) dan Transparansi (1,63). Satu-satunya subdimensi yang berada dalam kondisi kurang sehat adalah Demokrasi (1,49).

Kekuatan dimensi ini terletak pada Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan yang mendapat nilai cukup sehat (2,10) yang artinya aktor-

aktor MS dinilai cukup responsif terhadap isu kemiskinan dan mempromosikan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya-upaya tersebut memang sudah dilakukan beberapa OMS di Kabupaten Buton, seperti Sintesa yang mendampingi Lembaga Ekonomi Desa (LED) di 50 desa dari 12 kecamatan, dan Bahteramas untuk seluruh desa. Hanya saja sebagian besar upaya yang dilakukan oleh OMS masih dilatar belakangi oleh kepentingan program. Di tingkat desa sendiri ada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pendirian kelompok-kelompok yang diinisiasi oleh masyarakat desa, seperti kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok tani di Desa Siomanuru, Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Kambe-kambero dan kelompok dana bergulir di Desa Wasuemba. Dari berbagai upaya yang dilakukan, sebagian kecil sudah mampu melakukan aksi nyata untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat. Selain itu ada upaya-upaya OMS untuk penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan kepemimpian perempuan, keterampilan usaha, managemen usaha, pengembangan pemasaran, dan lain-lain. Cukup berkembangnya arisan di kalangan kelompok-kelompok masyarakat juga mampu membantu perekonomian masyarkaat.

Tantangan Dimensi Nilai ada pada Subdimensi Demokrasi yang mendapat skor terkecil yaitu 1,49. Subdimensi ini, merupakan satu-satunya yang berada dalam kondisi kurang sehat pada Dimensi Nilai. Meskipun demokrasi sudah menjadi diskursus di kalangan OMS, tetapi pada tataran praktik belum semua OMS melakukannya dengan baik. Pada kaji ulang tahun 2009, terjadi sedikit perubahan, walaupun dianggap belum signifikan. Upaya OMS untuk mendorong praktik demokrasi pada beberapa mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan di Pemerintah juga belum maksimal. Dalam praktiknya, proses Musbangdes dan Musrenbang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Desakan OMS untuk kondisi ini juga masih dirasa kurang.

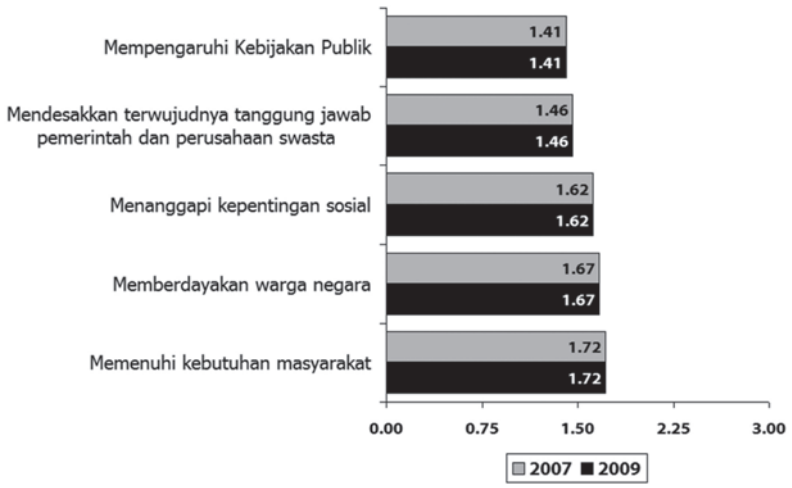
Dimensi Nilai di kabupaten Buton ini dipengaruhi oleh kebijakan donor dan pemerintah yang memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan. Biasanya mereka mensyaratkan adanya kuota perempuan minimal 30% dalam setiap kegiatan, seperti dalam program CLAPP–ACCESS, program PEKA (pemerintah). Selain itu banyaknya program penganggulangan kemiskinan baik pemerintah maupun donor seperti program P2KP, Kompensasi BBM melalui PKPS-BBM, Dana berguilir, MCRMP, CEREPAM, PEMP, dan pengram ACCESS, CREED, BO, BANTESA, serta PKM.

Sedangkan faktor yang dirasakan masih perlu mendapat perhatian adalah belum adanya Perda/Perdes yang menjamin pelaksanaan demokrasi. Di Kabupaten Buton ini Perda partisipasi belum disahkan. Belum semua desa/kelurahan melakukan Musrenbang seperti desa Lasalimu, dan Waara. Keterlibatan masyarakat dalam MUSRENBANG juga belum menggambarkan komposisi keterwakilan masyarakat. Untuk penerapan demokrasi pun dinilai belum murni. Hal ini karena ada intimidasi dari pihak tertentu dalam Pilkada 2005 di Desa Kaimbulawa dan Holimombo, konflik rumah tangga atas perbedaan pilihan calon kepala daerah di Desa Kapoa juga mencederai pelaksanaan demokrasi di kabupaten ini, ditambah lagi banyaknya pejabat PNS yang di non-jobkan karena tidak mendukung calon tertentu. Faktor lain yang dirasakan masih ada hambatan dalam dimensi nilai ini adalah belum banyak OMS yang mempraktikkan dan mempromosikan nilai-nilai transparansi dan Kesadaran MS untuk mengakses pengelolaan keuangan OMS masih rendah, seperti misalnya di LPM, BKM NUSPP di Palabusa.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Nilai sebagai berikut:

- Perlu memaksimalkan pendidikan politik bagi MS secara berkesinambungan
- Mendorong lahirnya PERDA Partisipasi melalui JMS Buton
- Mendorong upaya pelibatan masyarakat berdasarkan komposisi keterwakilan yang ada di desa khususnya masyarakat miskin dan perempuan pada kegiatan MUSRENBANG.

DIMENSI DAMPAK



Secara umum, hasil penilaian dimensi dampak menunjukkan kondisi cukup sehat (1,57). Kondisi cukup sehat ini dikontribusikan oleh subdimensi memenuhi kebutuhan masyarakat (1,72), memberdayakan warga negara (1,67), dan menanggulangi kepentingan sosial (1,62). Selain itu, ada dua subdimensi yang berada dalam kondisi kurang sehat; mendesak terwujudnya tanggungjawab pemerintah dan perusahaan swasta (1,46) dan mempengaruhi kebijakan publik (1,41).

Kekuatan di dimensi ini ada pada Subdimensi Memenuhi Kebutuhan Masyarakat yang mendapatkan penilaian cukup sehat (1,72) yang sekaligus menjadi skor tertinggi di dimensi ini. Ini berarti kinerja masyarakat sipil sebagai arena yang efektif untuk memecahkan problem sosial/ekonomi/politik dan melayani kebaikan bersama dinilai cukup sehat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa MS mampu melakukan lobi/negosiasi ke pihak pemerintah untuk penyediaan air bersih di pulau Makassar. Di Buton sendiri sudah tersedia air bersih di Wakaokili, Batauga, Ambuau, Hendea, dan Winning. OMS juga mendesak pemerintah untuk pengadaan listrik masuk desa. Pelayanan PLN saat ini menjadi lebih baik meskipun pelayanannya dinilai masih lamban dibanding dengan animo masyarakat untuk mendapatkan sambungan baru maupun penambahan daya. Lobby OMS juga berdampak pada layanan raskin yang lebih cepat dan tepat sasaran, meskipun masih ada beberapa desa atau kelurahan yang masih menyalahgunakan raskin seperti di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak secara langsung, OMS memberikan layanan seperti penyediakan makanan

bagi pengungsi yang tiba di pelabuhan Bau-bau. OMS melobi Pemerintah untuk penyediaan dana bencana alam, seperti pemberian bantuan kepada korban KM Acita dalam bentuk barang dan uang. OMS Kabupaten Buton juga menyalurkan bantuan permodalan untuk usaha ekonomi bagi masyarakat miskin dan perempuan, mendekatkan masyarakat dengan sumber air bersih dan membantu memberikan pelayanan bagi pengungsi miskin, contohnya dengan melakukan sunatan massal yang di koordinasikan oleh PKK di Kecamatan Pasarwajo

Untuk upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok terpinggirkan beberapa OMS melakukan pendampingan terhadap anak jalanan, beasiswa pendidikan bagi anak-anak PEKKA yang kurang mampu di SMP 2 di Pogalampa dan memberikan pinjaman lunak bagi orang miskin untuk pengembangan usaha

Tantangan dimensi dampak pada Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan Publik yang mendapatkan skor paling rendah (1,41) yang artinya tingkat keaktifan dan keberhasilan arena MS dalam mempengaruhi kebijakan publik dinilai kurang.

Kondisi eksternal yang memberikan pengaruh kondisi dampak ini adalah kebijakan Pemda untuk mengalokasikan stafnya sebagai fasilitator CLAPP kawasan. Pemda juga mulai terbuka membangun diskusi dengan OMS dalam penyelesaian masalah bersama. Faktor lainnya adalah berkembangnya beberapa program yang mendukung pencapaian dampak kinerja OMS seperti program JMS, program CRC, program PEKKA, dan program CLAPP serta dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas SDM OMS dan MS
- Peningkatan aksi untuk mendesak tanggung jawab pemerintah oleh OMS dan MS
- Meningkatkan kesadaran OMS dan MS untuk pada kegiatan sosial
- Membangun kekuatan bersama antar OMS dan MS
- Melakukan upaya-upaya membangun modal sosial baik dalam OMS, MS dan masyarakat.
- OMS dan MS mempertahankan kepercayaan masyarakat

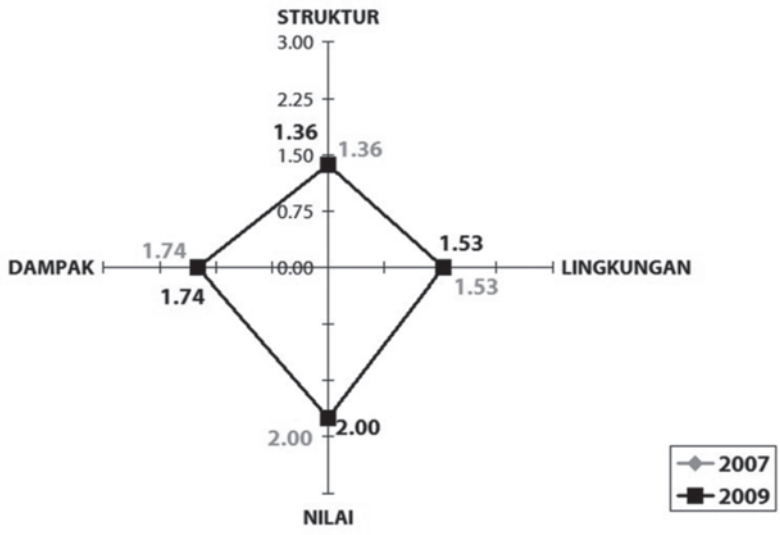
Kabupaten Muna

Kabupaten Muna terletak di Sulawesi Tenggara, meliputi bagian utara Pulau Buton dan bagian utara Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar kawasan tersebut. Secara gografis, Kabupaten Muna terletak di bagian selatan Khatulistiwa yang berada pada $4^{0}15^{0}$ - $4^{0}30^{0}$ LS dan $122^{0}15^{0}$ - $123^{0}00^{0}$ BT. Luas keseluruhan daratan Kabupaten Muna adalah 2.963,97 Km^{2-} atau 296.397 Ha. Batas-batas wilayah sebagai beikut:

- Utara : Selat Tiworo dan Kabupaten Kendari
- Timur : Laut Banda
- Selatan : Kabupaten Buton
- Barat : Selat Spelman

Berdasarkan Data Kabupaten Muna dalam Angka, pada 2009 anggota DPRD Kabupaten Muna berjumlah 30 orang, hanya 3 diantaranya adalah perempuan. Komposisi anggota DPRD menurut fraksi sebagai berikut. Fraksi Karya Pembangunan berjumlah 12 orang, Fraksi PAN berjumlah 3 orang, Fraksi PDIP berjumlah 3 orang, Fraksi Demokrat Pembaruan Bangsa (PKB, Demokrat, PDP) berjumlah 6 orang, Fraksi Madani (PKS, Partai Patriot, PBB, PKPB, Gerindra) berjumlah 6 orang.

Status Masyarakat Sipil



Grafik 12 Intan IMS Kabupaten Muna

Peserta Lokakarya Kaji Ulang IMS Kabupaten Muna 2009 menyepakati tidak melakukan penilaian ulang terhadap indikator-indikator IMS karena dianggap belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap dimensi ini, selama dua tahun terakhir. Dengan demikian perolehan nilai IMS 2007 menjadi pijakan dalam mengkaji kondisi dimensi IMS untuk tahun 2009.

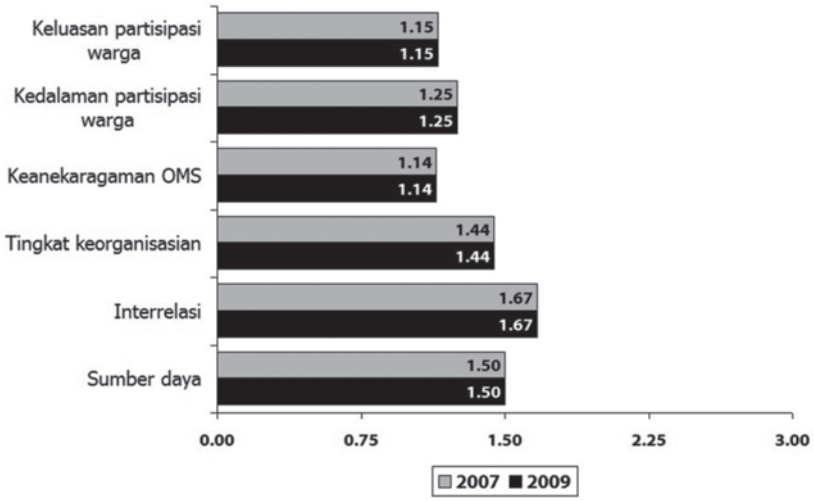
Grafik intan menunjukkan bahwa status masyarakat sipil Kabupaten Muna nampak cukup sehat. Meskipun pada Dimensi Struktur mendapat skor kurang sehat (1,36), namun dimensi lainnya mendapat skor cukup sehat. Dimensi Lingkungan mendapatkan nilai 1,53, Nilai 2,00 dan Dampak 1.74. Nilai Dimensi Struktur menunjukkan bahwa secara umum kondisi 'bangunan' MS di Kabupaten Muna agak rapuh. Sedangkan kondisi faktor eksternal yang ditunjukkan oleh skor Dimensi Lingkungan dinilai cukup mendukung perkembangan MS. Meski demikian pembenahan secara serius harus dilakukan pada aspek-aspek dalam dimensi tersebut. Sementara semangat mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai 'universal' dinilai cukup. Skor Dimensi Dampak mengindikasikan bahwa MS di Kabupaten Muna juga dinilai telah cukup mampu memainkan

memainkan peran yang efektif untuk memecahkan problem sosial, ekonomi dan politik dan melayani kebaikan bersama.

Kekuatan MS di Kabupaten Muna terletak pada Dimensi Nilai. Masyarakat sipil dinilai telah cukup sehat dalam mempromosikan dan mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai yang diyakini di dalam arena MS. Pada Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan, cukup banyak OMS yang bekerja dalam penanggulangan kemiskinan seperti pembentukan koperasi simpan pinjam, pendampingan untuk mendapatkan pelayanan air minum dan listrik juga pembentukan kelompok arisan, baik uang maupun barang. Selain penanggulangan kemiskinan, masyarakat sipil di Kabupaten Muna dipandang cukup sehat dalam mempromosikan dan mempraktikkan nilai anti kekerasan, toleransi, keberlanjutan lingkungan, transparansi, demokrasi dan kesetaraan gender.

Hal yang masih menjadi tantangan di kabupaten Muna ada pada Dimensi Struktur. Kurang efektifnya organisasi payung OMS dan masih terbatasnya keluasan partisipasi OMS menjadi tantangan yang penting untuk diperhatikan.

DIMENSI STRUKTUR



Berdasarkan hasil penilaian, Dimensi Struktur berada kondisi kurang sehat. Kondisi ini disebabkan oleh buruknya skor-skor Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga (1,15). Kedalaman Partisipasi Warga (1,25), Keanekaragaman OMS (1,14), Tingkat Keorganisasian (1,44) dan Sumber

Daya (1,50). Meskipun secara umum Dimensi Struktur mendapatkan penilaian kurang sehat, namun masih ada subdimensi yang mendapatkan skor cukup, yakni Subdimensi Interrelasi (1,67), yang sekaligus dianggap sebagai kekuatan pada dimensi ini.

Skor Indikator Komunikasi (1,75) dan Kerja Sama (1,58) menunjukkan bahwa hubungan antara OMS dipandang sudah terjalin dengan baik dan mulai mengarah pada hubungan kerja sama yang baik. Faktor-faktor yang mendukung di antaranya adalah tumbuhnya rasa saling percaya, adanya isu–isu yang dipetakan dan didorong bersama, dan terbangunnya komunikasi antar OMS yang lancar. Beberapa contoh yang dapat disebutkan adalah koalisi-koalisi OMS untuk mendorong isu listrik, otonomi desa dan isu korupsi APBD.

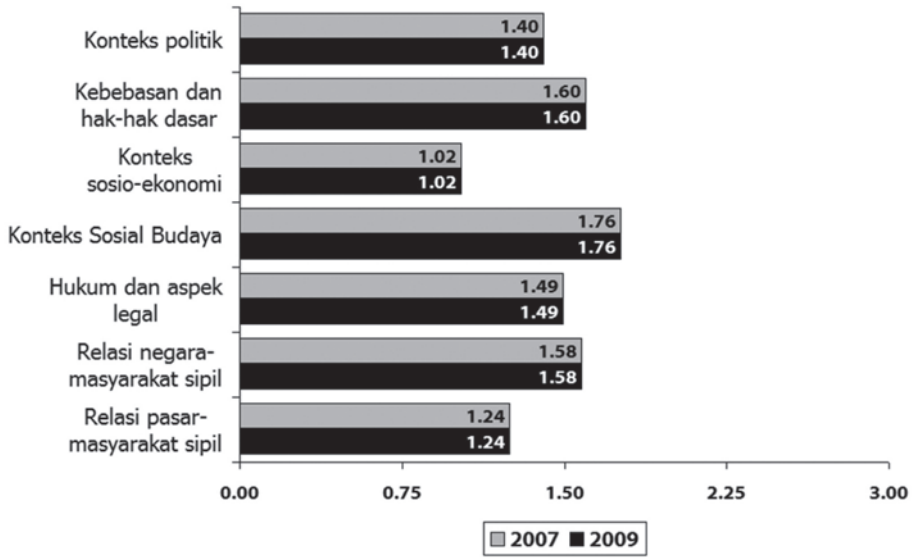
Salah satu tantangan yang dihadapi MS di Kabupaten Muna adalah keanekaragaman OMS. Skor Indikator Keanekaragaman OMS (1,19) menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan dinilai masih rendah. Selain itu, kepemimpinan organisasi juga dianggap belum mewakili kepentingan banyak kelompok. Ini ditunjukkan oleh Indikator Kepemimpinan OMS yang masih rendah (1,00).

Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan keluasan partisipasi warga. Indikator Aksi Politik Non-Partisan hanya memperoleh nilai 0,73 yang berarti sakit. Sedangkan Indikator Menyumbang Untuk Amal (0,98), Keanggotaan di OMS (1,06) dan Kegiatan Kolektif Komunitas (1,27) dianggap berada pada kondisi kurang sehat. Satu-satunya indikator yang memberikan kontribusi positif adalah Kerja Sukarela yang mendapatkan nilai cukup (1,71).

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Struktur sebagai berikut;

- Mendorong agar OMS tidak hanya berkembang di kota tetapi menyebar sampai ke pedesaan.
- Mendorong agar lebih memperhatikan kelompok masyarakat lain yang belum terwakili seperti buruh, kelompok difabel, PKL dan APS.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi Lingkungan memperoleh skor cukup sehat (1,53). Subdimensi-subdimensi yang berkontribusi positif adalah Sosial-Budaya (1,80), Kebebasan Hak-hak Dasar (1,79), Hukum dan Aspek Legal (1,67), dan Relasi Negara–MS (1,56). Sedangkan tiga subdimensi lainnya, yaitu Konteks Politik (1,32), Sosial-ekonomi (1,37) dan Relasi Pasar-MS (1,21) dianggap sebagai faktor yang belum mendukung.

Kekuatan utama MS Kabupaten Muna pada dimensi ini terletak pada Subdimensi Konteks Sosial-Budaya yang memperoleh skor 1,85, meski bukannya tanpa catatan. Walaupun Indikator Budaya Patriarki dinilai cukup sehat (1,75), namun di dalam diskusi terungkap bahwa budaya patriarki dipandang masih sangat kuat, sehingga menyebabkan terhambatnya partisipasi perempuan. Skor Indikator Kepercayaan (1,33) juga menunjukkan bahwa kepercayaan antar warga masih dalam kondisi kurang sehat.

Kekuatan lainnya adalah Subdimensi Kebebasan Hak-hak Dasar (1,79). Kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat dinilai sudah cukup sehat. Di beberapa tempat dalam menentukan keputusan di tingkat desa sudah melibatkan masyarakat. Penyaluran hak-hak sipil masyarakat juga sudah tidak ada halangan lagi, bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah berani mengeluarkan aspirasinya seperti saat aksi PNS menuntut uang makan. Indikator Hak-hak Sipil (1,85) mengindikasikan hal ini. Indikator Kebebasan Pers (2,11) mempertegas penilaian bahwa derajat kebebasan

pers di kabupaten ini cukup tinggi. Di sisi lain, pers juga digunakan pemerintah daerah dalam mengamankan kebijakan pemerintah daerah. Kebebasan untuk memperoleh informasi di ruang-ruang negara mulai terbuka. Meskipun demikian masih terdapat hambatan dalam akses terhadap dokumen negara seperti RAPBD dan PERDA dan ini ditunjukkan oleh Indikator Hak-hak Atas informasi (1,42).

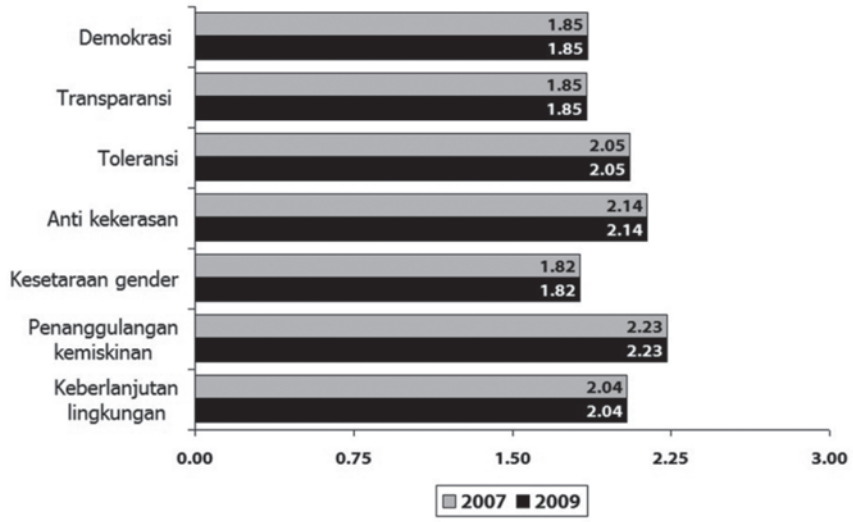
Paling tidak terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi MS Kabupaten Muna yang tercermin dari skor-skor Subdimensi Relasi Pasar-MS (1,21), Konteks Poltik (1,32) dan Konteks Sosial-Ekonomi (1,37). Sumbangsih dan tanggung jawab perusahaan dinilai masih sangat rendah bagi penguatan MS. Penilaian ini ditunjukkan oleh skor Indikator Kedermawanan Perusahaan (1,04) dan Tanggung jawab Perusahaan (1,08). Pada Subdimensi Konteks Politik, lima dari sembilan indikator mendapatkan penilaian kurang sehat. Bahkan Indikator Desentralisasi Dana mendapatkan skor sakit (0,74). Sedangkan pada Konteks Sosial-Ekonomi program-program pemerintah seperti BLT, bantuan untuk UKM, dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan masih dianggap belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Di sisi lain pemasaran hasil-hasil produksi/komoditi masyarakat masih sulit dan harga barang kebutuhan pokok makin meningkat.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan sebagai berikut:

- Memperbanyak program-program yang mendukung posisi dan peran perempuan.
- Advokasi tentang kesetaraan gender dan kebebasan informasi
- Perlu perluasan terhadap pemahaman kebebasan dan hak-hak dasar di masyarakat dengan melakukan penyadaran kritis bagi warga atas hak-hak dan kewajibannya termasuk didalamnya kebebasan pers.
- Advokasi terhadap UKM/koperasi agar memiliki akses untuk mendapatkan modal tanpa diskriminasi dan pungutan liar.
- Mendorong semua UKM dan koperasi agar dapat memiliki landasan hukum (akte)
- Mengintensifkan komunikasi intens OMS/MS dan pemerintah untuk membahas isu kepentingan rakyat.
- Pemerintah (dari desa sampai kabupaten) membuka ruang partsisipasi dan menjalankan permendagri 13/2004.

- Mendorong kesadaran partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam Musrenbang.
- Mendesak pemerintah untuk membuka ruang investor (pasar) agar hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan (produk Lokal) masyarakat Muna lebih baik pemasarannya dan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Muna.
- Menuntut/mendesak pemerintah (dinas) untuk mengirimkan PPL yang bermutu sesuai bidangnya
- Mendorong gerakan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat dan melakukan pemberdayaan rakyat.

DIMENSI NILAI



Secara umum, Dimensi Nilai berada dalam kondisi cukup sehat (2,00). Seluruh subdimensi berkontribusi positif terhadap pencapaian nilai dimensi ini. Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan (2,23), Anti Kekerasan (2,14), Toleransi (2,05), Keberlanjutan Lingkungan (2,04), Transparansi (1,85), Demokrasi (1,85) dan Kesetaraan gender (1,82), seluruhnya mendapat penilaian cukup sehat.

Kekuatan dimensi nilai terletak pada Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan. Cukup banyak OMS yang melakukan upaya penanggulangan kemiskinan seperti membentuk koperasi simpan pinjam dan pendampingan OMS untuk mendapatkan akses terhadap air minum dan listrik.

Masyarakat juga membuat kelompok arisan uang dan barang. Kekuatan lainnya adalah aktor-aktor OMS sudah cukup menjunjung tinggi nilai toleransi. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan kesempatan pada perempuan untuk terlibat dan datang bersama anaknya pada pertemuan-pertemuan. Selain itu, jadwal pertemuan disesuaikan dengan waktu aktor-aktor MS khususnya pada kelompok perempuan.

Sebagian OMS juga telah mulai mempraktikkan demokrasi di lembaga mereka. Proses-proses pengambilan keputusan, kontrol, pemilihan kepemimpinan, serta regenerasi mulai dilaksanakan melalui mekanisme yang demokratis. Selain itu, sebagian OMS ataupun aktor-aktor OMS juga gencar mempromosikan nilai-nilai demokrasi pada OMS lain, lembaga pemerintahan, maupun pengelola program-program blok grant. Salah satu contohnya adalah ketika OMS mempengaruhi pengelola program NUSS, P2KP, dan PPK untuk mendorong proses-proses penentuan program pembangunan di tingkat warga secara partisipatif.

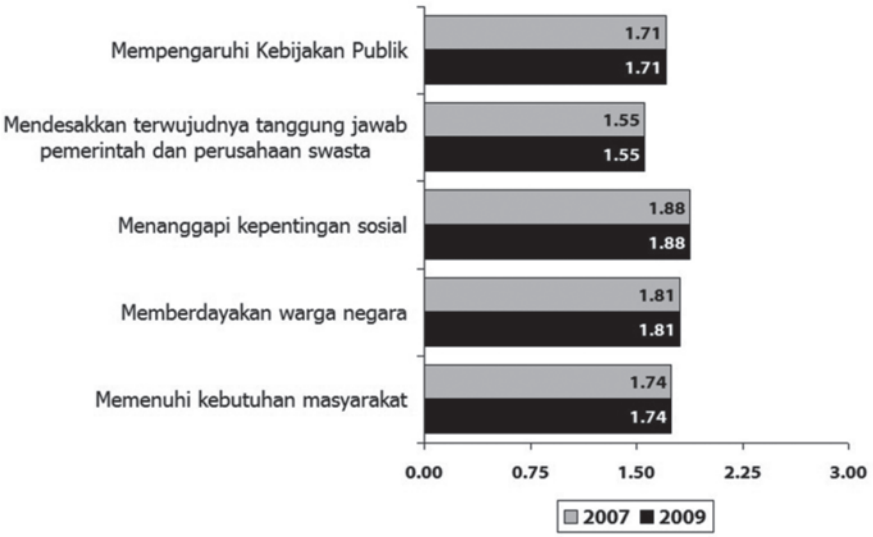
Nilai-nilai kesetaraan gender juga mulai dipromosikan oleh OMS-OMS yang bekerja pada isu tersebut. Keberhasilanyapun mulai terlihat dari peningkatan peran perempuan dalam posisi-posisi strategis di desa. Beberapa desa yang berhasil mendorong perempuan menduduki posisi sebagai kepala desa dan Ketua LPM. Beberapa OMS dan aparatus desa juga mulai menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, transparasi, dan akuntabilitas, seperti RAT pada beberapa koperasi di Muna dan pola-pola pelibatan warga dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Meskipun Nilai Subdimensi Anti Kekerasan tinggi, bukan berarti tanpa tantangan. Masih ada aktor-aktor OMS yang menggunakan cara-cara intimidasi kepada para pihak dalam memperjuangkan kepentingannya. Seperti ancaman yang diberikan oleh beberapa aktor OMS kepada para kepala desa berkaitan dengan pengelolaan dana-dana bantuan desa yang berujung pada keharusan kepala desa untuk memberikan sejumah uang kepada aktor-aktor OMS. Meskipun demikian ada sebagian kecil OMS mulai melakukan promosi (termasuk mengadvokasi) anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan seksual.

Rekomendasi

- Mendorong pemerintah untuk transparan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di daerah
- Mendorong OMS untuk melakukan transparansi pada semua program yang dijalankan
- Perlu peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan.
- Sosialisasi tentang kesetaraan gender dilakukan secara berkesinambungan
- Advokasi revisi UU Parpol tentang quota 30% perempuan dapat menjadi wajib
- Mulai mempromosikan dan mengagendakan diskusi tentang keadilan gender di forum-forum adat
- Penyelesaian persoalan-persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah dan hukum .
- Melakukan kampanye anti kekerasan

DIMENSI DAMPAK



Dimensi Dampak masuk dalam kondisi cukup sehat, dengan perolehan 1,74. Perolehan nilai dimensi dampak ini disumbang oleh semua subdimensi yang mendapat skor cukup sehat, seperti yang ditunjukkan oleh skor-skor. Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (1,88), Mem-

berdayakan Warga Negara (1,81), Mempengaruhi Kebijakan Publik (1,74), Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (1,74), serta Mendesakkan Terwujudnya Tanggung Jawab Pemerintah dan Tanggung Jawab Swasta (1,55).

Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial dianggap sebagai kekuatan Dimensi Dampak. Indikator Memberikan Tanggapan mendapatkan penilaian cukup sehat (2,15). Sejumlah fakta menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan OMS dalam menanggapi kepentingan sosial, seperti upaya pengaduan atas kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan penerangan (listrik). Selain itu, sejumlah OMS di Muna memberikan respon atas pengaduan warga seputar penyimpangan bantuan BLT ketika ada dugaan kecurangan dalam menentukan penerima BLT. Sedangkan kelompok generasi muda Kecamatan Lawa membangun diskusi-diskusi intensif untuk membahas isu-isu sosial. Dari sisi tingkat kepercayaan publik, nilai yang diperoleh juga cukup sehat (1,61), meskipun masih harus ditingkatkan.

Kekuatan lain ada pada Subdimensi Pemberdayaan Warga Negara. Hal ini terlihat pada aspek memberikan informasi kepada warga yang dapat dilihat dari sejumlah kegiatan antara lain forum pendidikan tentang KDRT di 22 desa, sosialisasi Permendagri 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD di 5 Kecamatan, Permendagri 13 tahun 2006 dan permendagri 56 tahun 2007. Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat sipil di Kabupaten Muna adalah toleransi antar umat beragama. Ada perkumpulan masyarakat yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti arisan kain kawan, pengadaan pecah belah untuk hajatan dll. Inisiatif penyediaan lapangan pekerjaanpun muncul misalnya dengan koperasi purnama di desa Malingano yang memberi kesempatan pada masyarakat miskin dan perempuan untuk mengembangkan usahanya dengan membuat aturan yang mudah untuk mengakses modal, terbentuknya beberapa kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan usahanya, seperti pengrajin Nentu dan Kasur di desa Korihi.

Tantangan dimensi dampak ada pada mendesakkan terwujudnya tanggungjawab pemerintah dan tanggungjawab swasta. Ada upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menuntut pertanggugjawaban pemerintah dan sektor swasta; seperti tuntutan implementasi Perda IPKR yang menuntut tangungjawab pemerintah dan swasta untuk mengakomodasi hak-hak rakyat dalam pengelolaan kayu, desakan masyarakat ke pemerintah desa untuk mencari pasar lain selain PT. Daewo lewat dinas pertanian agar

harga juangan kuning sesuai dengan harga pasar. Namun upaya-upaya ini belum nampak hasilnya. Upaya mengadvokasi Amdal penimbunan laut sampai saat ini juga belum terealisasi.

Rekomendasi:

- Perlu ada pemberdayaan yang dilakukan OMS untuk mendorong gerakan dari masyarakat sipil dalam mengawal usulan prioritas desa sampai tingkat kabupaten.

Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak ± 500.000 jiwa.

Batas Wilayah Administratif Kabupaten Gowa:

- Utara : Kota Makasar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone.
- Timur : Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- Selatan : Kabupaten Takalar dan Kabupeten Jeneponto.
- Barat : Kabupaten Takalar dan Selat Makasar (Kota Makassar).

Wilayah administratif Kabupaten Gowa pada tahun 2007 terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.888,33 kilometer persegi (3,01 % luas Sulawesi Selatan). Sebagian besar merupakan dataran tinggi (72,26%) yang meliputi 9 kecamatan yakni: Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Wilayah-wilayah inilah yang memiliki akses lebih kecil dalam percepatan pembangunan dibandingkan dengan wilayah dataran rendah.

Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 594 423 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 293.956 Jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 300.467 Jiwa. Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Gowa mencapai 12,79% dengan pendapatan per kapita penduduk Rp. 162.063 yang artinya masih di bawah garis kemiskinan.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Di Kabupaten Gowa terdapat banyak organisasi masyarakat sipil yang telah melakukan aktivitas kemasyarakatan secara intensif. Teridentifikasi ada 41 OMS yang tersebar di Kelompok tradisional sebanyak 7 lembaga, Kelompok Keagamaan sebanyak 7 lembaga, Kelompok gerakan sosial ada 13 lembaga dan Kelompok Asosiasi ada 14 lembaga.

Dalam kelompok tradisional terlihat bahwa kelompok etnis dan keluarga sangat mendominasi. Hal ini dikarenakan ikatan kekeluargaan baik yang berasal dari keluarga dan kekerabatan yang sama ataupun berasal dari etnis yang sama masih menjadi perhatian dalam masyarakat di Gowa. Sementara itu, kelompok keagamaan terlihat bahwa kelompok beragama Islam menjadi sangat mendominasi. Namun demikian, tidak terlihat kekuatan lain di luar kekuatan mayoritas agama Islam (NU dan Muhammadiyah) yang berhasil diidentifikasi.

Dalam kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pelayanan publik dan pemerintahan, terlihat jelas bahwa sebagian besar kelompok bermain dalam isu lingkungan hidup. Di samping itu, isu kepermerintahan seperti pelayanan publik juga menjadi perhatian kalangan LSM di Gowa. Isu perempuan dan petani juga tidak luput menjadi perhatian dari kekuatan masyarakat sipil yang ada di Gowa. Terakhir, dalam kelompok asosiasi terlihat beragamnya kelompok asosiasi. Baik karena ikatan profesi ataupun kesamaan hobi dan kelompok lainnya.

Sebagian besar organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu advokasi berada dalam tingkat berpengaruh, seperti KTNA, FKPG, LPPP, YPL, JAKER P3G, GP3A. Salah satu kelemahan organisasi ini adalah menyangkut kemampuan finansial, meski telah memiliki kekuatan dan besaran jaringan pendukung. Sama halnya seperti PGRI, Forwa Gowa, HIPMA, JARPUK, kekuatannya terletak dalam kemampuan membangun jaringan dan menyampaikan isu-isu yang ingin didorong, namun tidak

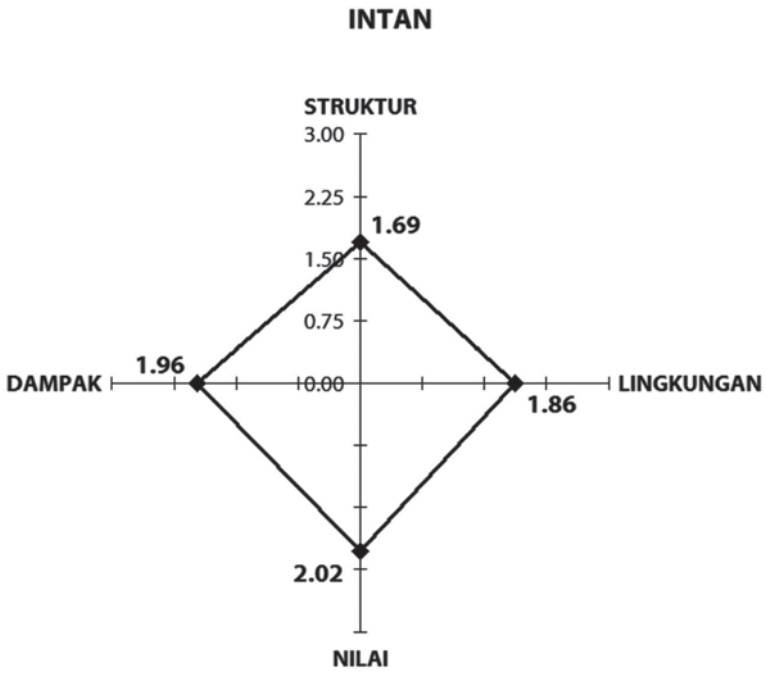
memiliki sumber keuangan yang memadai. Sedangkan organisasi seperti GAPENSI, SINOMAN, ataupun Forum Massa, dianggap kurang memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu yang menyangkut permasalahan masyarakat secara nyata, meski memiliki indikator keberpengaruhan lain yang kuat.

Dalam melihat peta kekuatan masyarakat sipil yang terkait dengan isu tata kepemerintahan lokal yang demokratis (TKLD), ada OMS yang telah melakukan advokasi kebijakan dalam isu ini seperti Karaeng puang, LP3, Jaker P3G, APKAN, LBI, LP2KL, FKPG, Kaukus Perempuan Batara Gowa. OMS ini yang bermain di isu menyangkut transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik (pendidikan dan kebaikan gratis), KDRT, *affirmative action*, pelestarian lingkungan dalam tata pemerintahan.

OMS yang bermain dalam isu TKLD berperan sebagai pengawal terhadap tata laksana pemerintahan lokal yang demokratis. Adapun pengawalan yang dilakukan lebih banyak menyangkut pengawasan, memberi kritik dan masukan baik teknis ataupun substantif dalam pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah.

Beberapa tema kerja yang dilakukan oleh OMS yang berperan dalam isu TKLD adalah pertama, bekerja dalam ranah advokasi terhadap pelayanan publik dalam hal ini pengawalan terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis yang menjadi program andalan pemerintah. Namun ada juga yang bekerja dalam ranah akuntabilitas dan kinerja parlemen serta aparat pemerintah, terutama melihat performance lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua, dalam ranah advokasi KDRT serta partisipasi politik perempuan, mendorong perda KDRT serta mendorong implementasi kuota 30 persen dalam parlemen yang nantinya berdampak terhadap peningkatan peran perempuan di ranah pemerintahan. Ketiga, dalam isu pelestarian lingkungan hidup; mendorong SRTPK (Strategi Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Gowa, dan juga termasuk juga mendorong perda transparansi dan partisipasi. Meski demikian saat ini didorong adanya kemitraan penyelamatan air yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Status Masyarakat Sipil



Grafik 13 Intan IMS Kabupaten Gowa

Dari grafik intan di atas status masyarakat sipil Kabupaten Gowa nampak terlihat cukup sehat. Hal ini terlihat pada Dimensi Struktur (1,69), lingkungan (1,86), nilai (2,02) dan dampak (1,96) yang skornya semua terlihat cukup sehat.

Aset-aset utama masyarakat sipil yang bekerja di Kabupaten Gowa

Dimensi Struktur

- Komunikasi dan bekerjasama yang baik satu dengan yang lain dalam memecahkan masalah bersama
- Menjunjung tinggi nilai saling menghargai dan menghormati (sipakatau) sehingga komunikasi antar OMS berjalan lancar

Dimensi Lingkungan

- Kebebasan berekspresi dan berkumpul yang telah mendapatkan jaminan baik dari pemerintah dan dipraktikkan dengan baik.

- Pemerintah memberikan perhatian penuh kepada OMS yang ada untuk melakukan kerja-kerja bersama dalam berbagai program kemitraan.

Dimensi Nilai

- nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, kesetaraan gender dan transparansi cukup baik dipahami dan dipraktikkan di Kabupaten Gowa
- OMS telah mempraktikkan transparansi dengan membuat LPJ yang disosialisasikan ke publik

Dampak

- Organisasi-organisasi kemasyarakatan atau OMS cukup terlatih dan tanggap terhadap isu-isu sosial
- OMS tanggap pada keluhan masyarakat dan responsif terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.
- Keterbukaan Pemerintah di bidang informasi publik

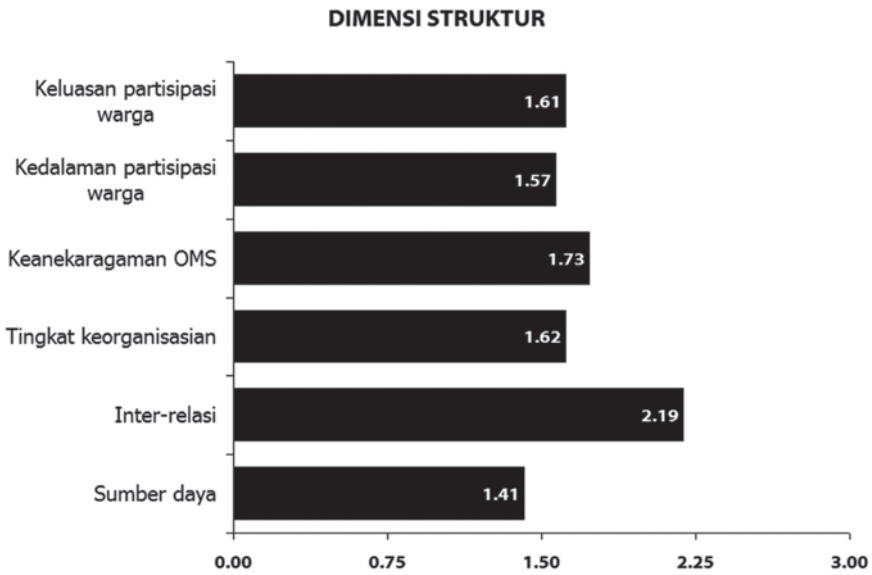
Kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Gowa ada pada Dimensi Nilai. Masyarakat sipil Kabupaten Gowa cukup sehat mempraktikan dan mempromosikan prinsip dan nilai-nilai yang diyakini di dalam arena MS. Nilai-nilai anti kekerasan, kesetaraan gender, toleransi, keberlanjutan lingkungan, demokrasi, penangulangan kemiskinan dan tranparansi menjadi kekuatan bagi perkembangan OMS di Kabupaten Gowa ini.

Skor terendah ada pada Dimensi Struktur (1,69), pada dimensi ini memang faktor terlemah ada pada sumber daya OMS di Kabupaten Gowa. Sumber daya OMS memang masih sangat minim, baik teknologi, finansial, maupun jaringan-jaringan yang dimiliki diluar wilayah. OMS di desa sangat tergantung pada anggaran dan program pembangunan pemerintah.

DIMENSI STRUKTUR

Dimensi Struktur di Kabupaten Gowa mendapat penilaian cukup sehat (1,69). Kondisi tersebut tersebut utamanya didukung oleh dua subdimensi, yaitu: Subdimensi Keragaman Arena MS (1,73) dan Relasi Antar Aktor-aktor Masyarakat Sipil (2,19). Dua subdimensi lain juga berada dalam kategori cukup sehat yaitu Subdimensi Kedalaman Partisipasi (1,57) dan Tingkat Organisasi (1,62). Subdimensi yang masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ adalah Sumber daya (1,44). Sumber daya OMS memang masih sangat minim, baik teknologi, finansial, maupun jaringan-jaringan yang

dimiliki diluar wilayah. OMS di desa sangat tergantung pada anggaran dan program pembangunan pemerintah.



Letak kekuatan MS di Kabupaten Gowa dalam Dimensi Struktur ini ada pada Dimensi Relasi Antar Aktor-aktor Masyarakat Sipil (2,19). Aktor-aktor MS di Kabupaten Gowa dinilai mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik untuk memecahkan masalah bersama, seperti yang ditunjukkan oleh skor Indikator Komunikasi (2,33) dan Kerja Sama (2,04). Contoh sederhana mengenai hal ini dapat dijumpai pada kehidupan masyarakat. Di Desa Parigi, setiap musim hujan, semua warga khawatir akan diri, lingkungan serta sawah-sawah pertaniannya, sehingga semua warga singsingkan lengan baju untuk saling melindungi dan memperingatkan satu dengan yang lainnya, proses ini mendorong koordinasi dan kerjasama yang baik antara aktor-aktor MS di wilayah tersebut.

Di perkotaan komunikasi dibangun dengan diskusi-diskusi, baik formal maupun informal. Oleh karenanya, di antara aktor OMS komunikasi dan kerjasama sudah terjalin dengan baik. Beberapa forum ataupun jaringan yang terbentuk lebih banyak disebabkan karena komunikasi yang intensif tersebut.

Saya bersama kawan-kawan terjun langsung ke masyarakat, memberikan penyuluhan, bimbingan dan advokasi terhadap perempuan bagaimana menyiapkan diri dan lingkungannya untuk menerapkan perilaku kehidupan yang sehat… Tampak terlihat perbedaan yang nyata dari perubahan perilaku masyarakat khususnya perempuan. Masyarakat khususnya perempuan dampingan kami sekarang semakin mengerti bagaimana hidup sehat, dan terutama se-makin memahami hak dan kewajiban terhadap keluarga dan lingkungannya.

Hasniati Hayat anggota Kaukus Perempuan Batara Gowa)

Tantangan OMS di Kabupaten Gowa ada pada Subdimensi Sumber Daya (1,41). Dua indikator pada subdimensi ini, yakni Sumber Daya (1,35) dan Kemampuan Sumber Daya (1,48) berada pada kondisi kurang sehat. Sumber daya manusia OMS di Kabupaten Gowa sebenarnya cukup sehat, tetapi tidak ditopang dengan sarana dan prasarana kerja, finansial yang mendukung, serta akses-akses sumber dana yang bisa diraih. Hampir semua OMS yang berada di desa masih sangat bertumpu pada proyek-proyek untuk desa, sehingga sangat bergantung dari program-program pemerintah. Jikapun ingin menggalang sumber daya dari anggota, masih sangat kecil kontribusi yang diperoleh. Seperti di Desa Bontonompo, OMS di desa tersebut sangat jarang ditemukan adanya penggalangan iuran dari anggota untuk lembaganya. Demikian pula di desa Panakkukang, kerja-kerja yang dilakukan oleh OMS setempat lebih banyak aktivitas gotong royong warga serta kegiatan sosial antar warga. Program-program yang dilakukan melalui dukungan dari luar sangat jarang sekali. Jarangnya sumber daya tersebut akibat kurangnya informasi yang diperoleh OMS di desa atas potensi mengalang sumber daya itu sendiri.

Kondisi ini juga terjadi pada OMS di kota. Penggalangan sumber daya dari publik masih sangat jarang. Penggalangan dana lebih banyak bertumpu kepada kerjasama dengan program-program yang dikembangkan pemerintah. Sementara penggalangan sumber daya dari anggota, publik maupun lembaga donor masih sangat jarang.

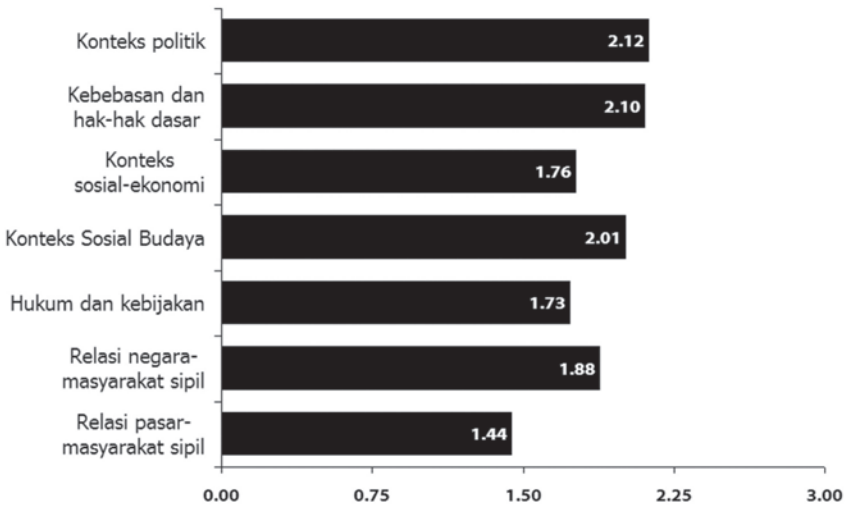
Hal menarik adalah perbedaan penilaian Subdimensi Sumber Daya antara kelompok peserta perempuan dan laki-laki. Kelompok peserta perempuan memberikan penilaian 1,48, sedangkan laki-laki memberikan skor 1,28. Dalam diskusi terungkap bahwa kelompok perempuan dalam

melakukan aktivitasnya (misalnya di PKK atau kelompok pengajian) tidak membutuhkan dana cukup besar. Bahkan terkadang dapat memobilisasi pendanaan dari masing-asing anggota, khususnya pada saat dilakukan pertemuan-pertemuan rutin organisasi/perkumpulan.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Struktur sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan OMS dalam menggalang sumberdaya baik di desa maupun di kota.
- Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah yang mengelola program di desa, sehingga terjadi harmonisasi antara kerja yang dilakukan oleh pemerintah dengan kerja-kerja OMS di desa-desa.
- Bagi OMS di kota akan membangun kerjasama lebih luas dengan berbagai pihak sehingga memilik pengetahuan dan kemampuan yang semakin baik dalam menggalang sumber-sumber daya.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi Lingkungan (1,86) dinilai dalam kondisi cukup sehat. Empat subdimensi, yaitu Konteks Politik (2,12), Kebebasan dan Hak-hak Dasar (2,10), Konteks Sosial-Budaya (2,01), Relasi Negara-MS (1,88) memberikan sumbangan positif. Sedangkan skor Subdimensi Konteks

Sosial-Ekonomi (1,76) dan Hukum dan Kebijakan (1,73) walapun masuk ke dalam kategori cukup sehat namun masih di bawah skor dimensi. Hanya ada satu subdimensi yang ada pada kategori kurang sehat yaitu Subdimensi Relasi Pasar-Masyarakat Sipil (1,44).

> *OMS tidak perlu alergi berhubungan dengan kekuasaan dan dunia usaha. Karena bagaimanapun secara realitas, OMS belum bisa mandiri secara finansial. Apalagi perhatian pemerintah Kabupaten Gowa terhadap OMS sangat tinggi. Buktinya melalui kerja Kerjasama Jaringan antar OMS melalui "JAKER (Jaringan Kerja) telah melibatkan berbagai OMS untuk bersama-sama membangun masyarakat di bidang pemberdayaan sosial.*
>
> **(Kurniaty Sulaiman anggota pemuda Pancasila dan P2TP2A)**

Kekuatan OMS pada Kabupaten Gowa pada Dimensi Lingkungan utamanya pada Subdimensi Konteks Politik. Hal ini ditunjukkan dari efektifitas negara yang dinilai sehat, penegakan hukum yang berjalan termasuk hukum adat. Selain Konteks politik, kekuatan OMS di Kabupaten Gowa ada pada kebebasan berekspresi dan berkumpul yang telah mendapatkan jaminan baik dari pemerintah dan dipraktikkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya berbagai organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Gowa. Pemerintah juga dinilai telah memberikan perhatian penuh kepada OMS yang ada untuk melakukan kerja-kerja bersama dalam berbagai program kemitraan. Kebebasan pers dipandang telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, Indikator Hak Atas Informasi dinilai masih belum maksimal. Meskipun secara hukum sudah dijamin, dan masyarakat juga telah memahami hak-haknya atas berbagai informasi, namun belum semua dapat mengakses informasi dengan mudah. Orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses informasi khusus secara langsung pada pusat kekuasaan.

Tantangan terbesar bagi OMS di Kabupaten Gowa ada pada Subdimensi Relasi Pasar–MS (1,44) yang mendapatkan penilaian terendah. Dua indikator pada subdimensi ini yakni Kedermawanan Perusahaan mendapat (0,96) dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (1,48) mendapatkan penilaian kurang sehat. Sektor swasta (perusahaan) dinilai masih kurang memperhatikan dan mendukung aktivitas OMS. Meski

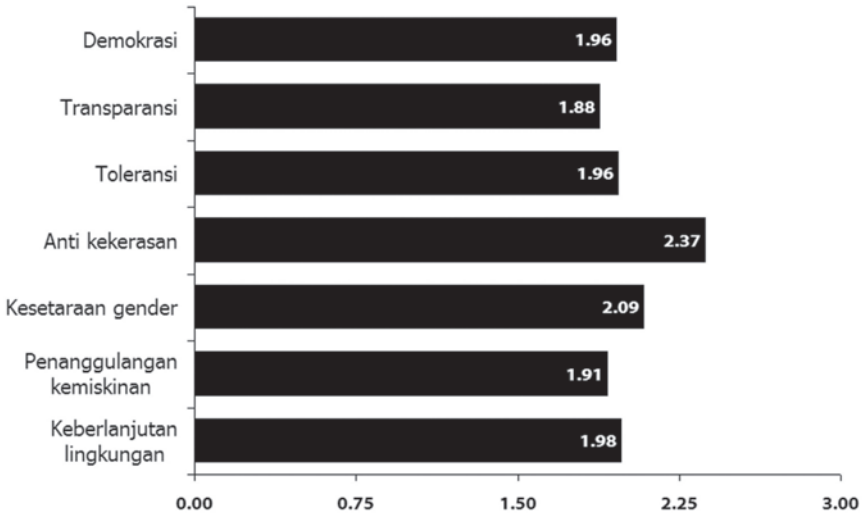
diakui ada sektor swasta yang membantu dalam kegiatan-kegiatan OMS, namun jumlahnya tidak begitu banyak. Secara umum banyak OMS yang mengalami kerumitan dan kesulitan dalam mendapatkan bantuan dari sektor swasta. Terkadang OMS justru mengeluarkan biaya proposal yang lebih besar daripada bantuan yang diterima dari sektor swasta.

Alasan klasik dari perusahaan apabila dimintai bantuan adalah perlu waktu yang lama untuk diproses karena akan dikoordinasikan dengan 'perusahaan pusat'. Alasan lainnya, kegiatan yang dilakukan OMS tidak ada hubungannya dengan aktivitas perusahaan, sehingga tidak mendapatkan jatah anggaran dari perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan akibat operasional perusahaannya. Meskipun Indikator Sikap Perusahaan Terhadap Aktor-aktor OMS mendapatkan penilaian cukup sehat, namun lebih ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri. Sikap ramah yang ditunjukkan hanya untuk melapangkan tujuan mereka. Namun apabila tujuan telah tercapai, sering lupa untuk berbagi dengan masyarakat.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan sebagai berikut:

- Pemerintah dapat memfasilitasi pertemuan antar pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (OMS atau aktor MS)
- Bila akan dibangun pabrik baru, maka dibuatlah kontrak sosial antara pihak perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan wajib mengakomodir potensi lokal baik dari segi penerimaan karyawan maupun pemanfaatan bahan baku.
- Pemerintah memfasilitasi pembukaan akses jaringan pasar bagi hasil produk keterampilan rakyat *(home industry)*.
- Keterlibatan masyarakat sipil khususnya perempuan dan kaum termarjinal dalam berbagai tahapan pembangunan mulai dari masa persiapan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi lebih diperhatikan.

DIMENSI NILAI



Dimensi Nilai di Kabupaten Gowa mendapatkan skor tertinggi (2,02), yang berarti masyarakat sipil di daerah ini dipandang sukses dalam mempromosikan dan mempraktikkan nilai-nilai tertentu. Seluruh subdimensi pada dimensi ini memperoleh penilaian sehat yaitu Anti Kekerasan (2,37), Kesetaraan Gender (2,09), Toleransi (1,96), Keberlanjutan Lingkungan (1,98), Demokrasi (1,96), Penangulangan Kemiskinan (1,91) dan Tranparansi (1,88).

Kekuatan Dimensi Nilai ada pada Subdimensi Anti Kekerasan yang mendapat nilai sehat yaitu 2,37. Ini berarti yang artinya masyarakat sipil di Kabupaten Gowa dianggap berhasil dalam mempraktikkan dan mempromosikan nilai-nilai anti-kekerasan. Penilaian ini bersandar pada praktik-praktik kekerasan oleh MS sudah semakin jarang dilakukan oleh aktor MS. Aktor-aktor MS sudah semakin banyak referensi tentang nilai-nilai anti kekerasan. Beberapa kondisi yang mendukung praktik anti kekerasan ini antara lain:

- Akses informasi semakin mudah oleh masyarakat sehingga mempersempit peluang terjadinya praktik kekerasan.
- Tingkat pendidikan MS di Kabupaten Gowa semakin meningkat utamanya bagi perempuan yang berdampak pada meningkatnya posisi tawar.

- Perempuan Kabupaten Gowa sudah semakin menyadari peran dan fungsinyanya sebagai masyarakat
- Sosialisasi tentang kesetaraan gender semakin berhasil
- Pengaruh budaya sangat terasa dalam hal memposisikan perempuan sebagai makhluk yang perlu dilindungi oleh laki-laki

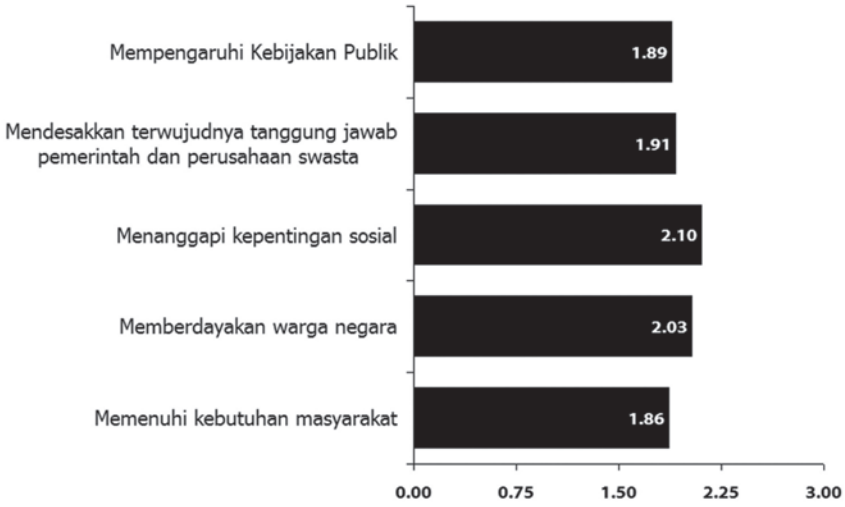
Nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh aktor OMS untuk mendorong kondisi lebih baik adalah saling menghargai dan menerapkan kearifan budaya local, tidak harus karena ada kerjasama dengan donor luar negeri maka budaya mereka ditelan mentah-mentah. Nilai lain dapat menempatkan diri di manapun berada. Dari segi kapasitas actor OMS ini harus memiliki KAS (knowledge, Attitude, Skill). Knowledge; memiliki wawasan tentang sesuatu yang diperjuangkan, Attitude; mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, Skill; Mampu berkomunikasi dan membina hubungan dengan orang lain.

(Kaharuddin Muji - Yayasan Wakil)

Dalam pemberikan skor pada Subdimensi Anti Kekerasan ini, perempuan memberikan skor sedikit lebih rendah dari laki-laki. Hal ini terjadi karena kelompok peserta perempuan menilai bahwa praktik kekerasan sebenarnya masih terjadi, namun karena tereduksi oleh budaya malu sehingga tidak terungkap ke publik.

Tantangan Dimensi Nilai ada pada Subdimensi Transparansi yang mendapat skor terendah yaitu 1,88. Peserta Lokakarnya IMS menilai meski upaya-upaya untuk melakukan praktik pengelolaan keuangan secara sehat dan transparan sudah banyak dilakukan, namun masih ada korupsi di lingkungan OMS. Dalam kenyataan beberapa OMS dinilai sudah mempraktikkan transparansi dalam organisasinya. Selain itu, dukungan kontrol masyarakat atas transparansi OMS semakin meningkat. Transparansi OMS ditengarai dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang disebarluaskan kepada publik. Selain itu aktor-aktor MS di Gowa menganggap penting untuk mempromosikan transparansi agar adanya keterbukaan pemerintah atas akses data dan informasi untuk masyarakat luas sehingga terjadi korelasi yang sehat dari semua elemen masyarakat baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi Dampak mendapat nilai 1,96 yang menunjukkan bahwa kinerja masyarakat sipil di Kabupaten Gowa dinilai cukup sehat. Kontribusi besar diberikan oleh Subdimensi Respon Terhadap Kepentingan Sosial (2,10) dan Memberdayakan Warga Negara (2,03). Sementara itu Subdimensi Mendesakkan Terwujudnya Tanggungjawab Pemerintah dan Perusahaan Swasta (1,91), Mempengaruhi Kebijakan Publik (1,89), Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (1,86) juga dinilai dalam kondisi cukup sehat.

> *Saya menekankan kepada teman-teman aktor pemberdayaan untuk membuka mata, telinga dan hati terhadap keluh kesah masyarakat, Berkomunikasilah dengan hati, sampaikan tutur kata dengan ramah dan berbudaya . Tingkatkan kepedulian, karena kalau bukan kita yang peduli dengan nasib mereka, lalu kepada siapa kita berharap perubahan itu.*
>
> **(Syariful Alam -Yayasan Baruga Cipta)**

Kekuatan Dimensi Dampak ada pada Subdimensi menanggapi isu-isu kepentingan sosial dengan nilai 2,10 artinya aktor-aktor masyarakat sipil dinilai cukup sehat dalam menanggapi kepentingan masyarakat.

Kekuatan/aset yang dimiliki di Kabupaten Gowa ini adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan atau OMS cukup terlatih dan tanggap terhadap isu-isu sosial, seperti Pramuka, Palang Merah Indonesia, tim-tim tanggap bencana dari parpol, dan sukarelawan. OMS di Kabupaten Gowa juga tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di kabupaten seperti gizi buruk yang telah berhasil tertangani dengan memberikan makanan tambahan seperti susu dan telur bagi anak dan balita yang berada di bawah garis merah dalam Kartu Menuju Sehat (KMS)[1]. OMS memberikan pelayanan dan pemerintah menyiapkan sehingga bantuan-bantuan yang diberikan cukup terorganisasi, meskipun sarana dan prasarana seperti ambulans masih minim di Kabupaten Gowa. Masyarakat Sipil juga tanggap dan bereaksi cepat terhadap isu-isu sosial meskipun mereka secara formal bukan anggota salah satu OMS.

Faktor pendukung lain adalah aktor MS dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Mereka juga cepat dan tanggap terhadap keluhan masyarakat. Gotong royong dan kekeluargaan memang kental menjadi budaya di masyarakat seperti *sipakatau*[2], *siri' na pacce*[3], *an akbulo sibatang accera sitongka-tongka*. Selain perhatian terhadap tetangga yang sakit, membangun rumah dan acara perkawinan, kepedulian juga terlihat dari keterlibatan OMS dari NGO dalam rangka pendataan KK miskin, kepesertaan ASKESKIN, dan kontrol terhadap implementasi pendidikan gratis. Pemerintah membuka diri di bidang informasi publik dengan membuat informasi layanan umum di Pemda, SMS Bupati, semua SKPD yang ada di Gowa.

Tantangan Dimensi Dampak pada Subdimensi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat. Subdimensi ini nilainya paling rendah di antara subdimensi lain yaitu 1,86 walau demikian masih tergolong cukup sehat. Indikator yang menunjukkan nilai rendah adalah infrastruktur yang belum memadai, sanitasi dan penerangan yang belum merata di semua wilayah.

---

1 Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak dan balita berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur.

2 Sipakatau bermakna Saling memanusiakan, menghormati/menghargai harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahluk ciptaan Tuhan tanpa membeda-bedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat terhadap norma adat/hukum yang berlaku.

3 Semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan. Secara lafdzhiyah **Siri'** berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan **Pacce** atau dalam bahasa Bugis disebu **Pesse** yang berarti : Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Jadi Pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai berikut:

- Perlu peningkatan penguatan MS dan OMS agar tetap eksis dalam menuju kemandiriannya
- Melibatkan OMS dalam perencanaan-perencanaan pembangunan pemerintah baik di tingkat Musrembang desa, kecamatan dan kabupaten sampai tingkat provinsi.

Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar dengan Ibukota Pattalasang terletak 29 Km arah selatan dari Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Takalar berada antara $5.^{0}3^{0}$ – $5.^{0}38^{0}$ LS dan antara $119.^{0}22^{0}$ - $119.^{0}39^{0}$ BT. Luas wilayah Kabupaten Takalar sekitar 566,51 Km^2, dengan wilayah pesisir sekitar 240,88 Km2 dan panjang garis pantai sekitar 74 Km. Batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kota Makasar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa

Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2008 berjumlah 255.154 Jiwa. Penduduknya tersebar di 9 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Polombangkeng Utara, yakni 43.347 Jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 123.173 Jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 131.981. Kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar pada tahun 2008 mencapai 450 Jiwa/Km^2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Galesong Utara, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.215 Jiwa/Km^2, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Polombangkeng Utara dengan angka kepadatan 204 Jiwa/ Km^2.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Takalar meliputi perikanan laut, pertanian, perkebunan dan peternakan. Luas areal budidaya ikan pada tahun 2006 sekitar 4.856 Ha, budidaya tambak dengan luas 4.343 Ha yang tersebar di hampir setiap kecamatan Produksi ikan laut di Kabupaten Takalar pada tahun 2006 mencapai 26.776 Ton. Selain itu Kabupaten Takalar dikenal sebagai penghasil ikan terbang dan rumput laut. Dalam Program Gerbang Emas Kabupaten Takalar sangat potensial dijadikan sebagai pusat inkubator pengembangan rumput laut.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Di kabupaten Takalar terdapat banyak organisasi masyarakat sipil yang telah melakukan aktivitas kemasyarakatan secara intensif, yang secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Daftar Kelompok Masyarakat Sipil di Kabupaten Takalar

No	Jenis Kelompok	Nama Organisasi Masyarakat Sipil
1	Kelompok tradisional	Kerukunan Karaeng SanroboneSASTRA PalongbongkengKerukunan Keluarga Sayye'Kerukunan PolongbangkengKelompok PaddekoKerukunan Keluarga Gallesong
2	Kelompok Keagamaan	MuhammadiyahNahdhatul UlamaBKPRM (Badan Kordinasi Remaja Masjid)BKMT (Badan Kordinasi Majelis Taklim)YAPPIS (yayasan pendidikan Islam)WahdahJamaah TabliqIQQAH (ikatan qori dan qoriah)
3	Kelompok gerakan sosial	YATBA (pendidikan anak)GAPOKTANI Kabupaten (kelompok tani)Asosiasi RAPPIKA (remaja pecinta alam)KTNA (petani dan nelayan)Yayasan Hasanudin (petani)POKWASMAS (pengawas masyarakat pesisir)LPMT (perencanaan musrenbang)LEMBARA (pendidikan anak)YBS Takalar (ekonomi kerakyatan)FIAT (pendidikan anak)Forum Kordinasi BKM (masyarakat miskin)MILENIUM (pendidikan anak)WAPELHUM (lingkungan hidup)Induk P3A (petani)FPPA

No	Jenis Kelompok	Nama Organisasi Masyarakat Sipil
		(perempuan dan anak)FIK-KSM (pemberdayaan perempuan)
4	Kelompok Asosiasi	PMII (mahasiswa Islam)GAPENSI (pedagang konstruksi)JARPUK (perempuan pedagang)Asosiasi Petani Rumput LautGEMARINTA (perajin)KNPI (kepemudaan)GAPEKNAS (pengusaha)SENEGAL (nelayan)PGRI (guru)TAGANA (karang taruna)AMPI (kepemudaan)AKLI (asosiasi pengusaha listrik)

Sumber: Diskusi terbatas OMS tanggal 4 April 2009, dikutip dari Laporan Penelitian Kondisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kabupaten Takalar

Dalam kategori kelompok tradisional, kelompok karaeng dan adat yang berdomisili di kecamatan namun memiliki jaringan yang luas, karena ada beberapa pejabat atau tokoh yang juga merupakan bagian dari kelompok tersebut. Sementara itu, kelompok agama seperti NU, Muhammadiyah juga memiliki kekuatan yang dipandang oleh masyarakat. Di luar itu, ada Jamaah Tabliq, Wahdah, dan Yappis (sebuah lembaga pendidikan islam).

Dalam kategori kelompok gerakan advokasi, kelompok yang bergerak di isu pemberdayaan ekonomi mikro, dalam sektor pendidikan, perlindungan anak, perempuan dan lingkungan hidup memiliki peran signifikan. Di samping itu, ada juga kelompok yang bermain di isu pertanian ataupun perikanan. Sedangkan, kelompok asosiasi, seperti kelompok pemuda dan mahasiswa, memiliki peran yang juga lumayan. Kelompok lainnya seperti guru, petani rumput laut, serikat nelayan, pengusaha konstruksi juga dikenal keberadaannya oleh masyarakat.

Tabel berikut ini memuat tingkat pengaruh OMS di kabupaten Takalar.

Tabel 7. Tingkat Pengaruh Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Takalar

No	Tingkat Pengaruh	Nama Organisasi Masyarakat Sipil
1	Sangat Berpengaruh	NU Muhammadiyah BKPRMI LEMBARA

No	Tingkat Pengaruh	Nama Organisasi Masyarakat Sipil
2	Berpengaruh	YAPPIS Gapoktan Kabupaten BKMT KTNA FIK-KSM Induk P3A JARPUK LPMT FPPA PGRI KNPI AMPI
3	Agak Berpengaruh	Asosiasi Petani Rumput Laut IQQAH Jamaah Tabliq AKLI FIAT GAPEKNAS GEMARITA YBS Takalar Wapelhum PMII GAPENSI Yayasan Hasanuddin TAGANA Kerukunan Karaeng Sanrobone Kerukunan Keluarga Gallesong Kerukunan Palengbongkang Sastra Palengbongkang
4	Kurang Berpengaruh	YATBA WAHDAH Asosiasi RAPPIKA POKWASMAS Milenium SENEGAL Kerukunan Keluarga Sayye' Kelompok Paddeko

Pada kategori "sangat berpengaruh" terdapat kelompok agama seperti NU, Muhammadiyah, BKPRM menjadi kelompok yang memiliki keanggotaaan serta jaringan yang luas. Di samping itu, kelompok ini juga mampu merespon isu dalam program dengan aktif, termasuk pendanaan yang cukup memadai. LEMBARA, merupakan LSM yang dianggap

sangat berpengaruh, karena memiliki kelompok dampingan yang besar di Takalar, memiliki jaringan ke internasional yang cukup memadai serta memiliki respon yang positif terhadap isu, termasuk aktornya yang aktif berperan dalam pemerintahan.

Pada kategori "berpengaruh" terdapat kelompok gerakan advokasi lebih mendominasi daripada kelompok lainnya. Kelompok advokasi seperti LPMT, FIK KSM, JARPUK dianggap memiliki perhatian terhadap isu yang dominan, memiliki jaringan kerja yang lumayan besar serta keanggotaan dan juga dukungan kelompok dampingan yang signifikan. Salah satu persoalan utamanya adalah basis financial yang kurang/lemah yang dimiliki kelompok ini.

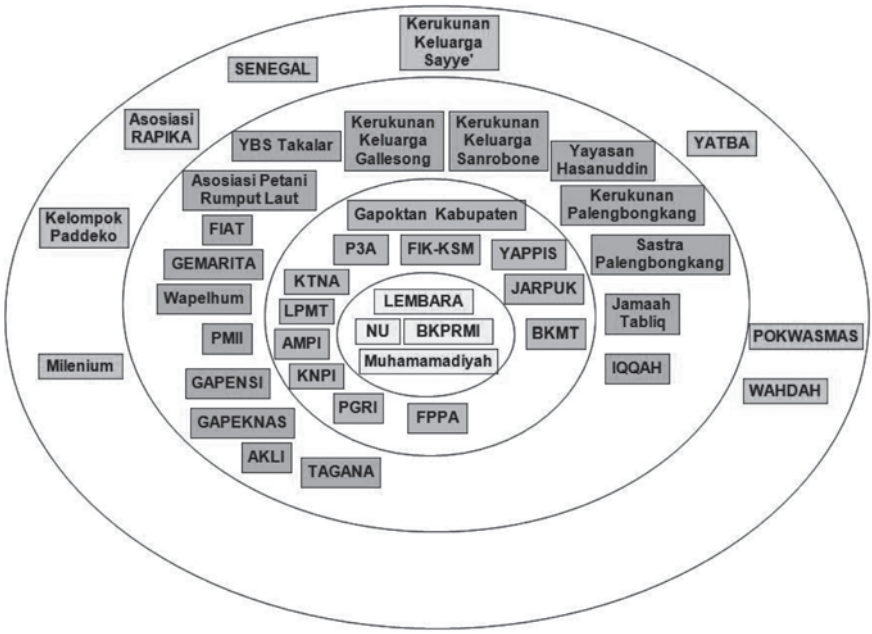
Pada kategori "agak berpengaruh" terdiri dari kelompok yang lebih beragam. Bila dilihat dari kelompok tradisional, kelompok ini hanyalah mengandalkan jaringan serta dukungan keanggotaan yang cukup besar. Namun perhatian terhadap isu kemasyarakatan tidaklah dominan dan dukungan sumber daya ekonomi belum terlalu besar. Kelompok yang berasal dari asosiasi juga tidak jauh berbeda. Kalaupun kuat secara finansial seperti GAPENSI, mereka kesulitan dalam merespon isu masyarakat secara intensif.

Pada kategori "kurang berpengaruh" terdapat kelompok yang bergabung lebih banyak menonjol dalam satu aspek saja. Seperti Kerukunan Sayye' yang lebih menekankan aspek keanggotaannya, atau SENEGAL yang hanya memperhatikan kepentingan kelompoknya yaitu para nelayan.

Organisasi Masyarakat Sipil di Takalar memiliki kedekatan dan saling berkomunikasi satu sama lain meskipun berbeda isu maupun jaringan. Hubungan kekerabatan diantara para aktor OMS telah memudahkan komunikasi dan kerjasama antar organisasi. Di samping itu, para aktor OMS ini juga memiliki perhatian yang relatif sama terhadap isu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masing-masing OMS. Unsur lain yang menyebabkan kedekatan adalah beberapa aktivis OMS pernah terlibat dalam aktivitas keagamaan yang sama atau berasal dari satu organisasi kemahasiswaan yang sama.

Secara skematis, peta kekuatan OMS di Kabupaten Takalar dapat dilihat dalam diagram berikut.

Diagram 7. Peta OMS di Kabupaten Takalar terhadap TKLD Tahun 2009



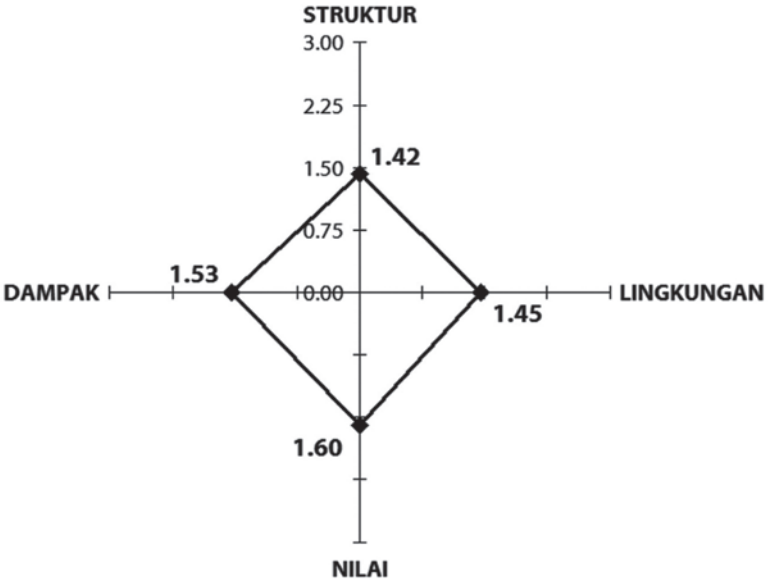
OMS yang bergerak di isu tata kepemerintahan lokal di Takalar lebih banyak berperan sebagai mitra pemerintah untuk melakukan pengawasan dan juga memberi masukan terhadap proses pembangunan yang dilakukan. Beberapa tema yang diangkat, antara lain, adalah:

- Beberapa OMS memiliki inisiatif mendesakkan agenda yang ingin ditawarkan terkait dengan isu perlindungan anak dan pendidikan, seperti yang dilakukan LEMBARA. Lembaga ini telah telah berhasil mendorong keluarnya Perda dan membongkar cara pandang para pembuat kebijakan tentang isu perlindungan anak.
- Tema yang menyangkut proses kontrol terhadap pembuatan kebijakan dan pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem Musrenbang di Takalar, seperti yang dilakukan LPMT
- Tema kesetaraan gender yang banyak memberi kesadaran kritis dan pemberdayaan bagi kelompok perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Status Masyarakat Sipil

Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di Kabupaten Takalar dilakukan pada tahun 2009, yang hasilnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 14 Intan IMS Kabupaten Takalar



Secara umum, masyarakat sipil Kabupaten Takalar pada tahun 2009 berada pada kondisi antara kurang sehat dan cukup sehat. Hasil pengukuran IMS menunjukkan bahwa dua dimensi, yaitu dimensi dimensi struktur dan dimensi lingkungan berada dalam kategori kurang sehat, dengan perolehan skor masing-masing 1,42 dan 1,45. Sementara itu, dua dimensi lainnya, yakni dimensi nilai dan dampak berada dalam kategori cukup sehat dengan skor 1,60 dan 1,53. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam kelembagaan internal OMS dan kurang kondusifnya kondisi lingkungan eksternal dimana OMS beraktivitas yang perlu mendapat perhatian pada masa-masa mendatang. Meskipun demikian, dengan keterbatasan seperti yang disebutkan itu, sudah terlihat hasil-hasil kerja (dampak) masyarakat sipil di Takalar, berbasiskan pada nilai-nilai yang dianutnya.

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Takalar

Dimensi Struktur

- Keterlibatan OMS dalam Musrenbang
- Relasi dan Komunikasi yang baik antar OMS, maupun antara OMS dengan pengambil keputusan
- Tingginya keterlibatan perempuan dalam OMS dan berbagai aktivitasnya

Dimensi Lingkungan

- Ruang untuk menyampaikan pendapat terbuka luas
- Pengaruh nilai feodalisme sudah mulai berkurang
- Adanya Perda Transparansi dan Partisipasi
- Adanya Perda Pelindungan Anak

Dimensi Nilai

- Toleransi antara masyarakat tinggi
- Pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan secara partisipatif

Dimensi Dampak

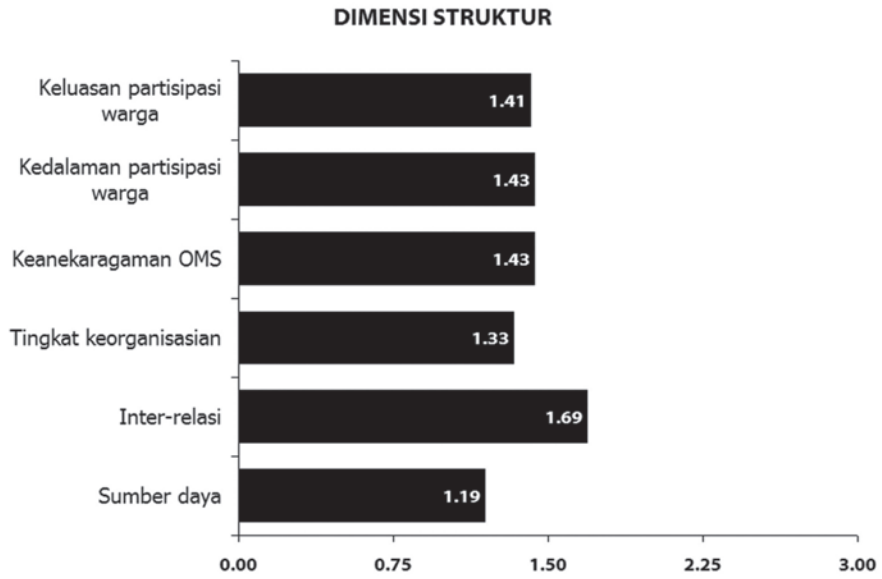
- Pengalaman keberhasilan OMS dalam melakukan respon terhadap kepentingan sosial
- Pengalaman pendampingan terhadap kelompok marjinal· Pengalaman keberhasilan dalam melakukan advokasi Perda transparansi dan Perda Perlindungan Anak

DIMENSI STRUKTUR

Dimensi struktur masuk dalam kategori kurang sehat, hal itu ditunjukkan dengan skor (1,42). Dari enam subdimensi yang ada dalam dimensi ini, hanya satu dimensi yang berada pada kategori cukup sehat, yaitu subdimensi interrelasi (1,69). Sementara lima subdimensi lainnya memiliki skor dibawah (1,5), yaitu subdimensi keluasan partisipasi warga (1,41), kedalaman partisipasi warga (1,43), keanekaragamaan OMS (1,43), tingkat keorganisasian (1,33) serta sumber daya (1,19).

Subdimensi Interelasi merupakan aset/kekuatan yang menopang dimensi ini. Dua indikator yang terdapat didalamnya berada pada tataran cukup baik, yaitu *indikator kerjasama* (1,62) dan *komunikasi* (1,76). Hal-

hal yang menggambarkan tentang komunikasi yang baik dalam MS di antaranya adalah kegiatan musrenbang dapat berjalan dengan menghadirkan aktor-aktor MS, serta pemerintah desa. Kegiatan ini menunjukan komunikasi yang baik terjadi di Desa Lagaruda. Kasus BLT tahun 2006 dapat diketahui oleh berbagai masyarakat. Pendataan BLT yang tidak akurat dapat diketahui dari proses komunikasi masyarakat kepada aktor-aktor masyarakat sipil yang kemudian ditindaklanjuti dengan demonstrasi bersama ke pemerintah desa sampai ke tingkat kecamatan; Komunikasi yang dibangun oleh GP3A kepada tokoh masyarakat yang dituakan di Kelurahan Manangkoki. Pada akhirnya komunikasi ini mendorong warga aktif untuk gotong royong membangun saluran air.



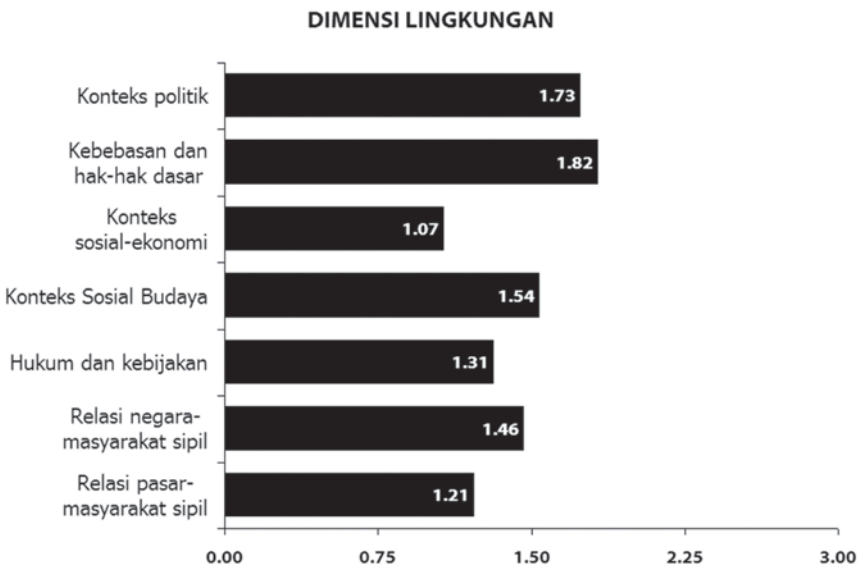
Partisipasi perempuan dalam aktivitas masyarakat sipil di desa jauh lebih besar. Hal itu ditunjukan dengan banyaknya organisasi yang diikuti oleh perempuan, seperti: PKK, Majelis Taklim, Remaja Masjid, kelompok-kelompok industri rumah tangga, seperti: kerajinan dari daun lontar, anyaman daun pandan, gerabah, menjahit yang banyak tersebar di Kabupaten Takalar. Selain itu**,** aktor-aktor MS perempuan yang berada posisi strategis yang ditempati, seperti menjadi inisiator dalam advokasi kebijakan perlindungan anak, ketua dalam KSM maupun kelompok tani.

Subdimensi yang memiliki skor paling rendah dalam *dimensi struktur* adalah *subdimensi sumber daya* (1,19). Terdapat tiga indikator dalam subdimensi ini yang berada dalam kategori kurang sehat, yaitu *sumber*

daya manusia dan *teknologi* (1,19), *sumber daya keuangan* (1,02) serta *kemampuan menggali sumber daya* (1,29).

Sumber daya manusia memiliki skor rendah akibat penempatan seseorang dalam struktur organisasi masyarakat sipil di desa-desa tidak sesuai dengan kapasitas/bidangnya dan anggota OMS kurang percaya kepada aktor-aktor yang terlibat dalam kepengurusan. Selain itu, sumber daya keuangan OMS masih sangat tergantung dari pihak luar, baik pemerintah maupun lembaga donor. Sumber pendanaan dari anggota masih sangat kurang dan anggota relatif tidak percaya untuk membayarkan iuran (wajib, pokok, sukarela) kepada organisasi. Selain itu, penggalangan sumber daya juga sangat bergantung pada tokoh yang berpengaruh atau memiliki sumber daya finansial. Artinya, jika dalam kepengurusan melibatkan golongan elit, maka sumber pendanaan OMS tersebut lebih baik. Sumber pendanaan juga dipengaruhi situasi politik dan akses yang dimiliki OMS. Inilah yang menjadi tantangan bagi OMS di Takalar pada masa mendatang.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi lingkungan memperoleh skor 1,45 yang berarti berada dalam kondisi kurang sehat**.** Dari tujuh subdimensi pada dimensi lingkungan, tampak bahwa subdimensi yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah pada *subdimensi kebebasan dan hak-hak dasar* (1,82) yang berarti berada

pada kategori cukup sehat. Sementara yang mendapatkan nilai paling rendah adalah sub dimensi *konteks sosial-ekonomi* (1,07) dan masuk pada kategori kurang sehat.

Fakta yang terlihat dan dialami oleh Masyarakat Sipil di kabupaten Takalar adalah bahwa Kebebasan dan Hak-hak dasar sudah cukup dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah sudah membuka ruang yang luas bagi OMS untuk mengekspresikan pendapat. Dapat dibuktikan dengan dibukanya berbagai tempat aduan untuk menampung berbagai keluhan dan saran dari masyarakat tentang berbagai hal (unit pengaduan masyarakat), termasuk melalui kegiatan demonstrasi yang dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang/ kesempatan yang cukup luas dalam kebebasan pers. Pemerintah daerah memberikan fasilitas dan kebebasan kepada Pers untuk mengakses berbagai informasi tentang daerah, tanpa mengurangi independensi dan daya kritis pers.

Pemerintah daerah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi pembangunan melalui berbagai media, termasuk melalui internet yang dapat diakses dengan mudah. Namun, akses informasi bagi masyarakat di desa masih sulit diperoleh karena belum dilakukan secara total oleh Pemerintah Desa. Informasi yang penting diketahui oleh masyarakat, seperti dalam hal transparansi penyusunan dan pengelolaan ADD masih sulit diakses. Pada sisi lain, masyarakat juga sudah dilibatkan dalam Musrenbang, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan disana-sini, misalnya hanya orang-orang yang dekat dan dikenal kepala desa saja yang dilibatkan dalam Musrenbang. Upaya perbaikan sudah mulai dilakukan Pemkab dengan menyampaikan kepda Pemdes tentang aturan dan kriteria orang yang ikut musrenbang.

Subdimensi Konteks Politik memiliki skor 1,73 pada kategori cukup sehat. Indikator yang paling tinggi adalah kompetisi politik yakni 2,16. Masyarakat bebas menentukan hak pilihannya. Persaingan dan kompetisi antar partai politik dalam memperebutkan suara rakyat berlangsung secara damai, tidak ditemukan kejadian konflik antar partai maupun antar pendukung. Namun secara sembunyi-sembunyi masih ditemukan aktor-aktor politik yang menggunakan strategi "pemberian bantuan/sumbangan" untuk membujuk pemilik agar mau memilih dirinya.

Subdimensi Konteks Sosial Budaya memiliki skor sebesar 1,54, artinya cukup sehat, dan indikator paling tinggi adalah indikator feodalisme yaitu

2,11, artinya cukup sehat. Pemahaman tentang feodalisme sudah mulai baik, dimana pengaruh nilai feodalisme sudah mulai berkurang. Tidak ada lagi perbedaan yang menonjol antara kaum bangsawan dengan rakyat jelata (biasa). Contohnya dalam adat pernikahan, status "darah biru" tidak terlalu nampak lagi di masyarakat. Nilai Indikator yang paling rendah adalah Budaya Patriarki dengan skor 1,09 artinya kurang sehat. Laki-laki memberikan penilaian bahwa masyarakat masih menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dan kuat dibanding perempuan.

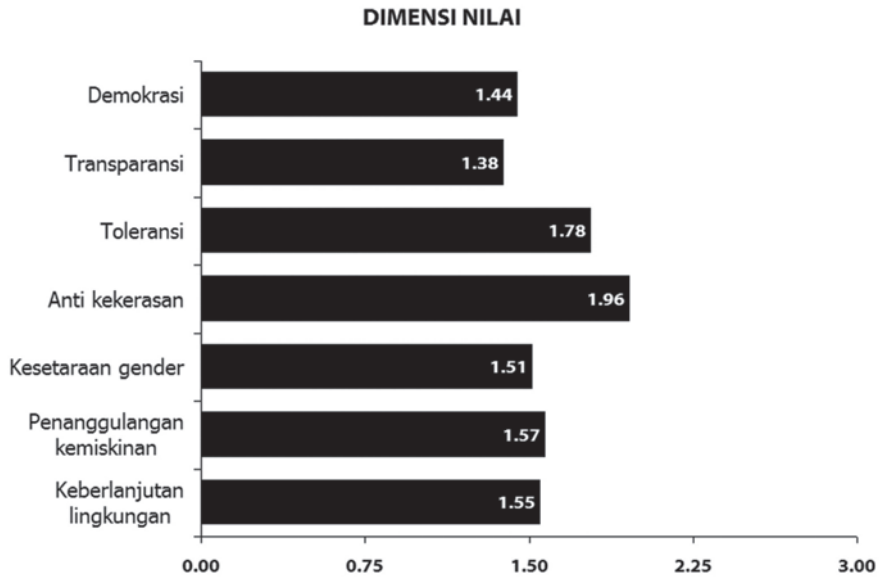
Tantangan yang masih harus dihadapi pada masa-masa menadatang adalah Kondisi Sosial Ekonomi yang memiliki skor 1,07 sekaligus menempati posisi terendah dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya. Ada beberapa penyebab Subdimensi Konteks Sosial Ekonomi mempunyai nilai rendah, yaitu; 1) Pemerintah Kabupaten telah membuat aturan yang jelas dan ketat dalam mekanisme pemberian bantuan. Akan tetapi, lagi-lagi fakta menunjukkan, bahwa dalam impelementasinya masih banyak oknum aparat Desa/kelurahan yang tidak menjalankan aturan itu dengan baik. Contohnya, banyak ditemukan penerima raskin yang tidak tepat sasaran, bahkan jumlah Raskin yang semestinya mendapat 10 liter/orang disunat (dikurangi/dipotong) menjadi 5 liter/orang, dengan berbagai alasan; 2) Dari segi permberantasan buta huruf, pemerintah telah menggalakkan program Kejar Pajet A dan Keaksaraan Fungsional. Namun belum dirasakan secara merata oleh masyarakat khususnyda di daerah pedesaan; 3). Minimnya infrakstruktur teknologi informasi. Akses internet dan telepon rumah belum merata kekecamatan, hanya dapat dinikmati oleh masyarakat perkotaan atau kabupaten.

DIMENSI NILAI

Dimensi Nilai di Kabupaten Takalar mempunyai skor paling tinggi yaitu 1,60, artinya cukup sehat, diantara dimensi yang lain. Kondisi nyata di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa penerapan hukum sudah semakin baik, terbitnya Perda mengenai Perlindungan Anak, organisasi masyarakat telah mengambil bagian, masyarakat semakin tanggap terhadap kondisi-kondisi yang ada, serta jiwa sosial budaya dan komunikasi masyarakat Takalar yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal mendukung keadaan ini menjadi cukup baik.

Sub dimensi anti kekerasan bernilai tinggi yaitu 1,96, artinya cukup sehat. Hal ini karena praktek-praktek kekerasan oleh masyarakat sipil sudah semakin jarang dilakukan oleh aktor MS, dan aktor-aktor MS sudah

semakin banyak referensi tentang nilai-nilai anti kekerasan. Selain itu, akses informasi semakin mudah oleh masyarakat sehingga mempersempit peluang terjadinya praktek kekerasan seperti adanya informasi perda tentang perlindungan anak.



Subdimensi Toleransi memperoleh skor 1,78 artinya cukup sehat. Hal ini sesuai dengan kenyataan di Kabupaten Takalar karena masyarakat masih tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, misalnya : *Siri' Na Pacce, Sipassiriki* (saling menjaga kehormatan), *Sipakatau* sehingga arena MS dapat dikatakan cukup toleran. Masyarakat Takalar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, serta mengajarkan pada anak-anak mereka. Di sisi lain, terdapat juga peraturan daerah yang turut berperan dalam mempertahankan nilai-nilai sosial yang ada. Salah satunya adalah Perda mengenai Perlindungan Anak dimana salah satu pasalnya menyatakan bahwa salah satu kewajiban anak adalah mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang ada.

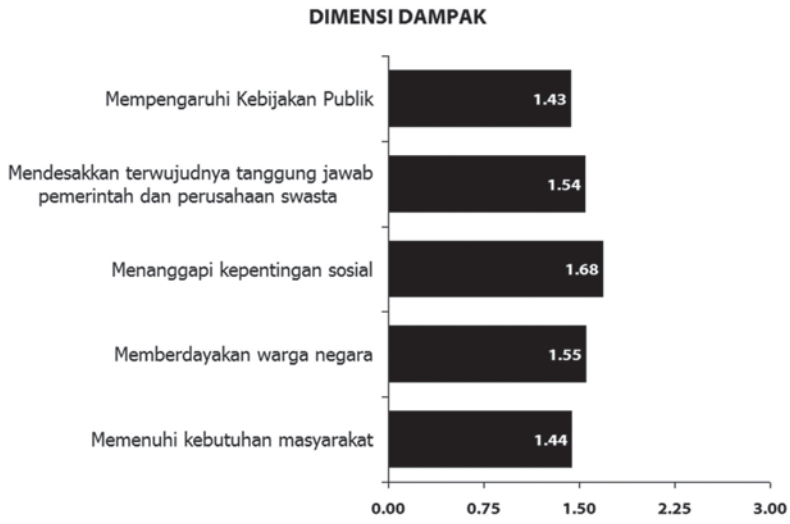
Subdimensi Kesetaraan Gender memperoleh skor 1,51 (cukup sehat). yang dipengaruhi oleh tiga indikator yaitu Kesetaraan Gender di Dalam Arena Masyarakat Sipil (1,64), Arena Masyarakat Sipil Untuk Mempromosikan Kesetaraan Gender (1,53), Praktek-Praktek Kesetaraan Gender di Dalam Organisasi Masyarakat Sipil (1,36) meskipun tergolong cukup sehat tetapi nilai pada subdimensi ini jauh lebih rendah dari

subdimensi yang lain. Alasannya, program atau kegiatan yang mendorong kesetaraan gender masih sangat kurang. Pada penilaian ini, perempuan memberikan skor lebih rendah (1,49) pada kesetaraan gender di Kabupaten Takalar dengan interpretasi bahwa perempuan belum banyak memperoleh peluang/kesempatan. Sedangkan lelaki memberikan skor lebih tinggi (1,53) dengan interpretasi bahwa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan semakin membaik terutama dengan adanya program PNPM. Contoh lain, yaitu keterlibatan perempuan dalam segala bidang sudah cukup luas misalnya dalam pentas politik Caleg terpilih sudah ada perempuan dibandingkan periode sebelumnya.

Tantangan yang dihadapi Masyarakat Sipil Kabupaten Takalar terkait dengan beberapa sub dimensi yang masih berada dalam kategori kurang sehat dengan perolehan skor di bawah 1,50 yaitu sub demokrasi dan transparansi. Pada subdimensi demokrasi, skor yang diperoleh sebesar 1,44, sementara sub dimensi transparansi memperoleh skor 1,38. Kedua sub dimensi ini cukup peting untuk diperhatikan, terutama untuk hal-hal terkait dengan praktek demokrasi dan transparansi di dalam OMS, agar OMS memiliki legitimasi pada saat melakukan advokasi kepada pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

DIMENSI DAMPAK

Dimensi Dampak mendapat nilai 1,53 berada dalam kategori cukup sehat. Hal ini didukung oleh Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial dengan nilai 1,68 dan Subdimensi Memberdayakan Warga Negara dengan total nilai 1,55.



Subdimensi respon terhadap kepentingan sosial memperoleh skor 1,68 (cukup sehat). Hal ini ditunjang dengan kenyataan bahwa aktivitas OMS mampu memperjuangkan ketersediaan sarana air bersih di Desa Patani, Kelurahan Takalar Lama, Desa Banggae, dan Desa Popo' serta pengadaan pompa air untuk kepentingan kelompok tani oleh yang diprakarsai oleh Kelompok Wanita Tani Fitrah, demikian juga FIAT berhasil membantu menguruskan/memfasilitasi anak-anak akta kelahiran sebanyak kurang lebih 1.000 lembar, Kelompok Tani Nelayan Abbulo Sibatang mampu membantu pengadaan *mesin ketinting* bagi Nelayan.

Subdimensi Pemberdayaan Warga Negara memperoleh skor 1,55 dengan kategori cukup sehat. Indikator yang memberikan kontribusi skor tinggi adalah Pemberdayaan Perempuan (1,66). Proses musrenbang sudah melibatkan perempuan karena semua SKPD memberi prasyarat adanya keterwakilan perempuan. Selain kepada kelompok perempuan, OMS juga telah berupaya memberikan informasi dan mendidik warga Negara. Hal ini dibuktikan dengan pemberantasan buta aksara melalui Keaksaraan Fungsional dan bebas baca tulis Alquran di TK/TPA. Beberapa kelompok-kelompok telah terbentuk pada masyarakat terpinggirkan sekaligus mendampingi dan dan melakukan aktivitas-aktivitas pemberdayaan, antara lain Kelompok Anak Mangindara mampu membina teman-temannya untuk belajar komputer dan bermain bersama sekaligus adanya tutor sebaya dalam kelompok tersebut untuk memperjuangkan isu anak secara bersama sampai pada penemuan solusi.

Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan Publik memperoleh skor 1,43 yang sekaligus menjadi subdimensi dengan skor terendah. Meskipun demikian, sebuah keberhasilan telah dicapai OMS Kabupaten Takalar dalam mendorong lahirnya Perda Transparansi dan Partisipasi, serta Perda Perlindungan Anak.

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang ± 95 Km di bagian selatan pulau Sulawesi. Secara geografis, Jeneponto terletak diantara $5^0 23^0 12"$ – $5^0 42^0 1{,}2"$ Lintang Selatan dan $119^0 29^0 12"$ – $119^0 56'44.9"$ Bujur Timur. Secara administratif, batas Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 749,79 Km^2. Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto sangat bervariasi. Pada bagian Utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari Barat ke Timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut yang cocok sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura dan sayur-sayuran. Di bagian tengah Kabupaten Jeneponto meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, sehingga cukup potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Sementara itu, pada bagian Selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut. Daerah ini telah dimanfaatkan sebagai areal usaha penggaraman rakyat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto sekitar 334.175 Jiwa, dengan komposisi penduduk perempuan sekitar 172.761 jiwa dan

penduduk laki-laki sebesar 161.414 jiwa. Dilihat dari komposisi anggota DPRD pada tahun 2009, anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebanyak 35 orang yang terdiri dari Fraksi P.Golkar sebanyak 4 orang, Fraksi PPP 3 orang, Fraksi PAN sebanyak 4 orang, Fraksi Nurani Rakyat sebanyak 3 orang, Fraksi Demokrat sebanyak 3 orang, Fraksi Kesatuan sebanyak 7 orang dan Fraksi Barisan Kebangsaan sebanyak 8 orang.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil[1]

Sebagian besar OMS yang ada di Jeneponto lahir dari inisiatif masyarakat dan terjadi pada masa era reformasi, saat tidak ada larangan atau tekanan dari pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga. Pengecualian terjadi untuk beberapa OMS yang dilahirkan pemerintah. Mereka telah ada sejak era orde baru karena ada aturan yang mengharuskan pembentukannya.

Ideologi pembentukan OMS di Jeneponto dilandasi oleh kepentingan kelompok yang bersifat lokal, misalnya kelompok tani, kelompok usaha dan seterusnya. OMS yang bergerak di bidang advokasi paling banyak jumlahnya, disamping organisasi jaringan dan usaha (lihat tabel 8). Namun karena sumber daya yang dimiliki OMS pada umumnya terbatas sehingga visi dan misi yang diperjuangkan kadang tidak dapat dilakukan. Memang ada OMS yang berhasil melakukan advokasi untuk memperjuangan kepentingan publik, misalnya Forum Pembela Keadilan yang menyoroti masalah raskin, tetapi OMS lain yang berhasil seperti itu sangat sedikit jumlahnya.

Tabel 8. Daftar OMS Kabupaten Jeneponto

Advokasi	Pertanian	Kelompok Usaha	Perempuan	Pendidikan	Agama	Jaringan
Harapan Bangsa	Kelompok Tani	Koperasi	Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JarPUK)	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	BKPRMI	BKPRMI
Pattiro Jeka		Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)			Muhammadyah Turatea	Dekopinda
Yaspalm		KPA (Kelompok Pengguna Air)			NU	KTNA

[1] Faisal, Ahmad, 2007. Hasil Pemetaan OMS Kabupaten Jeneponto. Makalah disampaikan dalam Lokakarya IMS Kabupaten Jeneponto.

Advokasi	Pertanian	Kelompok Usaha	Perempuan	Pendidikan	Agama	Jaringan
Mitra Turatea		Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)			Majlis Ta'lim	APDESI
Bina Bakti		BKM			Pmi	Karang Taruna Indonesia
Jalin Turatea		Dekopinda			Dewan Dakwah Turatea	KNPI
P3I					IJABI	FKPPI
Permata					PMII	
APSEMI					DDI	
Gema Turatea					Anshor	
Dewan Anak Jeneponto					Aisyiah	
Karang Taruna					Fathayat NU	
Asy-Syuro					Muslimat NU	
Forum Pembela Keadilan						
LP2MT						
PIPO						
Yapentar						
Yapem						
Forum Massa						

Organisasi jaringan yang ada seperti AMS-T, KTNA, APDESI, BKPRMI dan DEKOPINDA mempunyai jaringan tersendiri, dan masing-masing memperjuangkan visi dan misinya. AMS-T mempunyai anggota 26 anggota OMS padahal di Kabupaten Jeneponto ada sekitar kurang lebih 100 OMS. Potensi untuk menyatukan beberapa organisasi jaringan sangat terbuka karena hubungan emosional aktor-aktor OMS cukup dekat.

Berdasarkan lingkup pengaruh yang dimilikinya, OMS-OMS di Jeneponto terbagi atas 4 kategori, yaitu:

1. **Sangat berpengaruh, dengan kriteria sebagai berikut:**
   - OMS yang menjalankan programnya secara mandiri,
   - Kemampuan OMS berjaringan dengan dengan lembaga/ institusi lain berdasarkan kesetaraan dan keterbukaan mulai dari tingkat kabupaten, propinsi, nasional sampai tingkat internasional.

- Ada banyak perubahan di masyarakat dari dampak organisasi, misalnya BKPRMI yang memprogramkan anak-anak bebas buta baca Alquran dan APDESI yang mampu meningkatkan alokasi anggaran pembangunan desa.
- Kapasitas keorganisasian dan sumber daya yang tersedia kuat dan menyeluruh dalam organisasi.
- OMS mempunyai kekuatan finansial yang diandalkan. Mempunyai keahlian dalam menggalang dana
- OMS bekerja professional dan konflik yang sewaktu – waktu akan muncul dapat diatasi dengan baik.
- Sangat kuat menjaga komitmen dalam menjalankan kode etik lembaga.
- OMS memiliki visi dan misi yang kuat dan jelas.
- Mempunyai nilai posisi tawar yang tinggi

2. Berpengaruh dengan kriteria:

- Struktur organisasi yang sudah efektif.
- Adanya pengkaderan dalam tubuh organisasi, sehingga kapasitas cukup merata
- Hubungan antara OMS dengan pihak pengambil keputusan sudah membaik.

3. Agak Berpengaruh

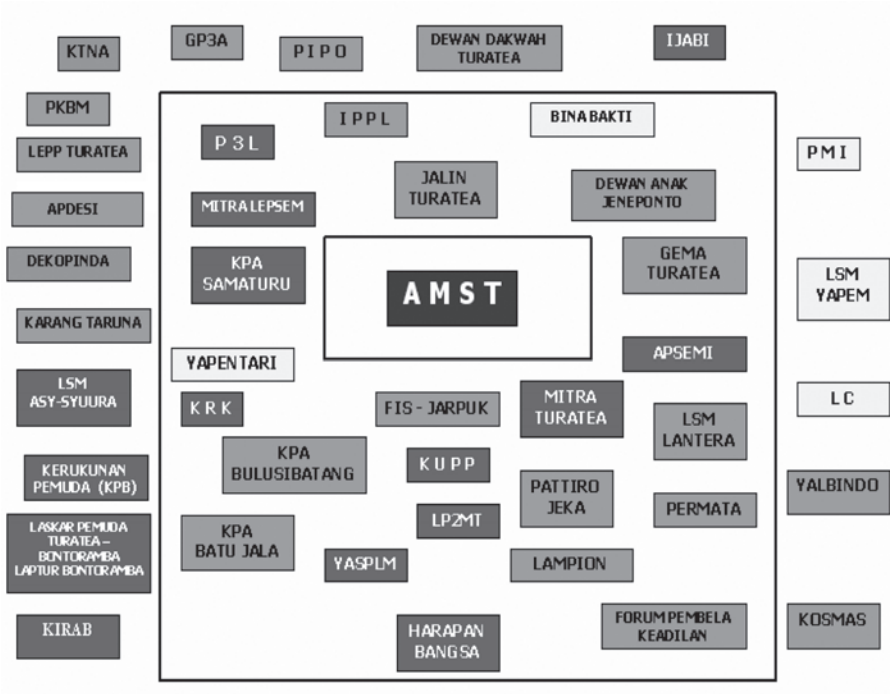
- Kurang atau bahkan tidak mempunyai kegiatan yang menyentuh isu publik.
- Sumberdaya yang dimiliki masih lemah.
- Tidak jelas peran-peran dalam organisasi

4. Kurang Berpengaruh

- LSM bentukan pemerintah untuk menjadi alat kekuasaan dan kepentingan penguasa. Pelaksana lembaga ini pada umumnya adalah bagian dari penguasa
- Rekruitmen/kaderisasi yang kurang/ tidak berkesinam–bungan.

Secara skematis, lingkup pengaruh dan relasi antar OMS di kabupaten Jeneponto dapat dilihat pda diagram sebagai berikut ini.

Diagram 8. Peta OMS di Kabupaten Jeneponto terhadap TKLD Tahun 2009



Status Masyarakat Sipil

Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di Kabupaten Jeneponto telah dilakukan pada tahun 2004, 2007 dan 2009. Khusus untuk tahun 2009, pengukuran IMS hanya berupa penilaian ulang untuk beberapa indikator yang dipandang mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan situasi tahun 2007. Berdasarkan hasil kesepakatan peserta yang hadir dalam kegiatan kaji ulang, beberapa indikator yang disepakati untuk dilakukan penilaian ulang adalah:

1. **Dimensi Struktur**
- Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga: Indikator kegiatan bersama di kelompok masyarakat
- Subdimensi Inter-relasi: Indikator Komunikasi

2. **Dimensi Lingkungan**
- Subdimensi Konteks Politik: Indikator Hak-Hak Politik dan Indikator Desentralisasi

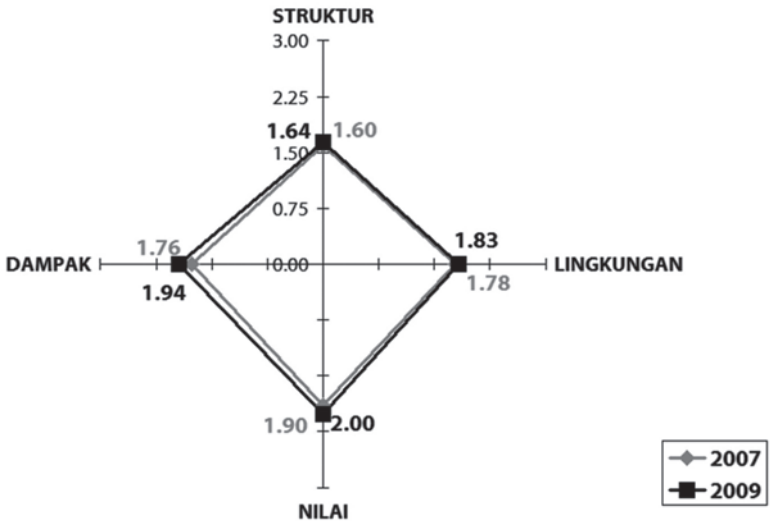
- Subdimensi Konteks Sosio-Ekonomi: Indikator Konteks Sosio-Ekonomi
- Subdimensi Relasi Negara – Masyarakat Sipil: Indikator Kerjasama/Dukungan

3. Dimensi Nilai

- Subdimensi Demokrasi: Praktek-praktek Demokrasi dalam OMS
- Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan: Indikator Aksi-aksi MS untuk penanggulangan kemiskinan

4. Dimensi Dampak

- Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan Publik: Indikator Pengaruh MS dalam Kebijakan Publik
- Subdimensi Menanggapi Kebutuhan Sosial: Indikator Memberikan Tanggapan dan Indikator Kepercayaan Publik



Grafik 15 Intan IMS Kabupaten Jeneponto

Secara umum, masyarakat sipil Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009 berada pada kondisi cukup sehat. Hal ini terlihat dari perolehan skor IMS di semua dimensi yang berada pada kategori cukup sehat, yaitu Dimensi Struktur (1,64), Dimensi Lingkungan (1,83), Dimensi Nilai (2,00) dan Dimensi Dampak (1,94). Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, skor IMS pada tahun 2009 mengalami peningkatan di semua dimensi. Ini berarti, dalam jangka waktu 2 tahun, telah terjadi perbaikan kondisi masyarakat sipil di Jeneponto.

Kekuatan utama masyarakat sipil di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009 terletak pada Dimensi Nilai (2,00). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh kalangan OMS, seperti nilai Demokrasi, Transparansi, Kesetaraan Gender, Anti Kekerasan, Penanggulangan Kemiskinan dan Kelestarian Lingkungan, dalam derajat tertentu sudah dipraktikkan dan dipromosikan kepada kalangan yang lebih luas melalui berbagai aktivitas yang dilakukan OMS di Jeneponto. Tantangan yang masih harus dihadapi masyarakat sipil di Jeneponto adalah bagaimana meningkatkan skor Dimensi Struktur yang pada pengukuran tahun 2009 memperoleh skor terendah (1,64) dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya. Beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah Aksi Politik Non-Partisan, Kepemimpinan Di OMS, Prasarana Pendukung dan Sumberdaya.

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Jeneponto

Dimensi Struktur

- Organisasi masyarakat di desa-desa semakin berkembang dan selalu dilibatkan dalam rapat-rapat perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi program-program yang dilaksanakan di desa.
- Partisipasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan di desa semakin meningkat
- Jaringan kerja, intensitas pertemuan/komunikasi antar OMS semakin meningkat.

Dimensi Lingkungan

- Telah ada Perda tata kelola air dan komisi Irigasi sehingga perebutan air semakin menurun
- Pada tingkat kabupaten, OMS sudah menjadi mitra pemerintah secara positif. Beberapa program Pemerintah melibatkan OMS, misalnya PNPM, WISMP, NICE, dll.

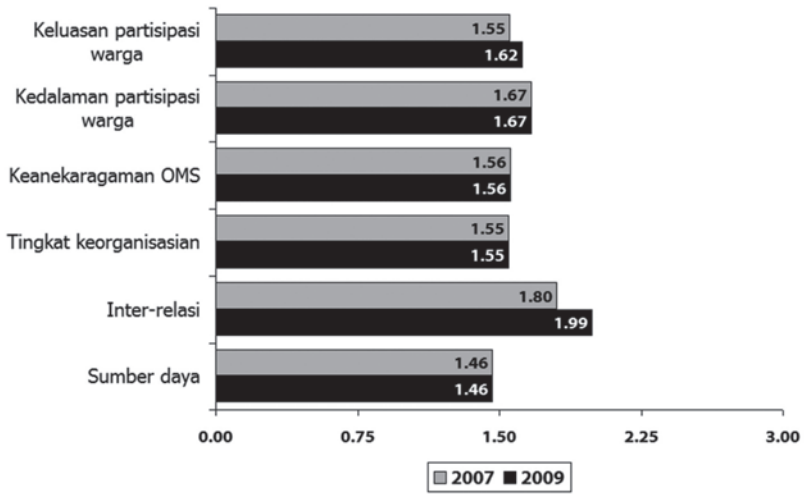
Dimensi Nilai

- Selain menerapkan kesetaraan gender pada tingkat kepengurusan, OMS juga aktif
- mempromosikan kesetaraan gender di ruang publik
- Kesempatan perempuan di ranah politik semakin besar, sehingga sudah banyak yang menempati posisi kunci dalam organisasi masyarakat di desa-desa (KSM), bahkan ada perempuan yang menjadi kepala desa
- Nilai-nilai demokrasi sudah dipahami dan diinternalisasikan di kalangan OMS
- Aksi-aksi MS untuk penanggulangan kemiskinan semakin meningkat melalui berbagai program yang dilakukan oleh OMS, Pemda maupun lembaga donor.

Dimensi Dampak

- Kapasitas Jaringan OMS dalam mempengaruhi sektor Negara dan Pasar semakin meningkat
- OMS semakin tanggap terhadap isu-isu yang ada di warga, seperti isu air bersih, kesehatan, kebersihan lingkungan, dll.· Keterlibatan aktif warga (laki-laki, perempuan) dalam Musrenbang untuk mendorong pemenuhan kebutuhan sosial makin meningkat

DIMENSI STRUKTUR

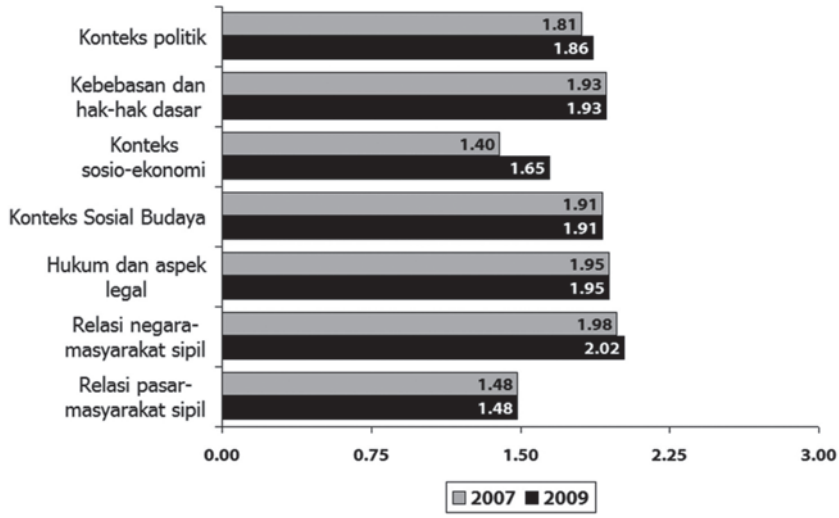


Dimensi Struktur menggambarkan kondisi aktor-aktor dalam arena masyarakat sipil, karakteristik utama dari aktor-aktor tersebut dan relasi diantara mereka. Secara umum, skor dimensi struktur di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009 sebesar 1,64 meningkat dibandingkan tahun 2007 yang berada pada skor 1,60. Perubahan skor ini terjadi akibat adanya perubahan kondisi yang signifikan pada Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga, khususnya pada Indikator Kegiatan Bersama di Kelompok Masyarakat (dari 1,56 ke 1,88) dan Subdimensi Inter-Relasi pada Indikator Komunikasi Antar Aktor Ms (1,86 ke 2,24). Subdimensi-subdimensi lainnya tidak mengalami perubahan siginifikan. Namun demikian ada beberapa tambahan informasi yang menguatkan atau memperkaya informasi hasil interpretasi tahun 2007.

Perubahan skor pada indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang terjadi di Jeneponto. Semakin berkembangnya program-program berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat pada tingkat perencanaan maupun evaluasi telah menyebabkan kegiatan bersama di kelompok semakin meningkat pula. Jika pada tahun 2007, hanya program *CLAPP* yang cukup menonjol mengembangkan pendekatan berbasis masyarakat, pada tahun 2009 pendekatan itu terlihat pula dalam program PNPM. Apalagi pelaksanaan program pun banyak diorganisasi langsung oleh masyarakat, sehingga semakin meningkatkan intensitas kerjasama antar sesama masyarakat. Komunikasi antar aktor dalam arena MS, terlihat semakin meningkat. Jika pada tahun 2007, kerjasama antara beberapa OMS masih belum banyak terjadi, pada tahun 2009 sudah terjadi diskusi-diskusi yang intens antar aktor MS, bahkan ada keinginan bersama untuk mengawal implementasi visi Jeneponto ke depan.

Tantangan yang tetap harus diperhatikan adalah Subdimensi Sumberdaya yang berada dalam kategori kurang sehat (1,46). Belum terlihat perubahan yang signifikan pada subdimensi ini dibandingkan dengan pengukuran tahun 2007. Meskipun sudah mulai tumbuh kesadaran untuk menggali berbagai peluang untuk keberlanjutan organisasi, namun sebagian besar OMS di Jeneponto masih belum mampu menggali sumber daya finansialnya; baik melalui pengumpulan iuran anggota maupun melalui kegiatan fundraising lainnya.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi lingkungan menggambarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya dan aspek legal (hukum) yang berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat sipil. Dimensi lingkungan masyarakat sipil Kabupaten Jeneponto menurut hasil pengukuran IMS tahun 2009 berada pada kondisi cukup sehat (1,83) atau sedikit mengalami peningkatan dibandingkan hasil pengkuran IMS tahun 2007 sebesar 1,78. Subdimensi yang mengalami peningkatan pada tahun 2009 sehingga memberikan sumbangan positif terhadap kondisi tersebut diantaranya adalah Subdimensi Relasi Negara – Masyarakat Sipil (2,02), Subdimensi Konteks Politik (1,86) dan Subdimensi Konteks Sosio-Ekonomi yang mengalami peningkatan dari 1,40 menjadi 1,65. Yang masih perlu memperoleh perhatian adalah Subdimensi Relasi Pasar – Masyarakat Sipil (1,48) yang tidak mengalami perubahan skor sama sekali, sekaligus menempati urutan terbawah dalam dimensi ini.

Subdimensi Relasi Negara dan Masyarakat Sipil (2,02) merupakan skor yang tertinggi untuk Dimensi Lingkungan. Skor subdimensi ini mengalami peningkatan dibadingkan tahun 2007 (1,98) akibat adanya perubahan pada Indikator Kerjasama/Dukungan Negara Terhadap Masyarakat Sipil. Jika pada tahun 2007, skor kerjasama/dukungan Negara terhadap masyarakat sipil sebesar 1,53 pada tahun 2009 meningkat menjadi 1,65. Perubahan angka ini ditandai dengan makin intensifnya kerjasama OMS dengan pemerintah kabupaten. Terjadi pemahaman antara kedua belah pihak bahwa dalam membangun daerah Jeneponto diperlukan

kerjasama yang baik antara OMS dan Pemerintah Daerah, bahkan sudah ada dukungan finansial yang diberikan Pemda kepada beberapa OMS, utamanya kepada OMS yang memiliki kedekatan dengan pihak Pemda. Di tingkat desa, OMS-OMS pun sudah mulai dilibatkan dalam penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD). Tantangannya adalah bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan anggaran khusus bagi kegiatan OMS secara transparan, akuntabel dan melalui proses yang terbuka sehingga tidak hanya diberikan kepada OMS yang memiliki kedekatan dengan pihak pemerintah daerah saja, tetapi dapat pula diakses oleh semua OMS yang beraktivitas di daerah bersangkutan.

Subdimensi Konteks Politik mengalami peningkatan dari 1,81 pada tahun 2007 menjadi 1,86 pada tahun 2009, akibat adanya perubahan pada Indikator Hak-hak Politik dan Desentralisasi dari 1,72 (2007) menjadi 1,82 (2009). Hal ini sejalan dengan perubahan kondisi di Jeneponto yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hak-hak politik masyarakat dalam proses pemilihan legislatif maupun kepala daerah. Masyarakat sudah berani secara terbuka menyampaikan siapa yang mereka dukung, tanpa perasaan was-was seperti masa-masa sebelumnya. Masyarakat pun memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, meskipun masih tetap dilatarbelakangi oleh hubungan kekerabatan dan pertemanan atau pihak-pihak yang memberikan bantuan berupa uang, sembako maupun bentuk-bentuk lainnya; belum merujuk pada visi dan misi dari calon bersangkutan. Namun, hal itu sudah tidak lagi didasarkan atas tekanan atau paksaan dari salah satu pihak yang berkompetisi. Semakin terbukanya ruang-ruang politik bagi masyarakat juga tercermin dari pemilihan kepala desa yang tidak lagi terlalu didominasi oleh elit-elit desa. Dalam beberapa kasus pemilihan kepala desa di Jeneponto, masyarakat tidak segan-segan lagi memilih kepala desa yang berasal dari kalangan masyarakat biasa yang mereka percaya.

Indikator Desentralisasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari 1,35 (2007) menjadi 1,59 (2009) sehingga meningkatkan status indikator tersebut dari kategori kurang menjadi kategori cukup. Peningkatan skor ini ditunjang oleh perubahan kondisi di Jeneponto, khususnya terkait dengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang diberlakukan dalam 2 tahun terakhir. Adanya ADD ini telah memberikan peluang lebih besar bagi desentralisasi pembangunan pada tingkat desa, karena masing-masing desa memiliki keleluasaan untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhannya masing-

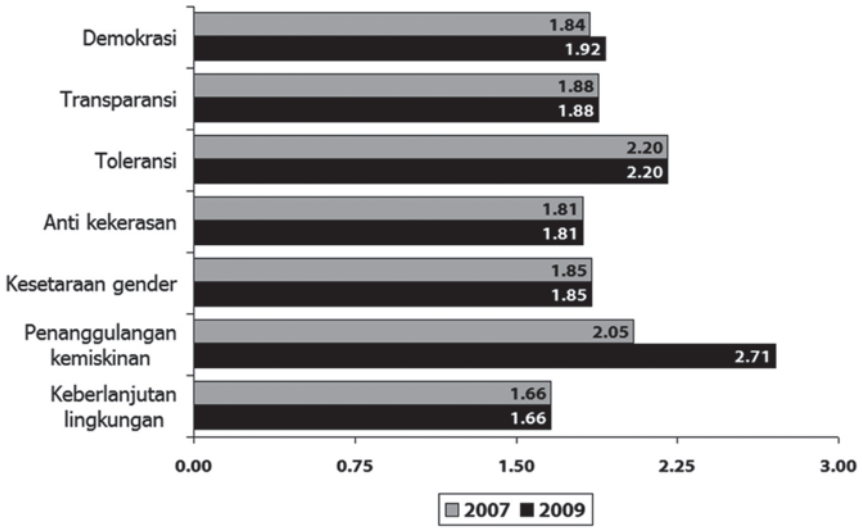
masing, tanpa harus tergantung pada kucuran anggaran dari instansi pemerintah di atasnya.

Subdimensi Konteks Sosial-Ekonomi mengalami peningkatan skor dari 1,40 (2007) menjadi 1,65 (2009). Peningkatan skor ini sekaligus mengubah sub-dimensi konteks sosial ekonomi dari kategori kurang menjadi cukup. Hal ini didukung oleh perubahan positif yang berkembang di tengah masyarakat dalam 2 tahun terakhir ini, baik dalam hal menurunnya konflik kekerasan di tengah masyarakat, menurunnya tingkat buta huruf, berkembangnya usaha-usaha ekonomi produktif dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi buta huruf, belakangan ini tingkat buta huruf di kabupaten Jeneponto menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena semakin intensifnya program Keaksaraan Fungsional yang dikembangkan pemerintah ke seluruh desa. Hasil nyata dari program ini terlihat dari makin berkurangnya suara yang batal dalam pemilu/pilkada karena tingkat buta huruf yang semakin berkurang.

Perubahan juga terjadi dalam hal pendapatan masyarakat dengan berkembangnya usaha budidaya jagung kuning dan rumput laut. Lembaga Ekonomi Desa (LED) amat membantu permodalan petani. Dengan adanya LED menyebabkan ketergantungan petani terhadap rentenir makin berkurang. Petani yang di desanya ada Lembaga Ekonomi Desa (LED) sudah mulai menjual hasil panen jagung kuning dan rumput laut kepada pembeli secara langsung. Sementara untuk petani yang di desanya tidak ada LED, pemasarannya masih bergantung pada pengumpul di desa. Pemerintah Daerah pun sudah memberikan bantuan berupa perahu, bibit tali dan para-para kepada beberapa kelompok tani rumput laut. Jika pada tahun 2007 tidak ada bantuan berupa permodalan kepada para petani tetapi di tahun 2009 sudah ada meskipun hanya 20 desa. Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengembangkan *crash program* berupa bantuan alat tulis dan pakaian seragam untuk siswa sehingga dapat meringankan beban masyarakat, meskipun program BLT sudah dihentikan. Peningkatan harga rumput laut dalam waktu terakhir ini juga mendongkrak penghasilan petani, bahkan beberapa diantaranya memanfaatkan pendapatan dari penjualan rumput laut ini untuk memperbaiki rumah dan menuaikan ibadah haji.

DIMENSI NILAI



Dimensi Nilai memberikan gambaran tentang nilai-nilai universal yang dikampanyekan maupun dipraktekkan oleh masyarakat sipil. Berdasarkan hasil IMS 2009, secara umum Dimensi Nilai yang dikampanyekan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil di Jeneponto masuk kategori cukup sehat dengan skor 2,00. Skor ini mengalami peningkatan dari pengukuran IMS tahun 2007 yang memperoleh skor 1,90. Peningkatan skor ini disumbangkan oleh sub-dimensi demokrasi dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini berarti, dalam periode 2007-2009 masyarakat sipil di Jeneponto cukup aktif melakukan upaya-upaya perbaikan terkait dengan pengembangan demokrasi dan penanggulangan kemiskinan. Sementara untuk subdimensi lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan pengukuran tahun 2007. Perhatian masih perlu diberikan untuk sub-dimensi keberlanjutan lingkungan yang berada pada skor terendah, meskipun masih masuk dalam kategori cukup.

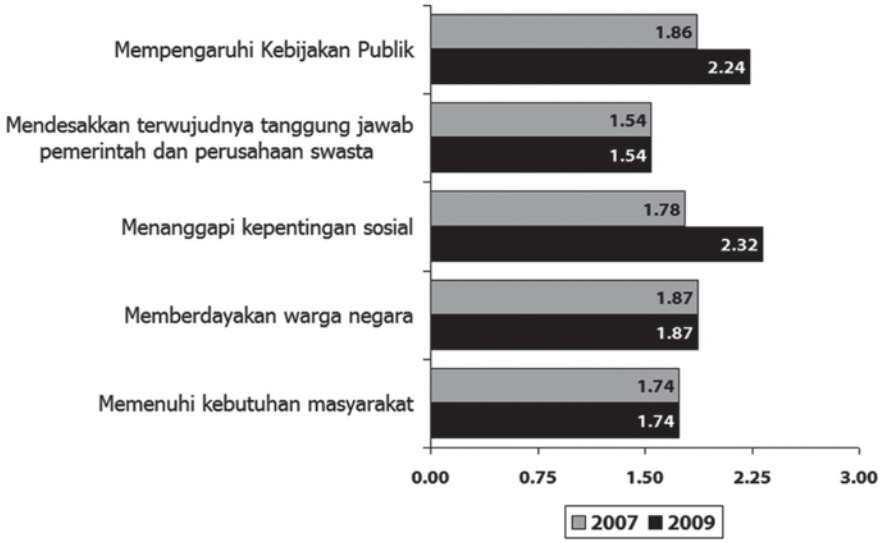
Perkembangan yang cukup signifikan dalam Dimensi Nilai terjadi pada Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan. Pengukuran tahun 2009 memberikan skor untuk subdimensi teersebut sebesar 2,71 (masuk dalam kategori sehat) meningkat jauh dibandingkan dengan pengukuran tahun 2007 dengan skor 2,05 (kategori cukup). Peningkatan ini sekaligus menjadikan subdimensi tersebut menempati skor tertinggi dalam Dimensi Nilai. Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah daerah Jeneponto. Kebijakan ini diikuti dengan

berkembangnya program-program (*crash program*) yang memberikan perhatian terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, seperti pembuatan pupuk organik yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian. Selain itu, beberapa OMS pun tetap aktif melakukan program-program penanggulangan kemiskinan bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor internasional, seperti WISLK, WISMP dan NICE. Program PNPM juga memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Jeneponto.

Perkembangan lain dari Dimensi Nilai terjadi dalam Subdimensi Demokrasi, khususnya pada Indikator Praktik-praktik Demokrasi Dalam OMS. Pada pengukuran tahun 2009, skor untuk indikator ini mengalami peningkatan, dari sebesar 1,84 (2007) menjadi 1,92. Peningkatan skor ini sejalan dengan perubahan yang terjadi di jeneponto. Sepanjang periode 2007-2009 terbuka ruang untuk aktor-aktor MS mempromosikan isu demokrasi, karena bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Alumni sekolah demokrasi Jeneponto, misalnya, sangat giat melakukan diskusi mengenai isu-isu terkait dengan demokrasi. Beberapa OMS pun melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi melalui kegiatan debat caleg. Upaya-upaya ini telah menyebabkan pemahaman demokrasi tersebar merata di kalangan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Di kalangan OMS, nilai-nilai demokrasi tidak hanya diinternalisasikan, tetapi juga sudah dipraktekkan dalam keseharian. Hal ini jelas terlihat dari semakin banyaknya perempuan menempati posisi kunci dalam OMS di desa-desa, bahkan ada perempuan yang terpilih sebagai kepala desa.

Untuk subdimensi lainnya, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi di Jeneponto. Perhatian penting diberikan untuk subdimensi keberlanjutan lingkungan yang menempati skor terendah dalam Dimensi Nilai. Meskipun sudah ada upaya-upaya untuk melakukan pelestarian lingkungan melalui program "*Go Green*" namun kondisinya masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Kemauan masyarakat yang instant masih menjadi hambatan bagi OMS-OMS untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan karena warga masyarakat masih didesak dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi Dampak memberikan gambaran sejauh mana masyarakat sipil aktif dan berhasil dalam memenuhi fungsi-fungsi pokoknya. Hasil IMS di Jeneponto tahun 2009 menunjukkan bahwa secara umum Dimensi Dampak berada pada kondisi cukup sehat dengan peroleh skor 1,94 dan mengalami peningkatan dibandingkan hasil IMS tahun 2007 yang memperoleh skor 1,76. Ada dua subdimensi yang amat berperan dalam peningkatan skor ini, yaitu Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan Publik dan Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Jeneponto sangat aktif dalam melakukan kegiatan advokasi dan kampanye untuk perbaikan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Namun upaya-upaya advokasi untuk mendesakkan tanggung jawab negara maupun swasta masih dinilai perlu ditingkatkan dan diupayakan secara serius di masa datang, karena masih memiliki skor yang paling rendah.

Skor tertinggi Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (2,32) yang masuk kategori sehat. Skor tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan perolehan pada pengukuran IMS 2007 sebesar 1,86 (kategori cukup). Dari dua indikator yang terdapat dalam subdimensi ini, yang berperan besar dalam meningkatkan skor adalah indikator memberikan tanggapan dari 1,98 (kategori cukup) pada tahun 2007 menjadi 2,71 (kategori sehat)

pada tahun 2009. Peningkatan skor tersebut dianggap cukup mencerminkan kondisi masyarakat sipil di Jeneponto. Aktor-aktor MS semakin tanggap terhadap isu-isu yang ada di warga, seperti isu tentang air bersih, kesehatan, kebersihan lingkungan. Keterlibatan aktif warga baik laki-laki maupun perempuan dalam Musrenbang untuk mendorong pemenuhan kebutuhan sosial semakin meningkat. Selain itu, aktor-aktor MS pun semakin aktif mencari layanan-layanan untuk warga dari negara, misalnya PAUD, PMD-sekolah, Pendidikan Luar Sekolah dan memfasilitasi masyarakat mengakses berbagai inisiatif program yang dicanangkan pemerintah seperti Jamkesmas, Jamkesda dan pendidikan gratis.

Subdimensi mempengaruhi kebijakan publik mengalami peningkatan skor dari 1,86 (2007) menjadi 2,24 (2009). Peningkatan skor ini sejalan dengan kian meningkatnya kemampuan OMS, sehat secara individual maupuan dalam bentuk jaringan/koalisi mempengaruhi pengambil kebijakan dari kalangan pemerintah maupun legislatif. Beberapa kebijakan yang didesakkan oleh OMS di Jeneponto adalah Perda perlindungan anak, Perda partisipasi dan transparansi serta Perda pelayanan publik. Selain itu, sebagai langkah lanjutan dari beberapa Perda yang sudah disyahkan, OMS-OMS di Jeneponto pun sangat giat mengupayakan implementasi komisi irigasi, dan mengupayakan pembentukan komisi pelayanan publik.

Subdimensi yang masih perlu mendapat perhatian adalah mendesakkan tanggung jawab Negara dan perusahaan swasta, karena belum ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi nyata dari subdimensi ini di Jeneponto. Perubahan-perubahan kecil memang sudah terlihat, misalnya, di Desa Bulu Sibatang OMS berhasil mendesak perusahaan untuk memperbaiki gorong-gorong yang rusak diakibatkan oleh pengambilan galian C. Sementara itu, beberapa agenda yang saat ini didesakkan oleh OMS adalah advokasi waduk Kareloe untuk prasarana pengairan dan pertanian, Penyediaan air bersih lebih luas lagi di desa-desa, serta pengerjaan irigasi dilakukan oleh GP3A.

Kabupaten Bantaeng

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada titik 5°21’23" - 5°35’26" Lintang Selatan dan 119°51’42" - 120°5’26" Bujur Timur. Berjarak 125 Km ke arah selatan dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencapai 395,83 Km^2, dengan jumlah penduduk 170.057 Jiwa (data BPS tahun 2006) dengan rincian Laki-laki sebanyak 82.605 Jiwa dan perempuan 87.452 Jiwa. Terbagi atas 8 kecamatan serta 46 desa dan 21 kelurahan. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan. Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi terbatas 1.262 Ha dan hutan lindung 2.773 Ha. secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Ha.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Bantaeng adalah petani. Kentang adalah salah satu tanaman holtikultura yang paling menonjol. Selain kentang, holtikultura lainnya adalah kool, wortel dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Perkembangan produksi perkebunan, khususnya komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti. Sementara itu, industri-industri yang berkembang di Kabupaten Bantaeng antara lain adalah industri pembersih biji kemiri, pembuatan gula merah, pertenunan godongan, pembuatan perabot rumah tangga dari kayu, anyaman bambu atau daun lontar, dan lain-lain.

Peta Masyarakat Sipil[1]

Secara umum OMS yang ada di Bantaeng lahir dari inisiatif masyarakat dan pemerintah. OMS yang lahir dari inisiatif masyarakat biasanya dilandasi oleh kepentingan yang bersifat lokal misalnya kelompok tani, kelompok hobi dan seterusnya. Sedangkan OMS yang lahir dari pemerintah biasanya lahir karena ada aturan yang mengharuskan organisasi tersebut ada atau berasal dari struktur yang lebih tinggi.

Dari pemetaan yang dilakukan, banyak masyarakat yang beraktifitas melalui berbagai bentuk organisasi, seperti Organisasi Keagamaan, Organisasi Hobby, LSM, Ormas, Kelompok usaha dan kelompok profesi. Dari sini terlihat ada kesadaran sebagian masyarakat bahwa untuk mencapai tujuan bersama diupayakan melalui wadah organisasi. Di Bantaeng, ada orang yang aktif di beberapa organisasi karena ingin merasakan suasana yang berbeda dalam setiap organisasi, ingin mengikuti banyak proses pembelajaran, mudah untuk membentuk ormas (tidak perlu AD/ART), efek dari OKP yang konflik, budaya ikut-ikutan, mudah menarik anggota tanpa perlu persyaratan khusus. Berikut ini adalah jenis OMS yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Tabel 9. Jenis OMS di Kabupaten Bantaeng

Ormas	Keagamaan	LSM	Hobby	Profesi	Kelompok Usaha
DPD AMPI	IPNU	JARPUK ASSAMATURU	BVC	PWI	GAPENSI
JARMANI	NASYIATUL AISYIAH	LSM SIPAKALABBIRI	SSBT	IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia)	GAPEKSINDO
KTNA	BKPRMI	WAPALA	PANSEL FM	MBS	HIPPI
PEMUDA PANCASILA	MUI	LPSM SEHATI	MASTER FM	KONI	HIMAS PAPOJI
KNPI	IPPNU	YBT	IKS KUBAH SMU 1		KOMPRAN TANI PARAGITTE
GP3A TODDO ATIA	AISYIAH BANTAENG	YAJALINDO	PCB		KOPPAS
HISBUL WATHAN	IRM	APD	HRC		KSM SIPAKAINGA
GERAKAN PEMUDA KA'BAH	PMU	LSM SOKO MAWAR	ORARI		LED SIPANAIKANG
KARANG TARUNA	IPM	BBT	KOMPLEN		

[1] Buntus, Muh Nasir dan M. Taufik, 2007. Dimensi Struktur dan Pemetaan OMS Kabupaten Bantaeng. Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya IMS Kabupaten Bantaeng, 2007.

Ormas	Keagamaan	LSM	Hobby	Profesi	Kelompok Usaha
IKA SMU 2	FATAYAT NU	YAINASTRI	BAT		
IKA SMU 1	MUSLIMAT NU	SMART	ISSI		
KOMUNITAS OJEK	BKMT	YASKO	SARI JAYA		
FORUM KALBA	F.TPA		SEGI TIGA FC		
FKPSM	GP.ANSOR		TARUNA BOTLEM		
BANSER			IVO SEGITIGA		
BAKOM PKB					
KOSKAR					
AMPG					
HPMB					
GP3A SAMA BINTOENG					
GORA					
IPHI					
KSM BAHARI					

Untuk mengetahui tingkat pengaruh OMS di Kabupaten Bantaeng, digunakan kriteria sebagai berikut:

1. **Sangat berpengaruh:**
   - OMS yang menjalankan programnya secara mandiri,
   - Kemampuan OMS berjaringan dengan dengan lembaga/ institusi lain berdasarkan kesetaraan dan keterbukaan mulai dari tingkat kabupaten, propinsi,nasional sampai tingkat internasional.
   - Ada banyak perubahan di masyarakat dari dampak organisasi, misalnya BKPRMI yang memprogramkan anak-anak bebas buta baca Alquran dan APDESI yang mampu meningkatkan alokasi anggaran pembangunan desa.
   - Kapasitas keorganisasian dan sumber daya yang tersedia kuat dan menyeluruh dalam organisasi.
   - OMS mempunyai kekuatan finansial yang diandalkan. Mempunyai keahlian dalam menggalang dana
   - OMS bekerja professional dan konflik yang sewaktu – waktu akan muncul dapat diatasi dengan baik.
   - Sangat kuat menjaga komitmen dalam menjalankan kode etik lembaga.
   - OMS memiliki visi dan misi yang kuat dan jelas.
   - Mempunyai nilai posisi tawar yang tinggi

2. **Berpengaruh:**
   - Struktur organisasi yang sudah efektif.
   - Adanya pengkaderan dalam tubuh organisasi, sehingga kapasitas cukup merata
   - Hubungan antara OMS dengan pihak pengambil keputusan sudah membaik.
3. **Agak Berpengaruh:**
   - Kurang atau bahkan tidak mempunyai kegiatan yang menyentuh isu publik.
   - Sumberdaya yang dimiliki masih lemah.
   - Tidak jelas peran-peran dalam organisasi
4. **Kurang Berpengaruh:**
   - LSM bentukan pemerintah untuk menjadi alat kekuasaan dan kepentingan penguasa. Pelaksana lembaga ini pada umumnya adalah bagian dari penguasa
   - Rekruitmen/kaderisasi yang kurang/ tidak berke–sinambungan.

Berdasarkan kriteria tersebut, peta OMS di Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. **Sangat Berpengaruh**

   Tidak ada OMS yang sangat berpengaruh di Bantaeng, dengan alasan:
   - Tidak ada OMS yang menjalankan programnya secara mandiri, semua bergantung pada pihak luar (Pemda, Donor).
   - Organisasi tidak dijalankan secara utuh, tetapi lebih dipengaruhi oleh tendensi "mobilitas politik vertikal"/lebih banyak bergantung pada kemampuan ketua/kordinator.
   - Ada OMS berbentuk dadakan atau karbitan tergantung moment misalnya untuk sekedar membuat dukungan politik pada musim suksesi . Sifatnya sangat temporer.
   - Lemahnya kapasitas keorganisasian dan sumberdaya yang tersedia karena masih terbatas pada segelintir orang.
   - OMS tidak intensif dalam menggulirkan isu-isu yang ditangani karena masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan finansial.

- Isu gerakan biasa-biasa saja, belum mampu melakukan booming isu yang tajam.
- OMS bekerja tidak profesional dan sering muncul konflik.
- Kurang menjaga komitmen dalam menjalankan lembaga atau hanya sekedar pasang nama dalam kepengurusan. Kebanggaan pribadi mempunyai sebuah atribut.
- Banyak OMS khususnya LSM yang dibangun tidak memiliki ***visi dan misi*** yang kuat dan jelas.

2. Berpengaruh

Ada beberapa OMS yang berpengaruh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Hanya LSM dan Organisasi Massa yang memiliki visi dan misi yang kuat.
- Untuk ormas yang punya massa, sudah mampu memanfaatkan massa untuk mendorong kepentingannya.
- Organisasi yang ada sudah memiliki struktur yang bagus, menyebar sampai ke bawah.
- Kelancaran kaderisasi dan kader yang dihasilkan sudah cukup berkualitas.
- Jaringan ke pengambilan kekuasaan cukup besar, contoh : Majelis Ulama Indonesia Bantaeng

3. Agak Berpengaruh

Ada beberapa OMS yang masuk dalam kategori ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kegiatan-kegiatannya masih belum menyentuh isu publik.
- Sumberdaya masih lemah.
- Struktur organisasi tidak efektif bekerja terutama ormas-ormas yang hanya berpengaruh jika mewakili kepentingan kekuasaan.

4. Kurang Berpengaruh

Ada beberapa OMS yang masuk dalam kategori ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Ormas & LSM yang hanya menjadi mesin kekuasaan & kepentingan penguasa, bahkan terkesan menempel pada kekuasaan.

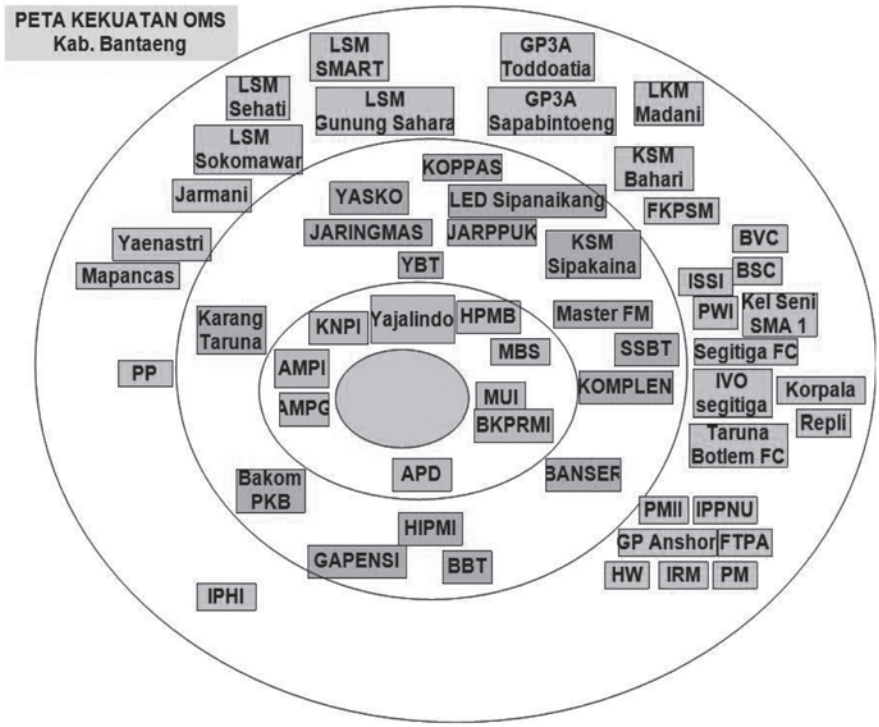
- Rekrutmen/kaderisasi yang kurang maksimal pada organisasi.

OMS yang masuk dalam masing-masing kategori di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10. Tingkat Pengaruh OMS di Bantaeng

SANGAT BERPENGARUH	BERPENGARUH	AGAK BERPENGARUH	KURANG BERPENGARUH
	Yajalindo	YBT Bantaeng	Bantaeng Sport Club (BSC)
	HPMB	BBT Bantaeng	FC. Segi tiga
	APD Bantaeng	Jarppuk	REPLI BT.Bulaeng
	MUI Bantaeng	KSM Sipakainga'	Forum TPA
	AMPG Bantaeng	Banser	IVO Segitiga
	DPD AMPI	Master FM	IPPNU
	KNPI Bantaeng	Karang Taruna	GP3A Sama Bintoeng
	Radio MBS	Yasko	Bantaeng Vespa Club (BVC)
	BKPRMI	Bakom PKB	GP3A Toddo Atia
		HIPMI	ISSI Bantaeng
		KOMPLEN	GP.Ansor
		LED Sipanaikang	PWI Bantaeng
		SSBT	Ikatan Penasehat Hukum Indonesia
		GAPENSI	FK.PSM
		Jaring Mas	Taruna Botlem FC
		KOPPAS	PMII
			KORPALA
			LSM Soko Mawar
			Pemuda Pancasila
			Mapancas
			Hisbul Wathan
			Honda Racing Club (HRC)
			Kelompok Seni Kubah SMA 1
			KSM Bahari
			Forum Silaturahmi Masy.Pallantikang
			Pemuda Muhammadiyah
			LSM SMART Bantaeng
			Ikatan Remaja Muhammadiyah
			Aisyiah
			LSM Gunung Sahara
			LKM Madani

Secara skematis, lingkup pengaruh dan relasi antar OMS di kabupaten Bantaeng dapat dilihat pda gambar berikut ini.



Dari pemetaan OMS yang dilakukan di Kabupaten bantaeng, beberapa catatan pentingnya adalah sebagai berikut:

- Relasi OMS lebih kuat jika dibangun atas dasar relasi individu berupa hubungan emosional, daripada berdasarkan hubungan antar organisasi.
- Kedekatan OMS biasanya hanya didasarkan pada kedekatan isu kegiatan.
- Individu yang ada kebanyakan terlibat di beberapa organisasi.
- OMS yang besar, mampu dan mau memfasilitasi OMS yang baru terbentuk karena adanya pertemanan yang kuat selama yang dilakukan oleh yang dibantu tidak bertentangan dengan pemahaman terhadap isu yang dikerjakan oleh lembaga induk.
- Ada OMS yang tidak bisa saling bekerja sama antara satu dengan yang lain karena perbedaan kepentingan yang di usung.

Status Masyarakat Sipil

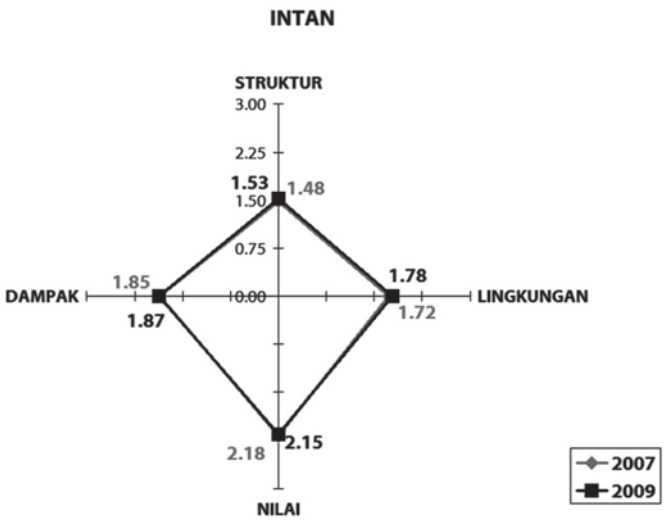
Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di Kabupaten Bantaeng telah dilakukan pada tahun 2004, 2007 dan 2009. Khusus untuk tahun 2009, pengukuran IMS hanya berupa penilaian ulang untuk beberapa indikator yang dipandang mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan situasi tahun 2007. Berdasarkan hasil kesepakatan peserta yang hadir dalam kegiatan kaji ulang, beberapa indikator yang disepakati untuk dilakukan penilaian ulang adalah:

1. **DIMENSI STRUKTUR**
   - Subdimensi keluasan partisipasi warga: indikator kerja sukarela dan kegiatan bersama masyarakat
   - Subdimensi Kedalaman partisipasi warga: indikator kerja sukarela
2. **DIMENSI LINGKUNGAN**
   - Subdimensi Konteks Politik: indikator desentralisasi
   - Subdimensi Relasi Negara dan MS: indikator dialog
   - Subdimensi Relasi Pasar dan MS: indikator sikap sector pasar
3. **DIMENSI NILAI**
   - Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan: indikator Aksi-aksi MS untuk penanggulangan kemiskinan
   - Subdmensi Keberlanjutan Lingkungan: Indikator Aksi-aksi MS dan OMS untuk keberlanjutan lingkungan
4. **DIMENSI DAMPAK**
   - Sub Dimensi Memberdayakan Warga: Indikator Pemberdayaan perempuan

Secara umum, masyarakat sipil Kabupaten Bantaeng pada tahun 2009 berada pada kondisi cukup sehat. Hal ini terlihat dari perolehan skor IMS di semua dimensi yang berada pada kategori cukup sehat, yaitu Struktur (1,53), Lingkungan (1,78), Nilai (2,15) dan Dampak (1,87). Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, skor IMS pada tahun 2009 mengalami peningkatan pada Dimensi Struktur, Lingkungan dan Dampak. Sementara untuk dimensi nilai mengalami penurunan, meskipun dengan angka yang sangat kecil. Ini berarti, dalam jangka waktu dua tahun, telah terjadi perbaikan kondisi masyarakat sipil di Bantaeng, khususnya untuk dimensi-

dimensi yang angkanya mengalami peningkatan, dan pada sisi lain, terjadi perubahan kondisi yang kurang menggembirakan terkait dengan dimensi nilai. Meskipun demikian, dimensi nilai masih menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan dimensi

Grafik 16 Intan IMS Kabupaten Bantaeng



Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Bantaeng

Dimensi Struktur

- Makin meluasnya sebaran OMS di tingkat desa yang lahir atas inisiatif masyarakat setempat dan memiliki pengurus yang mencerminkan keterwakilan kelompok perempuan, kelompok miskin dan komponen lain yang ada di desa. OMS ini terlibat aktif dalam proses musrenbang
- Jaringan kerja, intensitas pertemuan/komunikasi dan kerjasama antar OMS semakin meningkat, bukan sekedar antar aktor melainkan antar lembaga
- keluasan partisipasi warga dalam bentuk kerja gotong royong dan kerja sukarela masih tinggi

Dimensi Lingkungan

- Ruang berinteraksi dan dialog dengan pengambil keputusan semakin terbuka dan ada tindak lanjut dari dialog-dialog yang telah dilaksanakan

- Kerjasama antar etnis dan agama semakin meningkat
- Program desa mandiri yang mengembangkan kredit usaha rakyat (KUR) semakin membuka akses kredit di Bank melalui rekomendasi Bumdes (tidak perlu ada agunan)
- Implementasi ADD menyediakan anggaran untuk bantuan sosial

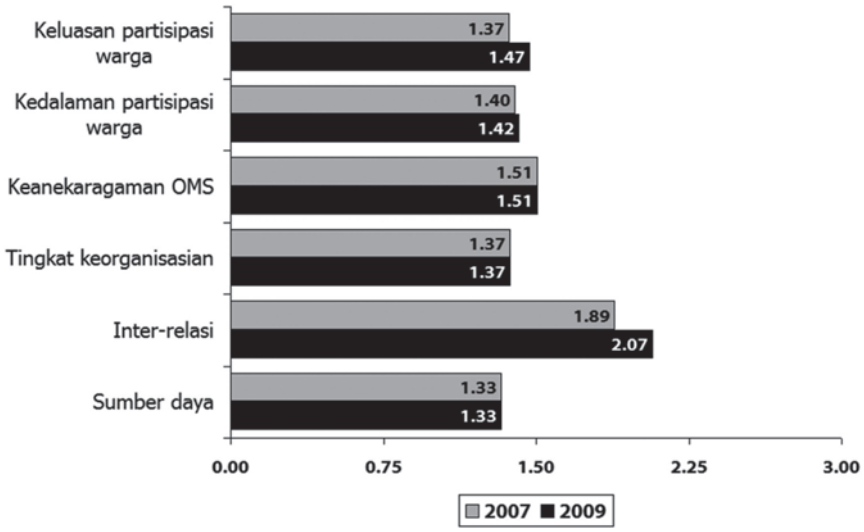
Dimensi Nilai

- Semakin meningkat jumlah OMS yang membuat pertanggungjawaban sebagai bentuk dari transparansi lembaga mereka
- Nilai-nilai kesetaraan gender sudah terinternalisasi dan dipraktekkan dalam lembaga maupun ruang publik, ditandai dengan semakin berkembangnya organisasi perempuan di desa

Dimensi Dampak

- Semakin meningkatnya daya tawar OMS dan masyarakat terhadap pengambil keputusan di tingkat kabupaten maupun desa, sehingga beberapa agenda kegiatan OMS diadopsi/ diakomodasi kedalam agenda kegiatan Pemerintah
- Kelompok-kelompok perempuan terlibat aktif dalam kegiatan Musrenbang

DIMENSI STRUKTUR



Dimensi Struktur menggambarkan kondisi aktor-aktor dalam arena masyarakat sipil, karakteristik utama dari aktor-aktor tersebut dan relasi di antara mereka. Secara umum skor dimensi struktur di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2009 sebesar 1,53 meningkat dibandingkan tahun 2007 yang berada pada skor 1,48. Peningkatan skor ini sekaligus meningkatkan Dimensi Struktur dari kategori kurang sehat menjadi kategori cukup sehat. Hal ini dikontribusikan oleh perubahan kondisi pada Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga dan Kedalaman Partisipasi Warga, khususnya pada Indikator Kerja Sukarela dan Kegiatan Bersama Di Kelompok Masyarakat. Perubahan juga terjadi pada Subdimensi Inter-Relasi, terutama pada Indikator Kerjasama.

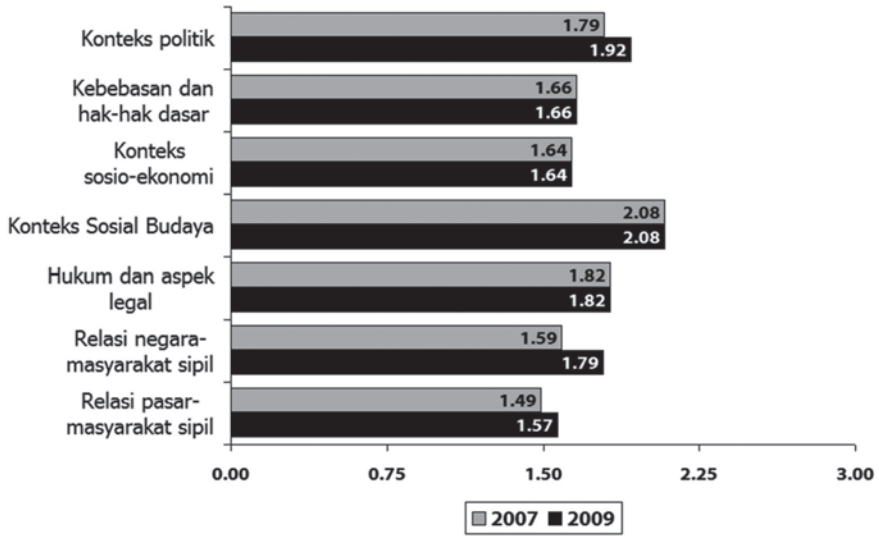
Pengukuran IMS 2009 memberikan skor untuk Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga sebesar 1,47, meningkat 0,1 dibandingkan pengukuran 2007 dengan skor 1,37. Meskipun masih berada dalam kategori kurang sehat, tetapi mulai terlihat adanya perubahan ke arah positif untuk subdimensi ini, yang dikontribusikan oleh peningkatan skor indikator kerja sukarela dan kegiatan bersama di kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan kondisi yang terjadi di desa-desa dalam Kabupaten Bantaeng. Jika sebelumnya kerja-kerja sukarela dan kegiatan bersama diantara masyarakat banyak dikaitkan dengan unsur keagamaan dan budaya seperti membangun rumah ibadah dan pesta adat perkawinan, saat ini gotong royong secara sukarela dan kegiatan bersama diantara masyarakat dilakukan juga untuk kegiatan pembangunan desa, bahkan ada masyarakat yang bersedia memberikan tanahnya untuk pembuatan jalan tani. Kerja sukarela juga dilakukan aktivis OMS dalam mendampingi/memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan berdialog dengan pengambil keputusan, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Semakin berkembangnya program-program berbasis masyarakat di pedesaan telah menyebabkan kerjasama diantara masyarakat maupun antara masyarakat dengan OMS semakin meningkat pula.

Subdimensi lain yang berkontribusi terhadap peningkatan skor Dimensi Struktur adalah Subdimensi Inter-Relasi, khususnya Indikator Kerjasama yang mengalami peningkatan skor dari 1,63 (2007) menjadi 2,00 (2009). Peningkatan skor tersebut mencerminkan perubahan yang terjadi di Bantaeng terkait dengan pola kerjasama yang berlangsung. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kerjasama lebih banyak bersifat individual, saat ini kerjasama yang berlangsung lebih bersifat kelembagaan baik antar sesama OMS maupun antara OMS dengan pengambil keputusan. Sebagai

contoh, pembelian pupuk oleh petani yang sebelumnya dilakukan secara individual, sekarang sudah mulai dikoordinasi oleh kelompok tani, sehingga daya tawarnya menjadi lebih tinggi. Telah terjadi pula kerjasama antara CLAPP-Jarpuk dengan Jaringmas dan PKK di satu desa dengan PKK di desa lainnya. Kerjasama juga sudah berlangsung antara OMS dengan instansi pemerintah, seperti kerjasama yang terjalin antara organisasi perempuan di desa dengan instansi pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten.

Tantangan yang tetap harus diperhatikan adalah Subdimensi Tingkat Keorganisasian yang berada dalam kategori kurang sehat (1,37). Belum terlihat indikasi perubahan yang signifikan terkait dengan subdimensi ini dibandingkan dengan pengukuran tahun 2007, khususnya terkait dengan keberadaan dan keefektifan lembaga payung. Pola komunikasi antara lembaga payung dan OMS anggotanya masih dirasakan kurang efektif, sehingga manfaat keberadaan lembaga payung masih kurang dirasakan oleh OMS yang menjadi anggotanya.

DIMENSI LINGKUNGAN



Dimensi lingkungan menggambarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya dan aspek legal (hukum) yang berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat sipil. Dimensi Lingkungan masyarakat sipil Kabupaten Bantaeng menurut hasil pengukuran IMS tahun 2009 berada pada kondisi cukup sehat (1,78), sedikit mengalami peningkatan

dibandingkan hasil pengkuran IMS tahun 2007 yang memperoleh skor sebesar 1,72. Subdimensi yang mengalami peningkatan pada tahun 2009 sehingga memberikan sumbangan positif terhadap kondisi tersebut adalah Subdimensi Konteks Politik (1,92), Relasi Negara–Masyarakat Sipil (1,79), dan Relasi Pasar– Masyarakat Sipil (1,59). Beberapa subdimensi lainnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, termasuk subdimensi kondisi sosial budaya yang menempati skor tertinggi dalam Dimensi Lingkungan.

Skor Subdimensi Konteks Politik mengalami peningkatan dari 1,79 (2007) menjadi 1,92 (2009). Ini terjadi akibat adanya peningkatan skor pada indikator desentralisasi. Jika pada pengukuran IMS 2007, skornya sebesar 1,11 (kategori kurang sehat), pada tahun 2009 meningkat tajam mencapai 1,89 (kategori cukup sehat). Peningkatan skor yang cukup tinggi ini sejalan dengan perubahan positif di Kabupaten Bantaeng. Sejak tahun 2008 sudah diimplementasikan Anggaran Dana Desa (ADD) yang memberikan kesempatan bagi pemerintahan desa mengelola anggarannya secara mandiri, tidak hanya untuk kepentingan melaksanakan tugas-tugas tata pemerintahan tetapi juga anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, memberikan tambahan insentif bagi guru mengaji, membiayai peningkatan kapasitas aparat desa dalam bidang komputer, dan tunjangan bagi aparat desa sehingga mereka lebih giat melaksanakan tugas-tugasnya. Selain dalam bentuk ADD, desentralisasi tercermin juga dari program-program pembangunan yang pengelolaannya dilimpahkan ke desa, misalnya Bumdes, sehingga terbuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan secara intensif. Masyarakat pun dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan untuk memberikan usulan dan pandangan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Subdimensi Relasi Negara-Masyarakat Sipil di Bantaeng dalam pengukuran IMS 2009 memperoleh skor sebesar 1,79 atau meningkat dibandingkan pengukuran 2007 yang mendapatkan skor 1,59 yang terjadi akibat adanya perubahan pada Indikator Dialog MS Dan Negara dari 1,50 menjadi 2,11. Dalam kenyataan di Bantaeng, Dialog Antara MS dan Negara memang semakin meningkat. Kesempatan untuk berdialog semakin terbuka baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Setiap ada program atau masalah yang terjadi di desa selalu didialogkan dengan aparat/kepala desa secara terbuka dan sebagian besar mendapatkan respon yang baik meskipun tidak jarang juga ada yang tidak tuntas. Jika ada persoalan yang tidak selesai di tingkat desa, masyarakat pun selalu

melakukan dialog dengan aparat pemerintah di tingkat kabupaten bahkan dengan bupati atau DPRD melalui OMS yang memiliki relasi dengan Bupati atau anggota dewan. Di kantor pemerintah daerah pun sudah tersedia pusat pengaduan dari masyarakat yang akan disampaikan kepada Bupati, meskipun belum dapat diukur efektifitasnya. Dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat tetap melakukan aksi demonstrasi ketika forum dialog tidak memberikan penyelesaian yang diharapkan.

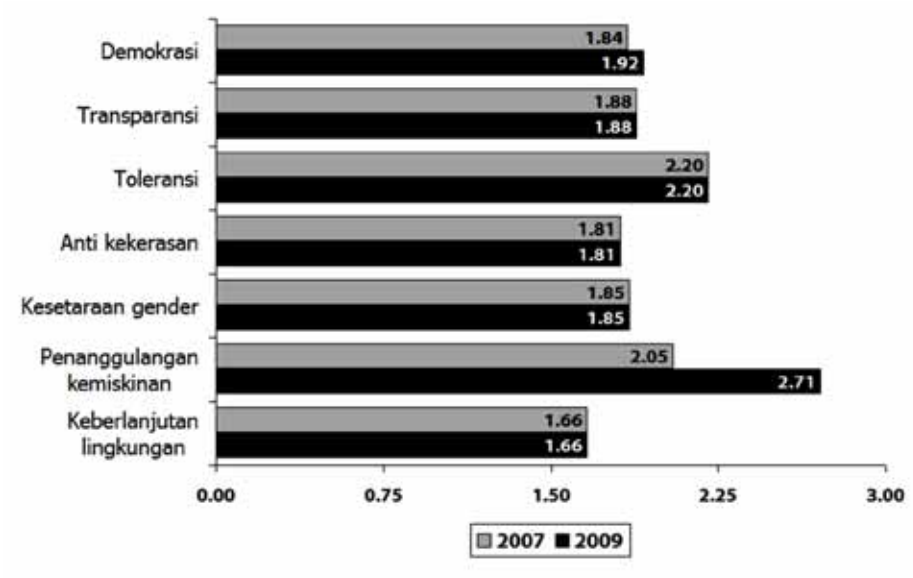
Subdimensi Relasi Pasar-Masyarakat Sipil mengalami peningkatan skor dari 1,49 pada pengukuran IMS 2007 menjadi 1,57 pada pengukuran 2009. Peningkatan skor ini menyebabkan Subdimensi Relasi Pasar-MS bergerak dari kategori kurang sehat menjadi kategori cukup sehat, akibat adanya perubahan pada indikator sektor pasar. Jika pada tahun 2007, skor indikator tersebut adalah 2,04 (cukup) maka pada pengukuran 2009 skornya berubah menjadi 2,28 (sehat). Hal ini sejalan dengan kondisi di Bantaeng yang menunjukkan terjadinya peningkatan lapangan kerja yang disediakan sektor pasar sehingga memberikan kesempatan lebih besar kepada perempuan. Selain itu, akses masyarakat untuk mendapatkan kredit di bank semakin terbuka dengan adanya kredit usaha rakyat sebagai bagian dari program pengembangan desa mandiri. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak perlu lagi menyediakan agunan untuk mendapatkan kredit di bank, cukup menunjukkan rekomendasi yang diperoleh dari Bumdes.

Terlepas dari perkembangan positif yang terjadi dalam Subdimensi Relasi Pasar-MS seperti yang diuraikan di atas, perhatian tetap perlu diberikan mengingat subdimensi ini masih menempati urutan terendah dalam Dimensi Lingkungan. Diperlukan upaya-upaya yang lebih kreatif untuk meningkatkan relasi yang lebih intensif antara sektor pasar dan MS di kemudian hari.

DIMENSI NILAI

Dimensi Nilai memberikan gambaran tentang nilai-nilai universal yang dikampanyekan maupun dipraktekkan oleh masyarakat sipil. Berdasarkan hasil IMS 2009, secara umum Dimensi Nilai yang dikampanyekan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil di Bantaeng masuk kategori cukup sehat dengan skor 2,15. Meskipun masih menempati posisi tertinggi dibandingkan beberapa dimensi lainnya, skor yang diperoleh pada tahun 2009 ini mengalami sedikit penurunan dari pengukuran IMS tahun 2007 yang memperoleh skor 2,18. Penurunan skor ini disebabkan oleh

menurunnya skor subdimensi aksi-aksi untuk penanggulangan kemiskinan dan subdimensi aksi-aksi pelestarian lingkungan. Hal ini berarti, dalam periode 2007-2009 perhatian masyarakat sipil di Bantaeng terhadap isu-isu kemiskinan dan lingkungan sedikit berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

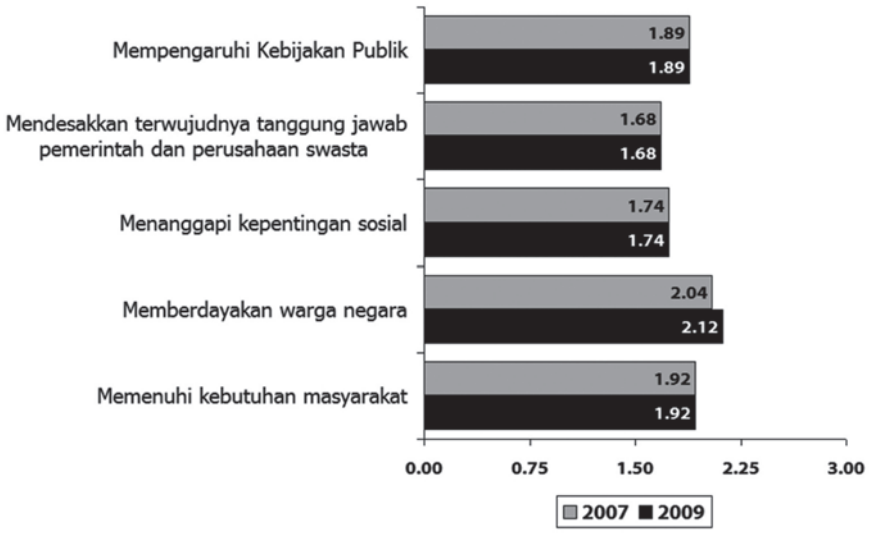


Pengukuran tahun 2009 memberikan skor untuk subdimensi penanggulangan kemiskinan sebesar 2,22 sedikit menurun dibandingkan pengukuran tahun 2007 dengan skor 2,29. Selama periode 2007-2009, OMS yang ada di Bantaeng tetap mempraktekkan nilai-nilai penanggulangan kemiskinan melalui pendampingan masyarakat di daerah pedesaan. Masuknya program PNPM telah meningkatkan inisiatif OMS untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. Namun, banyak kegiatan program PNPM yang sudah berlangsung masih merupakan inisiatif Pemda. Inisiatif dari kalangan OMS masih dalam proses persiapan sehingga perhatian OMS banyak tercurah ke dalam penyusunan rencana kegiatan. Aksi-aksi di lapangan masih belum intensif dilakukan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa dalam penilaian 2009, terjadi sedikit penurunan skor dibandingkan tahuan 2007. Sebuah tantangan yang dihadapi OMS dengan adanya program PNPM adalah bagaimana memastikan keterlibatan OMS betul-betul untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan secara mendasar, bukan sekedar melaksanakan proyek.

Subdimensi Keberlanjutan Lingkungan mengalami penurunan skor,

dari 2,11 pada pengukuran 2007 menjadi 2,00 pada tahun 2009. Berkurangnya skor subdimensi ini berbanding terbalik dengan gencarnya kampanye Pemda mengenai program-program yang berorientasi pelestarian lingkungan, seperti Desa Hutan, Desa Hijau, Jumat Bersih, dan Sabtu Menanam melalui penyediaan bibit tanaman keras yang dibagikan kepada masyarakat. Kalangan OMS pun giat mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman pohon di sekitar desa mereka, seperti yang dilakukan di Desa Baruga, Uluere, Batu Karaeng, Biang Loe dan lain-lain. Masyarakat juga sangat antusias melakukan kegiatan penanaman pohon/penghijauan di sekitar desa mereka. Hal yang masih perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga konsistensi dan menjaga komitmen yang terus menerus dari pemerintah daerah, masyarakat maupun kalangan OMS atas pelaksanaan inisiatif ini, mengingat upaya pelestarian lingkungan memerlukan waktu yang cukup panjang dan rentan terhadap inisiatif-inisiatif yang berbau ekonomi. Hal inilah yang menjadi catatan penting dari turunnya skor pada Subdimensi Keberlanjutan Lingkungan.

DIMENSI DAMPAK



Dimensi Dampak memberikan gambaran sejauh mana masyarakat sipil aktif dan berhasil dalam memenuhi fungsi-fungsi pokoknya. Hasil IMS di Bantaeng tahun 2009 menunjukkan bahwa secara umum dimensi ini berada pada kondisi cukup sehat dengan peroleh skor 1,87 dan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan hasil IMS tahun 2007 yang memperoleh skor 1,85. Peningkatan skor ini dikontribusikan oleh sub

dimensi memberdayakan warga yang mengalami peningkatan dari 2,04 pada pengukuran tahun 2007 menjadi 2,12 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Bantaeng sangat aktif dalam melakukan pemberdayaan warga, khususnya melalui pengembangan kelompok-kelompok perempuan di daerah pedesaan. Yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah bagaimana OMS melakukan upaya-upaya advokasi untuk mendesakkan tanggung jawab negara maupun swasta karena masih memiliki skor yang paling rendah.

Satu-satunya subdimensi yang dipandang memiliki perubahan kondisi yang signifikan di Kabupaten Bantaeng adalah memberdayakan warga, sementara subdimensi lainnya dipandang tidak mengalami perubahan. Cerminan atas perubahan sub dimensi tersebut dapat dilihat dari peningkatan skor sub dimensi pemberdayaan warga, khususnya akibat perubahan yang terjadi pada indikator memberdayakan perempuan. Jika pada tahun 2007 skor untuk indkator memberdayakan perempuan berada dalam kategori cukup sehat (2,20), maka pada tahun 2009 hasil pengukurannya berada dalam kategori sehat (2,67). Lonjakan skor yang cukup tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa upaya-upaya MS Bantaeng dalam melakukan pemberdayaan perempuan cukup berhasil. Di seluruh desa dalam Kabupaten Bantaeng telah berkembang kelompok perempuan dalam berbagai bentuknya, seperti PKK, SPP, kelompok tani perempuan, kelompok diskusi perempuan dan sebagainya. Keberadaan kelompok-kelompok perempuan ini cukup diperhitungkan sehingga mereka selalu diundang dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desanya masing-masing, termasuk dalam kegiatan musrenbang. Keterlibatan kelompok perempuan dalam berbagai kegiatan tersebut telah berhasil mendorong program-program yang sensititf gender, termasuk dalam pelaksanaan program PNPM yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng.

Terkait dengan subdimensi lainnya, tidak ada perubahan yang signifikan di Kabupaten Bantaeng. Upaya-upaya OMS untuk mempengaruhi kebijakan publik, menanggapi kepentingan sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat terus berlangsung secara intensif dengan dampak yang tidak jauh berbeda seperti penilaian pada tahun 2007. Catatan penting terkait dimensi dampak ini adalah bagaimana OMS terus mendesakkan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan swasta, yang memiliki skor terendah dalam dimensi dampak ini.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

Civicus (2004). Civicus Civil Society Index. **Toolkit Implementation Phase 2003-2005**. Penerbit CIVICUS. Washington.

Eko, Sutoro dkk (2009). **Pelajaran Dari Aceh: Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah**. Cetakan Pertama. Penerbit Yappika. Jakarta.

Hidayat, Syarif (2000). **Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan**. Penerbit Pustaka Quantum, Jakarta

Ibrahim, Rustam (2006). Draft Country Report: Masyarakat Sipil Indonesia 2006. **Suatu Laporan Mengenai Indeks Masyarakat Sipil untuk Republik Indonesia.** Penerbit Yappika. Jakarta.

_____ (2007). **Indeks Masyarakat Sipil: Jalan (Masih) Panjang Menuju Masyarakat Sipil**. Penerbit Yappika. Jakarta.

_____ (2002). "Beberapa Konsep Masyarakat Sipil dan relevansinya dengan peran Organisasi Masyarakat Sipil". Makalah disampaikan dalam Lokakarya Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil di Indonesia, Purwakarta, 16-17 September 2002.

Pujileksono, Sugeng (2006). Menuju Pelayanan Berpihak pada Publik. Dalam A. Patra M. Zen dkk., **Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik (hal 11-41).** Penerbit Malang Coruption Watch & Yappika.

USAID-DRSP (2006). Desentralisasi 2006: Membedah Reformasi Desentralisasi di Indonesia. Ringkasan Laporan untuk Donor Working Group on Desentralization. Diterbitkan oleh Democratic Reform Support Program (DRSP). Jakarta.

_____ (2009). Desentralisasi 2009: Membedah Reformasi Desentralisasi di Indonesia. Stock taking study terkini. Diterbitkan oleh Democratic Reform Support Program (DRSP). Jakarta.

Yappika (2006). Penelitian Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia. **Laporan Akhir**. Penerbit Yappika. Jakarta.

_____ (2006). Program untuk mendorong pelaksanaan desentralisasi yang membuka ruang partisipasi politik rakyat, efektivitas tata pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. **Ringkasan Laporan Penelitian**. Penerbit Yappika. Jakarta.

_____ (2006). Program untuk mendorong pelaksanaan desentralisasi yang membuka ruang partisipasi politik rakyat, efektivitas tata pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. **Beberapa Temuan dan Rekomendasi Penelitian**. Penerbit Yappika. Jakarta.



Membangun masyarakat sipil membutuhkan waktu dan kesabaran. Perubahan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah komitmen pemerintah dan tokoh politik daerah. Pasang-surut peran masyarakat sipil dalam pembangunan tidak menyusutkan semangat perubahan yang ingin dicapai meskipun terkadang cukup melelahkan. Demikian pula dengan indeks masyarakat sipil (IMS) yang dialami oleh 16 kabupaten/kota mitra ACCESS, tidak jarang dijumpai ada yang turun atau naik. Ini adalah hal yang biasa karena indeks masyarakat sipil bukan sebuah perubahan yang linier, melainkan sangat dinamis.

Namun perubahan peran masyarakat sipil adalah sesuatu yang perlu terus diperjuangkan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Kesetaraan menghormati seluruh warga, termasuk perempuan, warga miskin dan marginal sangat penting diperjuangkan. Dan Indonesia yang telah berhasil memancarkan cahaya demokrasi di Asia akan menginsipirasi dan membuka mata dunia. Tentu proses ini belum berhenti dan semakin menarik di waktu yang akan datang. Indeks Masyarakat Sipil sebagai salah satu parameter pembangunan membutuhkan dukungan terus-menerus sehingga mampu meningkatkan peran warga di segala lini. Dengan demikian kemungkinan kesenjangan pembangunan dapat diperkecil.

Dengan terbitnya buku ini, kami berharap dapat menambah khasanah perbincangan mengenai masyarakat sipil. Buku ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan peran masyarakat sipil sebagai salah satu pilar dalam pembangunan. Buku ini sangat berguna bagi para praktisi organisasi masyarakat sipil, pemerintah serta aktor-aktor pembangunan lainnya sebagai referensi atau rujukan untuk membangun agenda-agenda tata kepemerintahan lokal demokratis.

Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II

Australian AID

Australian Aid managed by IDSS on behalf of AusAID

YAPPIKA

YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergiat mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis & mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya.

YAPPIKA didirikan tahun 1997 sebagai kelanjutan dari Yayasan Persahabatan Indonesia-Kanada yang telah ada sejak tahun 1991.

YAPPIKA memiliki kompetensi sebagai Penyedia Layanan Pengembangan Kapasitas OMS, Riset & Advokasi Kebijakan Publik, Evaluasi & Pengkajian Program, Pengkajian Kapasitas Lembaga, Mengukur Indeks Masyarakat Sipil, Fasilitasi (Lokakarya, Perencanaan Strategis), Mengelola Dana Hibah untuk OMS.